



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN BERAU

2025 - 2029

"MEWUJUDKAN BERAU
YANG MAJU, UNGGUL,
BERKELANJUTAN, MAKMUR
DAN SEJAHTERA"





BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27

Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah di kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KERANGKA RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun paling sedikit dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
 - a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **10 Oktober** 2025

BUPATI BERAU,

SRI JUNIANSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **10 Oktober** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR **5**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BERAU TAHUN 2025-2029: (64.03/56/5/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Berau perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah.

Tahapan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahap I (2025-2029), tahap II (2030-2035), tahap III (2036-2041), dan tahap IV (2041-2046). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau tahun 2025-2045, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2025-2045, dan masuk dalam tahap pembangunan jangka menengah pertama.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2045, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap pertama. Arah pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui perwujudan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas masyarakat Kabupaten Berau melalui investasi yang inklusif.

Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh pertanian dalam arti luas dengan pengembangan kemitraan pertanian, pariwisata ekowisata, wisata yang terintegrasi berbasis (derawan-maratua-sangaleki), pengembangan terbarukan dan iklim investasi, pengembangan berkelanjutan, sejalan dengan sumberdaya kemajuan alam didalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah

kepala daerah terpilih dilantik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kepala Baplitbang menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Baplitbang tersebut akan disampaikan kepada semua Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Renstra PD. Ketentuan Pasal 260 dan 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan rencana disinergikan, dan pembangunan diharmonisasikan oleh Daerah PD dikoordinasikan, yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, sertamenggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. kerangka Pendekatan berpikir pembangunan Daerah. Berdasarkan ilmiah teknokratis untuk menggunakan mencapai tujuan metode dan dan sasaran Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 57

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI BERAU



SRI JUNIARSIH MAS



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	 II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-181
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis	II-243
 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III-2
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-28
 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	 IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-25
 BAB V PENUTUP	 V-1
5.1 Pedoman Transisi	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Kecamatan (Km ²) Kabupaten Berau, Tahun 2024	II-3
Tabel II.2	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provisi	II-8
Tabel II.3	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	II-9
Tabel II.4	Statistik Klimatologi Menurut BMKG di Stasiun Kalimantan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-10
Tabel II.5	Penggunaan Lahan Kabupaten Berau	II-10
Tabel II.6	Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Berau	II-12
Tabel II.7	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Berau	II-13
Tabel II.8	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Kuintal) Tahun 2020-2024	II-21
Tabel II.9	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Kuintal) Tahun 2020-2024	II-22
Tabel II.10	Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Ton) Tahun 2020-2024	II-24
Tabel II.11	Produksi Ikan Menurut Sub Sektor Perikanan Kabupaten Berau (Ton) Tahun 2020-2024	II-26
Tabel II.12	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-32
Tabel II.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-35
Tabel II.14	Angka Penurunan Emisi GRK Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-38
Tabel II.15	Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Berau Tahun 2024	II-42
Tabel II.16	Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	II-53
Tabel II.17	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-55
Tabel II.18	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-57
Tabel II.19	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II-58
Tabel II.20	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-61
Tabel II.21	Proyeksi Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	II-62
Tabel II.22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-63
Tabel II.23	Indikator Kemiskinan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-65



Tabel II.24	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-74
Tabel II.25	Distribusi Data Kematian Anak Balita Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-79
Tabel II.26	Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Milik Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-85
Tabel II.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-91
Tabel II.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-92
Tabel II.29	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-93
Tabel II.30	Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Berau Tahun 2025	II-94
Tabel II.31	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-96
Tabel II.32	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-98
Tabel II.33	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-99
Tabel II.34	Angka Ketergantungan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-110
Tabel II.35	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-116
Tabel II.36	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Tiga Bulan Terakhir Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-123
Tabel II.37	Rasio dan Pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-124
Tabel II.38	Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-129
Tabel II.39	Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-131
Tabel II.40	Perkembangan Penumpang Angkutan Udara (Orang) di Bandara Kalimantan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-133
Tabel II.41	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-143
Tabel II.42	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-146



Tabel II.43	PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II-148
Tabel II.44	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024	II-150
Tabel II.45	Distribusi PDRB Kabupaten Berau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024	II-152
Tabel II.46	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-153
Tabel II.47	Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-155
Tabel II.48	Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-161
Tabel II.49	Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Berau Tahun 2021-2024	II-168
Tabel II.50	Skala interval Otonomi Fiskal	II-183
Tabel II.51	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-184
Tabel II.52	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-195
Tabel II.53	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-203
Tabel II.54	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II-205
Tabel II.55	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-210
Tabel II.56	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-213
Tabel II.57	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-216
Tabel II.58	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-218
Tabel II.59	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	II-228
Tabel II.60	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	II-235
Tabel II.61	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	II-237
Tabel II.62	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	II-239
Tabel II.63	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	II-242



Tabel II.64	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	II-242
Tabel II.65	Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-254
Tabel II.66	Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-255
Tabel II.67	Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan	II-259
Tabel II.68	Permasalahan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II-261
Tabel II.69	Highlight Indikasi Intervensi Kebijakan Kabupaten Berau pada RPJMN Tahun 2025-2029	II-280
Tabel II.70	Matriks Potensi, Permasalahan, Isu KLHS, dan Isu Strategis Daerah Kabupaten Berau	II-315
Tabel III.1	Penjelasan Pokok Visi	III-3
Tabel III.2	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029	III-16
Tabel III.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-24
Tabel III.4	Strategi Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-28
Tabel III.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-45
Tabel III.6	Pemetaan Program Unggulan Kepala Daerah ke Dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-51
Tabel III.7	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Berau	III-68
Tabel III.8	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Berau	III-70
Tabel IV.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2030	IV-2
Tabel IV.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Berau Tahun 2025-2030	IV-26
Tabel IV.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2030	IV-30



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-4
Gambar II.1	Peta Topografi Kabupaten Berau	II-4
Gambar II.2	Peta Sebaran Karst di Kabupaten Berau dan Kutai Timur	II-6
Gambar II.3	Peta Hidrologi Kabupaten Berau	II-7
Gambar II.4	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2020-2024	II-17
Gambar II.5	Produksi Padi Kabupaten Berau (Ton) Tahun 2020-2024	II-18
Gambar II.6	Produksi Beras Kabupaten Berau (Ton), 2020-2024	II-19
Gambar II.7	Produksi Jagung Kabupaten Berau (Ton), 2020-2024	II-20
Gambar II.8	Peta Status Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Berau	II-27
Gambar II.9	Peta Status Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan	II-28
Gambar II.10	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-29
Gambar II.11	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Berau	II-30
Gambar II.12	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh) Kabupaten Berau, tahun 2020-2024	II-31
Gambar II.13	Akses Air Minum Layak Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-34
Gambar II.14	Akses Sanitasi Layak Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-36
Gambar II.15	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-41
Gambar II.16	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-50
Gambar II.17	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-52
Gambar II.18	Distribusi Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2024	II-54
Gambar II.19	Piramida Penduduk Kabupaten Berau, Tahun 2024	II-60
Gambar II.20	Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-64
Gambar II.21	PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-68
Gambar II.22	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-69
Gambar II.23	Indeks Gini Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-71
Gambar II.24	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-73



Gambar II.25	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Ditangani Kabupaten Berau Tahun 2022-2024	II-75
Gambar II.26	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-76
Gambar II.27	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KLH) dan Jumlah Kematian Ibu (Orang) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-78
Gambar II.28	Prevalensi Stunting Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-81
Gambar II.29	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-82
Gambar II.30	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024	II-83
Gambar II.31	Cakupan Kepesertaan Program BPJS Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-87
Gambar II.32	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-89
Gambar II.33	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-90
Gambar II.34	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-100
Gambar II.35	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021-2024	II-102
Gambar II.36	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	II-103
Gambar II.37	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Dan Dilestarikan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-105
Gambar II.38	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Berau, Tahun 2021-2024	II-106
Gambar II.39	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-107
Gambar II.40	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-108
Gambar II.41	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-112
Gambar II.42	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-114
Gambar II.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-118
Gambar II.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-119
Gambar II.45	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-120



Gambar II.46	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-122
Gambar II.47	Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-126
Gambar II.48	Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Berau, Tahun 2024	II-130
Gambar II.49	Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Berau, Tahun 2024	II-132
Gambar II.50	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-134
Gambar II.51	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-136
Gambar II.52	Jumlah dan Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-137
Gambar II.53	Laju Inflasi (Persen) Kabupaten Berau (Pendekatan Provinsi Kalimantan Timur), Tahun 2020-2024	II-138
Gambar II.54	Laju Inflasi (Persen) Per Bulan Kabupaten Berau, Tahun 2024	II-139
Gambar II.55	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-141
Gambar II.56	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-154
Gambar II.57	Jumlah Tindak Pidana (Kasus) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024	II-158
Gambar II.58	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Berau Tahun 2024	II-160
Gambar II.59	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II-186
Gambar II.60	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-186
Gambar II.61	Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (%)	II-189
Gambar II.62	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (%)	II-190
Gambar II.63	Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-190
Gambar II.64	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (%)	II-191
Gambar II.65	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-193
Gambar II.66	Perkembangan Belanja Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-198



Gambar II.67	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-199
Gambar II.68	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	II-204
Gambar II.69	Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Berau	II-244
Gambar II.70	13 Resiko Internasional Jangka Menengah	II-266
Gambar II.71	Isu RPJMN 2025-2029 Wilayah Kalimantan	II-276
Gambar II.72	PKW Tanjungredep dalam Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur	II-293
Gambar II.73	Peta Hirarki Struktur Ruang Kabupaten Berau	II-295
Gambar II.74	Kawasan Strategis Kabupaten Berau	II-297
Gambar II.75	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Berau	II-298
Gambar II.76	Kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	II-300
Gambar II.77	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kecamatan Pulau Derawan	II-301
Gambar III.1	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Berau dengan Visi RPJMN dan Provinsi Kalimantan Timur	III-7
Gambar III.2	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-9
Gambar III.3	Keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	III-14
Gambar III.4	Penyelarasan Tujuan Pembangunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 Dengan Tujuan SDG's	III-19
Gambar III.5	Penahapan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-44
Gambar III.6	Peta <i>Highlights</i> Indikasi Kebijakan di Kabupaten Berau Tahun 2025–2029	III-61
Gambar III.7	Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Berau	III-65
Gambar III.8	Peta Rencana Pola Ruang Lindung dan Budidaya Kabupaten Berau	III-67
Gambar III.9	Peta Kawasan Hutan	III-69
Gambar III.10	Peta Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	III-69
Gambar III.11	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan	III-71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Tanjung Redeb. Kabupaten ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan dan pertanian. Sektor-sektor ini menjadi pilar utama perekonomian daerah, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Berau. Pertambangan, khususnya batu bara, memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, sementara sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Selain potensi ekonomi, Kabupaten Berau juga menawarkan kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Keberagaman budaya tercermin dalam berbagai adat istiadat dan tradisi masyarakat lokal, termasuk suku-suku asli yang mendiami wilayah ini. Dalam hal pariwisata, Kabupaten Berau memiliki destinasi unggulan seperti Danau Labuan Cermin yang terkenal dengan airnya yang jernih dan fenomena unik dua lapisan air tawar dan asin. Keindahan alam ini menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pembangunan daerah merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan memegang peranan krusial dalam memberikan arah dan fokus terhadap implementasi program-program pembangunan. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan dapat berjalan secara terarah dan efektif, mencakup peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan yang holistik dan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Berau.

Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam kerangka hukum nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun



kabupaten/kota, diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang hingga jangka pendek yang saling terkait dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD akan menjadi landasan bagi OPD untuk merumuskan program, kegiatan, serta target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap OPD di Kabupaten Berau diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antarsektor, dan mendukung keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema yang diusung.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak pada November 2024 pada 15 April 2025 yaitu pasangan Sri Juniarsih Mas dan Gamalis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2025-2030, pembangunan Kabupaten Berau periode 2025-2029 mulai dilaksanakan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 tidak hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tetapi juga memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati diwajibkan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah paling lambat enam bulan setelah pelantikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau harus segera menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur: (9-313/2024);

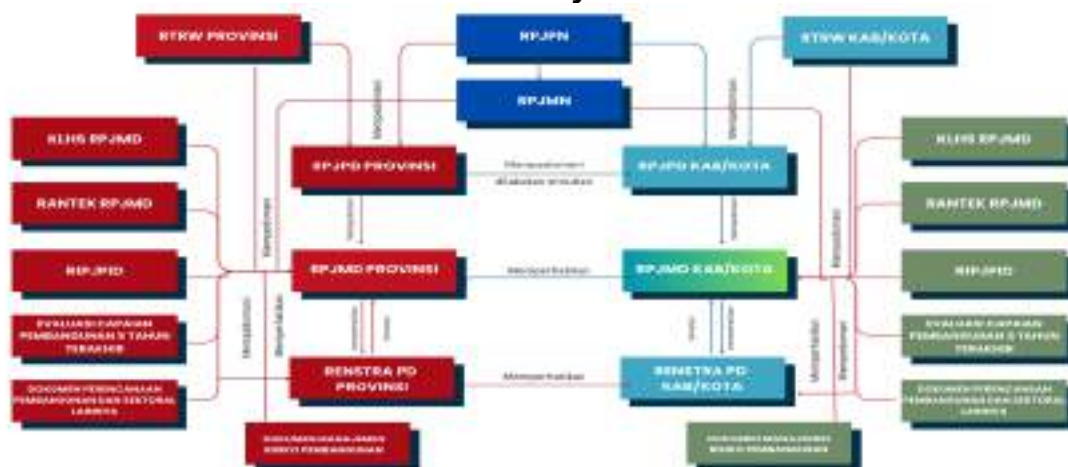


10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor Register: 8/67/2017);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2045.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergisitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar I. 1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya





Berdasarkan gambar diatas:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sangat erat, karena keduanya berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. RPJMD Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Sementara itu, RPJMN adalah rencana strategis lima tahunan dari pemerintah pusat yang mengarahkan pembangunan nasional dan regional dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang lebih besar.

Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Berau harus mengakomodasi dan mengintegrasikan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, sehingga pencapaian tujuan nasional dapat terwujud secara sinergis. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menekankan pentingnya penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah Kabupaten Berau menjaga komitmennya untuk menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Kaltim.

RPJMN 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, memuat strategi, kebijakan, program, dan kerangka ekonomi makro yang mencakup rencana kerja dan pendanaan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Berau perlu memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten sejalan dengan program-program prioritas nasional, seperti pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara RPJMD dan RPJMN, diharapkan pembangunan Kabupaten Berau dapat berjalan secara terarah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.



b. Hubungan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis untuk menciptakan keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dengan perencanaan pembangunan provinsi, guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan terpadu. RPJMD Kabupaten Berau, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten, mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang spesifik untuk daerah tersebut, disesuaikan dengan potensi, tantangan, serta aspirasi masyarakat Berau. Sementara itu, RPJMD Kalimantan Timur mencakup perencanaan pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dengan fokus pada isu-isu dan kebutuhan yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur regional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan.

Kedua dokumen ini harus saling mendukung dan terintegrasi, agar pembangunan di Kabupaten Berau tidak hanya berfokus pada kepentingan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Sinergi antara RPJMD Kabupaten Berau dan RPJMD Kalimantan Timur akan memastikan bahwa program pembangunan di tingkat kabupaten berjalan sejalan dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dengan koordinasi yang baik, RPJMD Kabupaten Berau dapat berperan aktif dalam mendukung tujuan pembangunan provinsi sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Berau Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sangat penting dalam menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengatur arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Berau selama



lima tahun, sedangkan RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada RPJPD 2025-2045 agar seluruh program dan kebijakan jangka menengah tetap berada dalam jalur yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, RPJMD berfungsi sebagai tahapan implementatif dari RPJPD, yang lebih berfokus pada pencapaian target pembangunan lima tahunan sebagai bagian dari rangkaian tahapan pembangunan menuju visi 2045 Kabupaten Berau. Dengan memastikan keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD dan RPJPD, pemerintah daerah dapat menjamin bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan masa depan. Sinergi antara kedua dokumen ini akan memperkuat efektivitas perencanaan, mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau secara berkelanjutan.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Berau

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2023-2042 mencerminkan integrasi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dan penataan ruang jangka panjang. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang merumuskan arah kebijakan, prioritas program, dan target pembangunan daerah. Sementara itu, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah dokumen yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah untuk jangka waktu 20 tahun sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Keterkaitan antara kedua dokumen ini menjadi krusial agar kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD berjalan sejalan dengan pengaturan pemanfaatan ruang dalam RTRW.

Dalam konteks Kabupaten Berau, RTRW 2023-2042 menjadi pedoman utama dalam menentukan peruntukan ruang, seperti kawasan permukiman, pelabuhan, industri, pariwisata, kawasan lindung, pertambangan, dan wilayah pesisir. RPJMD 2025-2029 perlu mengacu pada arah RTRW agar setiap program pembangunan, seperti pengembangan infrastruktur jalan, pelabuhan, konektivitas antarwilayah, serta



pemanfaatan potensi pariwisata dan sumber daya alam, dapat berjalan selaras dengan zonasi dan daya dukung lingkungan yang telah ditetapkan.

Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang tertib ruang, meminimalkan konflik pemanfaatan lahan, dan mendorong pertumbuhan yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara RPJMD dan RTRW, Pemerintah Kabupaten Berau dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis di wilayahnya.

e. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) selama periode lima tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini berperan sebagai rencana operasional yang mendetail dan spesifik untuk setiap urusan pemerintahan, guna memastikan keterpaduan antara kebijakan makro yang ditetapkan dalam RPJMD dengan implementasi teknis di tingkat pelaksana.

Penyusunan Renstra dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Berau dengan koordinasi dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau, agar tercipta konsistensi antarprogram dan kegiatan, serta sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, Renstra PD membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan perangkat daerah mendukung visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah, serta berkontribusi pada target pembangunan yang terukur dan tepat sasaran. Sinergi ini penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dikarenakan KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan



suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Berau. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Pada saat penyusunan dokumen ini, RIPJPID Kabupaten Berau masih dalam proses penyusunan sehingga diharapkan dokumen RIPJPID dan RPJMD Kabupaten 2025-2029 dapat selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakomodir dokumen rencana sektoral pembangunan. Sehingga rekomendasi/masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan/perencanaan sektoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

i. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara bertahap melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 hingga Tahun 2029. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang memuat prioritas



pembangunan, sasaran, dan arah kebijakan daerah setiap tahunnya. Oleh karena itu, sasaran tahunan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD harus menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD agar pembangunan daerah berjalan konsisten, terarah, dan terukur.

Selanjutnya, perangkat daerah merumuskan program dan kegiatan prioritas tahunan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) masing-masing, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam rangka memastikan keterpaduan dan konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan Renja PD, setiap tahun dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terhadap prioritas pembangunan tahun berikutnya. Melalui sinergi antar dokumen perencanaan dan pelibatan semua pihak, diharapkan pembangunan Kabupaten Berau dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan inklusif.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Berau. Hal ini agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara agar terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Berau Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- 3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berau ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan



- berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berau Tahun 2025-2029;
- 4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
 - 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
 - 8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau selama 5 (lima) tahun;
 - 9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - 10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Berau.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat Gambaran Umum Daerah yang terdiri atas beberapa subbab. Subbab pertama adalah Gambaran Umum Kondisi Daerah



yang paling sedikit mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Selain itu, subbab ini dapat ditambah dengan informasi lain sesuai kondisi daerah, seperti standar pelayanan minimal, kerja sama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi maupun kabupaten/kota, serta keberadaan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah. Subbab kedua adalah Gambaran Keuangan Daerah yang menjelaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2025-2029. Selanjutnya, subbab ketiga memuat uraian mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah tersebut.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat penjabaran mengenai Visi, Misi, serta Program Prioritas Pembangunan Daerah. Pada Subbab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, disampaikan visi dan misi daerah, serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat strategi dan arah kebijakan daerah yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta program-program prioritas daerah yang mendukung pencapaian tersebut.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat uraian mengenai Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada bagian Subbab Program Perangkat Daerah, dibahas daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditujukan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah. Selain itu, subbab ini juga mencantumkan indikator program, target, serta pagu indikatif program Perangkat Daerah selama periode tersebut. Sementara itu, Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan



sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Subbab ini juga mencantumkan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan ibu kota terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas, mencakup daratan dan kepulauan. Menjadikan Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya pada sektor wisata alam dan wisata budaya. Keindahan pantai, pulau-pulau, dan taman nasional menjadi daya tarik utama. Salah satu destinasi andalan adalah Kepulauan Derawan, yang terkenal dengan pesona bawah lautnya dan menjadi magnet bagi para penyelam. Selain itu keunikan budaya dan keragaman etnis yang ada menjadikan Kabupaten Berau salah satu destinasi wisata yang harus dipertimbangkan wisatawan mancanegara dan domestik.

Selain pariwisata, Kabupaten Berau juga memiliki potensi alam yang sangat potensial yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, khususnya dalam produksi pertambangan batu bara. Kontribusi sektor ini signifikan terhadap pendapatan daerah maupun nasional. Keunikan Kabupaten Berau tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada aspek budaya dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan terarah dan terukur hendaknya menjadi perhatian dan prioritas semua pihak agar dapat bersinergi baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sehingga sumber daya alam dapat terkelola dengan baik dan maksimal serta memberi manfaat berkelanjutan.

Pembangunan di Kabupaten Berau mencakup berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Namun, percepatan pembangunan masih perlu diupayakan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks, bertujuan untuk mengatur pertumbuhan dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Esensi dari perencanaan ini adalah mengintegrasikan berbagai aspek penting guna mencapai pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pembangunan harus berpijak pada analisis yang mendalam terhadap kondisi daerah.



Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun, yang di dalamnya akan dirumuskan berbagai kebijakan. Dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan dan merepresentasikan harapan masyarakat Kabupaten Berau. Melalui analisis yang menyeluruh, perencanaan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Informasi geografis memberikan dasar yang komprehensif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan pembangunan. Penjabaran mengenai aspek ini memberikan gambaran utuh mengenai karakteristik wilayah Kabupaten Berau, mencakup luas dan batas wilayah, letak geografis, topografi, hingga kondisi klimatologis.

Sementara itu, aspek demografi sangat penting dalam memahami ukuran, struktur, serta persebaran penduduk baik secara waktu (temporal) maupun ruang (spasial). Mengingat penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, keterkaitan antara demografi dan sektor lainnya perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan.

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah mencapai 36.962,37 km², dimana wilayahnya terdiri atas daratan seluas 22.232,53 km² dan perairan seluas 14.729,85 km² yang membentang sepanjang 12 mil dari garis pantai pulau terluar. Dalam pembagian wilayah pembangunan, Kabupaten Berau memiliki empat wilayah yaitu wilayah pesisir, wilayah pedalaman, wilayah kota dan wilayah laut.

Kabupaten ini terdiri atas 13 kecamatan, 100 kampung, dan 10 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kelay yang mencakup 6.556 km² atau 17,73 persen dari luas kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Tanjung Redeb merupakan yang terkecil dengan luas 24,41 km² atau sekitar 0,1 persen dari total luas wilayah. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Berau ditentukan sebagai berikut:



Utara : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
Selatan : Kabupaten Kutai Timur;
Timur : Laut Sulawesi; dan
Barat : Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara

Tabel II.1
Luas Kecamatan (Km²) Kabupaten Berau, Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
Kelay	Sido Bangen	6.556,54
Talisayan	Talisayan	1.621,57
Tabalar	Tubaan	1.837,34
Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	2.429,97
Pulau Derawan	Tanjung Batu	4.423,99
Maratua	Maratua Teluk Harapan	5.616,26
Sambaliung	Sambaliung	2.163,37
Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	24,41
Gunung Tabur	Gunung Tabur	1.963,32
Segah	Tepian Buah	5.241,29
Teluk Bayur	Teluk Bayur	316,98
Batu Putih	Batu Putih	3.575,30
Biatan	Biatan Lempake	1.192,03
Berau	Tanjung Redeb	36.962,37

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang berada di utara Propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Kalimantan Utara. Secara astronomis, kabupaten ini terletak antara 116°08'28" - 119°03'31" Bujur Timur dan 0°59'28" - 2°37'32" Lintang Utara, yang menempatkannya di kawasan tropis.

Potensi geografis Berau cukup menonjol, terlihat dari sejumlah kecamatan seperti Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, dan Maratua yang berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan Pulau Derawan dan



Maratua bahkan dikenal di tingkat nasional dan internasional sebagai destinasi wisata unggulan karena keindahan pantai dan ekosistem lautnya.

Kabupaten ini memiliki 17 pulau dan 31 pulau kecil dengan wilayah laut yang luas serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Di sisi lain, Kecamatan Segah dan Kelay yang terletak jauh dari ibukota dan tidak berbatasan dengan laut dikenal sebagai wilayah pedalaman yang menyimpan potensi wisata alam yang masih bisa dikembangkan. Kabupaten Berau juga merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah utara Kalimantan Timur, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara. Luasnya wilayah yang masih berupa hutan juga membuka peluang pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan, serta sektor pariwisata berbasis alam, bahari, dan budaya.

c. Topografi

Wilayah daratan Kabupaten Berau didominasi oleh gugusan perbukitan dan kawasan hutan, yang sebagian besar belum berpenghuni. Sebagian wilayah juga berbatasan langsung dengan laut. Keanekaragaman bentuk topografi ini mencerminkan variasi relief, kemiringan lereng, dan ketinggian dari permukaan laut.

**Gambar II.1
Peta Topografi Kabupaten Berau**



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036



Kecamatan dengan wilayah yang luas umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Di Kecamatan Kelay, misalnya, terdapat bentang alam berupa perbukitan batu kapur dengan luas hampir mencapai 100 km². Sementara itu, Kecamatan Tabalar memiliki bukit tertinggi yang dikenal dengan nama Bukit Padai. Dengan luas daratan yang memiliki keragaman hayati dan flora fauna maka sebesar 3.602,54 Km² luas wilayah merupakan kawasan hutan lindung, namun tetap juga ada peruntukan kawasan hutan produksi sebesar 11.914,77 Km². Sedangkan kurang lebih 107,86 Km² merupakan peruntukan untuk kawasan industri, kurang lebih 410,24 Km² diperuntukkan untuk kawasan pariwisata, 501,45 Km² untuk kawasan perumahan pedesaan dan kurang lebih 161,61 Km² diperuntukkan untuk kawasan perumahan perkotaan.

d. Geologi

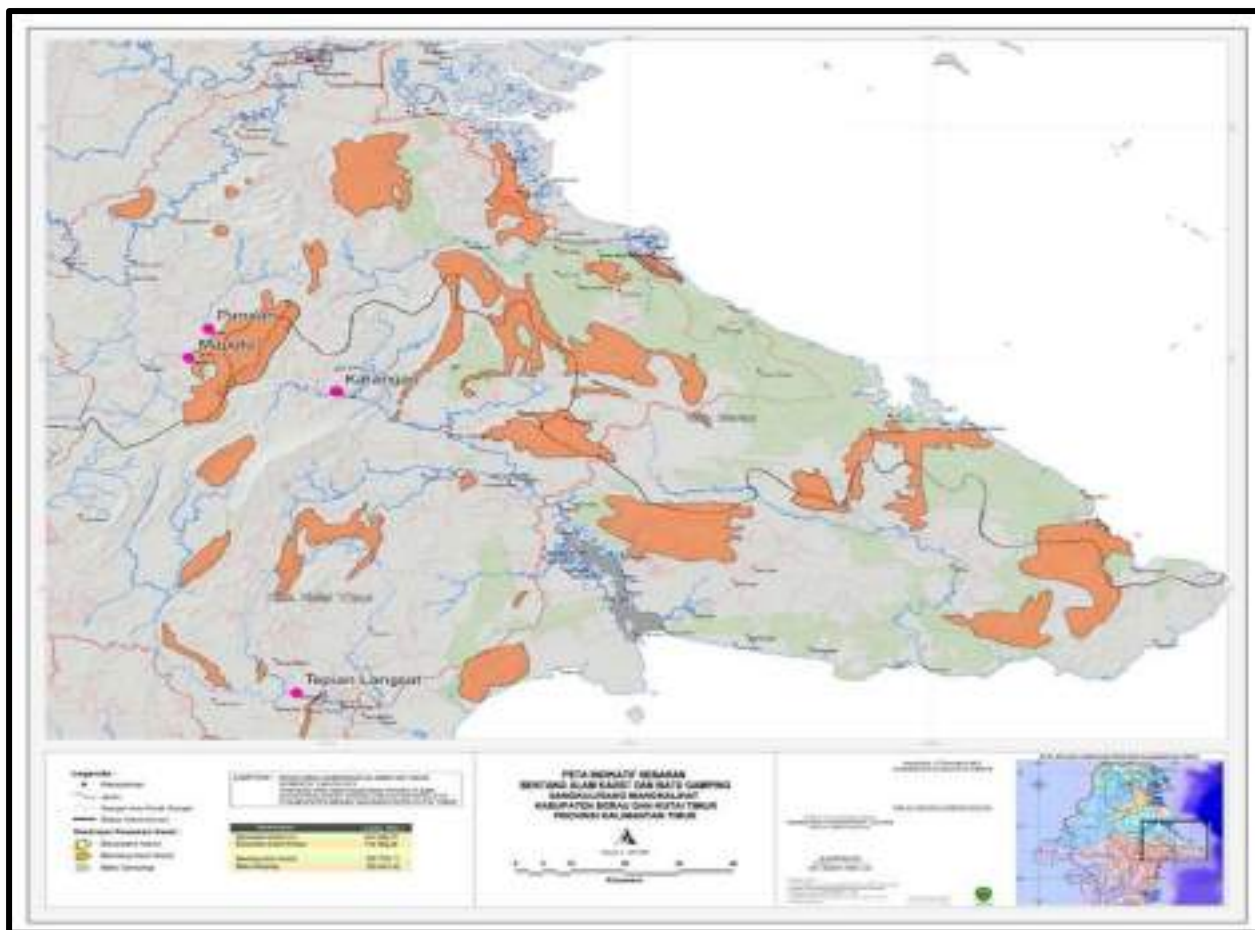
Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kawasan karst yang luas, mencapai 15,4 juta hektar. Salah satu kawasan karst penting di Kalimantan Timur adalah Karst Sangkulirang-Mangkalihat, yang membentang di wilayah Kabupaten Berau dan Kutai Timur dengan luas mencapai 1.867.676 hektar, atau sekitar 12 persen dari total kawasan karst Indonesia.

Kawasan karst memiliki karakteristik khas, seperti relief berbukit, gua, lembah terjal, serta sistem drainase bawah tanah yang unik. Kawasan ini juga memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, karena merupakan hulu dari lima sungai utama di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Selain menjadi habitat hayati dan nirhayati yang penting, kawasan karst juga menyimpan nilai geologis, ekologis, dan budaya yang tinggi.

Karst Sangkulirang-Mangkalihat memiliki keunikan berupa lukisan prasejarah di dinding gua yang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun SM. Situs ini menunjukkan jejak awal penyebaran manusia purba rumpun Austronesia di wilayah Nusantara. Kawasan ini telah diusulkan menjadi Warisan Dunia oleh IUCN pada tahun 2015.

Selain nilai sejarah dan ilmiah, kawasan karst juga memiliki potensi ekonomi berupa sarang burung walet, hasil hutan, hingga objek wisata. Namun, kawasan ini menghadapi ancaman dari aktivitas penambangan batu kapur dan marmer yang dapat merusak kelestariannya.

Gambar II.2
Peta Sebaran Karst di Kabupaten Berau dan Kutai Timur

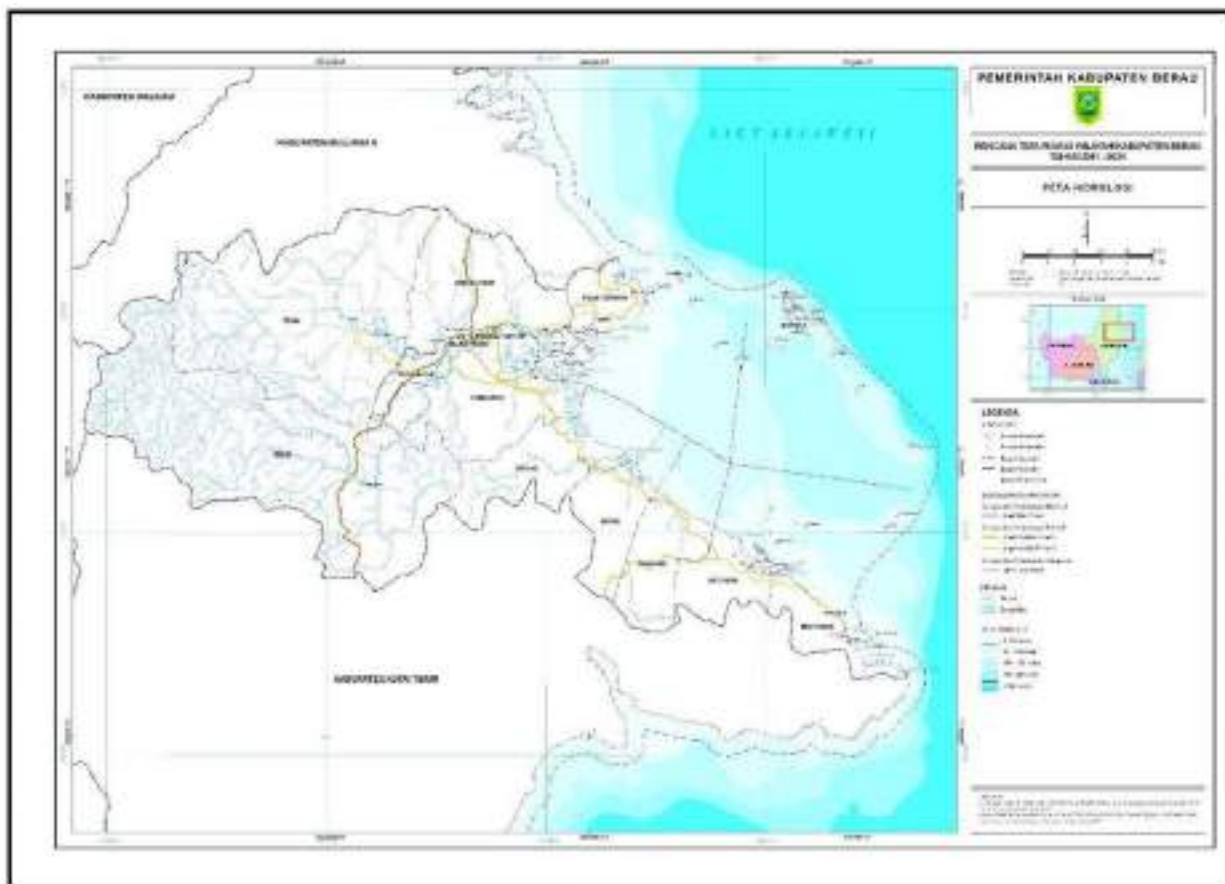


Sumber: Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012

e. Hidrologi

Kabupaten Berau memiliki sistem hidrologi yang terdiri dari jaringan sungai besar dan kecil, dengan total 20 aliran sungai yang tersebar di enam kecamatan. Sungai Berau merupakan yang terpanjang, mengalir sepanjang 292 km di Kecamatan Gunung Tabur, diikuti Sungai Kelay sepanjang 254 km di Kecamatan Kelay. Menurut Perda Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017, sistem sumber daya air di Berau mencakup wilayah sungai, daerah aliran sungai (DAS), serta infrastruktur pengelolaan air seperti irigasi, penyediaan air baku, dan pengendali banjir. Wilayah Sungai (WS) utama adalah WS Berau-Kelay dan WS Karangan, dengan masing-masing mencakup sejumlah DAS strategis.

**Gambar II.3
Peta Hidrologi Kabupaten Berau**



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2036, sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Berau mencakup antara lain a) sistem wilayah sungai dan daerah aliran sungai, b) pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi dan c) pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir dan bangunan konservasi. Adapun Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Berau mencakup dua WS yaitu WS Berau-Kelay dan WS Karangan. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut wilayah sungainya dirinci sebagai berikut:

1. DAS yang termasuk dalam WS Berau-Kelay mencakup 15 DAS yaitu DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkupadie, DAS Pidada, DAS Malinau, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempake, DAS Pegat, DAS lungsuran naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung-Payung dan DAS Maratua Teluk Alulu.



2. DAS yang termasuk dalam WS karangan mencakup 16 DAS yaitu DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benyuan, DAS Sumber Agung, DAS Kayu Indah, DAS Talisayan, DAS Dumaring, DAS Lobang Kelatak, DAS Kalriabu, DAS Muhammad, DAS Labuan Kelambu, DAS Sandaran, DAS Kembalun, DAS Manubara, DAS Karangan dan DAS Tanjung Buaya.

Selanjutnya, pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Berau terbagi menjadi 2 (dua) kewenangan, yakni kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten dengan lokasi dan luasan yang dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provisi

No.	Daerah Irigasi (DI)	Lokasi	Luas (Ha)
1	DI Biatan	Biatan	1.800
2	DI Dumaring	Talisayan	1.000
3	DI Labanan	Teluk Bayur	1.116
4	DI Merancang	Gunung Tabur	1.200
5	DI Batu-Batu	Gunung Tabur	1.000
6	DI Sungai Lati	Gunung Tabur	1.050
7	DI Beriwit	Sambaliung	1.500
8	DI Muara Bangun	Sambaliung	2.000
9	DI Tepian Buah	Segah	1.500
10	DIR Rantau Panjang	Sambaliung	1.500
11	DIR Sei Kuran	Gunung Tabur	1.000
12	DIR Sukan Tengah	Sambaliung	1.000
13	DIR Tanjung Perangat	Sambaliung	2.500
14	DIR Urutang		2.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036



Tabel II.3
Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten

No.	Daerah Irigasi (DI)	Lokasi	Luas (Ha)
1	DI Buyung-Buyung	Tabalar	500
2	DI Gurimbang	Sambaliung	250
3	DI Pulau Besing	Gunung Tabur	200
4	DI Semurut	Tabalar	510
5	DI Talisayan	Talisayan	850
6	DI Merancang	Gunung Tabur	200
7	DI Tasuk	Gunung Tabur	300
8	DI Tumbit Melayu	Teluk Bayur	350
9	DI Siduang	Segah	500
10	DI Pujut	Pulau Derawan	500
11	DI Tabalar	Tabalar	300
12	DI Samburakat	Gunung Tabur	200
13	DI Bebanir Muara	Sambaliung	100
14	DI Pulau Aji	Sambaliung	100
15	DIR Karang	Biatan	250
16	DIR Sukan	Sambaliung	500
17	DIR Semanting	Tabalar	500
18	DI Suaran	Sambaliung	200
19	DI Teluk Sumbang	Biduk-Biduk	250
20	DI Semurut II	Tabalar	300
21	DI Batu Putih	Batu Putih	300
22	DI Biatan Lempake	Biatan	450
23	DI Pandan Sari	Segah	300
24	DI Bukit Makmur	Segah	600
25	DI Tabalar Muara	Tabalar	1.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

f. Klimatologi

Data klimatologi Kabupaten Berau diperoleh dari Stasiun Meteorologi Kalimarau. Rata-rata suhu udara selama lima tahun terakhir (2020–2024) berkisar antara 26,83°C hingga 27,38°C. Kelembapan udara rata-rata berada pada rentang 86,2 persen hingga 90,5 persen, dengan kecepatan angin 2,25–3,91 m/detik.



Curah hujan tahunan tercatat antara 53,10 mm hingga 222,83 mm, dengan frekuensi hujan berkisar 16,5–24,25 hari per bulan. Rata-rata lama penyinaran matahari mencapai 27,76–59,17 persen sepanjang tahun 2019–2022, dan pada 2023 mencapai rata-rata 4,63 jam per hari, namun di tahun 2024 rata-ratanya menjadi 3,48 jam per hari.

Tabel II.4
Statistik Klimatologi Menurut BMKG di Stasiun Kalimarau
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembapan Udara (persen)	Rata-rata Kecepatan Angin (m/det)	Rata-rata Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Rata-rata Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Penyinaran Matahari	
						(Jam)	(persen)
2024	27,32	86,91	3,50	242,42	16,75	3,48	
2023	27,38	86,20	2,25	191,77	19,83	4,63	-
2022	26,85	86,08	3,48	222,83	24,25	-	49,25
2021	26,83	89,82	2,44	176,26	16,5	-	27,76
2020	26,93	90,5	3,62	53,10	NA	-	49,75

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2020-2024

2. Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016–2036, kawasan lindung mencakup 4.613,76 Km², sementara kawasan budidaya mencapai 32.348,61 Km². Dengan demikian, pengelolaan lahan harus dirancang secara matang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Tabel II.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Berau

Kawasan/Pola Ruang		Luas (Km ²)
A	Kawasan Lindung	
1	Hutan Lindung	3.602,54
2	Hutan Mangrove	3,18
3	Padang Lamun (Konservasi Laut)	585,93
4	Sempadan Pantai	39,84
5	Sempadan Sungai	381,68
6	Suaka Marga Satwa	0,59
Jumlah Kawasan Lindung		4.613,76



Kawasan/Pola Ruang		Luas (Km ²)
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Konversi	483,62
2	Hutan Produksi Terbatas	6.525,79
3	Hutan Produksi Tetap	4.905,36
4	Industri	107,86
5	Kawasan Peruntukan Perikanan	834,67
6	Laut Teritorial (12 mill)	11.943,71
7	Pariwisata Darat	143,98
8	Pariwisata Laut	234,94
9	Perkebunan	4.337,59
10	Permukiman Perdesaan	501,46
11	Permukiman Perkotaan	161,62
12	Pertanian Lahan Basah	174,68
13	Pertanian Lahan Kering	463,78
14	Sungai	290,31
15	Taman Wisata Alam Laut	1.239,23
Jumlah Kawasan Budidaya		32.348,61
Luas Kabupaten Berau		36.962,37

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Kabupaten Berau dalam penataan ruang terkait sistem pusat kegiatan, terbagi menjadi tiga sistem, yakni Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi 15 perkotaan.



**Tabel II.6
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Berau**

No.	Sistem Pelayanan	Fungsi Utama	Nama Pusat Kegiatan
1.	PKW	Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, pusat pelayanan jasa pariwisata, pusat transportasi darat dan laut regional, pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat siaran dan telekomunikasi, pusat olah raga skala provinsi, pengendalian lingkungan kelautan, pusat transportasi laut regional dan internasional, pusat perikanan tangkap, pusat penelitian kelautan, pusat industri, pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan, pengembangan perikanan tangkap.	Perkotaan: Tanjung Redeb
2.	PKL	Sebagai pusat transportasi udara regional, pusat pengembangan agropolitan, pelayanan pariwisata, pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, pendidikan tinggi, pengembangan agroindustri dan agribisnis, pengembangan budidaya perikanan darat, pengembangan energi/ kelistrikan, pengelolaan/industri pengelolaan perkebunan, pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas pergudangan, industri	Meliputi Perkotaan: Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, dan Sido Bangen.
3	PKL-p		Perkotaan: Biduk-Biduk
4	PPK	Sebagai pelayanan kegiatan perikanan tangkap, pelayanan kegiatan budidaya tambak, industri rakyat, pelayanan jasad perdagangan, pengembangan pertanian, pengembangan perkebunan, pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat	Meliputi Sambakungan, Kasai, Teluk Harapan, Bebanir/Bangun, Tumbit Melayu, Tubaan, Biatan Lempake, Tembudan, Batu Putih, Biduk- Biduk, Merapun, Long Keluh, Merasa, Bukit Makmur, dan Long Laai.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036



Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

**Tabel II.7
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Berau**

No.	Kecamatan	Jumlah PPL	Lokasi PPL
1.	Kelay	10	Merabu, Mapulu, Panaan, Muara Lesan, Lesan Dayak, Long Beliu, Long Duhung, Long Lamcin, dan Long Pelay, Long Sului.
2.	Talisayan	9	Sumber Mulya, Eka Sapta, Purna Sari Jaya, Suka Murya, Dumaring, Capuak, Bumi Jaya, Tunggal Bumi, dan Campu Sari.
3.	Tabalar	5	Buyung-Buyung, Semurut, Harapan Maju, Tabalar Ulu, dan Tabalar Muara.
4.	Biduk- Biduk	5	Tanjung Perepat, Pantai Harapan, Giring-Giring, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang.
5.	Pulau Derawan	3	Teluk Semanting, Pulau Derawan, dan Pegat Batumbuk
6.	Maratua	3	Bohe Silian, Payung-Payung, dan Teluk Alulu.
7.	Sambaliung	13	Rantau Panjang, Pegat Bukur, Inaran, Bena Baru, Tumbit Dayak, Long Lanuk, Gurimbang, Rantau Panjang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, UPT Sukan Tengah III, UPT Sukan Tengah IV, dan Suaran
8.	Gunung Tabur	7	Tasuk, Birang, Maluang, Samburakat, Pulau Besing, Batu-Batu, dan Melati Jaya.
9.	Segah	9	Pandan Sari, Siduung Indah, Batu Rajang, Harapan Jaya, Punan Malinau, Long Ayan, Long Ayap, Punan Mahakam, dan Punan Segah
10.	Teluk Bayur	1	Labanan Makarti
11.	Batu Putih	5	Kayu Indah, Sumber Agung, Ampen Medang, Lobang Kelatak, dan Balikukup.
12.	Biatan	7	Biatan Bapinang, Biatan Baru, Manunggal Jaya, Biatan Ulu, Bukit Makmur Jaya, Karangan, dan Biatan Ilir.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan, yakni:



1. Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sebatik, Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: kawasan *Heart Of Borneo* (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial ekonomi, meliputi: kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batu bara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
 - c. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam, meliputi: Pulau Kakaban, Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit, Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, serta Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup;
 - d. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau, yakni bandar udara HANKAM di Pulau Maratua.

Prioritas pembangunan Kabupaten Berau difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang agrobisnis dan pariwisata. Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan potensi dan permasalahan khusus yang ada di Kabupaten Berau. Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, pengembangan pariwisata dilakukan melalui perwujudan kawasan pariwisata, yakni: (1) Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata; (2) Pengembangan promosi pariwisata; (3) Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah; (4) Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata; serta (5) Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata.

Adapun wisata yang dikembangkan di Kabupaten Berau meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Berikut masing-masing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya:

1. Pengembangan Wisata Alam, mencakup:



- a. Pengembangan Wisata Bahari, terletak di Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Maratua; Kecamatan Biduk-Biduk; Kecamatan Batuputih, dan Kecamatan Talisayan.
 - b. Pengembangan Wisata Sejarah, terletak di Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Tanjung Redeb; dan Kecamatan Teluk Bayur.
 - c. Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata, terletak di Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.
2. Pengembangan Wisata Budaya, mencakup:
- a. Wisata Budaya Banua, terletak di Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung.
 - b. Wisata Budaya Dayak, terletak di Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.
 - c. Wisata Budaya Bajau, terletak di Kecamatan Derawan dan Kecamatan Maratua.
3. Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia, mencakup:
- a. Wisata Buatan/Binaan Tangab dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur.
 - b. Wisata Buatan/Binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur.
 - c. Wisata Buatan/Binaan Air panas Biatan di Kecamatan Biatan
 - d. Wisata Buatan/Binaan Makam Raja Alam di Kecamatan Batu Putih; dan
 - e. Wisata Buatan/ Binaan Arung jeram di Kecamatan Kelay dan Segah.

Kabupaten Berau walaupun telah mengembangkan sektor pariwisata namun tetap tidak boleh meninggalkan untuk melakukan pengembangan industri hilir agar potensi sumber daya alam dapat dikelola dengan baik dan maksimal sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Berau dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakatnya. Beberapa sektor yang berbasis sumber daya alam yang ada di Kabupaten Berau adalah pertanian, perkebunan dan perikanan.

Jika melihat perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu 2020-2024, terlihat bahwa sektor berbasis sumber daya alam ini masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Berau. Dominasi ini dapat terlihat dari besarnya peranan sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Berau yang



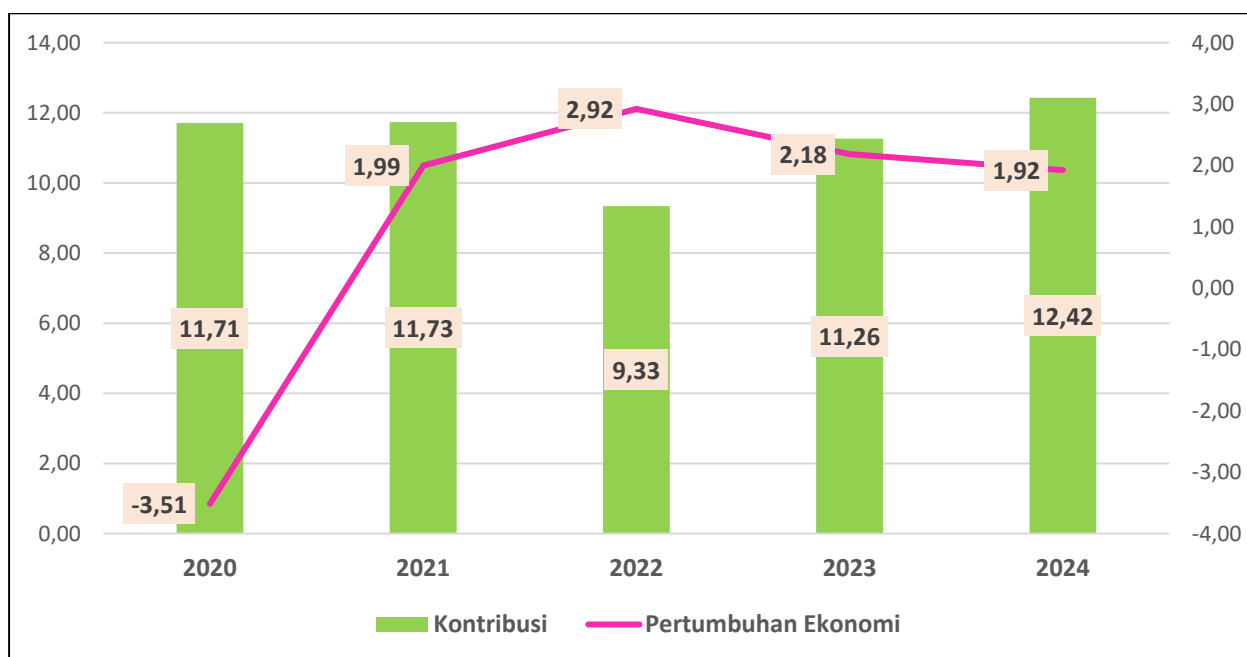
tidak berubah secara signifikan dan masih berada dalam kisaran angka 10 sampai dengan 12 persen. Salah satu yang menjadi kunci perkembangan kategori ini adalah adanya perkebunan kelapa sawit dimana luas tanamannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di Kabupaten Berau, sektor ini masih menjadi alternatif pilihan bagi sebagian besar masyarakat terutama di daerah-daerah perdesaan. Hal ini dikarenakan mudahnya tenaga kerja untuk masuk kedalam sektor ini, dimana tidak memerlukan klasifikasi pendidikan tertentu dan kemampuan atau keahlian tertentu yang biasanya di syaratkan pada kategori lainnya. Jika dilihat perkembangannya dalam lima tahun terakhir, angka kontribusi pada tahun 2024 ini merupakan yang tertinggi dimana mencapai 12,42 persen. Adapun salah satu yang menjadi kunci utama perkembangan kategori ini adalah adanya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan kehutanan. Ketersediaan lahan yang luas menyebabkan dua kegiatan ini sangat berkembang. Pada perkebunan kelapa sawit, luas tanaman terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dengan luas tanam yang meningkat, sesungguhnya produksi kelapa sawit pada tahun 2021 justru mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah cuaca. Di sisi lain, karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, menyebabkan nilai nominal PDRB kegiatan perkebunan tetap meningkat. Sedangkan pada kegiatan kehutanan, produksi kayu dapat dipengaruhi oleh antara lain bagaimana pemasaran kayu logs yang dihasilkan maupun faktor cuaca untuk dapat melakukan penebangan kayu di dalam hutan, mengingat medan di dalam hutan sangat susah.

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB diperlukan untuk mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan gambaran peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan masih menjadi target utama dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi di suatu daerah.



Gambar II.4
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

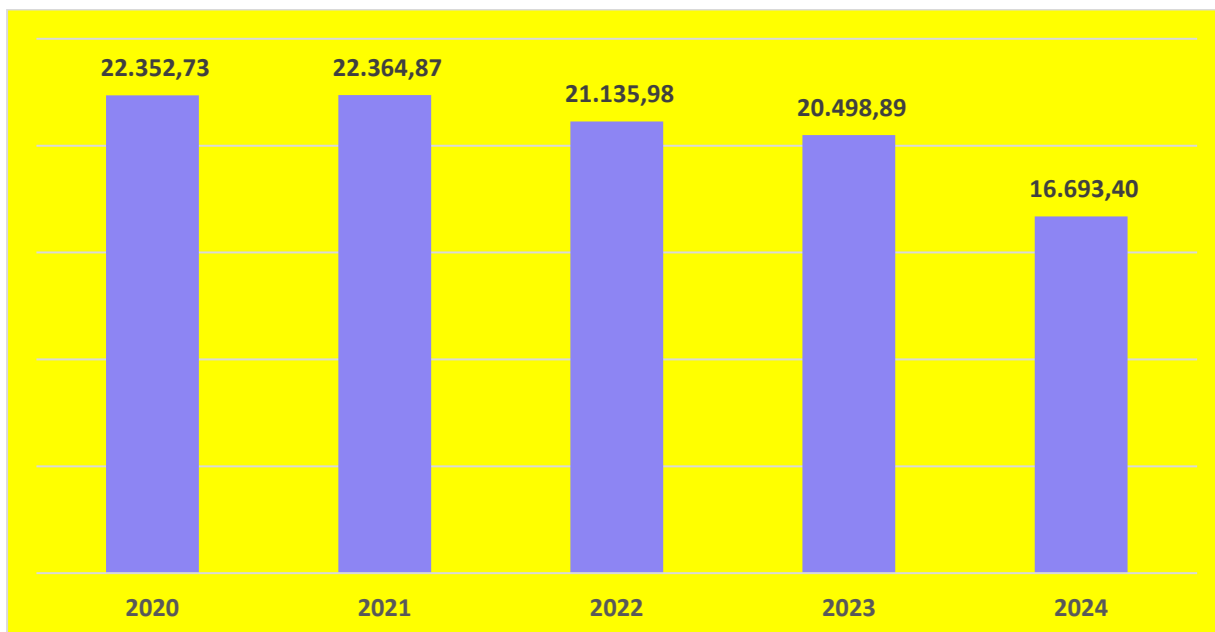
Selama kurun lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pernah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Selain pertambangan dan penggalian, salah satu kategori yang memiliki peran cukup besar tetapi tumbuh negatif pada tahun 2020 adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun produksi kelapa sawit meningkat, namun penurunan yang terjadi pada produksi jagung serta kayu masih menyebabkan kategori ini berkontraksi sebesar 3,51 persen pada tahun 2020. Namun kembali merangkak naik menjadi 1,99 persen pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan sektor tersebut untuk melakukan resiliensi secara cepat dan mampu meningkatkan kembali nilai tambah dari kegiatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

a. Tanaman Pangan

Kabupaten Berau sebagai daerah penghasil padi nomor 4 terbanyak untuk Propinsi Kalimantan Timur dimana kisaran 6-7 persen produksi padi berasal dari kabupaten ini. Hal ini diharapkan mampu menunjang status swasembada beras yang terus diwujudkan oleh Propinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.5
Produksi Padi Kabupaten Berau (Ton) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Selama kurun waktu lima tahun 2020-2024 produksi padi Kabupaten Berau terus mengalami penurunan secara bertahap, dimana pada tahun 2020 Kabupaten Berau mampu menghasilkan padi sebanyak 23.352,73 ton hingga menjadi hanya sebanyak 16.593,40 ton pada tahun 2024. Melihat fenomena yang terjadi adalah generasi muda cenderung untuk bekerja di sektor yang menghasilkan uang secara rutin dan tetap dengan cara bekerja di luar sektor ini sehingga tenaga kerja yang tersisa yang sudah berumur dan regenerasi tenaga kerja sangat sedikit. Jika melihat faktor eksternal adalah ketersediaan air melalui irigasi yang selama ini sangat sulit diperoleh para petani dan pemasaran yang sangat tidak mendukung para petani menjadi faktor penentu menurunnya produksi padi. Beberapa tantangan utama dalam melakukan produksi padi di Kabupaten Berau antara lain :

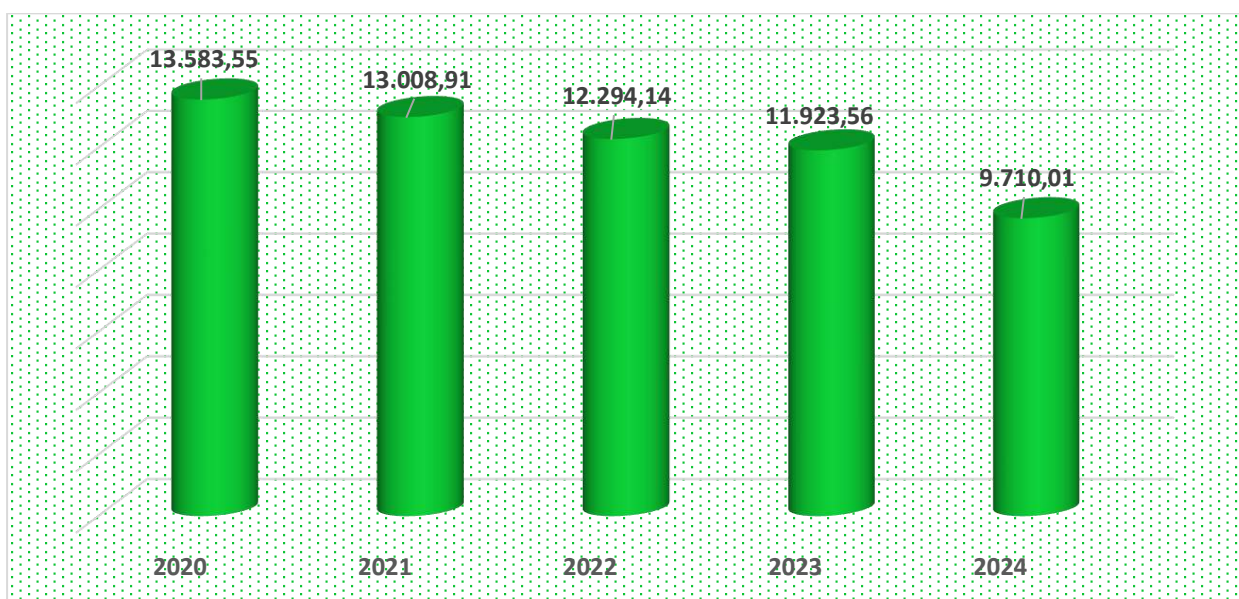
1. Ketersediaan tenaga kerja
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian
3. Keterbatasan akses pasar
4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tanaman
5. Pengoptimalan penggunaan sumber daya air
6. Peningkatan dukungan dan kapasitas tenaga penyuluh pertanian lapangan
7. Perubahan iklim



8. Merubah petani dari pertanian tradisional ke pertanian modern yaitu dari pertanian untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi komersial.

Jika melihat rata-rata rendemen pengolahan padi menjadi beras di Kabupaten Berau sekitar 60,77 persen tahun 2020 sebesar 13.583,55 ton beras dari 22.352,73 ton padi (rendemen 60,77 persen). Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena selama empat tahun berikutnya nilai rendemen terus mengalami penurunan dimana mencapai 58,17 persen di tahun 2024.

Gambar II.6
Produksi Berau Kabupaten Berau (Ton), 2020-2024



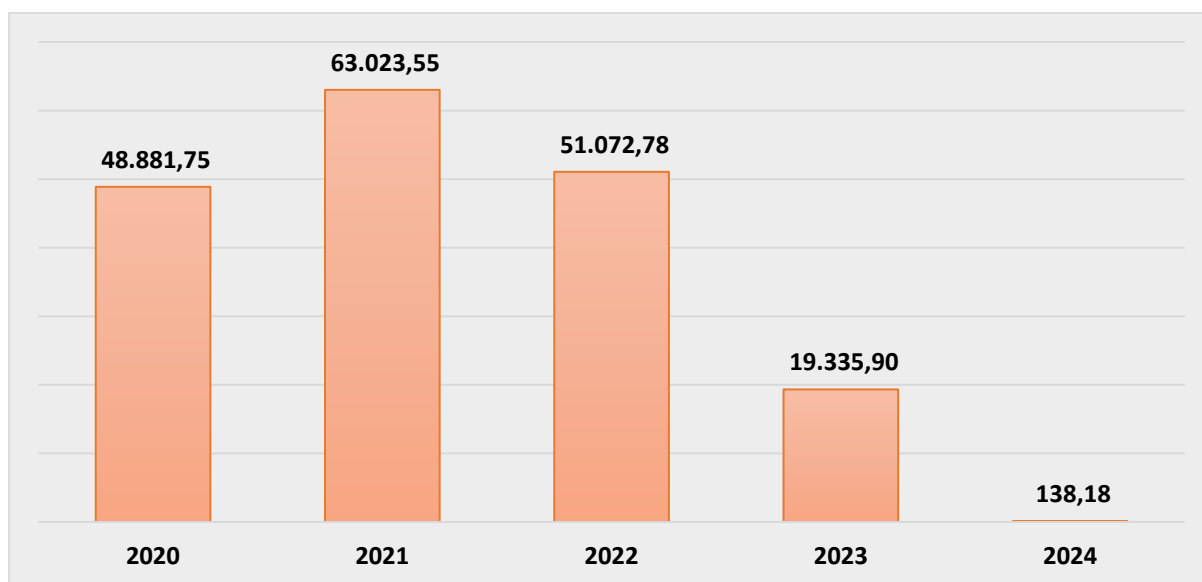
Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur

Jika ditinjau Produksi Beras Kabupaten Berau dari tahun 2020-2024, maka pola dperkembangannya serupa dengan produksi padi dimana terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 13.583,55 Ton di tahun 2020 hingga mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana menjadi 9.710,01 Ton pada tahun 2024. Sehingga jika melihat ketersediaan konsumsi beras untuk penduduk Kabupaten Berau yang berjumlah 261.833 jiwa pada tahun 2024 dan produksi beras hanya sebesar 9.710,01 Ton maka diperoleh hanya sekitar 37,08 kg/kapita/tahun. Angka ini sangat jauh di bawah konsumsi beras rata-rata 72 kg/kapita/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau masih sangat tergantung pada pasokan dari luar Kabupaten Berau.



Selain beras, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi komoditas pangan nomor dua setelah padi. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 Kabupaten Berau merupakan sentra penghasil jagung hal ini dimana lebih dari 50 persen produksi jagung Propinsi Kalimantan Timur berasal dari Kabupaten Berau. Produksi jagung tersebut selain untuk konsumsi, juga untuk kebutuhan pakan ternak dan bahan industri pangan.

Gambar II.7
Produksi Jagung Kabupaten Berau (Ton), 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur

Produksi jagung di Kabupaten Berau menurun drastis dari 63.023,55 Ton pada 2021 menjadi 138,18 ton pada 2024 atau terjadi penurunan sekitar 99,72 persen. Kabupaten Berau sebagai produsen terbesar pada 2020-2023, namun mengalami penurunan signifikan pada 2024 sehingga tidak menjadi penghasil terbesar lagi buat Propinsi Kalimantan Timur. Penurunan ini disebabkan oleh semakin berkurangnya bantuan benih dari pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau, selain itu harga benih yang cukup mahal mengakibatkan petani berpikir ulang untuk menanam jagung. Namun akibat aplikasi pupuk kimia menjadi salah satu penyebab tanah mulai jenuh sehingga produktivitas juga menurun. Penyebab yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit.



b. Holtikultura

Sektor hortikultura merupakan sub sektor unggulan pertanian yang berpeluang mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Berau. Meningkatnya kebutuhan konsumsi akibat peningkatan konsumsi per kapita, jumlah konsumen dan perubahan preferensi konsumen pada dasarnya merupakan faktor penarik bagi pertumbuhan agribisnis hortikultura. Tanaman hortikultura mencakup beragam jenis tanaman yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, mulai dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, hingga tanaman obat. Tanaman-tanaman ini umumnya ditanam di lahan yang terbatas, seperti kebun rumah atau lahan pertanian kecil, dengan cara budidaya yang tepat dan inovatif, tanaman hortikultura dapat memberikan hasil yang optimal dan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran dibedakan menjadi tanaman semusim dan tahunan.

Tabel II.8
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Kuintal) Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Merah	636,00	134,00	201,50	391,00	154,00
Bayam	4.637,00	7.583,25	4.231,66	5.003,40	1.557,55
Cabai Rawit	12.163,00	11.953,32	10.294,11	5.820,64	2.989,54
Kacang Panjang	10.046,00	9.474,40	7.580,56	5.420,95	3.051,90
Kangkung	3.439,00	11.879,70	7.821,33	6.338,70	2.823,32
Mentimun	14.399,00	9.215,40	6.635,30	4.347,00	1.943,17
Labu Siam	24,00	55,00	32,50	855,00	933,00
Melon	265,00	34,00	-	14,00	-
Semangka	4.850,00	5.572,00	7.025,00	3.371,50	908,81
Terung	27.823,00	1.302,50	9.089,08	9.821,30	5.034,93
Tomat	5.983,00	13.529,10	2.879,55	3.205,00	2.052,34
Cabai Besar	1.300,00	3.504,72	2.937,22	1.658,80	571,90
Bawang Daun	1.005,00	815,11	702,73	1.227,00	265,97
Buncis	239,00	73,90	874,00	986,30	590,93
Cabai Keriting	-	202,90	294,00	493,70	106,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Hampir seluruh komoditas tanaman mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Cabai rawit yang merupakan tanaman dengan produksi terbesar tahun 2020 turun drastis di tahun 2024 begitu juga dengan produksi cabai besar. Penurunan produksi cabai di Kabupaten Berau berdampak langsung pada ketersediaan pasokan cabai di pasar lokal, yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Inovasi dalam teknologi pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana serta pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan produksi di Kabupaten Berau.

Tabel II.9
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Kuintal) Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Alpukat	6.834	6.834	2.359,32	1.216	702,8
Belimbing	262,65	262,65	131,55	96,61	98,32
Duku/Langsar/Kokosan	36.850	36.850	27.214,68	28.516,44	25.127,88
Durian	12.232,5	12.232,5	4.425,44	4.608,24	4.296,79
Jambu Air	1.836	1836	975	1.152,8	1.336,2
Jambu Biji	2.574,5	2.574,5	1.747,16	1.810,96	1.925,44
Jengkol	5	5	125,95	126,55	170,15
Jeruk Besar	3.659	3.659	2.190	360,76	360,76
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine(kw/qui)	16.162	16.162	6.350	5.234,5	5.102,75
Mangga	2.695	2.695	2.243	2.180,5	2.242,04
Manggis	435	435	18,35	0,9	0,55
Melinjo	30,5	30,5	137,5	36,3	59,2
Nangka/Cempedak	28.799	28.799	14.746,16	6.054,76	5.509,84
Nenas	9.367,6	9.367,6	670,17	706,24	708,75
Pepaya	10.263,5	10.263,5	13.530,28	12.356,85	12.875,21
Petai	760,5	760,5	787,46	1.146,08	1.160,94
Pisang	50.290	50.290	37.171,32	32.700,45	34.348,99
Rambutan	12.045	12.045	23.665,28	12.142,6	15.933,7
Salak	413,4	413,4	595,5	775,23	1.793,15
Sawo	856,6	856,6	3.283,8	1.230,5	1.249,5
Sirsak	1.094,6	1.094,6	1.048,2	424,8	422,23
Sukun	2480	2480	5.832,86	1.646,92	1.697,15
Buah Naga	...	...	236,35	76,35	109,2
Jeruk Lemon	...	...			1
Lengkeng	...	...	41,6	29,3	41,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Untuk tanaman buah dan sayuran tahunan memiliki produksi yang berbeda setiap tahunnya, dan tidak tentu jumlahnya. Namun untuk Kabupaten Berau buah yang memiliki jumlah produksi tertinggi adalah Pisang. Buah tropis ini dapat di produksi dalam jumlah besar di Kabupaten Berau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah dan masih dapat di ekspor keluar Kabupaten Berau. Selain pisang ternyata Pepaya juga mampu di produksi dalam jumlah besar dan meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 hanya 10.263,5 kuintal menjadi 12.875,21. Peningkatan ini disebabkan kondisi tanah dan iklim yang cocok buat tanaman ini selain itu, dengan meningkatnya harga dan permintaan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor tanaman ini di budidayakan di Kabupaten Berau.

c. Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Berau. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menopang perekonomian. Kabupaten Berau memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan kakao.



Tabel II.10
Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Ton) Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Karet					
-Rakyat	81,90	720,96	343,67	460,19	588,92
-Plasma	-	-	-	-	-
-PBS	-	6.228,97	79,03	-	-
Jumlah Karet	81,90	6.949,93	422,70	460,19	588,92
Kelapa Dalam	3.482,74	1.569,29	1.794,24	1.942,58	2.570,16
Kelapa Sawit	-	-	-	-	-
- Swadaya	255.503,77	302.008,63	374.878,34	291.235,95	443.732,41
-Plasma	237.149,62	297.363,36	298.638,42	332.313,57	338.620,53
-PBS	1.731.172,80	1.634.349,85	1.840.500,53	2.262.691,41	2.177.476,88
Jumlah Sawit	2.223.826,19	2.233.721,84	2.514.017,29	2.886.240,93	2.959.829,82
Kakao	787,66	513,63	600,87	416,81	463,70
Lada	827,02	1.256,80	1.326,00	1.180,23	1.139,14
Kopi	11,66	12,80	8,51	6,05	4,32
Pala	0,15	10,66	16,10	4,57	4,88
Kemiri	0,80	0,84	1,30	0,90	0,94
Cengkeh	0,40	1,12	1,70	1,50	1,43

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Komoditas perkebunan yang sangat mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit. Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2024 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Pencapaian tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir, dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa



sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

d. Perikanan

Perikanan merupakan salah satu potensi alam yang sangat penting dalam penyediaan sumber pangan berprotein tinggi. Perikanan secara umum di Indonesia dibagi menjadi dua berdasarkan cara perolehannya yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap sendiri dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap di laut dan di perairan umum daratan. Begitu juga perikanan yang ada di Kabupaten Berau, dimana memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan pangan, meningkatkan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir produksi perikanan di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan sejumlah program yang tengah dijalankan untuk memperkuat sektor ini, di antaranya, pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, bantuan sarana usaha, pelatihan nelayan kecil, pengelolaan TPI, hingga penerbitan izin kapal. Sedangkan untuk Pengelolaan Perikanan Budidaya juga di lakukan beberapa program peningkatan berupa pelatihan pembudidaya ikan kecil, bantuan prasarana, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, serta penjaminan ketersediaan sarana. Tentunya juga diperlukan pengawasan untuk usaha pembudidaya dan penangkapan ikan sesuai kewenangan kabupaten. Selain itu Kabupaten Berau mencoba langkah strategis lainnya melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui penyediaan data usaha, pembinaan dan pelatihan, serta fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah mendorong hilirisasi dan pengolahan hasil laut di dalam daerah agar perputaran ekonomi lebih besar terjadi di Berau, karena jika terjadi penurunan harga ikan dipasaran akibat produksi ikan yang melimpah namun permintaan tidak begitu besar dan harga rendah. Maka kondisi bisa ditekan jika ada industri pengolahan yang menyerap hasil tangkapan dalam jumlah besar dan memperpanjang usia konsumsi ikan melalui produk olahan, seperti fillet, ikan asap, atau bahkan olahan beku. Diman ini bisa memperpanjang umur ikan dan menstabilkan harga. Selain itu, industri pengolahan hasil laut di Berau diyakini



dapat menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan dan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah pesisir.

**Tabel II.11
Produksi Ikan Menurut Sub Sektor Perikanan Kabupaten Berau (Ton)
Tahun 2020-2024**

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perikanan Tangkap	20.448,98	23.402,15	24.290,05	24.941,08	26.323,93
Laut	18.988,84	21.779,62	22.618,82	23.164,26	24.481,47
Umum	1.460,14	1.622,53	1.671,23	1.776,82	1.842,46
2. Perikanan Budidaya	2.259,99	2.380,24	2.403,70	3.895,89	3.493,78
Tambak	1.754,90	1821,02	1.825,05	2.322,97	2.356,05
Kolam	344,86	381,2	394,44	564,05	534,80
Karamba	21,08	39,64	42,61	64,63	98,71
KJA	139,15	138,38	141,60	182,24	184,22
Rumput Laut				762,00	320,00
Total	22.708,97	25.782,39	26.693,75	28.836,97	29.817,71

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Berau

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

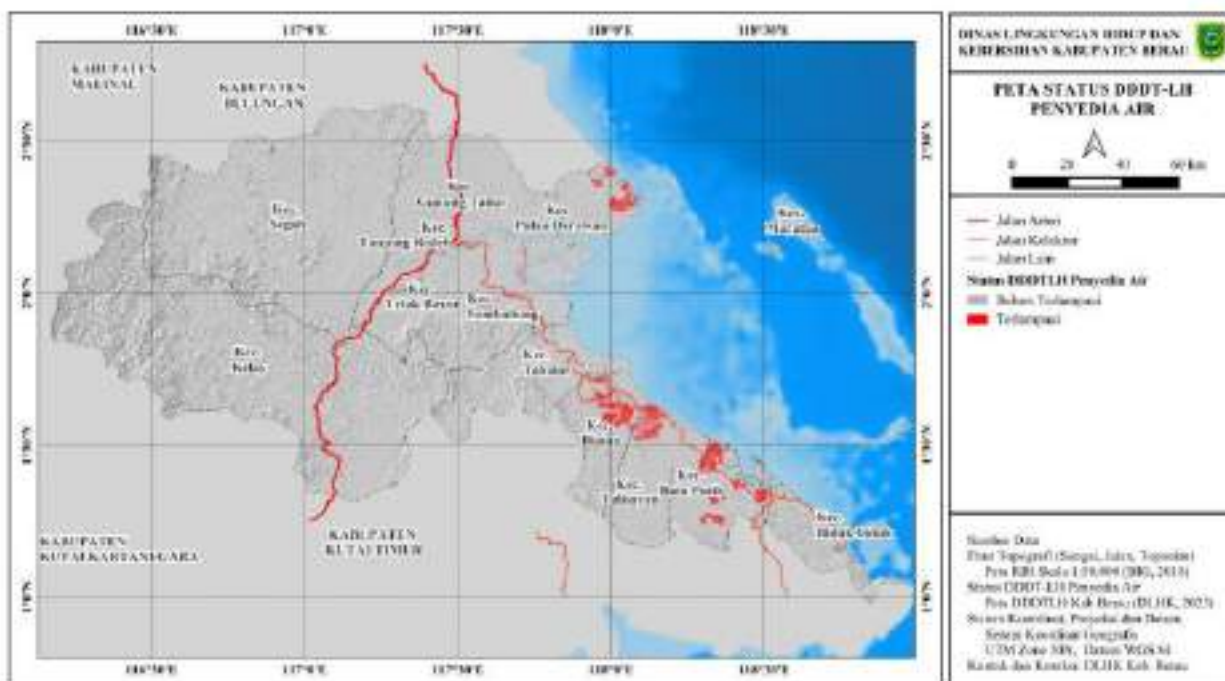
Sebagai daerah yang didominasi sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Berau menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan untuk lingkungan hidup. Sehingga isu penting yang tidak boleh diabaikan dan dikesampingkan adalah tentang adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Berau. Dengan luas Kawasan hutan yang besar serta keanekaragaman hayati maka dapat memberikan kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari kegiatan ekonomi terhadap ekosistem yang ada baik deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air, yaitu ketersediaan air, baik yang berasal dari air permukaan seperti sungai dan danau maupun air tanah, bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.



Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Gambar II.8
Peta Status Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Berau

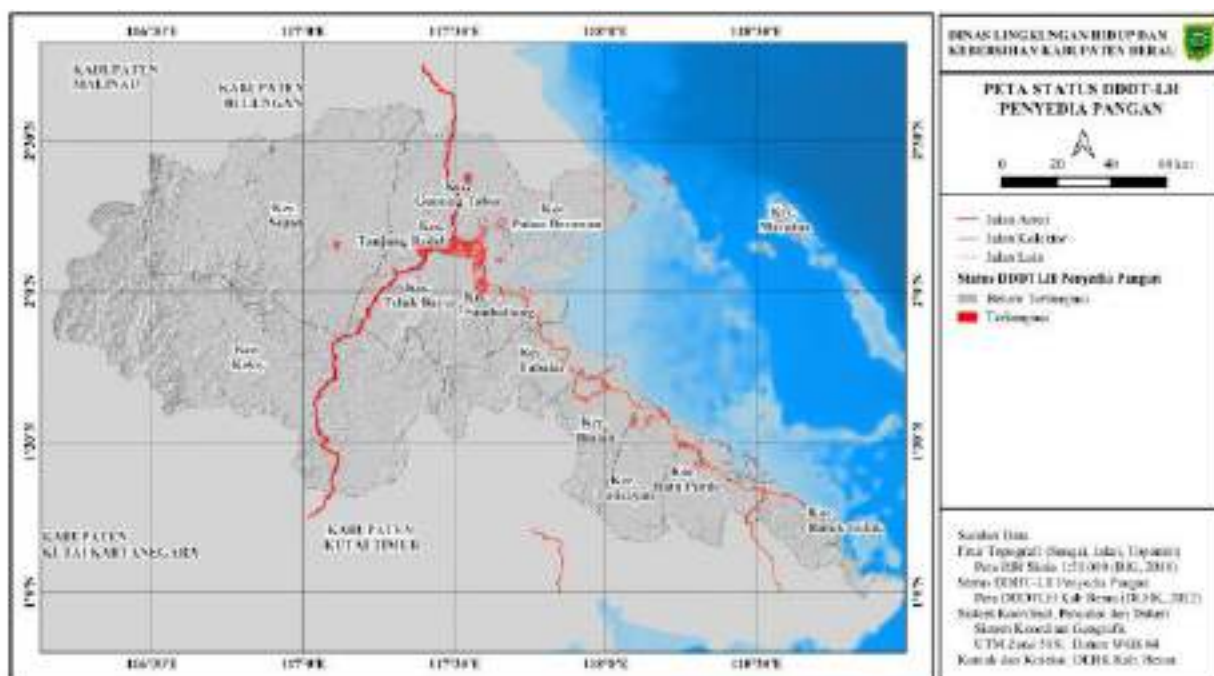


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

Status jasa penyedia air di Kabupaten Berau masih didominasi oleh kategori belum terlampaui (98,43%) yang hasilnya hampir sama dengan status jasa penyedia pangan di Kabupaten Berau yang juga didominasi oleh kategori belum terlampaui (98,62%). Untuk daerah-daerah dengan dominasi kategori jasa penyedia air yang telah terlampaui yang umumnya ada di daerah perkotaan agar dapat melakukan upaya pembangunan daerah dengan tidak lagi menggunakan air permukaan dan mencari alternatif lain dalam penyediaan air seperti dari air tanah ataupun dari upaya desalinasi air hujan/air laut, sedang untuk daerah-daerah dengan dominasi kategori jasa penyedia pangan yang telah terlampaui yang umumnya juga ada di daerah perkotaan agar dapat mencari sumber penyuplai pangan dari daerah-daerah di sekitarnya yang belum terlampaui. Tren kecenderungan jasa penyedia air di Kabupaten Berau didominasi oleh kondisi menurun (77,35%) dan jasa penyedia pangan di Kabupaten Berau didominasi oleh kondisi tetap (74,48 %) yang didapat dari perbandingan data tahun 2012 dan data

tahun 2021. Diperlukan upaya yang lebih baik dalam memperbaiki lingkungan di Kabupaten Berau karena data hasil dominasi tren menurun lebih tinggi dari hasil tren meningkat, baik untuk jasa penyedia air maupun untuk jasa penyedia pangan.

Gambar II.9
Peta Status Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

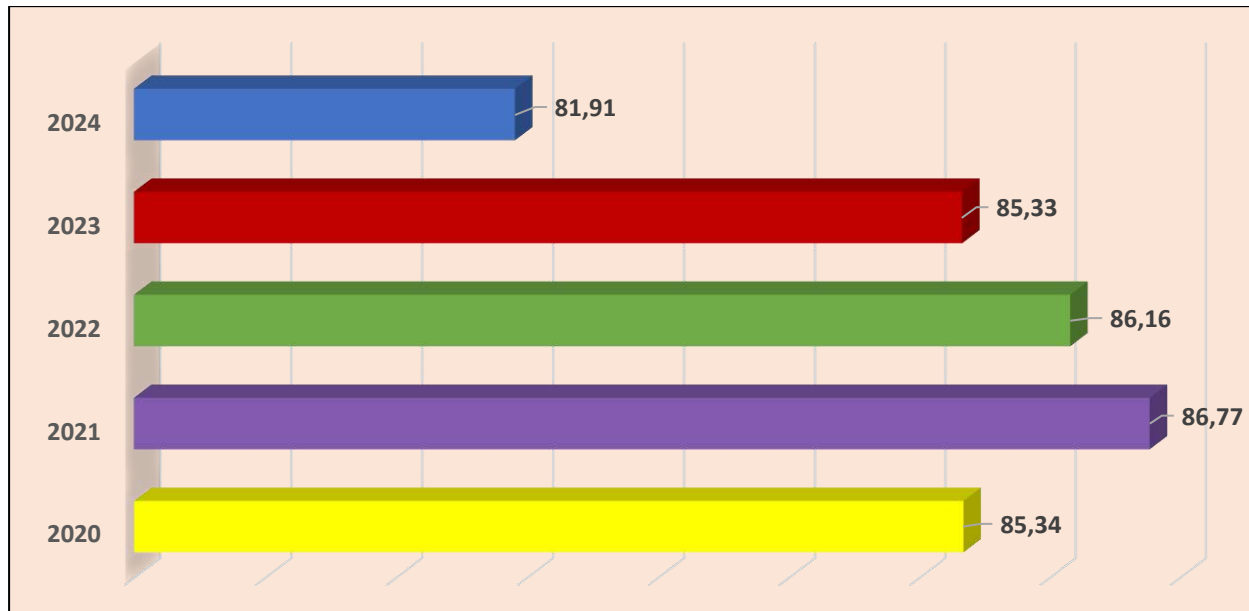
Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.



Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Berau sempat mencapai angka tertinggi sebesar 86,77 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2024, indeks ini menurun menjadi 81,91, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini menjadi indikator perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk program yang mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah. Diperlukan sinergi lintas sektor serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan bidang pangan dan pertanian, para petani diperlukan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan guna pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).

Gambar II.10
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Berau

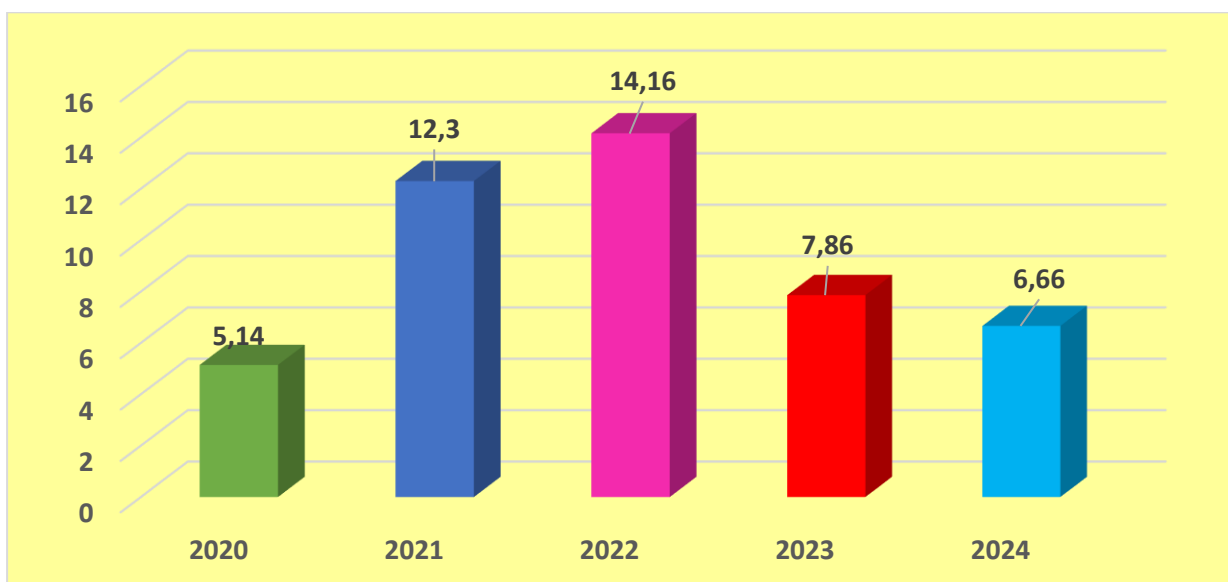
b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalence of Undernourishment (PoU) atau Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif



terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Nilai PoU yang semakin rendah menandakan telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Gambar II.11
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Berau

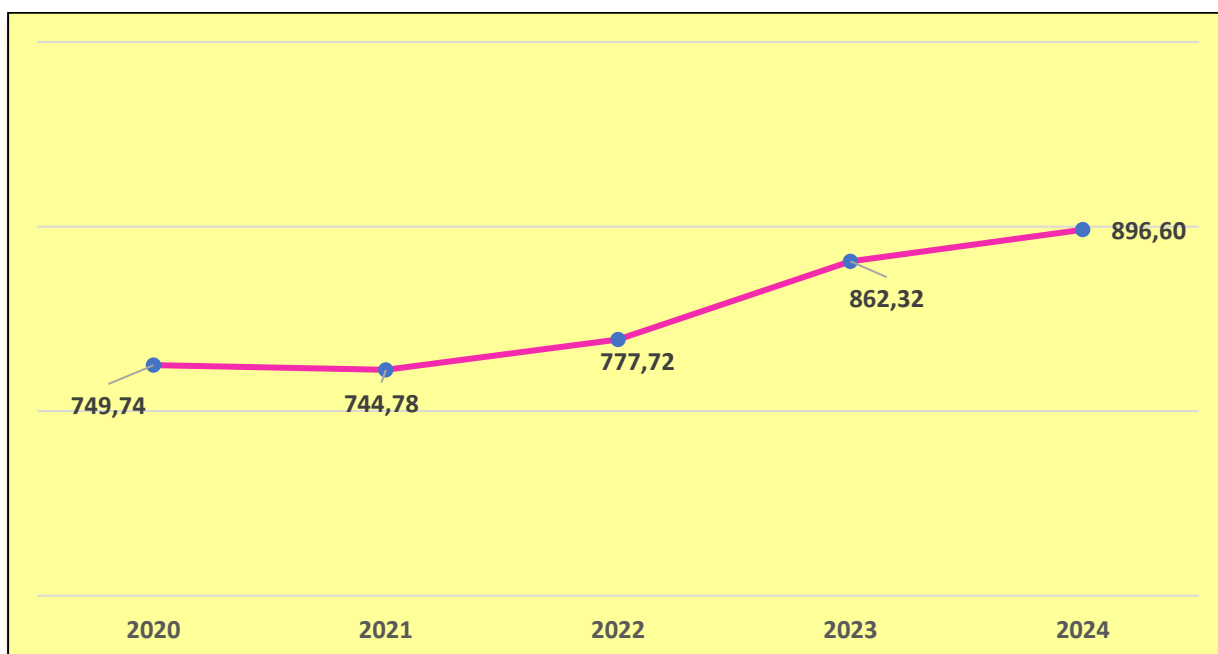
PoU tertinggi Kabupaten Berau terjadi pada tahun 2022 dimana mencapai 14,16 persen, padahal pada tahun 2020 PoU hanya sebesar 5,14 persen dan naik menjadi 12,30 persen di tahun 2021. Namun pada tahun 2023 PoU Kabupaten Berau mulai menunjukkan perbaikan kinerja dimana hampir 50 persen terjadi penurunannya menjadi 7,86 persen dan menjadi 6,66 persen di tahun 2024 yang artinya masih terdapat 6 hingga 7 orang diantara 100 orang penduduk Kabupaten Berau yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif dan sehat. Perbaikan kinerja PoU ini dikarenakan masivnya program pemerintah untuk masyarakat agar mendapatkan kemudahan akses terhadap pangan melalui Gerakan Pangan Murah, Bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta Bantuan Pangan Non Tunai.



c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan modern, memungkinkan pengoperasian berbagai perangkat elektronik dan teknologi. Sedangkan Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Konsumsi listrik adalah jumlah energi listrik yang digunakan oleh perangkat elektronik dalam jangka waktu tertentu, biasanya diukur dalam kilowatt-hour (kWh). Sedangkan Konsumsi Listrik Per Kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Melalui indikator ini maka dapat diketahui tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi dan akses energi di suatu wilayah.

Gambar II.12
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Perkapita) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: PT. PLN Cabang Berau

Kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Berau setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari konsumsi listrik per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2020 konsumsi listrik per kapita sebesar 749,74 kWh namun menjadi 896,60 kW di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan akses terhadap energi listrik dimana Kabupaten Berau sangat tergantung terhadap listrik untuk melakukan berbagai kegiatan baik ekonomi, pendidikan, sosial dan bermasyarakat. Selain itu, juga



dikarenakan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang sangat tergantung pada teknologi dan listrik dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-hari.

d. Rasio Elektrifikasi

Elektrifikasi adalah proses mengganti penggunaan energi dari sumber lain (seperti bahan bakar fosil) dengan listrik. Ini bisa mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan perumahan. Elektrifikasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Sedangkan Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN.

Tabel II.12
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi	68,18	74,54	78,18	78,18	81,81

Sumber : PT.PLN Cabang Berau

Rasio elektrifikasi di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan terus menerus. Dimana tahun 2020 sebesar 68,18 menjadi 81,81 ditahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi secara konsisten, mencoba terlibat secara serius terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan mencoba untuk menggunakan energi terbarukan dalam berbagai sektor baik industri, transportasi maupun rumah tangga.

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur diperoleh bahwa pada tahun 2024 dari 110 desa terdapat 19 desa yang masih menikmati listrik yang bukan berasal dari PLN, listrik yang mengalir di desa tersebut kebanyakan berasal dari pembangkit listrik perusahaan. Hal ini menunjukkan peran serta perusahaan terhadap kemajuan dan peningkatan fasilitas desa di Kabupaten Berau menunjukkan keseriusan yang cukup tinggi. Namun harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar pemenuhan terhadap listrik PLN untuk seluruh desa. Sedangkan jika melihat jumlah keluarga yang sudah menikmati listrik diketahui bahwa terdapat 79.736 atau sebesar 88,51 persen keluarga di Kabupaten Berau telah menikmati fasilitas listrik pada tahun 2024, sedangkan sisanya sebesar 11,49 persen keluarga telah menikmati listrik tapi bukan berasal dari PLN.



Semakin pentingnya listrik bagi kegiatan perekonomian Kabupaten Berau, maka penyediaan listrik menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau bekerjasama dengan PT.PLN, dalam melakukan pendistribusian listrik hingga mencapai desa-desa yang belum teraliri listrik PLN, seperti pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS). Sehingga dengan teralirinya listrik dan semakin banyak desa dan keluarga yang dapat menikmati listrik maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

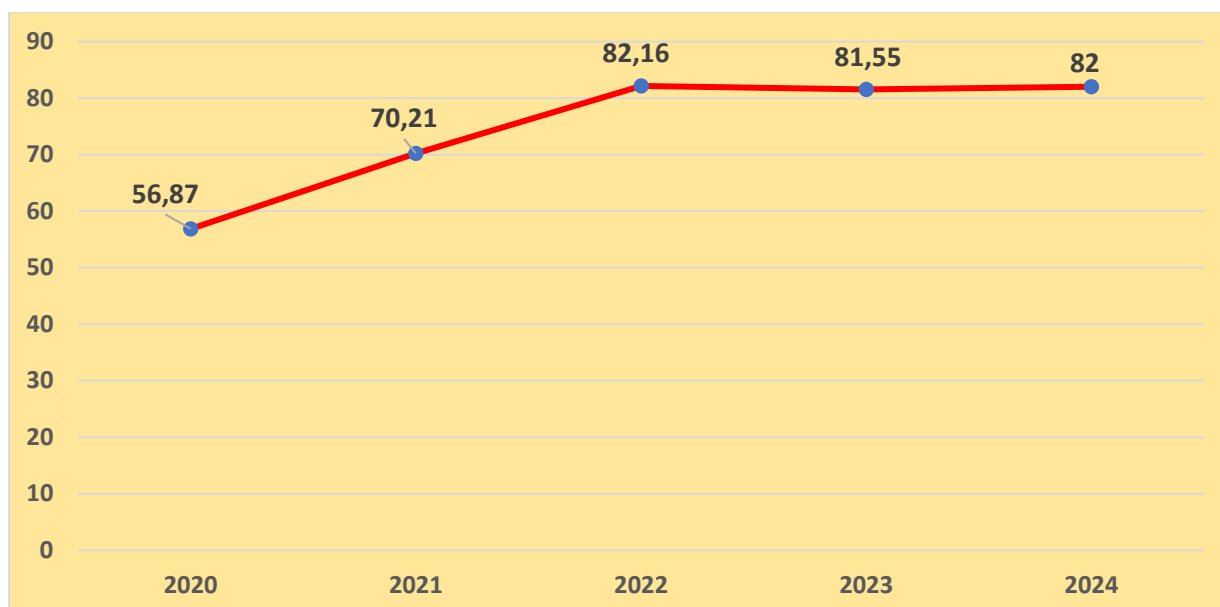
e. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidrasi pada tubuh manusia. Hal ini dikarenakan 90 persen tubuh manusia diisi oleh cairan. Sehingga, kekurangan air atau yang dikenal dehidrasi dimungkinkan dapat menurunkan fungsi-fungsi dari tubuh itu sendiri. Namun, air yang dibutuhkan tubuh bukanlah air sembarangan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar air yang dikonsumsi tersebut dikategorikan layak dan aman. Syarat dasarnya adalah harus terbebas dari bakteri dan kuman serta terhindar dari kontaminasi zat-zat yang berbahaya.

Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Sedangkan menurut BPS, air minum layak terdiri dari air leding, air hujan dan air terlindung yakni air yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/limbah/tinja sejauh 10 m atau lebih. Akses terhadap air minum layak merupakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti minum, masak, mandi, cuci, dan ibadah. Ketiadaan akses terhadap air minum layak akan menyebabkan paparan terhadap beragam jenis penyakit.



Gambar II.13
Akses Air Minum Layak Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur

Akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dan telah mencapai agregat diatas 50 persen, bahkan di tahun 2022 hingga 2024 sudah mencapai diatas 80 persen. Walau angka tahun 2024 masih dibawah angka propinsi yang mencapai sebesar 83,71 persen namun Kabupaten Berau sudah mencapai 80 persen sejak 2022 sedangkan propinsi baru mencapai diatas 80 persen di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh terbangunnya beberapa unit air baku dan peningkatan kualitas infrastruktur air minum (seperti pembangunan IPA, revitalisasi IPA, perluasan jaringan). Selain itu dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta sarana dan prasarana jalan untuk mencapai wilayah penduduk juga memberi andil terhadap peningkatan akses air minum layak untuk masyarakat.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai daerah yang didominasi sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Berau menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Berau menunjukkan peningkatan dari 74,75 pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 78,53 tahun 2020 dan 76,37 pada



tahun 2021. Namun mengalami peningkatan lagi menjadi 75,08 pada tahun 2023 dan terus meningkat menjadi 78,97. Indeks kualitas udara juga mengalami hal serupa dimana selama kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan namun pada tahun 2023 meningkat mencapai 85,17 dan meningkat sebesar 5,66 poin menjadi 90,83 di tahun 2024. Namun, hal ini tidak berlaku pada indeks kualitas air sungai dimana selama empat tahun (2020-2023) terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 56,96. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan mengalami fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini tentunya harus ini menjadi perhatian penting pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam mengendalikan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Tabel II.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,53	76,37	74,75	75,08	78,97
Indeks Kualitas Air Sungai	56,19	56,09	53,48	53,33	56,96
Indeks Kualitas Udara	85,87	85,32	83,76	85,17	90,83
Indeks Kualitas Lahan	89,78	94,64	94,64	93,76	94,85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

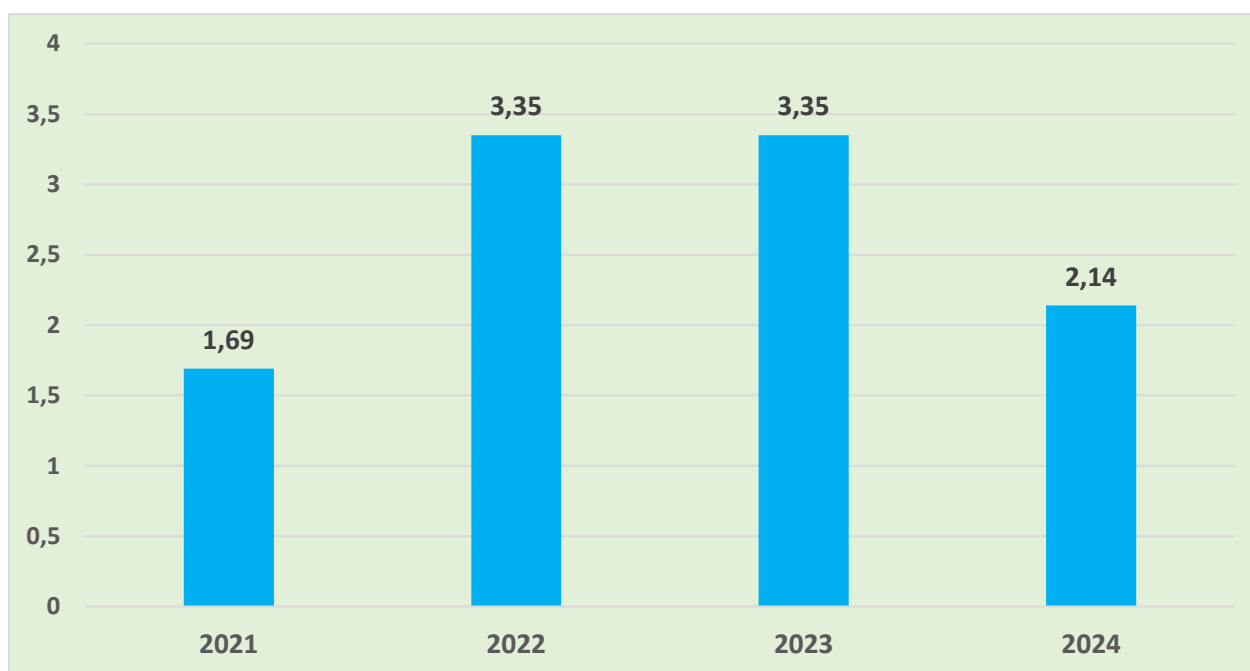
b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan produk buangan atau limbah, baik itu kegiatan domestik maupun kegiatan industri besar. Dampaknya bagi lingkungan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis, jumlah, dan cara pengolahannya. Sehingga penanganan limbah harus menjadi perhatian penting oleh seluruh lapisan masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Kabupaten Berau, Meskipun tidak bisa dihindari, namun dapat melakukan tindak pengelolaan agar limbah yang dibuang tidak berdampak negatif. Pengelolaan limbah di Kabupaten Berau mengadopsi prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dengan fokus pada pengurangan di sumber dan daur ulang, termasuk pengolahan sampah organik menjadi kompos, penyaluran sampah anorganik ke bank sampah, pemanfaatan teknologi untuk sampah residu, serta pelibatan masyarakat melalui lubang biopori dan sosialisasi gaya hidup bebas plastik. Selain itu, ada juga upaya untuk mengelola sampah di sungai dan penerapan konsep Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R sebagai target 100% pengelolaan sampah pada tahun 2025.



Akses sanitasi layak Kabupaten Berau mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun, dimana pada tahun 2022-2023 mencapai persentase tertinggi yaitu sebesar 3,35. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,14, dan capaian ini masih dibawah capaian propinsi sebesar 9,70 persen. Hal ini salah satunya disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Dukungan penuh dari perusahaan kelapa sawit dan industri pengolahan CPO juga mutlak diperlukan dalam pengelolaan limbah yang ramah terhadap lingkungan dikarenakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut cukup besar.

Gambar II.14
Akses Sanitasi Layak Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur

6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

GRK adalah sekelompok gas yang ada di atmosfer Bumi dan memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Fungsinya sangat penting karena tanpa gas ini, Bumi akan menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Salah satu sumber utama GRK adalah fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis, yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, menyerap CO₂ dari atmosfer dan



mengonversinya menjadi oksigen. Emisi gas efek rumah kaca adalah fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer Bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan Bumi, lalu memancarkannya kembali ke semua arah. Proses ini penting untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan dapat menyokong kehidupan. Suhu rata-rata permukaan Bumi akan jauh lebih dingin tanpa adanya GRK, sekitar minus 18 derajat Celcius. Namun, masalah muncul ketika konsentrasi gas-gas ini di atmosfer meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Peningkatan konsentrasi GRK ini menyebabkan lebih banyak radiasi inframerah ditahan di atmosfer dan mengakibatkan pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*).

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) yang secara rutin dilakukan. Melalui kegiatan ini dapat diketahui capaian penurunan emisi GRK berdasarkan pelaksanaan aksi mitigasi setiap tahunnya. Kabupaten Berau tercatat telah melakukan pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi pada aplikasi AKSARA pada tahun 2024 yang dibagi menjadi empat sektor /bidang dengan masing-masing inventarisasi sebagai berikut

1. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut terdapat 52 kegiatan dimana potensi penurunan emisi yang diperoleh dari pelaksanaan aksi mitigasi pada bidang ini pada tahun 2024 adalah 11.509,27 Ton CO₂ equivalen (CO₂-eq). Kegiatan yang paling banyak dilaksanakan adalah penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pengembangan agroforestry, peningkatan ruang terbuka hijau, reklamasi lahan pasca tambang serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun *illegal logging*).
2. Bidang Energi terdapat 17 aksi mitigasi berupa pemanfaatan limbah biomassa pengolahan kelapa sawit menjadi energi dan penggunaan energi surya (PLTS) untuk energi listrik oleh perusahaan pertambangan dan pembangunan PLTS terpusat di Kampung Pegat Batumbuk Kontribusi dari sektor energi terhadap potensi penurunan emisi di kabupaten Berau merupakan kedua terbesar setelah sektor Kawasan Pesisir dan Kelautan yaitu sekitar 23,6% pada tahun 2024 atau sekitar 135.113 Ton CO₂-eq.



3. Bidang Kawasan Pesisir dan Kelautan didominasi oleh dua kegiatan utama yaitu perlindungan (konservasi) hutan mangrove eksisting dan aksi penanaman mangrove. Kedua aksi ini marak dilakukan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat kampung dengan dukungan mitra pembangunan lokal/organisasi non pemerintah sejak tahun 2016. kegiatan aksi mitigasi yang dilaporkan bidang ini terdapat 22 aksi mitigasi yang tersebar lokasinya disepanjang pesisir wilayah kabupaten Berau. Potensi penurunan emisi dari Sektor ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya dengan potensi menurunkan emisi sebesar 425.337 Ton CO₂-eq.
4. Bidang Pengelolaan Limbah yang dilaporkan dalam AKSARA adalah sebesar 31 kegiatan. Kegiatan yang dilaporkan pada bidang pengelolaan limbah meliputi:
 - Sub-bidang persampahan domestik: pemanfaatan gas metan di TPA, proses komposting di TPST/TPS 3R, dan proses *reuse* dan *recycle* sampah kertas/kardus/karton di Bank Sampah.
 - Sub-bidang air limbah: operasionalisasi IPAL atau *septic tank* komunal, baik itu secara *aerobic* dan *anaerobic*.

Potensi penurunan emisi dari pelaksanaan aksi mitigasi di bidang pengelolaan limbah pada tahun 2024 ada sebesar 448 Ton CO₂-eq.

Tabel.2.14
Angka Penurunan Emisi GRK Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ -eq)	117.514	102.964	249.058	565.942	572.407

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

Adanya pertambahan data teknis aksi mitigasi yang dilaporkan melalui sistem AKSARA secara signifikan dapat meningkatkan potensi penurunan emisi. Hal ini terlihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2023 dan 2024 persentase capaian penurunan emisi melebihi target emisi yang diturunkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Berau periode 2021-2026. Capaian ini masing-masing adalah sebesar 149% di Tahun 2023 dan 156% di tahun 2024. Secara kumulatif, potensi penurunan emisi GRK dibandingkan dengan baseline sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Tata Guna Lahan



untuk Mendukung Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Berau (Pokja Ekonomi Hijau, 2017), pada periode 2010-2030 maka potensi capaian penurunan emisi hingga tahun 2024 adalah sebesar 80 persn atau setara dengan 2.997.969 ton CO₂eq (kumulatif).

Tantangan yang sama seperti tahun – tahun sebelumnya juga akan terus dihadapi ke depan adalah pengumpulan data aktifitas dari para pihak yang melaksanakan aksi mitigasi dan dimasukkan ke dalam system PPRK Aksara. Khususnya pada tahun 2024, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi non pemerintah sudah mulai dilakukan, misalnya oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Perusahaan pertambangan, organisasi non pemerintah. Hal ini perlu terus dilanjutkan guna meningkatkan pelaporan aksi-aksi mitigasi di Kabupaten Berau sehingga dapat menjustifikasi pencapaian target penurunan emisi GRK yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Indeks Resiko Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah harus mampu memberikan gambaran terkait statistik bencana yang akan menjadi bahan dalam merumuskan program penanggulangan bencana pada periode pembangunan saat ini.

Peta risiko longsor Kabupaten Berau hasil analisis skoring dan pembobotan berdasarkan Permen PU No. 22/PRT/M/2007. Secara umum, area-area yang teridentifikasi sebagai area yang rawan longsor adalah di sekitar Kecamatan Tanjung Redeb dan Teluk Bayur. Hal ini selain dikontrol oleh curah hujan yang cenderung sedang menuju ke tinggi, di area ini juga didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman penduduk yang artinya bahwa tekanan terhadap massa tanah juga cenderung cukup tinggi dan pada suatu ketika dapat berpotensi terjadi gerakan massa batuan. Selain itu pada area menuju Kecamatan Segah teridentifikasi juga terdapat beberapa area yang rawan longsor, hal ini cenderung dikontrol akan kondisi litologi disana berupa formasi batuan sedimen dan juga curah hujan yang tinggi serta adanya beberapa lereng yang



memiliki kemiringan yang cukup tinggi. Disamping itu, pada jalur pesisir Kabupaten Berau menuju Kecamatan Talisayan dan juga Biduk-biduk, cenderung berada pada kategori tidak rawan, yang mana selain curah hujannya cenderung rendah, litologi batuan disana jugadidominasi oleh batuan karst atau batuan kapur yang cukup keras dengan kandungan tanah yang rendah. Artinya bahwa kemungkinan terjadinya longsor pada kawasan ini cukup rendah.

Untuk bencana alam banjir, diperoleh bahwa terdapat 17 data titik banjir yang terjadi ditahun 2020 dan 2021, dimana didapatkan semua data titik aktual banjir masuk ke dalam area kelas rawan. Luasan peta pendugaan tingkat kerawanan banjir Kabupaten Berau menunjukkan Kabupaten Berau didominasi dengan kelas kerawanan Sedang yaitu seluas 8.725,56 km² atau sebesar 40,16 persen dari luas wilayah Kabupaten Berau, yang mendominasi dibagian sebelah utara, tenggara dan beberapa wilayah bagian selatan, kemudian kelas kerawanan kurang rawan menjadi tingkat kerawanan yang mendominasi ke dua dengan luas wilayah 5.820,76 km² atau sekitar 26,79 persen yang area sebarannya dibagian timur dan bagian selatan. Untuk kerawanan tidak rawan yaitu seluas 3.596,39 km² atau 16,55 persen dan kelas rawan seluas 3.402,08 km² atau 15,66 persen.

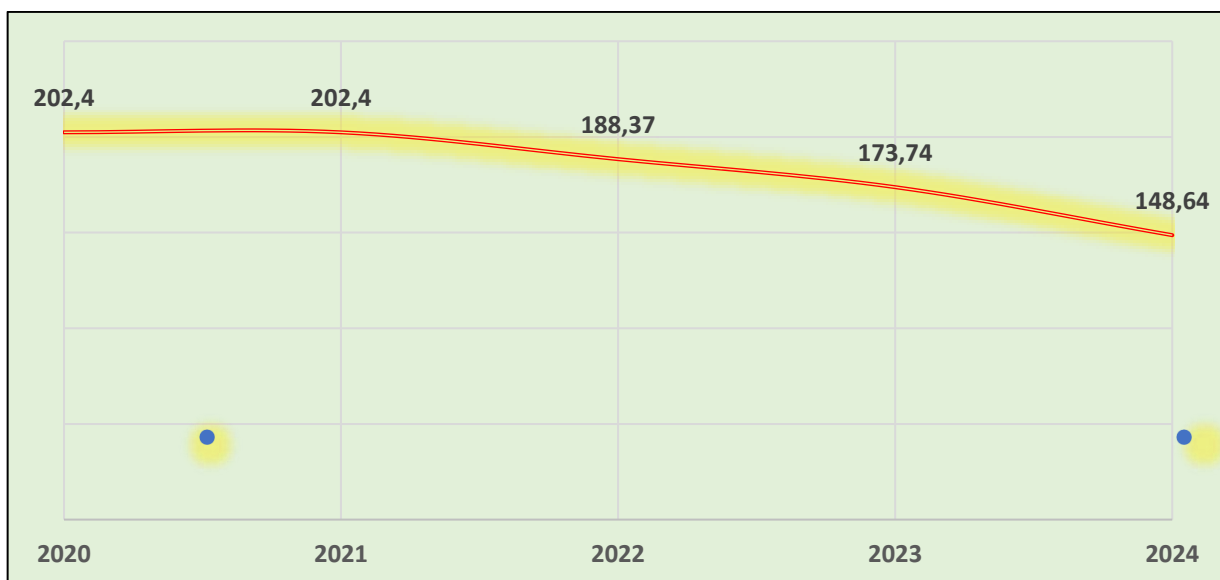
Untuk bencana alam berupa kebakaran hutan, kebakaran lahan merupakan peristiwa yang terjadi setiap musim kemarau. Kebakaran lahan meskipun berulang tetapi masih saja belum dapat diatasi secara maksimal. Penyebab kebakaran lahan lebih pada faktor manusia. Aktivitas penyiapan lahan, pembalakan liar, dan faktor kesengajaan lainnya telah menyebabkan kebakaran menjadi semakin meluas. Melalui mitigasi kebakaran lahan, diharapkan kebakaran dapat dikurangi, yaitu melalui program restorasi, yang meliputi pembasahan, revegetasi dan revitaliasi ekonomi masyarakat.

Dari sisi indikator kinerja kebencanaan yang memiliki cakupan lebih luas, maka Indeks Risiko Bencana dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan kebencanaan daerah. Indeks Risiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana, dimana dalam penghitungannya memperhatikan faktor *hazard* (bahaya), *vulnerability* (kerentanan) dan *capacity* (kapasitas). Bahaya dihitung berdasarkan probabilitas fenomena alam, kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, sedangkan kapasitas dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana. Semakin tinggi tingkat kerentanan dan



bahaya daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Berau mengalami progres penurunan secara gradual dari 202,40 di tahun 2020 menjadi 188,37 pada tahun 2022. Selanjutnya capaian tersebut terus menurun pada tahun 2023 menjadi 173,74 dan menjadi 148,64 pada tahun 2024. Meskipun demikian, kategori risiko bencana Kabupaten Berau sudah di level tinggi.

Gambar II.15
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau

Jika melihat laporan kejadian bencana sepanjang tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mencatat 65 kejadian bencana, didominasi oleh kebakaran baik rumah, kios, bangunan kosong maupun fasilitas sekolah (52 kejadian) sedangkan sisanya adalah banjir, kasus orang tenggelam, tanah longsor sebanyak 11 kejadian. Secara rinci kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.15
Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Berau Tahun 2024

No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
1.	Jl.Abi mayus Rt.11 Trans Bangun, Kecamatan Sambaliung	06/01/2024	Kebakaran Ruang Koperasi MTS 003	-	1 jam pemadaman,15 personil Damkar,2 unit Damkar
2.	Perairan Laut Kec.Tabalar,Kampung Tubaan, Kecamatan Tabalar	07/01/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	3 hari pencarian,3 personil BPBD,1 unit Mobil peralatan
3.	Jl.Pulau Sambit Rt.005, Kelurahan Tg.Redeb, Kec.Tg.Redeb	08/01/2024	Pohon Tumbang	-	1 jam penanganan, 5 personil TRC, 1 unit Mobil peralatan
4.	Jl.Poros Side Bangen Rt.04, Kecamatan Kelay	15/01/2024	Kebakaran KCP BPD	-	1 jam penanganan, 1 personil Damkar,2 unit Damkar
5.	Jl.Ir.Soekarno Rt.06 Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur	17/01/2024	Kebakaran Peternakan Ayam	-	1 jam penanganan, 2 personil Damkar,1 unit Damkar
6.	Jl.H.A.R.M Ayoeb Rt.13 Kmplk.Perum Cita Raya Permai, Kec.Gunung Tabur	23/01/2024	Tanah Longsor	-	1 hari penanganan, 5 personil TRC, 1 unit mobil Resceu
7.	Jl.Suka Maju Rt.06 Kampung Bebanir, Kec.Sambaliung	03/02/2024	Kebakaran Rumah	-	Tidak Ditangani
8.	Kampung Pulau Derawan Rt.003, Kec.Pulau Derawan	06/02/2024	Kebakaran Rumah	-	1 hari penanganan dan 6 personil TRC
9.	Perairan Pulau Maratua, Kec. Maratua	10/02/2024	Laka Transportasi Air	2 jiwa	2 hari penanganan, 9 personil TRC, 1 unit Resceuboot, 1 unit mobil Resceu,1 unit mobil peralatan



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
10.	Jl.Perumahan BUMA Rt.05 kampung Pegat Bukur, Kec.Sambaliung	19/02/2024	Kebakaran Rumah Bangsalan 98 Pintu	-	2 jam pemadaman, 10 personil TRC, 20 personil Damkar, 5 unit Damkar,1 unit WS BPBD
11.	Jl.Pulau Panjang, Kel.Pulau Panjang, Kec. Tanjung Redeb	29/02/2024	Kebakaran Gudang SDN 009	-	1 jam pemadaman, 6 personil TRC, 15 personil Damkar, 2 unit Damkar
12.	Kampung Dumaring Rt.005, Kec.Talisayan	06/03/2024	Kebakaran Rumah	-	1 jam pemadaman, 3 personil Damkar, 2 unit Damkar
13.	Perairan Sungai Kampung Gurimbang, Kec.Sambaliung	08/03/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	3 hari pencarian, 10 personil TRC, 1 unit spedboat
14.	Sungai Segah Rt.13 (penumpukan kerikil jetty jansen), Kec.Gunung Tabur	08/03/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	3 hari pencarian, 10 personil TRC, 1 unit spedboat
15.	Perairan Laut Kec.Tabalar,Kampung Semurut (pisang- pisangan), Kec. Tabalar	08/03/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	3 hari pencarian, 3 personil DamkarC, 1 unit spedboat
16.	Kampung Pijanau Rt.03, Kecamatan Sambaliung	15/03/2024	Banjir	-	1 jam Penanganan, 3 Personil Damkar, 1 Unit Mobil operasional BPBD
17.	Kampung Pijanau Rt.06, Kecamatan Sambaliung	15/03/2024	Tanah Longsor	-	Monitoring 2 hari Pasca Banjir ,6 personil, 2 unit mobil operasional,
18.	Kampung Buyung- Buyung , Kecamatan Tabalar	15/03/2024	Banjir	-	Monitoring 2 hari pasca banjir,6 personil, 2 unit mobil



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
					operasional
19.	Kampung Biatan Ilir Rt.03 , Kecamatan Biatan	15/03/2024	Banjir	-	Monitoring 2 hari pasca banjir,6 personil, 2 unit mobil operasional
20.	Jl. Albina Gg.Sejahtera Rt.15, Kel.Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb	31/03/2024	Tanah Longsor	-	1 hari penanganan, 6 personil TRC, 2 unit mobil resceu
21.	Jl.Pendidikan II Rt.06 (sungai kampung Bebanir), Kec.Sambaliung	31/03/2024	Orang Tenggelayam	1 jiwa	2 hari penanganan, 6 personil TRC, 1 unit mobil resceu, 1 unit spedboat BPBD
22.	Jl. SM Bayanuddin Rt. 01, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung	22/04/2024	Kebakaran Tanki Solar	-	3 Personil Damkar, 1 Unit Damkar, 1 Jam Penanganan
23.	Jl.Durian III Gg.Rahayu Rt. 07, Kel. Tg.Redeb, Kec.Tg.Redeb	22/04/2024	Kebakaran Rumah	-	6 personil TRC BPBD, 20 personil Damkar,5 unit Damkar, 2 jam pemadaman
24.	Kampung Semurut (Pisang Pisangan), Kecamatan Tabalar	24/04/2024	Kebakaran WC Umum SDN 002	-	Tidak Ditangani
25.	Jl. Imam Bonjol RT.03, Kampung.Tg.Perepat, Kec.Biduk-Biduk	28/04/2024	Kebakaran Kios	-	Tidak Ditangani
26.	Kampung Dumaring Rt.01, Kec.Talisayan	29/04/2024	Kebakaran Rumah	-	2 Personil Damkar, 1 Unit mobil peralatan, 1 hari Pemadaman
27.	Kampung Labanan Makmur (Depan Pospol), Kec. Teluk	01/05/2024	Kebakaran Workshop	-	20 personil Damkar, 6 Personil TRC BPBD,2 jam



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
	Bayur				pemadaman
28.	Kampung Teluk Sumbang Rt.02, Kec. Teluk Bayur	03/05/2024	Banjir Bandang	-	2 Personil Damkar, 1 Unit mobil peralatan, 1 hari penanganan dan 1 unit jembatan 10 meter Putus
29.	Jl.Sultan Agung Rt. 02 Gg.Mapan, Kel. Bedungun, Kec. Tanjung Redeb	04/05/2024	Kebakaran Tempat Pembakaran Batu Bata	-	18 personil Damkar, 3 unit Damkar, 35 menit penanganan
30.	Jl.Padat Karya, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb	05/05/2024	Pohon Tumbang	-	5 Personil TRC BPBD, 1 Unit mobil Resceu, 45 menit penanganan
31.	Jl. Poros Berau-Samarinda, Kec. Kelay	07/05/2024	Pohon Tumbang	-	1 Personil Damkar, 1 Unit mobil peralatan, 60 menit penanganan
32.	Jl.Hasanuddin Rt.03 Kampung Tembudan (pemandian Telaga Biru), Kec. Batu Putih	10/05/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	2 Personil Damkar, 1 unit mobil peralatan, 1 hari penanganan
33.	Jl.Dermaga Gg. Wakaf Rt 13 Blok A, Kelurahan Karang Ambun, Kec.Tanjung Redeb	24/05/2024	Kebakaran Ringan Rumah Bangsal 2 Pintu	-	10 Personil Damkar, 3 Unit Damkar, 1 hari penanganan
34.	Kampung Capuak Rt.10, Kecamatan Talisayan	26/05/2024	Kebakaran Mess Karyawan	-	1 unit Damkar, 3 personil, 1 Jam Pemadaman
35.	Kampung Pisang Pisangan Rt.10, Kecamatan Tabalar	27/05/2024	Cuaca Ekstrem	-	2 jam Penanganan, 3 Personil BPBD, 1 Unit Mobil Peralatan
36.	Jl. H.A.R.M Ayoeb (Pasar Induk), Kelurahan Rinding, Kec. Teluk	02/06/2024	Kebakaran Kios Kelontong	-	1 Jam Pemadaman, 15 Personil Damkar, 6 Personil TRC, 4



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
	Bayur				Unit Damkar
37.	Jl.Urip Sumoharjo Rt.007, Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan	04/06/2024	Kebakaran Rumah	-	1 Jam Pemadaman, 2 Personil Damkar, 2 Unit Damkar
38	Jl.Manunggal Gg.Unyil Rt.08 & Rt 09,Kelurahan Gayam Kec.Tanjung Redeb	06/06/2024	Kebakaran Rumah & Bengkel	-	2 Jam Pemadaman, 20 Personil Damkar, 6 Personil TRC, 8 Unit Damkar
39.	Jl.Raubah Rt.04, Kampung Tubaan, Kec.Tabalar	10/06/2024	Kebakaran Rumah	-	1 Jam Pemadaman, 3 Personil Damkar, 2 Unit Damkar
40.	Jl.H.Isa III (Komplek Sejahtera 1), Kelurahan Karang Ambun, Kec.Tg.Redeb	18/06/2024	Kebakaran Ringan Rumah	-	30 Menit Penanganan,20 Personil Damkar, 4 Unit Mobil Damkar
41.	Jl.Mangga III, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb	24/06/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	90 Menit Penanganan,10 Personil TRC, 1 Unit Mobil Resceu
42.	Perairan Kampung Batu-Batu, Kelurahan Gunung Tabur, Kec.Gunung Tabur	13/07/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	3 hari pencarian,10 personil TRC, 1 Unit Mobil Resceu,1 Unit Speedboat
43.	Jl.Kampung Baru Gg,Sido Rukun Rt 23, Kelurahan Teluk Bayur, Kec.Teluk Bayur	22/07/2024	Kebakaran Rumah	-	1 jam Pemadaman,15 Personil Damkar,6 personil TRC, 7 Unit Mobil Damkar
44.	Jl.Sungai Kuyang Gg. Ramah Rt 22,Gg.Kedondong Rt 03,Kec.Teluk Bayur	30/07/2024	Kebakaran Rumah	-	2 jam Pemadaman,20 Personil Damkar,10 personil TRC, 7 Unit Mobil Damkar



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
45.	Jl. Murjani III Gg.Power ranger Rt 11, Kel. Gunug Panjang,Kec.Tanjung redeb	15/08/2024	Kebakaran Rumah	-	2 jam Penanganan,2 Personil Damkar,1 Unit Mobil Damkar
46.	Jl. H.A.R.M Ayoeb Gg.Rahmat,Kelurahan Gunung Tabur,Kecamatan Gunung Tabur	16/08/2024	Kebakaran Rumah Bangsalan	-	1 jam Penanganan,25 Personil Damkar,4 Personil TRC,5 Unit Mobil Damkar
47.	Jl.Jendral Sudirman, Keluirahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb	30/08/2024	Kebakaran Gudang SDN 004	-	1 jam Penanganan,10 Personil Damkar,6 personil TRC,2 Unit Mobil Damkar
48	Kecamatan Batu Putih	15/09/2024	Gempa Bumi	-	1 jam monotoring pasca gempa bumi, 2 personil BPBD, 1 Unit mobil operasional
49.	Jl. Kandang Muntik Strat 4. Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur	15/09/2024	Kebakaran Gudang	-	1 jam Penanganan,10 Personil Damkar,2 Unit Mobil Damkar
50.	Kampung Long gie, Kecamatan Kelay	20/09/2024	Kebakaran Rumah	-	1 jam Penanganan,10 Personil Damkar,6 personil TRC,2 Unit Mobil Damkar
51.	Kampung Suaran Rt 01,02,03 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung	27/09/2024	Banjir	-	3 hari penanganan, 15 personil TRC,2 unit Mobil Operasional
52.	Kampung Malinau (Areal PT.NPN),	02/10/2024	Kebakaran Mes Karyawan	-	1 jam Pemadaman, 2 personil Damkar, 1



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
	Kecamatan Segah				unit mobil peralatan
53.	Jl. Bulalung Rt 12, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan	11/10/2024	Kebakaran Rumah	-	2 jam Pemadaman, 2 personil Damkar, 2 unit mobil Damkar
54.	Jl. Gunung Panjang Rt 03, Kelurahan Gunung Panjang, Kec. Gunung Panjang	16/10/2024	Kebakaran Tempat Pembakaran Bata	-	1 jam Penanganan, 10 Personil Damkar, 1 Unit Mobil Damkar
55.	Jl. Gatot subroto Gg. Jeruk Rt 03, Kelurahan Bedungun, Kec. Tanjung Redeb	11/11/2024	Kebakaran Gedung SMPN 5	-	1 jam Penanganan, 30 Personil Damkar, 6 Personil TRC, 5 Unit Mobil Damkar
56.	Jl. Panglima Iskandar Rt 002, Kampung Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	12/11/2024	Kebakaran Rumah Kontrakan	-	2 jam Penanganan, 2 Personil Damkar, 2 Unit Mobil Damkar
57.	Jl. Poros PT. DLJ rt 02, Kampung Biatan Ulu, Kec. Biatan	14/11/2024	Kebakaran Rumah	-	1 jam Penanganan, 2 Personil Damkar, 1 Unit Mobil Damkar
58.	Jl. Stasiun 3 Rt 13, Kelurahan Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur	14/11/2024	Kebakaran Ringan Rumah Kontrakan	-	1 jam Penanganan, 10 Personil Damkar, 2 Unit Mobil Damkar
59.	Kampung Long Lanuk Rt 01, Kelurahan Sambaliung, Kec. Sambaliung	14/11/2024	Orang Tenggelam	1 jiwa	4 Hari pencarian, 6 Personil TRC, 1 Unit Spedboat
60.	Jl. Kampung Bugis Rt 002, Kecamatan Batu Putih	19/11/2024	Kebakaran Rumah	1 jiwa	1 Jam Penanganan, 2 Personil Damkar, 1 Unit Mobil Damkar
61.	Kampung Tubaan Rt 03, Kecamatan Tabalar	20/11/2024	Kebakaran Rumah Kosong	-	1 Jam Penanganan, 3 Personil Damkar, 2



No	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Keterangan
					Unit Mobil Damkar
62.	Jl.Ahmad Yani (Poros Km 11 Labanan-Kelay), Kec.Teluk Bayur	27/11/2024	Kebakaran Rumah	-	1 Jam Penanganan, 2 Personil Damkar,1 Unit Mobil Damkar
63.	Jl. Raja Alam 2 Rt 002 Kampung Bugis, Kecamatan Batu Putih	08/12/2024	Kebakaran Rumah	-	1 Jam Penanganan, 2 Personil Damkar,1 Unit Mobil Damkar
64.	Jl. Pemuda Gg.Pinang merah Rt 09 dan Gg.Pandan wangi Rt 14,Kelurahan Tanjung Redeb,Kec.Tanjung Redeb	09/12/2024	Kebakaran Rumah Hunian & Rumah Kontrakan	-	2 jam Penanganan,30 Personil Damkar,6 Personil TRC,7 Unit Mobil Damkar
65.	Kampung Pилanjau Rt 01, Kelurahan Sambaliung, Kec.Sambaliung	10/12/2024	Kebakaran Rumah	-	Tidak Ditangani

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bapelitbang di tataran daerah.

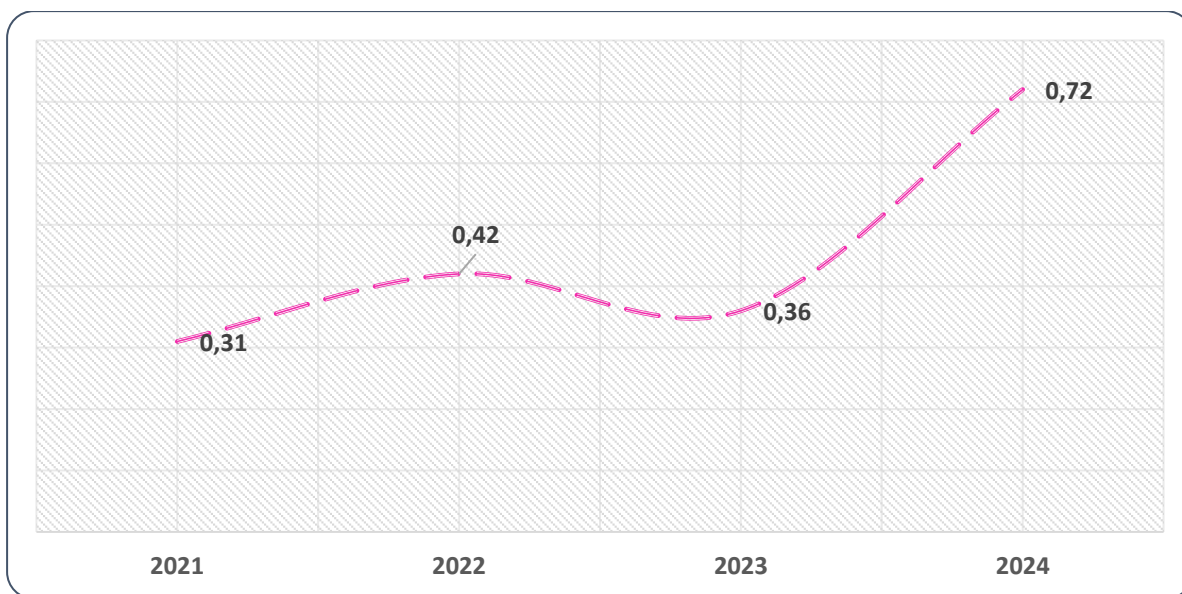
c. Indeks Ketahanan Daerah

Capaian keberhasilan penanggulangan bencana dapat dilihat dari beberapa indikator, termasuk penurunan angka kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkannya, peningkatan responsifitas dalam penanganan bencana, serta pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana. Selain itu, keberhasilan juga tercermin dari efektivitas koordinasi antar instansi terkait, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.



Selain indikator diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) juga menjadi indikator yang dapat digunakan mengukur keberhasilan capaian terhadap kegiatan penanggulangan bencana. IKD juga dapat menjadi dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Dengan menggunakan IKD, daerah dapat mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengurangi risiko bencana. IKD juga dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko bencana.

Gambar II.16
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun capaian ini masih masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya capaian kinerja pada beberapa indikator, antara lain restorasi sungai untuk ancaman banjir, perlindungan daerah untuk tangkapan air untuk ancaman banjir, restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.



7. Demografi

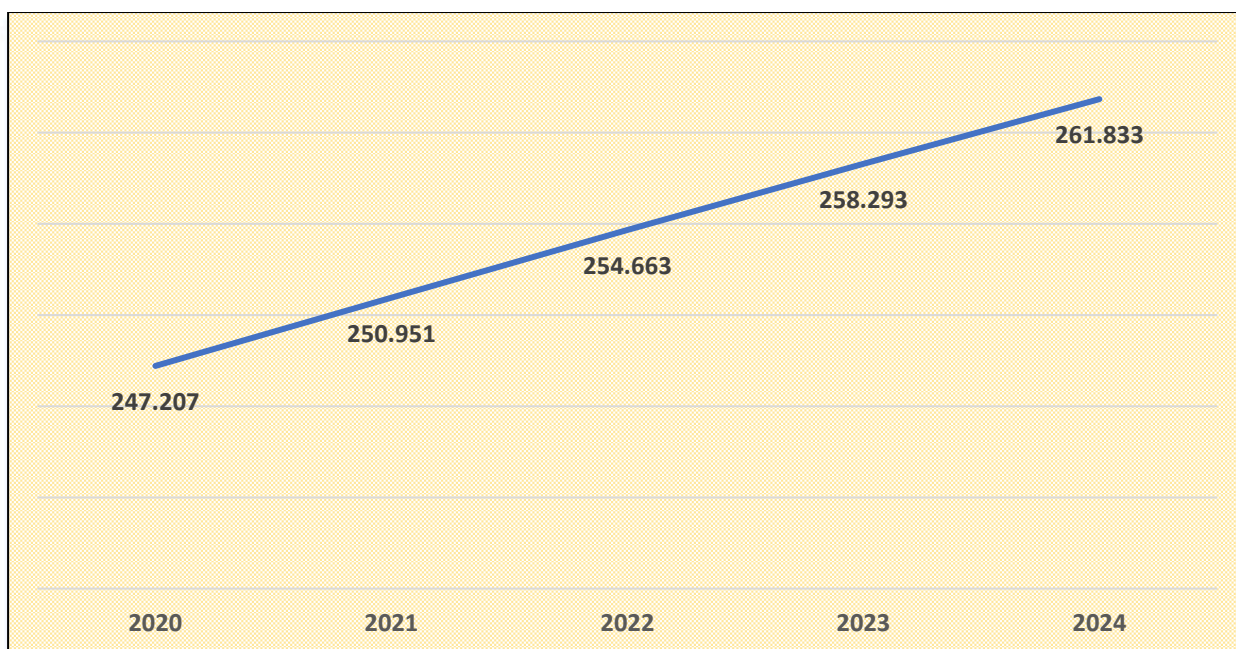
a. Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu pemerintahan. Tanpa adanya penduduk, suatu pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, penduduk merupakan potensi utama dalam pembangunan, sekaligus penerima manfaatnya. Dalam konteks pengembangan wilayah, peran penduduk sangat strategis sebagai sumber daya manusia yang mengelola dan memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan. Penduduk dapat menjadi aset maupun beban pembangunan, tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Penduduk berperan sebagai objek sekaligus subjek dari pembangunan. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagai subjek pembangunan berarti penduduk berperan sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan. Sehingga data dan informasi tentang kependudukan sangat diperlukan untuk menetapkan program prioritas daerah.

Ketersediaan data kependudukan di Kabupaten Berau akan memberikan beberapa manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Pertama, dengan adanya data kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Berau dapat merumuskan kebijakan yang mampu mendistribusikan sumber daya yang tersedia secara merata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. Kedua, dengan tersedianya data kependudukan, Pemerintah Kabupaten Berau mampu memetakan sumber daya manusia yang dimiliki beserta kualitasnya untuk dapat dikelola dengan baik sehingga pembangunan di Kabupaten Berau dapat berjalan secara optimal. Ketiga, ketersediaan data kependudukan di Kabupaten Berau juga membuat Pemerintah Kabupaten Berau mampu merumuskan kebijakan yang dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan kependudukan seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Terdapat beberapa indikator-indikator penting yang berhubungan dengan penduduk. Beberapa diantaranya adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, serta rasio ketergantungan.



Gambar II.17
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

Jumlah penduduk menjadi data dasar yang selalu menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat. Tingginya jumlah penduduk pada suatu wilayah akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, kelaparan, dan sebagainya. Namun, rendahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah juga dapat menghambat pembangunan pada suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan atau justru kelemahan bagi suatu daerah. Jika jumlah penduduk yang besar mampu dikelola dengan baik sehingga memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka hal ini dapat mempercepat pembangunan suatu daerah. Jika jumlah penduduk yang besar tidak mampu dikelola dengan baik maka semakin tinggi pula beban pemerintah daerah. Untuk mengetahui kondisi jumlah penduduk Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir, tren pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 261.833 jiwa, menjadikannya sebagai tahun dengan jumlah penduduk tertinggi selama kurun lima tahun terakhir. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi terhadap program keluarga berencana dan perencanaan keluarga sejahtera.



Tabel II.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

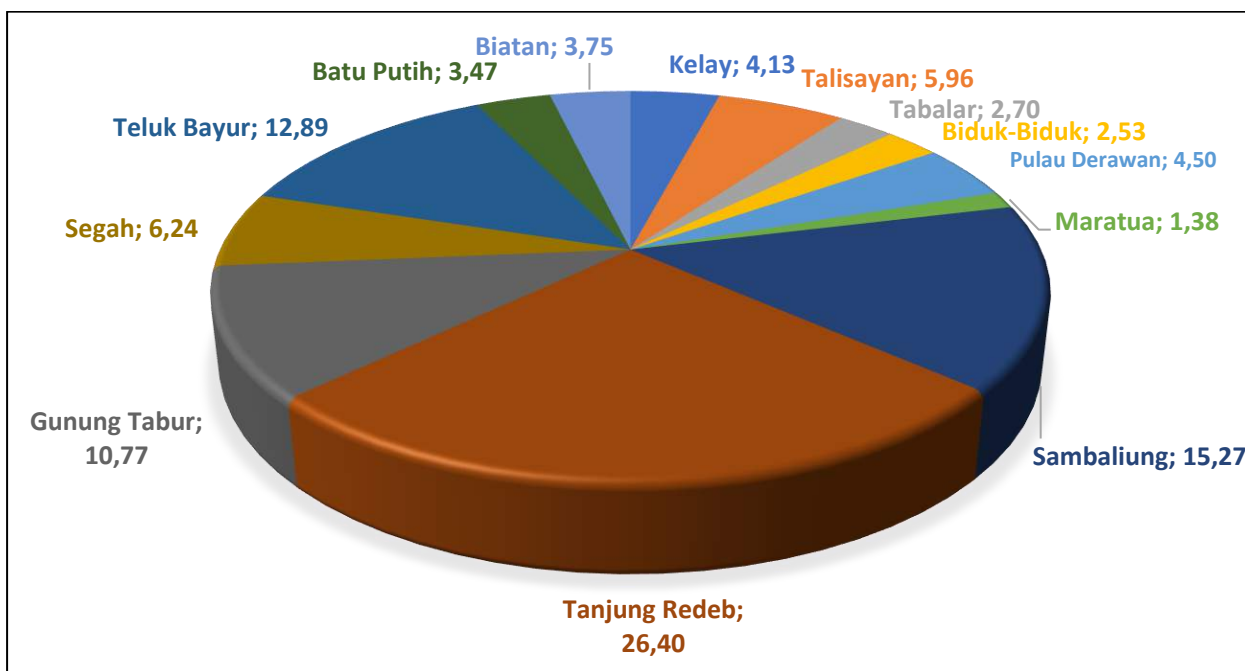
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelay	8.928	9.375	9.839	10.317	10.810
2.	Talisayan	14.565	14.833	15.096	15.353	15.601
3.	Tabalar	6.820	6.886	6.948	7.005	7.057
4.	Biduk-biduk	6.587	6.605	6.618	6.627	6.630
5.	Pulau Derawan	11.303	11.433	11.558	11.675	11.784
6.	Maratua	3.652	3.648	3.642	3.634	3.622
7.	Sambaliung	36.661	37.503	38.342	39.168	39.981
8.	Tanjung Redeb	70.994	70.597	70.160	69.671	69.132
9.	Gunung Tabur	24.929	25.738	26.558	27.383	28.211
10.	Segah	14.320	14.816	15.321	15.830	16.343
11.	Teluk Bayur	31.031	31.724	32.412	33.090	33.755
12.	Batu Putih	8.810	8.890	8.966	9.035	9.097
13.	Biatan	8.607	8.903	9.203	9.505	9.810
Berau		247.207	250.951	254.663	258.293	261.833

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

Selain jumlah penduduk, indikator kependudukan lainnya yang digunakan adalah distribusi penduduk. Nilai dari distribusi penduduk di dapat dari jumlah penduduk yang tinggal pada suatu kecamatan dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, distribusi penduduk dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang tinggal di suatu kecamatan. Data distribusi ini berguna untuk melihat pola persebaran penduduk di Kabupaten Berau. Distribusi penduduk tahun 2024 menunjukkan konsentrasi tertinggi di empat kecamatan: Tanjung Redeb (69.132 jiwa atau 26,40 persen), Sambaliung (39.981 jiwa atau 15,27 persen), Teluk Bayur (33.755 jiwa atau 12,89 persen), dan Gunung Tabur (28.211 jiwa atau 10,77 persen). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Maratua, dengan 3.622 jiwa (1,38 persen). Banyaknya penduduk yang memilih tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb ini dikarenakan kecamatan ini merupakan daerah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Berau. Selain itu, kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan olahraga di Kecamatan Tanjung Redeb membuat penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan ini.



Gambar II.18
Distribusi Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2024



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Selain jumlah dan distribusi penduduk, indikator kependudukan lainnya adalah rasio dan kepadatan penduduk. Indikator kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni dalam satuan kilometer persegi (km^2). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang wilayah konsentrasi untuk pemukiman penduduk, memberikan gambaran apakah suatu wilayah sudah mencapai batas maksimum dalam menampung penduduk atau tidak. Secara umum, kepadatan penduduk memiliki pola yang sama dengan distribusi penduduk. Dimana wilayah di perkotaan dan sekitarnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang jauh dari daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan memiliki daya tarik yang kuat seperti kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, hiburan, heterogenitas lapangan pekerjaan, fasilitas berolahraga yang cukup lengkap dan standar hidup yang tinggi.

Di Kabupaten Berau, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Tanjung Redeb. Kecamatan ini merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Berau dengan luas wilayah sebesar 24.42 km^2 atau sekitar 0,07 persen dari



total total luas wilayah Kabupaten Berau. Pada tahun 2024, kecamatan ini memiliki kepadatan 2.830,96,52 km² atau terdapat 2.830 hingga 3.831 jiwa penduduk per 1 km². Tingginya angka kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung Redeb dikarenakan Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota Kabupaten Berau sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap segala jenis sarana dan prasarana dan prasarana.

Berdasarkan Tabel II.13, dapat terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Berau masih belum merata. Padahal kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini karena semakin banyak penduduk yang tinggal disuatu wilayah maka dapat menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, kesejahteraan, keamanan, kerusakan lingkungan, dan kelangkaan bahan pangan (Chritiani, Tedjo, & Martono, 2018). Oleh karena itu, pemerataan penduduk serta pengendalian jumlah penduduk menjadi hal yang harus terus diupayakan.

Tabel II.17
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Kelay	6.556,54	10.810	1,65	172,77
Talisayan	1.621,57	15.601	9,62	108,43
Tabalar	1.837,34	7.057	3,84	108,23
Biduk-biduk	2.429,97	6.630	2,73	102,01
Pulau Derawan	4.423,99	11.784	2,66	105,05
Maratua	5.616,26	3.622	0,64	97,38
Sambaliung	2.163,37	39.981	18,48	111,95
Tanjung Redeb	24,42	69.132	2830,96	106,94
Gunung Tabur	1.963,32	28.211	14,37	117,48
Segah	5.241,29	16.343	3,12	139,25
Teluk Bayur	316,98	33.755	106,49	110,81
Batu Putih	3.575,30	9.097	2,54	115,72
Biatan	1.192,03	9.810	8,23	118,97
2024	36.962,37	261.833	7,08	113,77
2023	36.962,37	258.293	6,99	114,29
2022	36.962,37	254.663	6,89	114,83
2021	36.962,37	250.951	6,79	115,37
2020	36.962,37	247.207	6,69	115,92

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau



c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 tercatat sebesar 1,37 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Berau dalam satu tahun terakhir bertambah sebesar 1,37 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau sebesar 1,16 persen selama kurun waktu 2020-2024 lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 1,93 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau diantaranya adalah tingginya angka kelahiran dan banyaknya pendatang yang masuk ke Kabupaten Berau. Salah satu daya tarik yang membuat pendatang tertarik tinggal di Kabupaten Berau adalah keberadaan perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dimana kedua sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Berau.

Meningkatnya jumlah penduduk akan berakibat terhadap beberapa hal. Pada sisi ekonomi, adanya penambahan jumlah penduduk dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh penduduk Kabupaten Berau. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk akan memperluas pasar perekonomian dan dengan adanya perluasan perekonomian akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Walaupun meningkatnya jumlah penduduk dapat meningkatkan perekonomian, pertumbuhan penduduk juga dapat mempengaruhi kondisi lingkungan alam sekitar. Adanya penambahan penduduk akan membuat lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal semakin banyak dan ini akan berakibat pada lahan hijau yang semakin sedikit. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Hal ini dapat terjadi karena lapangan pekerja yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada. Pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat terpecahkan.



Tabel II.18
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2021 (Persen)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2022 (Persen)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022 - 2023 (Persen)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2023 - 2024 (Persen)
1.	Kelay	5,01	4,95	4,86	4,78
2.	Talisayan	1,84	1,77	1,70	1,62
3.	Tabalar	0,97	0,90	0,82	0,74
4.	Biduk-biduk	0,27	0,20	0,14	0,05
5.	Pulau Derawan	1,15	1,09	1,01	0,93
6.	Maratua	-0,11	-0,16	-0,22	-0,33
7.	Sambaliung	2,30	2,24	2,15	2,08
8.	Tanjung Redeb	-0,56	-0,62	-0,70	-0,77
9.	Gunung Tabur	3,25	3,19	3,11	3,02
10.	Segah	3,46	3,41	3,32	3,24
11.	Teluk Bayur	2,23	2,17	2,09	2,01
12.	Batu Putih	0,91	0,85	0,77	0,69
13.	Biatan	3,44	3,37	3,28	3,21
Berau		1,51	1,48	1,43	1,37

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

d. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada periode waktu tertentu. Nilai rasio jenis kelamin menyatakan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk perencanaan pembangunan berdasarkan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Selama lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Berau tidak mengalami perubahan, selalu didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin di Kabupaten Berau bernilai 115,92 yang artinya terdapat 115 hingga 116 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan di Kabupaten Berau. Kondisi ini kemungkinan besar terjadi karena dampak sektor perekonomian di Kabupaten Berau yang didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Dimana pasar



tenaga kerja dari kedua sektor tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi tenaga kerja laki-laki. Namun kemudian terjadi penurunan di tahun 2022 hingga 2024 menjadi 113 - 114 orang. Penurunan angka *sex ratio* pada tahun 2024 di Kabupaten Berau dapat disebabkan karena banyaknya PHK di perusahaan tambang yang mana mayoritas pegawainya adalah laki-laki. Sehingga dengan asumsi penduduk perempuan tetap maka *sex ratio* akan menurun. Dinamika yang terjadi di Kabupaten Berau diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun ini ada pergeseran atau penurunan nilai *ratio*. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih besar dari penduduk perempuan.

Tabel II.19
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2020	132.719	114.488	247.207	115,92
2	2021	134.429	116.522	250.951	115,37
3	2022	136.120	118.543	254.663	114,83
4	2023	137.757	120.536	258.293	114,29
5	2024	139.351	122.482	261.833	113,77

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

e. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Piramida penduduk merupakan grafik yang memuat informasi terkait struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dalam piramida penduduk, sumbu horizontal menunjukkan jumlah penduduk. Sedangkan sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk. Piramida penduduk ini kaya akan informasi, dari satu grafik informasi seperti *sex ratio* untuk setiap kelompok umur dapat diketahui. Selain itu, dapat menggambarkan komposisi penduduk usia produktif dan non produktif dalam waktu yang cepat. piramida penduduk di Kabupaten Berau berjenis piramida penduduk muda (ekspansif). Piramida ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau tergolong tinggi dan sebagian besar penduduk di Kabupaten Berau berada dalam kelompok umur muda. Hal ini diketahui dari lebih panjangnya grafik pada kelompok umur penduduk muda dibandingkan panjang grafik pada kelompok umur penduduk tua. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda di Kabupaten Berau



dapat menjadi anugerah atau menjadi bencana. Hal ini dikarenakan kaum pemuda memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan semangat yang tinggi untuk belajar.

Selain itu, kaum pemuda juga memiliki kekuatan fisik dan mental yang prima sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, banyaknya kaum pemuda dapat menjadi anugerah jika Pemerintah Kabupaten Berau dapat mengelola dengan baik segala potensi yang dimiliki oleh kaum pemuda sehingga mereka berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Berau. Namun sebaliknya, hal ini dapat menjadi bencana apabila banyaknya kaum pemuda ini tidak diiringi dengan kualitas yang memadai sehingga dapat menyebabkan tidak terserapnya mereka dalam pasar tenaga kerja dan akhirnya menjadi beban masyarakat. Untuk itu, kaum pemuda di Kabupaten Berau harus dipersiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing dalam menghadapi segala tantangan pembangunan. Hal ini tentu saja menjadi suatu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar mampu memberdayakan generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri sehingga dapat bersaing di berbagai aspek kehidupan.

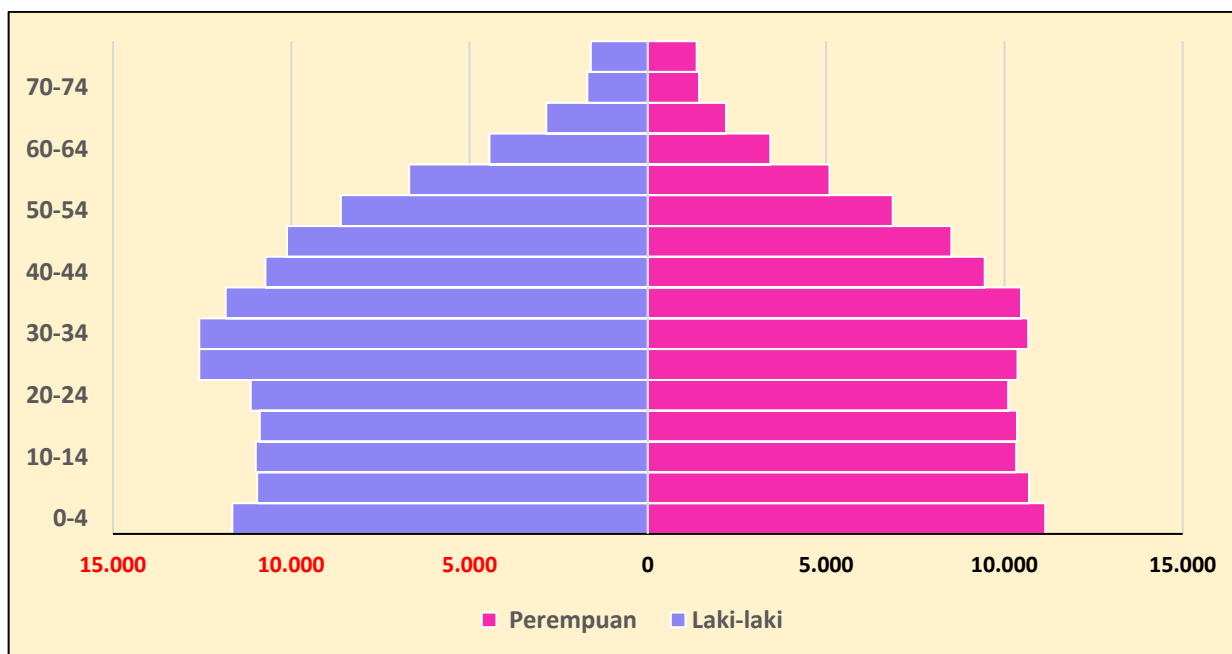
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan yang berkaitan dengan investasi modal manusia. Sehingga pengeluaran-pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan lain-lain adalah investasi modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan input lain dalam produksi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi pendidikan juga bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan, serta pengetahuan akan keluarga berencana, serta meningkatkan dalam partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum, dan lain lain.

Penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dibedakan menjadi penduduk produktif dan penduduk tidak produktif. Piramida penduduk Kabupaten Berau tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia muda (0–14 tahun) dan usia produktif (15–64 tahun), dengan proporsi yang relatif seimbang. Kondisi ini merupakan peluang bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan jika dikelola dengan baik. Penduduk usia produktif mencapai 184.920 jiwa, usia muda 65.768 jiwa, dan usia lanjut 11.145 jiwa. Penduduk muda biasanya belum bekerja dan masih bergantung pada orang tua, sedangkan penduduk lanjut usia umumnya tidak lagi produktif. Selanjutnya juga bisa diketahui rasio ketergantungan atau biasa disebut dengan rasio beban tanggungan adalah perbandingan antara penduduk usia yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk



usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini dapat memberikan gambaran secara kasar terkait besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar II.19
Piramida Penduduk Kabupaten Berau, Tahun 2024



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa komposisi penduduk Kabupaten Berau sebagian besar adalah penduduk usia produktif dengan trend yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Begitu pula dengan penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas menunjukkan trend yang terus meningkat. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dan usia produktif, pada tahun 2020 angka beban ketergantungan di Kabupaten Berau sebesar 42,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Berau menanggung sekitar 42 hingga 43 penduduk usia belum dan tidak produktif lagi.

Jika melihat Rasio Ketergantungan Kabupaten Berau pada tahun 2024 maka diketahui bahwa sebesar 41,59 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41–42 penduduk usia nonproduktif. Beban tanggungan penduduk tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun. Untuk mengoptimalkan bonus demografi, diperlukan investasi pada sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan



lapangan kerja, serta dukungan bagi wirausaha dan UMKM.

Tabel II.20
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Tahun	Umur 0-14 tahun	Umur 15-64 tahun	Umur > 65 tahun	Rasio beban tanggungan
2020	64.330	174.030	8.847	42,05
2021	64.774	176.831	9.346	41,92
2022	65.165	179.598	9.900	41,80
2023	65.487	182.308	10.498	41,68
2024	65.768	184.920	11.145	41,59

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

f. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Berau, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, memiliki beragam kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayahnya. Masyarakat adat di Kabupaten Berau umumnya hidup di pedalaman atau daerah yang terpencil, menjaga tradisi, budaya, dan kearifan lokal mereka. Beberapa kelompok masyarakat adat yang ada di Kabupaten Berau antara lain:

1. Suku Dayak: Dayak adalah kelompok etnis pribumi yang tersebar di Kalimantan, termasuk Kabupaten Berau. Mereka terdiri dari berbagai sub-suku seperti Dayak Bahau, Dayak Kenyah, Dayak Tidung, dan lain-lain. Suku Dayak cenderung memiliki kehidupan yang berbasis pada kegiatan pertanian, berburu, dan pengumpulan hasil hutan.
2. Suku Bajau: Suku Bajau adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah pesisir di Kabupaten Berau. Mereka dikenal sebagai kelompok yang mahir dalam kegiatan pelayaran, perikanan, dan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan laut.
3. Suku Banua: Suku Banua di Kabupaten Berau merupakan salah satu komunitas lokal yang secara genealogis dan kultural berkelindan dengan rumpun Dayak di wilayah timur Kalimantan.

Masyarakat adat di Kabupaten Berau memiliki kehidupan yang sering kali terpencil dan terisolasi dari pusat perkotaan, tetapi mereka memiliki nilai kearifan lokal yang kaya. Mereka mengandalkan sumber daya alam lokal untuk kehidupan



sehari-hari mereka dan mempertahankan tradisi turun temurun dalam mengelola dan melestarikan lingkungan mereka. Pemerintah, perusahaan swasta dan berbagai organisasi masyarakat sipil telah berupaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, serta untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang inklusif bagi mereka. Hal ini harus terus dilakukan agar keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penduduk Kabupaten Berau juga dapat hidup secara damai dan adil serta menjadi bagian penting dalam berkehidupan masyarakat Kabupaten Berau.

g. Proyeksi Demografi Kabupaten Berau

Proyeksi penduduk digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada akhir periode pembangunan jangka menengah, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 278,37 ribu jiwa, dengan kepadatan 7,53 jiwa/km². Rasio jenis kelamin menunjukkan tren menurun mendekati 100, dengan angka 111,30 pada tahun 2029, menandakan pertumbuhan penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan.

Rasio ketergantungan meningkat menjadi 41,86 persen pada tahun 2029, menandakan bertambahnya penduduk usia nonproduktif. Penduduk usia muda diproyeksikan mencapai 66,78 ribu jiwa, usia produktif 196,23 ribu jiwa, dan usia lanjut 15,37 ribu jiwa. Komposisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau masih berada dalam jendela bonus demografi hingga akhir periode tersebut.

Tabel II.21
Proyeksi Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	265,3	268,69	271,99	275,21	278,37
Laki-laki	140,9	142,4	143,86	145,27	146,63
Perempuan	124,41	126,29	128,14	129,95	131,74
Rasio Jenis Kelamin	113,25	112,76	112,27	111,79	111,30
Kepadatan Penduduk	7,18	7,27	7,36	7,45	7,53
Rasio Ketergantungan	41,54	41,55	41,59	41,69	41,86
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	66,00	66,23	66,44	66,62	66,78
15–64	187,45	189,84	192,11	194,22	196,23
65+	11,86	12,64	13,46	14,36	15,37



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi yang diukur melalui berbagai indikator strategis. Analisis terhadap kesejahteraan ini mencakup dua dimensi utama: kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi riil suatu daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun.

Tabel II.22
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,51	1,99	2,92	2,18	1,92
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,48	7,04	3,31	5,74	7,88
C	Industri Pengolahan	-0,32	-3,09	3,63	4,07	4,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,33	0,69	3,34	8,38	12,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,02	4,13	5,75	5,51	7,51
F	Konstruksi	-9,17	0,75	7,34	9,10	10,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,58	2,40	6,00	5,34	6,83
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,58	5,16	6,10	6,35	7,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,63	1,48	7,72	5,63	9,44
J	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,44	6,31	5,39	7,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,27	8,53	10,23	8,24
L	Real Estate	1,37	1,94	2,85	1,29	4,55
M, N	Jasa Perusahaan	-5,65	6,01	5,17	6,14	7,63
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,45	0,74	6,26	9,41	24,36
P	Jasa Pendidikan	4,88	4,54	4,77	4,07	5,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,41	21,14	4,73	4,81	4,89
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-2,04	1,94	6,84	5,95	8,22
PDRB		-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

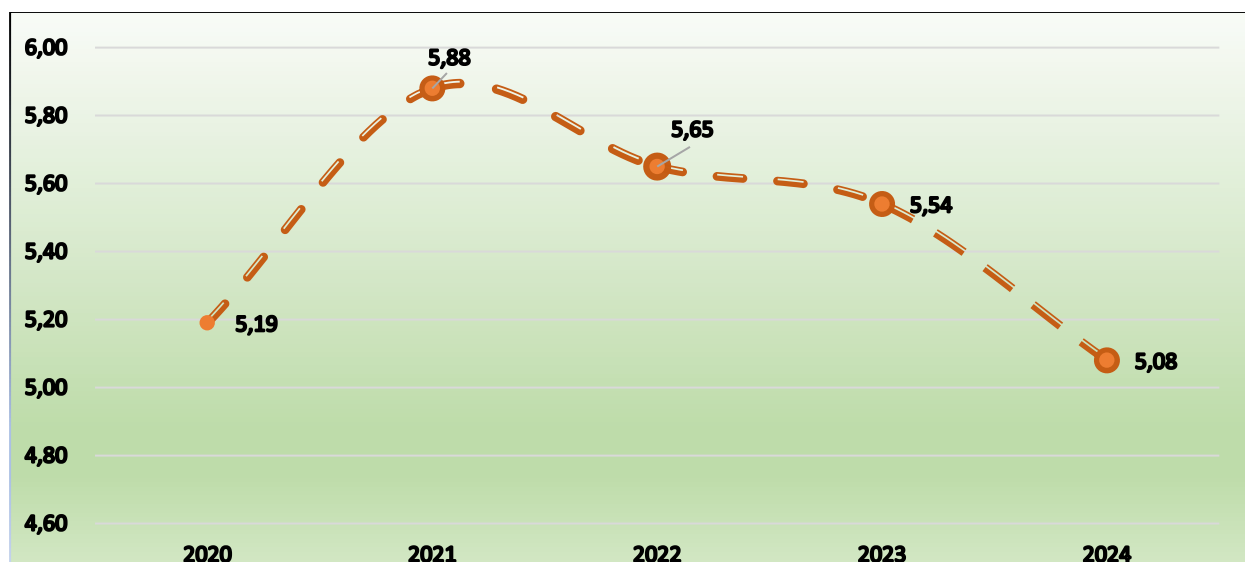


Perekonomian Kabupaten Berau sempat mengalami kontraksi signifikan sebesar - 3,32 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, seiring dengan upaya pemulihan oleh pemerintah pusat dan daerah, perekonomian kembali tumbuh secara positif hingga mencapai 7,28 persen pada tahun 2024.

b. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 5,88 persen, sebagai dampak pandemi. Namun, angka tersebut menurun hingga mencapai 5,08 persen pada tahun 2024, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan sosial ekonomi yang dilaksanakan secara konsisten.

Gambar II.20
Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Berau menunjukkan tren peningkatan. Berada pada rentang 500-600 ribuan per kapita per bulan, pada tahun 2022 GK ini meningkat hingga mencapai Rp. 624.948,00 per kapita per bulan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 7,95 persen



menjadi Rp. 568.500,00. Besarnya peningkatan biaya hidup ini diindikasikan terjadi disebabkan oleh fenomena COVID-19 yang melumpuhkan sektor perekonomian Kabupaten Berau termasuk di dalamnya alur pasokan makanan dan non makanan. Kesulitan-kesulitan dalam hilir mudik pasokan barang berpotensi meningkatkan harga atas setiap komoditas dan berdampak pada peningkatan batas GK.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Berau tertinggi berada pada tahun 2021 dengan P1 sebesar 0,95 atau meningkat sebesar lebih dari 35 persen dibanding P1 tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Berau memang cukup dalam dan membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus untuk mengentaskannya. Sementara itu, pada P2 nilainya juga kian meningkat hingga tahun 2022 namun mengalami penurunan hingga 0,07 pada tahun 2024. Angka P2 ini menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Berau cenderung tidak terlalu intens. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok penduduk berkategori miskin cenderung tidak terlalu berbeda dan ketimpangan antar penduduk miskin juga cenderung rendah.

Tabel II.23
Indikator Kemiskinan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	568.500	595.550	624.948	677.819	731.250
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	12,30	13,62	13,31	13,26	12,35
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,70	0,95	0,98	0,16	0,41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,20	0,22	0,01	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Apabila dikaitkan dengan penurunan persentase penduduk miskin (P0) maka dapat diindikasikan terdapat ketimpangan yang besar antar penduduk di Kabupaten Berau. Dikarenakan, dengan P0 tahun 2022 yang menurun justru P1 tahun 2022 hampir mendekati 1. Secara lebih sederhana dapat dinyatakan, bahwa kelompok penduduk yang



berada di atas GK dengan kelompok penduduk yang berada di bawah GK memiliki ketimpangan rata-rata pengeluaran per kapita yang terlampau besar. Ketimpangan rata-rata pengeluaran ini secara lebih lanjut dapat juga digunakan untuk menyatakan ketimpangan pendapatan. Hal ini digunakan dengan asumsi bahwa nominal yang diterima penduduk seluruhnya dikeluarkan sebagai pengeluaran. Dalam kacamata besar suatu perekonomian, ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan di antara individu. Ketimpangan pendapatan yang tidak terselesaikan memberikan dampak yang cukup besar pada beberapa bidang, beberapa di antaranya yaitu sosial, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang sosial, ketimpangan pendapatan menciptakan sekelompok marginal yang tidak cukup setara dalam pandangan sosial, Hal ini dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan kecemburuan-kecemburuan sosial antar kelompok pendapatan. Sementara itu pada bidang kesehatan dan pendidikan, ketimpangan pendapatan mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kelompok dengan pendapatan yang rendah mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Sementara itu pada, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kelompok dengan pendapatan rendah cenderung tidak memiliki akses terhadap sumber daya atau peluang ekonomi, ini dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, pendapatan yang terdistribusi dengan merata dan berkeadilan penting untuk diusahakan pemerintah daerah.

c. PDRB Perkapita

Untuk mengukur sejauh mana PDRB berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, indikator PDRB per kapita menjadi pisau analisis awal yang penting. Angka ini, yang merepresentasikan rata-rata nilai produksi atau pendapatan yang diatribusikan kepada setiap individu dalam suatu wilayah, memberikan perspektif makro tentang tingkat kemakmuran ekonomi. Kenaikan PDRB per kapita seringkali diasosiasikan dengan potensi peningkatan standar hidup, akses terhadap barang dan jasa yang lebih baik, serta peluang untuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa PDRB per kapita memiliki keterbatasan inheren dalam merefleksikan distribusi kesejahteraan secara riil. Sifatnya yang merupakan nilai rata-rata mengaburkan potensi disparitas pendapatan yang signifikan di



antara kelompok masyarakat yang berbeda. Sebuah wilayah dengan PDRB per kapita yang tinggi bisa saja menyimpan jurang ketimpangan pendapatan yang lebar, di mana sebagian kecil populasi menikmati kekayaan yang besar sementara mayoritas lainnya berpenghasilan rendah.

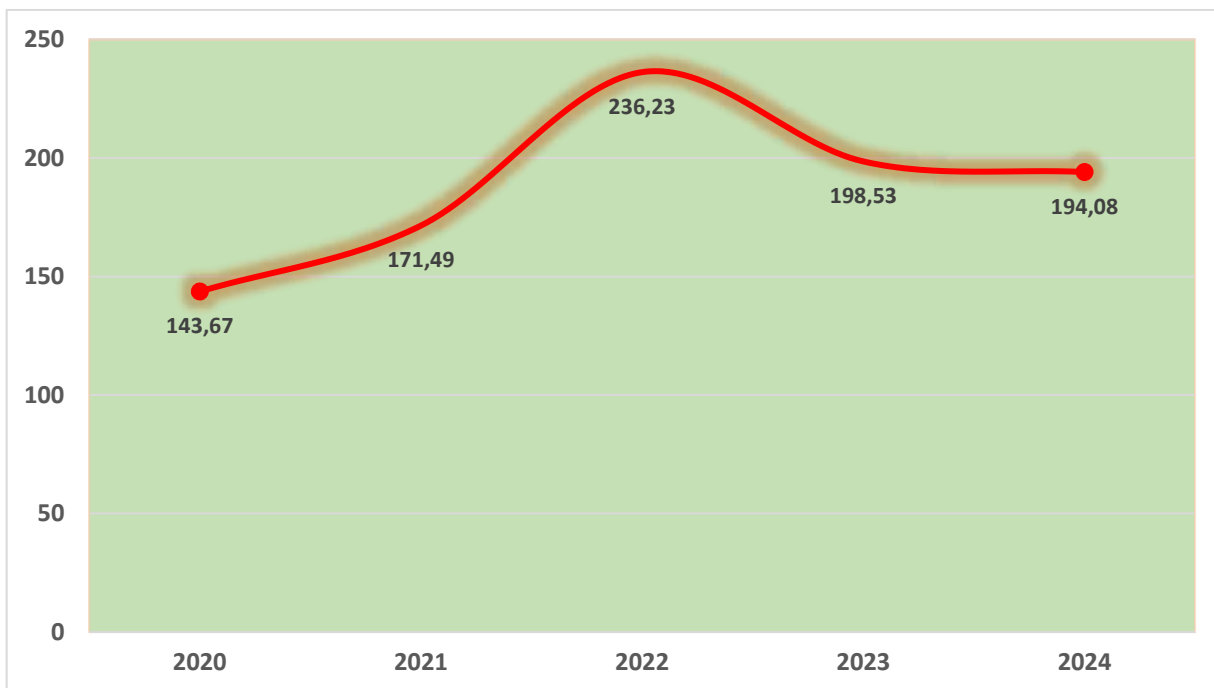
Oleh karena itu, analisis kesejahteraan yang komprehensif tidak dapat hanya bertumpu pada PDRB per kapita. Diperlukan kajian mendalam mengenai distribusi pendapatan, yang dapat diukur melalui berbagai instrumen seperti Indeks Gini atau rasio kuantil pendapatan. Analisis ketimpangan pendapatan akan memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai sebaran manfaat pertumbuhan ekonomi dan mengidentifikasi kelompok masyarakat mana yang mungkin tertinggal.

Dengan demikian, PDRB per kapita berfungsi sebagai sinyal awal atau *proxy* makro tentang potensi kesejahteraan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan akuntabel, para pembuat kebijakan dan analis ekonomi perlu melengkapinya dengan analisis distribusi pendapatan yang cermat. Kombinasi kedua perspektif ini akan memungkinkan perumusan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan gambar dibawah ini terjadinya peningkatan PDRB per Kapita mengindikasikan bahwa pendapatan rata-rata individu di Kabupaten Berau mengalami kenaikan. Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Berau mengalami peningkatan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, PDRB per Kapita mengalami penurunan sebagai dampak langsung dari kontraksi ekonomi agregat akibat pandemi COVID-19. Setelah titik terendah di tahun 2020, PDRB per Kapita menunjukkan pemulihan dan terus mengalami kenaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai puncaknya sebesar 236,23 juta rupiah per kapita pada tahun 2022. Angka ini merefleksikan rata-rata nilai ekonomi per penduduk yang sangat tinggi di tahun tersebut, sangat mungkin dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas unggulan daerah. Namun, setelah mencapai puncak di tahun 2022, PDRB per Kapita mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, dan tercatat sebesar 194,08 juta rupiah per kapita pada tahun 2024.



Gambar II.21
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Penurunan dari puncak 2022 ke 2024 ini mengindikasikan koreksi pada rata-rata nilai ekonomi per penduduk, yang sejalan dengan normalisasi atau penurunan harga komoditas yang mempengaruhi PDRB total ADHB. Meskipun mengalami penurunan dari puncaknya, nilai PDRB per kapita di tahun 2024 (194,08 juta rupiah) namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan nilai di tahun 2020 saat awal pandemi. Pola ini menggarisbawahi sensitivitas rata-rata nilai ekonomi per penduduk terhadap dinamika sektor dominan dan faktor eksternal.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

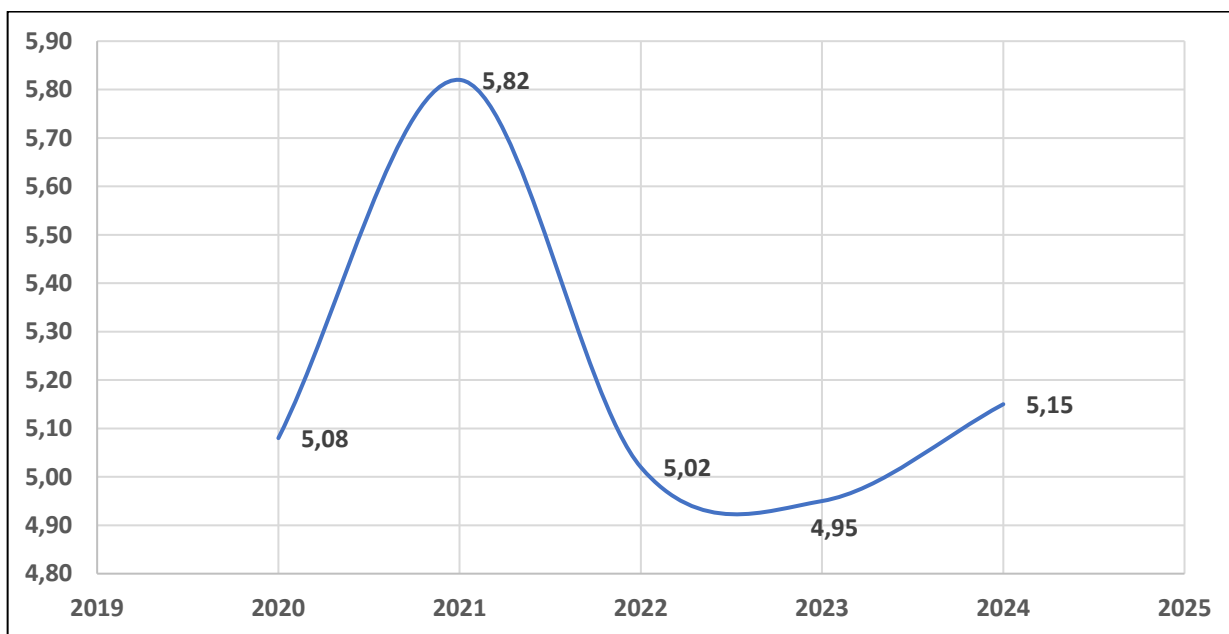
Keadaan ketenagakerjaan pada umumnya dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, artinya bahwa jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Apabila kondisi ini belum dapat tercapai, maka akan terjadi pengangguran. Oleh karena itu, ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang masih menjadi perhatian utama di setiap wilayah khususnya di daerah. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang



seringkali di hadapi daerah adalah masalah pengangguran. Dimana indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan kondisi pengangguran di suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat menilai keberhasilan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. TPT merupakan indikator penting dalam mengukur efisiensi pasar tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2021, TPT mencapai angka tertinggi yaitu 5,82 persen akibat gejolak ekonomi karena pandemi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, TPT menurun menjadi 5,02 dan 4,95 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 5,15 persen pada tahun 2024. Untuk menekan angka pengangguran, diperlukan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. Penciptaan lapangan kerja mandiri dimana penduduk berupaya membuka usaha sendiri, mengembangkan usahanya dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru yang berbasis kepada kemandirian perseorangan.

Gambar II.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Di Kabupaten Berau, TPT tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,82 persen. Dimana kemudian mengalami penurunan di tahun selanjutnya sebesar 0,8 poin persen, sehingga menjadi sebesar 5,02 persen dan turun kembali lagi sebesar 0,07 poin



persen merupakan nilai TPT terendah dalam periode lima tahun terakhir. Adanya penurunan pada tingkat pengangguran menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Berau semakin membaik setelah pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya. Berbagai macam kegiatan dan stimulan di berikan pemerintah daerah agar perekonomian dapat bangkit kembali seperti bantuan UMKM, pemberian latihan kerja dan pelatihan mengelola pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil perikanan, perkebunan dan sebagainya agar memiliki nilai jual lebih dengan harapan bisa lebih mandiri membuka usaha.

Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena naik kembali menjadi 5,15 persen. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 5 sampai 6 penduduk Kabupaten Berau yang menganggur dari 100 penduduk angkatan kerja. Pada dasarnya, pengangguran disebabkan oleh tidak sempurnanya pasar tenaga kerja yang ada di suatu wilayah dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tidak seimbang. Adanya pengangguran terbuka menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum bisa memaksimalkan potensinya dalam kegiatan perekonomian. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Berau terkait adanya program dan kebijakan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal yang bisa dilakukan antara lain memaksimalkan potensi daerah seperti usaha mikro kecil yang bersumber dari produk unggulan daerah atau mempermudah akses modal/perizinan dalam pembangunan usaha baru, serta memberi sinyal kepada para investor untuk lebih banyak menggunakan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

e. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal.

Pemerataan pendapatan menjadi perhatian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai indeks berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Nilai Indeks Gini yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $G < 0,3$: pemerataan tinggi / ketimpangan rendah;

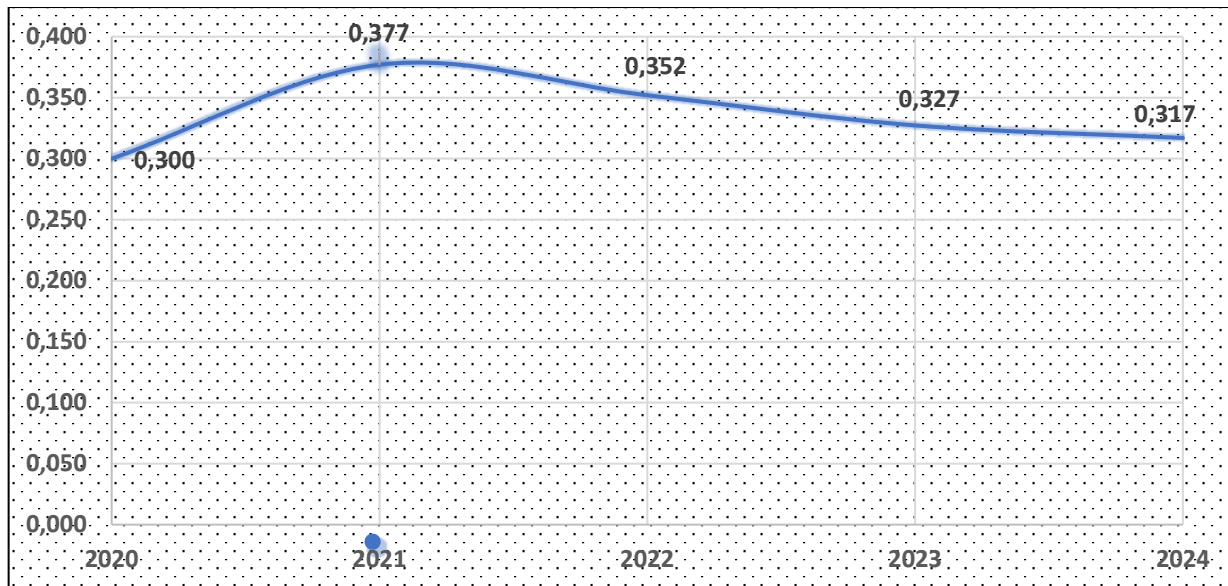


- $0,3 \leq G \leq 0,50$: pemerataan / ketimpangan sedang;
- $G > 0,50$: pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Indeks Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Indeks Gini makin mendekati satu.

Nilai Indeks Gini selalu berada di bawah 0,40, rasio gini Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Sempat meningkat pada tahun 2021 dengan 0,377, tahun 2022 rasio gini kembali turun menjadi 0,352. Walaupun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi yakni dengan kisaran 0,300, penurunan ini menunjukkan indikasi yang positif. Penurunan rasio gini pada tahun 2022, tidak terlepas dari penurunan jumlah penduduk miskin dan pergeseran distribusi pendapatan penduduk menuju kelompok yang tertinggi. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 terus menunjukkan tren menurun dengan harapan lambat laun akan menuju area konsentrasi maksimum yang artinya pendapatan telah terdistribusi secara merata.

Gambar II.23
Indeks Gini Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Dari lima titik masa, tahun 2020 hingga 2025, maka pada tahun 2022 yang penurunannya disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk miskin, pada tahun 2020 justru penurunan rasio gini tersebut tidak disertai dengan penurunan jumlah penduduk



miskin. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan secara umum mencakup rata-rata pengeluaran seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya penduduk miskin. Mengacu pada amanat pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), ketimpangan pada suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada beberapa capaian pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan yang tinggi dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai SDGs, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan, ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan sebagian masyarakat terpinggirkan dari kesempatan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang layak. yang kedua, ketimpangan pendapatan juga berpengaruh pada SDGs kedelapan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja yang layak untuk semua orang. Ketimpangan pendapatan yang besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, serta menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap lapangan kerja yang layak.

Kendati rasio gini Kabupaten Berau cukup berada pada kondisi yang baik, beberapa upaya untuk menekan ketimpangan pendapatan masih terus dapat diusahakan. Beberapa hal yang dapat diupayakan, yaitu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, menciptakan peluang ekonomi yang adil, memperkuat sistem perlindungan sosial, dan mengurangi kesenjangan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kolaborasi antar organisasi pemerintah, bahkan lembaga internasional, dan sektor swasta. Melalui berbagai kolaborasi maka diharapkan dari segi perekonomian dapat membawa perekonomian Kabupaten Berau untuk terus tumbuh positif bahkan menunjukkan percepatan. Sebab melalui masyarakat yang hidup layak dan sejahtera, pendapatan regional per kapita akan meningkat dan selaras dengan hal tersebut pertumbuhan ekonomi juga dapat ditingkatkan.

f. Indeks Pembangunan Manusia

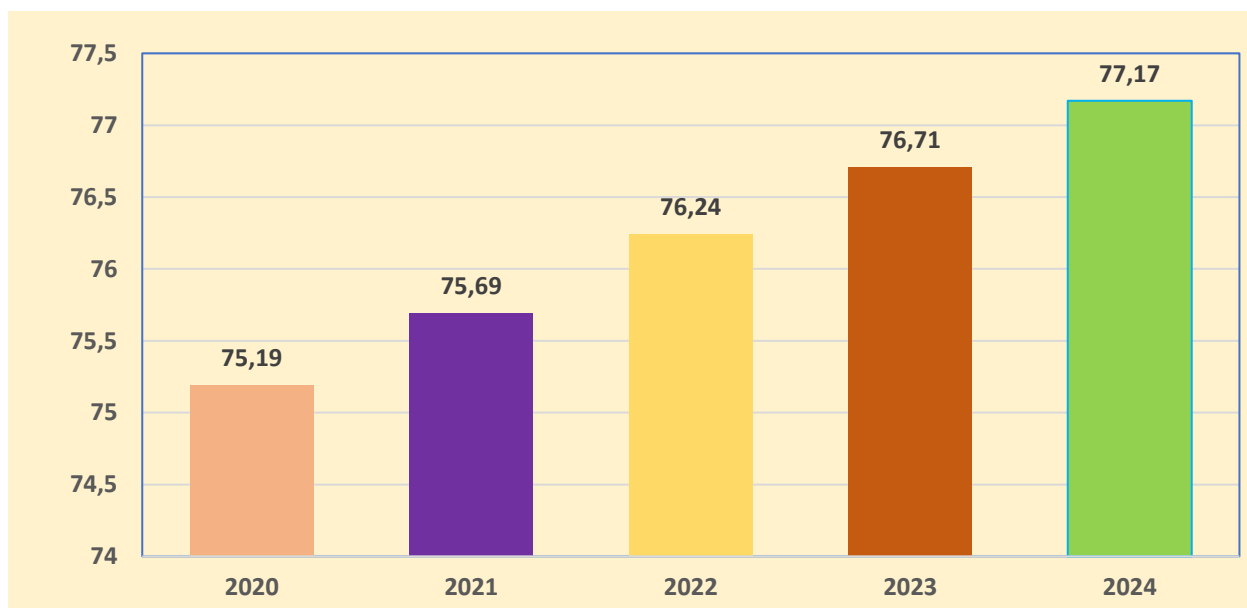
Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan



pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Berau mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan capaian IPM juga diikuti oleh peningkatan komponen penyusunnya, namun pada tahun 2020, pada komponen penyusun IPM terjadi sedikit penurunan pengeluaran per kapita disesuaikan karena adanya pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat selama pandemi berlangsung. Meskipun komponen pengeluaran tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020, namun secara umum IPM Kab. Berau masih memiliki capaian positif hingga tahun 2024 mencapai 77,17.

Gambar II.24
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimana IPM digunakan untuk mengukur bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Konsep yang digunakan di sini adalah manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).



Tabel II.24
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	-	75,19	75,69	76,24	76,71	77,17
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,53	9,54	9,56	9,57
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,06	73,35	73,35	73,45	73,66
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Kapita/Tahun	12.018	12.435	13..095	13.620	14.101

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Jika melihat indikator yang membentuk IPM diketahui bahwa keempat indikator tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Walaupun setiap indikator tidak mengalami kenaikan secara signifikan, namun telah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sangat serius untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberikan pendidikan dan kesehatan yang optimal.

g. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

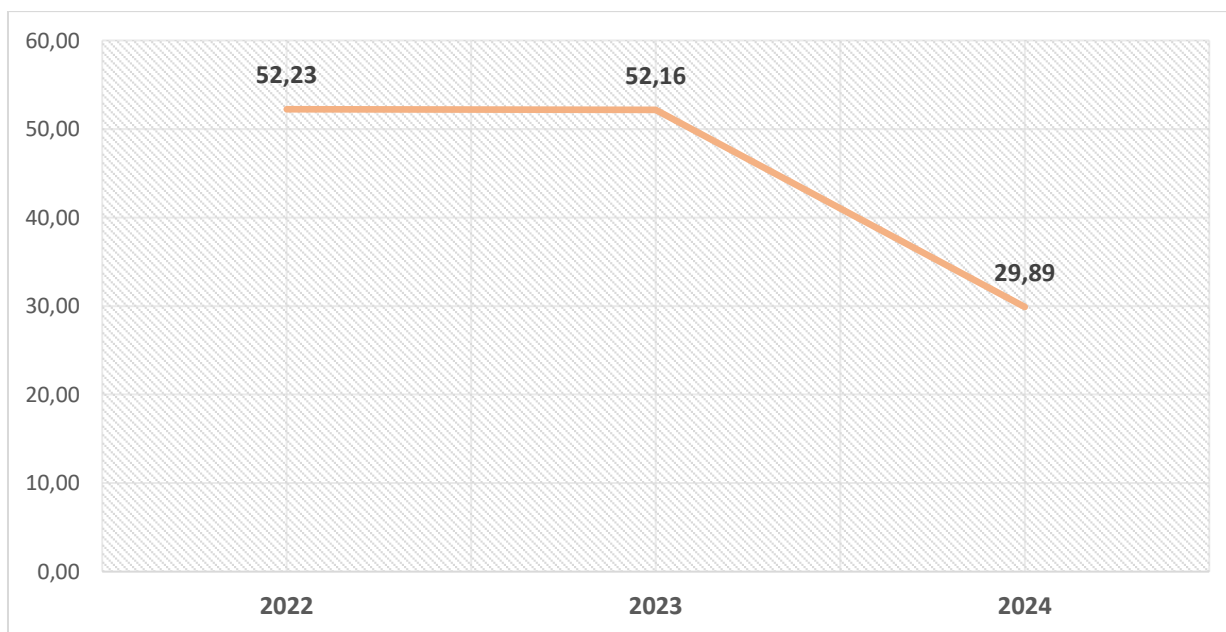
Upaya penanganan masalah kemiskinan memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan. PSKS inilah yang bersama-sama dengan pendamping sosial akan berupaya melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan untuk itu diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat



melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Persentase PPKS yang ditangani Kabupaten Berau selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini terjadi karena bahwa Jumlah individu atau kelompok yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) mengalami pengurangan, kemungkinan karena adanya program penjangkauan, imbauan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Gambar II.25
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Ditangani Kabupaten Berau Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Berau

Kabupaten Berau melalui Dinas Sosial melakukan berbagai upaya antara lain

1. Penjangkauan dan Imbauan:

Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial melakukan upaya penjangkauan dan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah PPKS.

2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial:

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial secara umum dapat membantu mengurangi jumlah PPKS, sehingga mereka dapat mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan.



3. Pendataan yang Akurat:

Data yang akurat dan berkelanjutan tentang PPKS dapat membantu dalam mengukur penurunan dan keberhasilan program-program sosial.

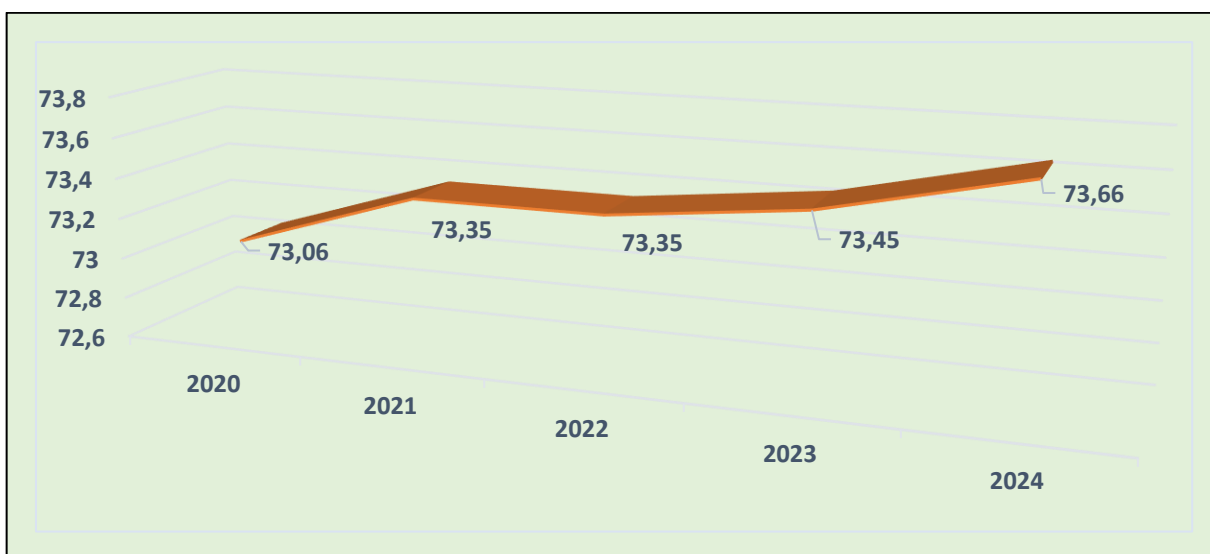
2. Kesehatan Untuk Semua

a. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator atau penilaian derajat Kesehatan suatu wilayah dan digunakan dalam perencanaan program kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Selain itu, AHH juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga AHH rendah

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Gambar II.26
Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Dari indikator Angka Harapan Hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara bertahap dimana Angka Harapan Hidup masyarakat



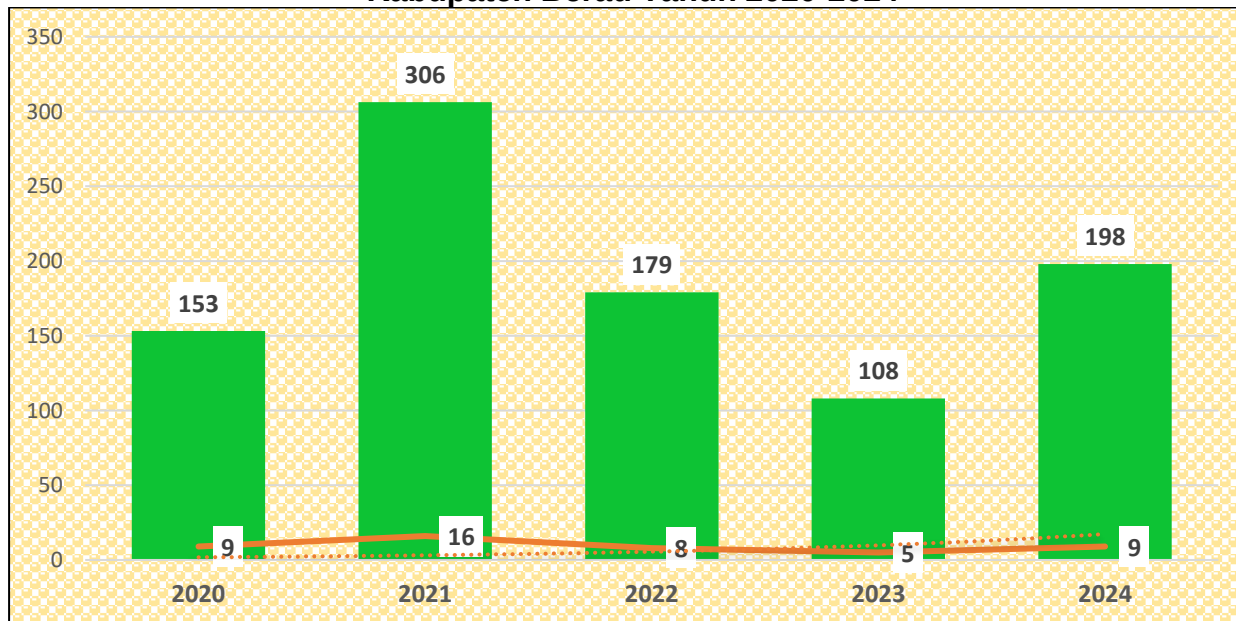
pada tahun 2020 sebesar 73,06 tahun meningkat hingga menjadi 73,66 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 73-74 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu, peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti semakin baik dan mudahnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat oleh masyarakat dan disertai semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Selain itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Berau berupaya menyediakan anggaran urusan kesehatan untuk membiayai pelayanan kesehatan. Selain dari sisi jumlah, anggaran yang dimaksudkan tersebut juga harus memiliki alokasi anggaran yang tepat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup (per 100.000 KLH).



Gambar II.27
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KLH) dan Jumlah Kematian Ibu (Orang)
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Angka kematian ibu di Kabupaten Berau selama kurun waktu 2020 hingga 2024, pernah mencapai posisi tertinggi yaitu 306 per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi pada tahun 2021 namun menurun cukup signifikan di tahun 2022 yaitu mencapai 179 per 100.000 kelahiran hidup, dan turun terus di tahun 2023 menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 198 per 100.000 kelahiran untuk ibu meninggal yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Jika melihat dari jumlah kematian ibu tercatat pada tahun 2021 merupakan tahun dengan kematian ibu cukup tinggi yaitu mencapai 16 orang, sedangkan tahun-tahun berikutnya menurun menjadi di bawah 10 orang kematian ibu.

Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu yang tidak disertai dengan perbaikan Angka Kematian Ibu, mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal. Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu, harus dibangun sinergisme dan sistem rujukan yang kuat antara FKTP (puskesmas) dan FKRTL (rumah sakit), termasuk peningkatan



kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan puskesmas PONEK dan RS PONEK 24 jam selama 7 hari perlu dilakukan termasuk kemampuan SDM untuk memberikan pelayanan PONEK dan PONEK. Selain itu, Rumah Sakit juga perlu melakukan audit kematian khususnya maternal perinatal untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir serta melakukan intervensi sesuai penyebabnya.

c. Angka Kematian Anak Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah banyaknya kematian Anak Balita berusia di atas satu tahun hingga lima tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu atau dapat juga dikatakan probabilitas anak balita meninggal pada rentang usia diatas satu tahun hingga 5 tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup/KLH). Kematian Anak Balita di Kabupaten Berau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 16 kasus atau sebesar 3,06 per 1.000 KLH dan menurun menjadi 10 kasus atau 2,11 per 1.000 KLH sepanjang tahun 2021, dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 6 kasus atau 1,34 per 1.000 KLH. Namun kondisi sebaliknya terjadi tahun 2023 dimana terjadi peningkatan kasus kematian balita menjadi 8 kasus atau sebesar 1,7 per 1.000 KLH. Namun demikian turun kembali menjadi 6 kasus ditahun 2024 atau 1,32 per 1.000 KLH. Namun kondisi penurunan ini tidak menjadikan Pemerintah Kabupaten Berau harus berpuas hati, akan tetapi terus mencari cara agar jumlah kematian balita ini harus lebih kecil lagi jumlahnya. Melalui program dan kebijakan kesehatan yang memprioritaskan keterjangkauan dan kemudahan kesehatan untuk seluruh masyarakat, maka hal tersebut menjadi sangat tidak mustahil untuk terwujud. Adapun distribusi data kematian Anak Balita di Kabupaten Berau pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.25

Distribusi Data Kematian Anak Balita Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kematian Balita	16	10	6	8	6
Angka Kematian Anak Balita (per 1.000 kelahiran hidup)	3,06	2,11	1,34	1,7	1,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau



Banyak faktor yang mempengaruhi kematian anak balita, baik itu faktor pendukung keberhasilan seperti kualitas peningkatan KIA di tingkat puskesmas, kesadaran tenaga kesehatan dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, motivasi dan komitmen Dokter Spesialis Anak dan Bidan dalam menjalankan program, sistem rujukan yang efisien dan efektif, adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan lainnya serta yang tidak kalah penting adalah kepedulian dan kewaspadaan dari orang tua ataupun keluarga. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain adalah

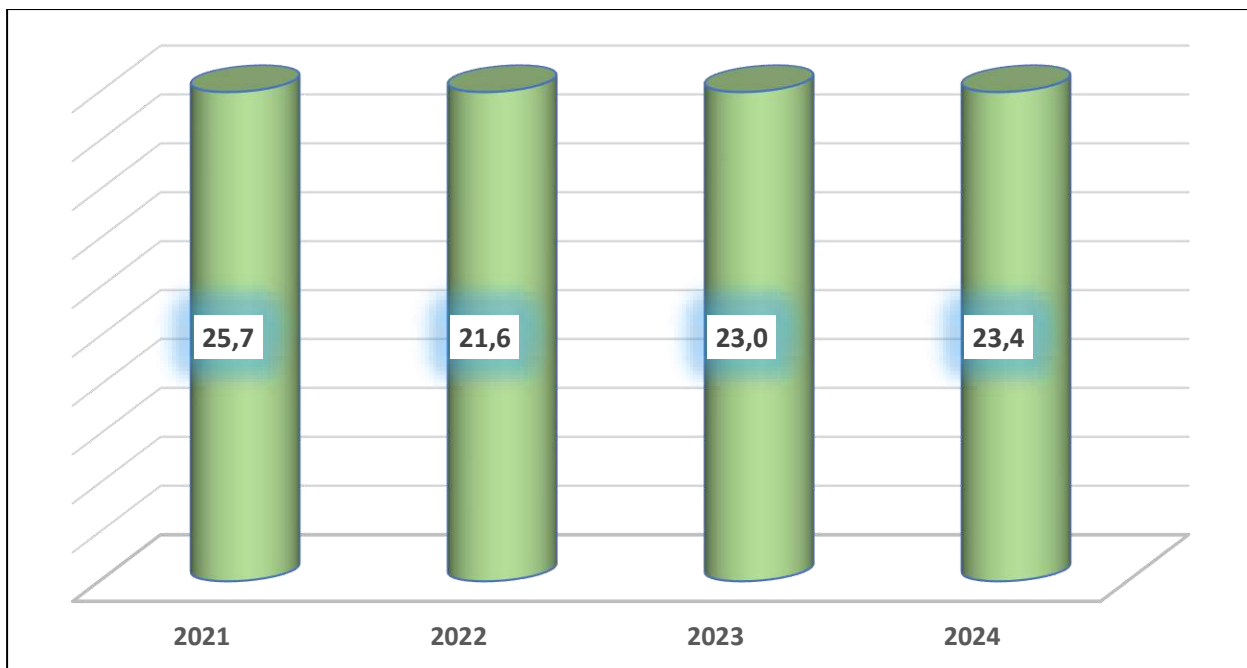
- a. Masih ada perawat dan Bidan Desa yang belum terlatih tatalaksana Balita sakit dengan pendekatan MTBS.
- b. Masih ada Bidan Desa yang belum terlatih Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak.
- c. Masih adanya tenaga kesehatan yang sudah dilatih tetapi belum mampu melaksanakan hasil pelatihan.
- d. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada Anak Balita sesuai standar.
- e. Belum maksimalnya sistem pencatatan pada kohort Anak Balita
- f. Pentingnya monev pasca pelatihan
- g. Belum maksimalnya Ketersediaan sarana dan prasarana pasca pelatihan.
- h. Ada beberapa Puskesmas yang belum melaksanakan kelas ibu balita.
- i. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi serta perlunya penerapan pola pendekatan MTBS bagi puskesmas yang belum melaksanakan.

d. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan (Kementrian Kesehatan, 2016). Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.



Gambar II.28
Prevalensi Stunting Kabupaten Berau Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Angka stunting di Kabupaten Berau cenderung fluktuatif selama kurun waktu 2021-2024 menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dimana angka prevalensi tertinggi di tahun 2021 mencapai 25,7 persen. Namun turun perlahan di tahun 2022 menjadi 21,6 persen, hal ini tidak berlangsung lama ternyata naik lagi menjadi 23,0. Dan kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 23,4 persen. Sangat disayangkan kinerja penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Berau ini masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, sampai dengan tahun 2024 prevalensi stunting di Kabupaten Berau masih berada di atas angka 20 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8.

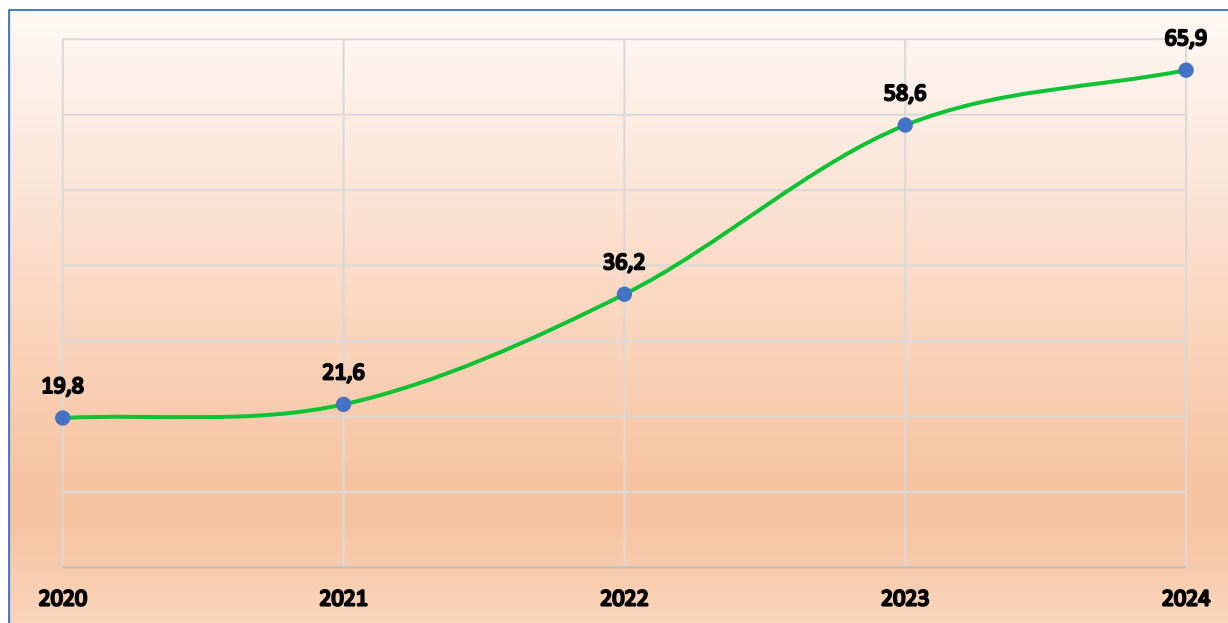
e. Insidensi Tuberkulosis

Kabupaten Berau berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, dengan memberi perhatian khusus terhadap berbagai jenis penyakit menular yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu nya adalah penyakit Tuberkulosis yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru dan disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* atau bakteri TBC. Tuberkulosis



merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara yang menyebar dengan mudah di area yang terdapat banyak orang berkumpul dalam kerumunan atau masyarakatnya tinggal dalam kondisi padat.

Gambar II.29
Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

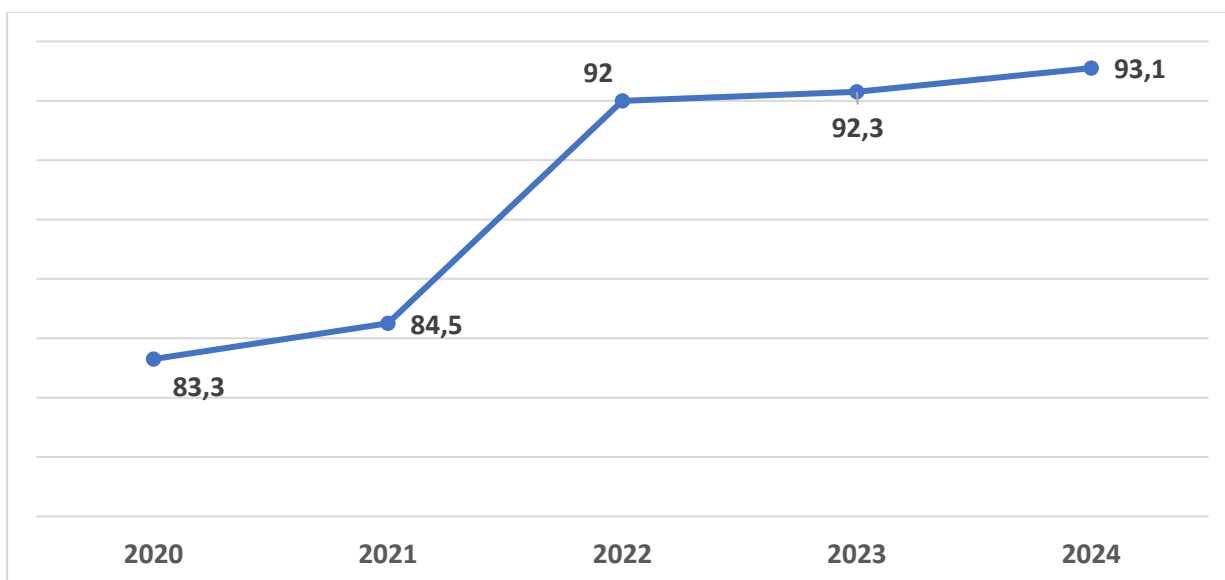


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*Case Detection Rate*) di Kabupaten Berau selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimana persentasenya konsisten meningkat setiap tahunnya. Jika melihat dari jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati pada tahun 2020 hanya ditemukan sebanyak 503 kasus namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 524 kasus. Angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan yang mendapat pengobatan lengkap diantara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.



Gambar II.30
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Angka Keberhasilan pengobatan TBC (*Succes Rate*) Kabupaten Berau cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam menangani masalah pengobatan penyakit ini antara lain pasien tidak patuh minum Obat anti TBC (OAT), pasien pindah fasyankes dalam pengobatan TB, dan adanya kasus TB Resistean Obat (TB-RO), faktor Pengawas Menelan Obat (PMO) tidak berjalan secara maksimal, belum ada kader Tuberkulosis aktif yang berperan dalam penagawan obat di lingkungan sekitarnya, sulitnya penerapan pemantauan kepatuhan minum obat pada kategori kasus TB anak, sulitnya pemeriksaan BTA *Follow Up* pada bulan 2, bulan 5, dan Akhir Pengobatan untuk memenuhi syarat sembuh pada pasien TB.

f. Infrastruktur Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan investasi multidimensi dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan berkualitas. Lebih dari sekadar penyediaan layanan kuratif, pembangunan kesehatan mencakup spektrum upaya yang luas, mulai dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tingkat individu dan komunitas, hingga penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang merata dan berkualitas. Ini juga melibatkan penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan,



termasuk sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-3, fokus pembangunan kesehatan tidak hanya tertuju pada peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara holistik. Ini berarti memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan yang esensial, termasuk kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan mental. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, untuk mengatasi determinan sosial kesehatan seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Strategi pembangunan kesehatan yang efektif mengedepankan pendekatan *continuum of care*, mulai dari pelayanan kesehatan primer di tingkat komunitas melalui penguatan Posbindu dan UKBM, hingga pelayanan rujukan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengawasan kualitas air, sanitasi yang layak, dan penyehatan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan merupakan intervensi kunci dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan yang efektif menjadi fondasi keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Puskesmas induk adalah fasilitas kesehatan utama yang mudah diakses oleh penduduk di setiap kecamatan. Namun, karena jumlah puskesmas induk tidak bertambah, rasio puskesmas per 100.000 penduduk cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Ini berarti, rata-rata jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap puskesmas semakin banyak. Pada tahun 2020, rata-rata satu puskesmas di Kabupaten Berau melayani 11.973 penduduk. Kondisi jangkauan ini sebenarnya cukup baik karena menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016, perbandingan ideal antara satu puskesmas induk dengan jumlah penduduk adalah satu banding 16.000.



Tabel II.26
Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Milik Pemerintah dan Swasta
di Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Puskesmas Induk	21	21	21	21	21
Puskesmas Pembantu	112	112	112	112	113
Poskesdes	67	67	67	77	67
Apotek	62	71	72	72	88
Puskesmas Keliling	33	32	14	14	14
Unit Transfusi Darah	1	1	1	1	1
Laboratorium Kesehatan	1	1	1	3	3
Tenaga Medis	131	156	148	200	208
Bidan	339	339	371	406	451
Perawat	661	666	687	786	863
Tenaga Gizi	34	33	36	51	47
Tenaga Kefarmasian	83	83	83	212	129
Tenaga Kesehatan lainnya	82	87	350	506	337

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas Induk, tetap konsisten jumlahnya dari tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu dan Apotek, yang mengindikasikan upaya perluasan jangkauan layanan kesehatan. Namun, terdapat fluktuasi pada jumlah Poskesdes dan Puskesmas Keliling, yang mungkin mencerminkan penyesuaian strategi pelayanan kesehatan daerah. Di sisi lain, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah Laboratorium Kesehatan, yang menandakan peningkatan kapasitas diagnosis dan pengujian kesehatan.

Dari segi tenaga kesehatan, terjadi peningkatan jumlah tenaga medis, bidan, perawat, dan tenaga gizi sepanjang periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terjadi fluktuasi pada jumlah tenaga



kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan stabilitas dan kualitas layanan kesehatan.

Dari sisi jumlah tenaga kesehatan, perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah penduduk di Kabupaten Berau pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang memadai. Dengan total 208 dokter yang melayani 261.833 jiwa penduduk, rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 dokter untuk 1.259 penduduk. Perbandingan ini lebih baik dari standar ideal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016, yaitu 1 dokter umum untuk 2.500 penduduk, dan jauh lebih unggul dibandingkan standar untuk dokter spesialis yang adalah satu dokter untuk 16.000 penduduk.

Dalam bidang pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Berau mengambil berbagai tindakan antisipatif untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama penyakit yang pernah menjadi wabah baik di tingkat nasional maupun internasional. Berkaitan dengan perkembangan anak, khususnya Balita (di bawah lima tahun), pemberian imunisasi dianggap penting untuk membangun kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Meskipun cakupan imunisasi secara keseluruhan sudah luas di masyarakat, masih diperlukan upaya sosialisasi lebih lanjut kepada sebagian masyarakat yang mungkin belum memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka, baik karena kurangnya pemahaman atau informasi yang memadai mengenai pentingnya imunisasi.

g. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

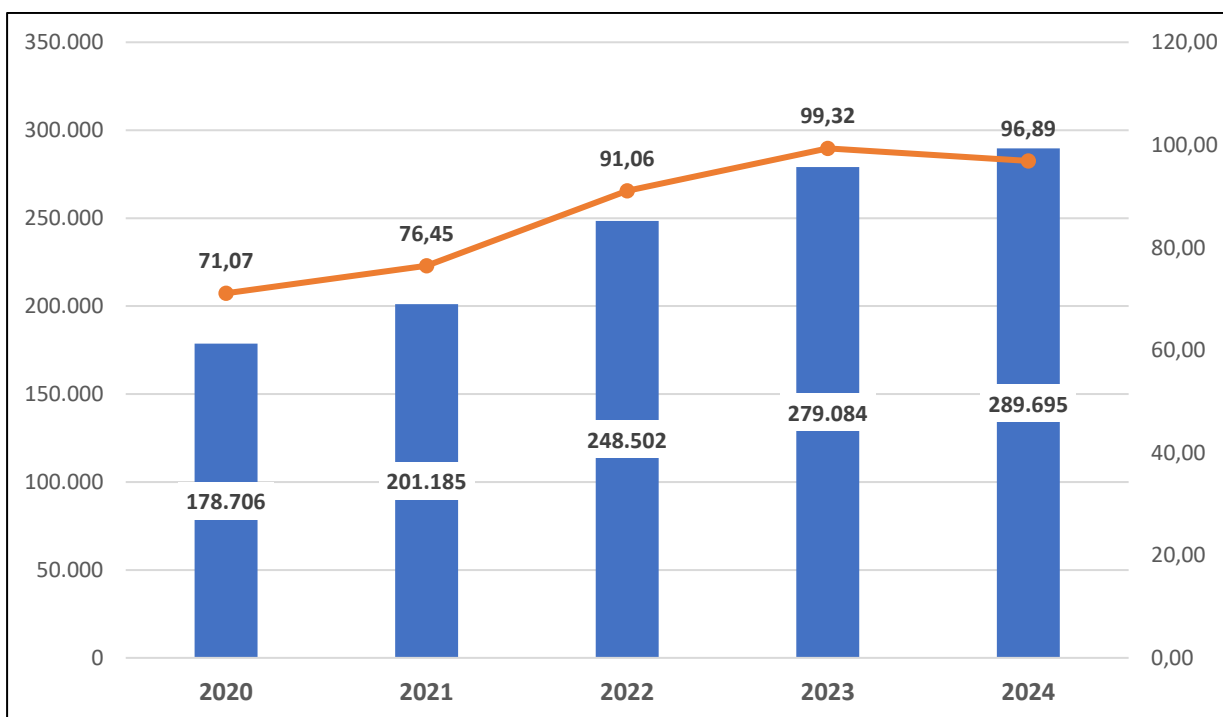
Sebagai salah satu langkah menuntaskan atau mengangkat derajat kesehatan masyarakat, dibutuhkan sebuah jaminan kesehatan dalam rangka menjamin kemudahan pelayanan di bidang kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Peserta BPJS dibagi menjadi beberapa kategori, yakni :

- PPU (Pekerja Penerima Upah), yakni setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, misalkan karyawan swasta, PNS, TNI, Polri.
- PD Pemda (Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah) adalah penduduk yang belum diikutsertakan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.



- PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), yakni setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau biasa disebut peserta mandiri serta BP (Bukan Pekerja) yakni seperti investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda atau duda, dsb.
- PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Gambar II.31
Cakupan Kepesertaan Program BPJS Kesehatan Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Berau

Cakupan kepesertaan program BPJS Kesehatan Kabupaten Berau selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Dimana tahun 2020 hanya sebesar 71,07 persen atau sebanyak 178.706 jiwa yang menjadi peserta BPJS, dan meningkat menjadi 96,89 persen di tahun 2024. Hal ini dikarenakan penduduk sudah semakin merasa pentingnya memiliki jaminan kesehatan agar tidak memiliki kecemasan saat mengalami sakit. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Berau, terlihat bahwa kategori BPJS penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini. Begitu juga dengan kepesertaan BPJS PBI Pusat dan Non PBI.



Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Berau merupakan karyawan swasta dan pegawai instansi yang kepesertaan JKN nya dikelola oleh pemilik atau instansi terkait. Menurut BPJS Kesehatan Kabupaten Berau, angka cakupan PD Pemda Kabupaten Berau paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Timur. Padahal seharusnya tiap daerah memiliki porsi PD Pemda yang cukup, karena dikaitkan dengan cakupan masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan jaminan kesehatan dan belum di cover oleh BPJS jenis PBI.

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

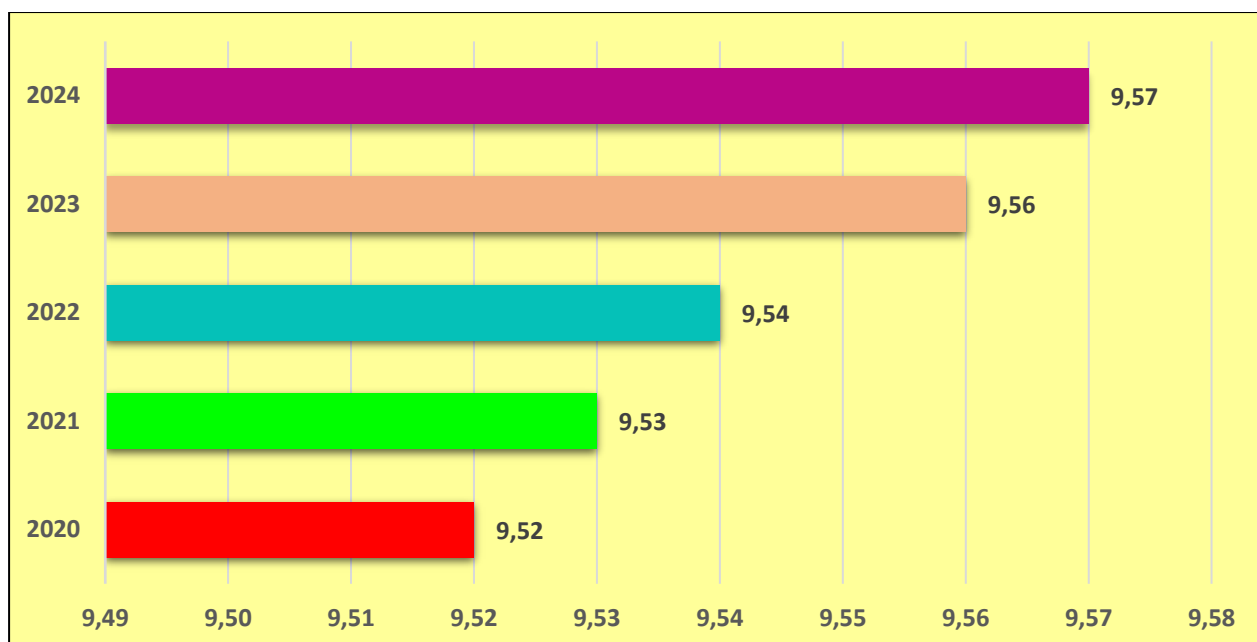
a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Melalui RLS maka dapat menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah diantaranya dengan memperkecil angka putus sekolah. Masyarakat diharapkan tidak hanya bersekolah sampai tamat SD saja, tetapi juga melanjutkan ke jenjang-jenjang di atasnya. Demikian halnya, anak yang sudah tamat SMP dapat melanjutkan ke jenjang SMA bahkan perguruan tinggi. Jika penduduk sudah terlalu lama tamat SD atau SMP tetapi tidak sempat melanjutkan ke jenjang di atasnya karena beberapa alasan, maka dapat meningkatkan lama sekolahnya dengan mengikuti pendidikan kesetaraan yakni paket B (untuk tingkat SMP) dan paket C (untuk tingkat SMA).



Gambar II.32
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Berau mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 9,57 pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022 dan tahun 2023 ke tahun 2024 terlihat cukup landai dimana hanya meningkat 0,01 poin dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2023 hanya terjadi peningkatan 0,02 poin. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan selama 9,56 tahun atau setara dengan SMA kelas 10. Dengan begitu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Berau telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

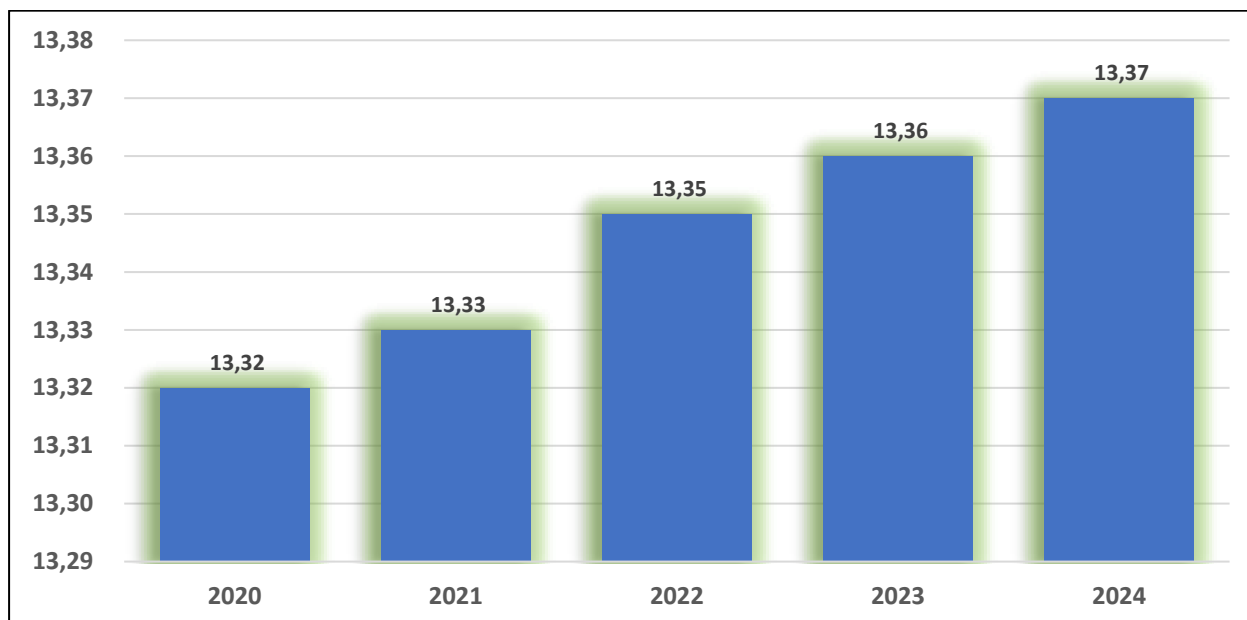
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa



rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Gambar II.33
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Pada capaian harapan lama sekolah Kabupaten Berau mengalami kenaikan secara stabil di setiap tahunnya meskipun memiliki pola landai. Terlihat pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan harapan lama sekolah sebesar 0,01 poin dan pada tahun 2021 hingga 2022 kenaikan yang terjadi sebesar 0,02 poin. Pada tahun 2024, capaian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Berau meningkat 0,01 poin menjadi 13,37 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 akan memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 hingga 14 tahun atau setara dengan Diploma I. Dengan besaran angka tersebut, diharapkan berbagai program dan kebijakan bidang pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dapat membantu pencapaian target pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

c. Angka Partisipasi Pendidikan

Sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan manusia harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu acuan yang menjadi titik keberhasilan bidang pendidikan adalah kemudahan akses masyarakat untuk



mendapatkan sarana pendidikan. Salah satu indikator yang dapat memberi gambaran tersebut adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pengembangan layanan pendidikan di daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai Angka Partisipasi Sekolah, maka daerah tersebut dianggap berhasil dalam memberikan akses ke layanan pendidikan. Dalam lima tahun terakhir, angka partisipasi sekolah Kabupaten Berau cenderung berpola menurun seiring dengan meningkatnya kelompok usia penduduk. Nilai APS pada kelompok usia 7-12 tahun secara umum selalu lebih tinggi daripada nilai APS kelompok usia lainnya dari tahun 2020 hingga 2024. Tingginya angka tersebut memberikan gambaran bahwa selama lima tahun terakhir akses pendidikan untuk kelompok usia 7-12 tahun memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan kelompok usia 13-15 tahun dan seterusnya.

Tabel II.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024

Usia Sekolah (Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
7-12	99,37	99,18	99,95	99,65	99,98
13-15	97,59	97,35	97,67	96,80	99,31
16-18	81,38	81,08	79,40	80,30	75,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Indikator partisipasi sekolah yang selanjutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Nilai APK menunjukkan proporsi penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (tidak dibedakan menurut usianya) terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan tersebut. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan terkait. Selain itu, APK juga digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Angka ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK juga memiliki peran yang berarti di Indonesia, yaitu untuk mengetahui secara



signifikan tingkat penduduk yang menyelesaikan pendidikan, dimana masih menghadapi banyak permasalahan seperti putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah.

Tabel II.28
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	105,78	106,84	106,46	106,48	108,98
SMP	82,89	81,50	87,39	85,26	84,83
SMA	92,61	95,38	93,96	94,85	95,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Tabel diatas menunjukkan gambaran indikator APK di Kabupaten Berau. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Seperti yang terjadi pada jenjang SD di kabupaten Berau. APK jenjang ini selalu berada di atas 100 persen selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa murid SD di kabupaten Berau selain mencakup anak usia 7-12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan ada juga anak berusia lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang tinggal kelas, terlambat masuk SD atau sebaliknya terlalu dini bersekolah di jenjang SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung menggunakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu



tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK karena nilai APK juga mencakup penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sementara itu, selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi anak yang bersekolah di luar usia jenjang pendidikan yang seharusnya akibat anak yang terlambat masuk sekolah, terlalu cepat masuk sekolah, atau tinggal kelas.

Tabel II.29
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	99.04	99.18	99.03	99,65	99,98
SMP	79.64	79.31	79.38	80,88	82,94
SMA	71.19	71.39	71.56	73,54	72,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Berdasarkan diatas diketahui nilai APM jenjang pendidikan SD selalu berada di atas 90 persen dan selalu menempati posisi tertinggi setiap tahunnya. Kondisi ini juga selaras dengan nilai APS dan APK pada jenjang SD yang juga selalu memiliki nilai tertinggi. Tercatat APM Kabupaten Berau pada jenjang SD di tahun 2022 menurun dari 99,18 di tahun 2021 menjadi 99,03 namun angkanya masih berada pada kisaran 99. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dari 100 penduduk yang bersekolah di SD, terdapat sebanyak 99 murid yang bersekolah SD tepat waktu di usia 7-12 tahun dan hanya 1 murid yang kemungkinan mengalami tinggal kelas, terlambat masuk SD atau terlalu cepat masuk SD. Lebih lanjut, jika melihat selisih antara APK dan APM jenjang SD pada tahun 2024 ada sebesar 9 yang artinya dari 100 murid yang bersekolah SD terdapat sekitar 9 murid yang terlambat masuk SD atau terlalu cepat masuk SD.

Sementara itu, nilai APM jenjang SMP pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 80,88 di tahun 2023 menjadi 82,94. Artinya, pada



jenjang SMP sebanyak 82-83 dari 100 penduduk usia SMP telah bersekolah secara tepat waktu. Lalu selisih antara APK dan APM jenjang SMP sebesar 1,89 memberi potret bahwa dari 100 murid yang bersekolah SMP masih terdapat sekitar 1-2 murid yang bersekolah tidak tepat pada usia SMP yang seharusnya.

Berbanding terbalik dengan jenjang SMP, nilai APM jenjang SMA pada tahun 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dari 73,54 persen menjadi 72,20. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata jumlah penduduk usia SMA yang bersekolah tepat waktu mengalami penurunan dari sekitar 73-74 orang dari 100 orang menjadi 71-72 orang. Sementara itu, selisih antara APK dan APM pada jenjang SMA sebesar 23,35 persen memberi gambaran bahwa dari 100 murid SMA masih terdapat 23-24 murid yang bersekolah SMA yang tidak tepat pada usianya. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi penduduk dalam mengemban pendidikan semakin menurun, baik dilihat dari indikator APS, APK, dan APM. Faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya adalah keberadaan sarana pendidikan setiap jenjang pendidikan.

Salah satu permasalahan serius lainnya yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendidikan masyarakatnya adalah tingginya anak tidak bersekolah, belum bersekolah, *Drop Out (DO)* dan masyarakat yang lulus tetapi tidak mau melanjutkan pendidikan. Hal ini perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel II.30
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Berau Tahun 2025

Kabupaten	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
Berau (Orang)	2.110	1.225	1.163	4.498

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Jumlah anak belum pernah bersekolah di Kabupaten Berau ada sebanyak 2.110 orang. Hal ini bisa disebabkan karena ketergantungan terhadap pertambangan dan perkebunan, dimana kebanyakan masyarakatnya bermukim disekitar daerah pertambangan dan perkebunan yang daerahnya cukup menyebar dan terpencil dan pemukiman penduduk yang tidak terkumpul disuatu tempat. Sehingga menyulitkan



pemerintah Kabupaten Berau untuk menyediakan infrastruktur di daerah tersebut. Namun demikian harus menjadikan sebagai motivasi agar bisa menurunkan angka tersebut dengan berbagai intervensi yang masif dan konsisten.

Jika melihat jumlah anak yang mengalami DO atau putus sekolah, ditemukan masih ada 1.225 anak yang mengalami kondisi tersebut. Hal ini tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus berhenti sekolah dan membantu ekonomi orang tua dengan bekerja. Selain itu bisa juga disebabkan jarak menuju sekolah yang terlalu jauh menyebabkan anak putus sekolah, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang terlibat dalam pernikahan dini juga bisa menyebabkan anak putus sekolah, atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan hingga budaya yang meyakini bahwa anak tidak perlu pendidikan tinggi.

Selain permasalahan anak DO, Kabupaten Berau juga menghadapi masalah terhadap anak yang lulus tapi tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Kondisi ini juga disebabkan faktor yang sama dengan anak yang mengalami DO. Namun, kendala dalam penanganan ATS ini adalah banyak ATS memiliki umur yang melebihi batas usia sekolah. Sehingga perlu intervensi Pemerintah Kabupaten Berau dan pihak swasta dalam hal ini melalui bantuan *Corporate Social Responsibility*, dimana untuk penyelesaian penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah adalah dengan melalui ujian paket A, B dan C. Intervensi terhadap ATS usia sekolah akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), sedangkan intervensi terhadap ATS pada penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah akan berdampak pada peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada akhirnya dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingginya jenjang pendidikan yang dilalui oleh penduduk mencerminkan tingginya kesejahteraan penduduk. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator penentu pembangunan di bidang pendidikan. Dimaksud tingkat pendidikan tertinggi adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat atau ijazah. Capaian jenjang pendidikan yang diperoleh seseorang menunjukkan batasan dalam perolehan pendidikan.



Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, dapat mengindikasikan semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi keahlian/keterampilannya. Semakin meningkat keterampilan/keahlian, maka semakin berkualitas modal yang dimiliki penduduknya sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing dalam pasar kerja.

Tabel II.31
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Memiliki Ijazah	11.16	9.40	10.67	9,81	7,77
SD/Sederajat	24.29	19.66	21.61	20,93	25,79
SMP/Sederajat	23.78	22.84	21.48	23,86	23,24
SMA/Sederajat	27.72	37.19	34.45	45,41	30,99
Perguruan Tinggi (PT)	13.05	10.91	12.19		12,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Karakteristik penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Berau menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada periode 2020 hingga 2024 secara umum didominasi oleh jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Berau cukup baik, yakni sekitar hampir 30 persen penduduk telah mengenyam pendidikan SMA/ sederajat. Meskipun angka tersebut fluktuatif selama kurun waktu lima tahun tersebut, namun tetap memiliki persentase paling besar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini berkaitan dengan program wajib belajar 12 tahun yang harus tetap digalakkan untuk mencapai target pembangunan daerah.

Selain tingkat SMA/ sederajat, proporsi yang menurun juga terjadi pada persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah, yaitu dari 11,16 persen di tahun 2020 menjadi 7,77 persen di tahun 2024. Hal tersebut merupakan kabar baik karena penduduk usia 15 tahun ke atas semakin menyadari pentingnya pendidikan meskipun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, proporsi penduduk yang memiliki ijazah tertinggi Perguruan Tinggi pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, yakni dari 10,91 persen di tahun 2021 menjadi 12,19 persen pada tahun 2022. Ketersediaan sarana penunjang



perguruan tinggi yang semakin beragam di Kabupaten Berau dan banyaknya jurusan yang tersedia mempengaruhi minat masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi.

e. Kondisi Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Berau selama tahun 2020-2024 terus ditingkatkan kualitasnya baik sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Perkembangan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Berau, yang meliputi jumlah institusi pendidikan (sekolah), sumber daya manusia (guru), dan partisipan aktif (murid) pada jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat selama periode lima tahun.

Secara rinci, pada jenjang SD/Sederajat, jumlah sekolah menunjukkan peningkatan bertahap dari 172 di tahun 2020 menjadi 178 di tahun 2024. Jumlah murid juga terus bertambah setiap tahun, meningkat dari 32.978 jiwa di 2020 menjadi 36.571 jiwa di 2024. Peningkatan jumlah guru SD relatif stabil dari 2.284 di 2020 menjadi 2.563 di 2024, meskipun sempat ada kenaikan signifikan di 2022 (2.487) sebelum sedikit menurun di 2023 (2.382). Rasio murid per guru di jenjang SD pada tahun 2024 adalah sekitar 14,27 murid per guru.

Pada jenjang SMP/Sederajat, jumlah sekolah mengalami peningkatan dari 62 di tahun 2020 menjadi 70 di tahun 2023, namun kemudian menurun drastis menjadi 61 di tahun 2024, bahkan lebih rendah dari jumlah sekolah di awal periode. Jumlah murid juga mengikuti pola serupa, meningkat dari 13.291 di 2020 menjadi 14.292 di 2023, lalu turun signifikan ke 13.228 di tahun 2024. Jumlah guru SMP menunjukkan fluktuasi, meningkat dari 1.001 di 2020 menjadi puncaknya 1.200 di 2023, lalu menurun menjadi 1.102 di 2024. Rasio murid per guru di jenjang SMP pada tahun 2024 adalah sekitar 12,00 murid per guru.

Untuk jenjang SMA/Sederajat, jumlah sekolah meningkat dari 36 di tahun 2020 menjadi 37 dan bertahan hingga 2023, lalu bertambah menjadi 39 di tahun 2024. Jumlah murid menunjukkan tren peningkatan dari 10.799 di 2020 menjadi 11.992 di 2024, meskipun sempat sedikit menurun di 2022. Jumlah guru SMA mengalami fluktuasi yang cukup terlihat; meningkat dari 743 di 2020 hingga mencapai puncaknya 978 di 2023,



namun kemudian menurun menjadi 876 di tahun 2024. Rasio murid per guru di jenjang SMA pada tahun 2024 adalah sekitar 13,69 murid per guru.

Secara agregat untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA), jumlah sekolah meningkat dari 270 di tahun 2020 menjadi 278 di tahun 2024 (sempat mencapai 283 di 2023). Jumlah total murid meningkat dari 57.068 di tahun 2020 menjadi 61.791 di tahun 2024. Sementara itu, jumlah total guru berfluktuasi dari 4.028 di tahun 2020, mencapai puncaknya 4.565 di tahun 2023, lalu menurun menjadi 4.541 di tahun 2024.

**Tabel II.32
Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Berau Tahun 2020-2024**

Indikator		*2020	*2021	*2022	*2023	**2024
SD/Sederajat	Jumlah Sekolah	172	175	175	176	178
	Jumlah Guru	2.284	2.286	2.487	2.382	2.563
	Jumlah Murid	32.978	33.667	34.614	35.707	36.571
SMP/Sederajat	Jumlah Sekolah	62	68	68	70	61
	Jumlah Guru	1001	1.061	1.066	1.200	1.102
	Jumlah Murid	13.291	13.707	13.884	14.292	13.228
SMA/Sederajat	Jumlah Sekolah	36	37	37	37	39
	Jumlah Guru	743	816	908	978	876
	Jumlah Murid	10.799	11.363	11.198	11.564	11.992

Sumber: * Kabupaten Berau Dalam Angka 2021

** Buku Profil Kabupaten Berau 2024

*** Kabupaten Berau Dalam Angka 2025

3. Perlindungan Sosial yang Adaktif

a. Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu daerah. Baik di sektor formal maupun informal, pekerja memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam



menjalankan tugasnya, pekerja juga menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian finansial di hari tua. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan sistem perlindungan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan finansial yang layak dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.

Tabel II.33
Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Peserta BPJS Ketenagkerjaan Penerima Upah	23.407	27.565	32.328	39.686	42.984
Peserta BPJS Ketenagkerjaan Bukan Penerima Upah	3.477	6.465	11.300	16.974	20.679
Peserta BPJS Ketenagkerjaan Aktif	26.884	34.030	43.628	56.660	63.663
Peserta BPJS Ketenagkerjaan Baru	11.366	18.494	29.511	39.958	41.942

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Berau

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan mengalami peningkatan untuk semua kategori. Peserta BPJS Ketenagkerjaan Penerima Upah yang awalnya di tahun 2020 hanya sebanyak 23.407 peserta menjadi 42.984 peserta. Hal ini menunjukkan kerjasama dan kepatuhan pemberi pekerjaan terhadap regulasi pemerintah semakin tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada peserta bukan penerima upah, malah kenaikannya sangat signifikan selama lima tahun terakhir ini mencapai lebih dari 100 persen. Jika melihat jumlah peserta yang terdaftar dan masih aktif hingga 2024 maka juga terlihat kenaikan setiap tahunnya. Dan jumlah peserta yang mendaftar setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.

Jika melihat cakupan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Berau selama kurun waktu lima tahun terakhir terlihat, bahwa terjadi peningkatan signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 hanya sebesar 25 persen namun menjadi 2 kali lipat mejadi 54 persen ditahun 2024. Hal ini dikarenakan semakin masifnya



pemerintah mengingatkan pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, dan bahkan beberapa perusahaan mewajibkan pekerjanya memiliki jaminan ketenagakerjaan ini.

Gambar II.34
Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Berau

Namun demikian pemerintah daerah Kabupaten Berau jangan berpuas hati terhadap kondisi ini karena tantangan untuk memperluas agar seluruh tenaga kerja yang ada memiliki jaminan sosial masih cukup berat dikarenakan masih banyak tenaga kerja yang belum paham tentang pentingnya hal ini, dan masih ada badan usaha yang abai dan acuh tentang keselamatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ini.

4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek ini menekankan pentingnya peran norma, nilai, dan struktur sosial budaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya yang harmonis berperan vital dalam menciptakan pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan pembangunan dalam aspek ini harus mempertimbangkan keragaman sosial budaya masyarakat dan



mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen sosial demi terciptanya kehidupan sosial yang berdaya dan berkelanjutan.

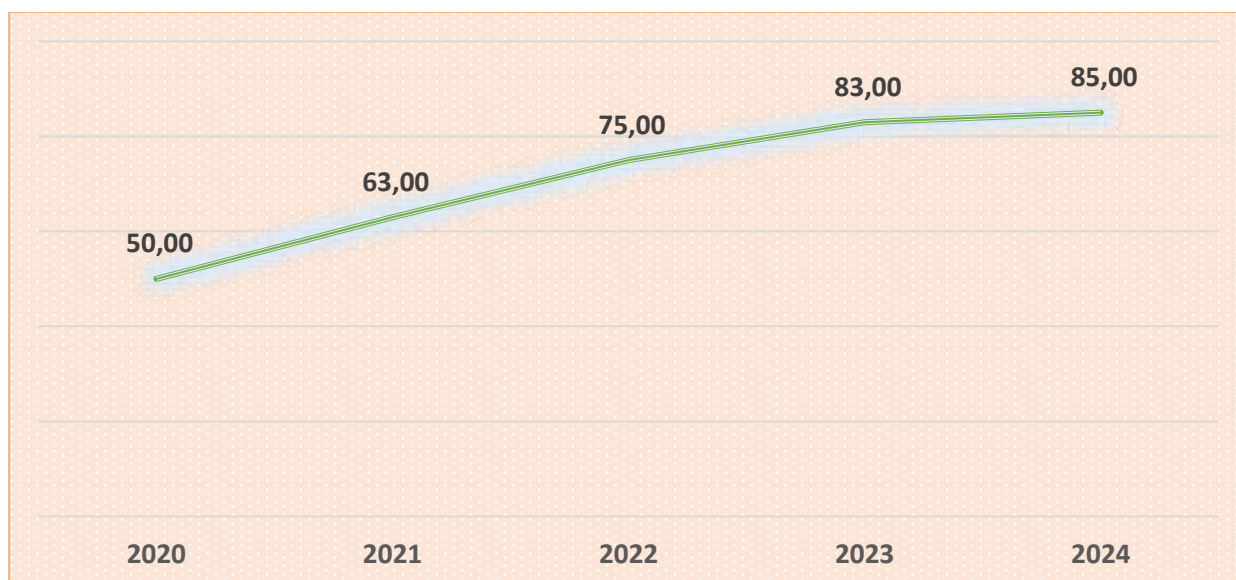
a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 juga dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga NKRI.

Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Berau merilis hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Tahun 2024, IKUB untuk Kabupaten Berau mencapai 85,00. Pencapaian ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,00 poin persen dibandingkan tahun lalu. Litbangdiklat Kemenag RI secara rutin melakukan survei IKUB yang mengukur tiga indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Dalam empat tahun terakhir, IKUB menunjukkan tren positif, yakni 50,00 (2020), 63,00 (2021), 75,00 (2022), 83,00 (2023) dan 85,00 (2024). Tren ini menggambarkan sikap toleransi antarumat beragama di Kabupaten Berau cenderung membaik. Ia menjelaskan bahwa program penguatan moderasi beragama mencakup beberapa lingkup. Di antaranya adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat bagi aparatur negara. Juga perlindungan hak beragama dalam program dan layanan publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga. Pengelolaan rumah ibadah yang berperspektif moderasi beragama, serta pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya, juga untuk memperkuat toleransi.



Gambar II.35
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Berau

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

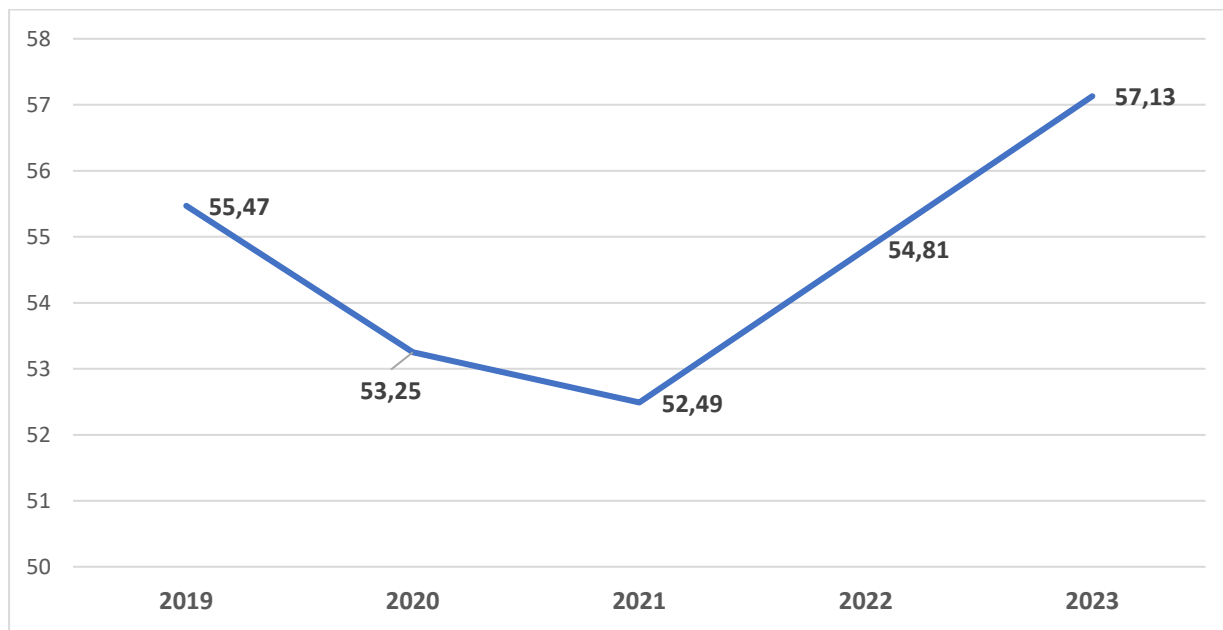
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. IPK dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pembangunan kebudayaan. Sehingga dapat menjadi basis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di bidang kebudayaan dan menjadi acuan dan alat koordinasi terkait dalam melaksanakan program pemajuan kebudayaan. Dengan adanya IPK, pemerintah daerah dapat lebih mudah memetakan area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pelestarian kebudayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis kebudayaan. Selain itu juga memberikan nilai pengukuran yang terstandarisasi untuk melihat bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensi kebudayaannya sebagai motor penggerak pembangunan. Kemudian bisa menjadi alat evaluasi yang efektif untuk melihat efektivitas program kebudayaan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 55,47 dan meningkat menjadi 57,13 di tahun 2023. Capaian IPK Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 dan kemudian meningkat kembali ditahun



2022 menjadi 54,81. Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar II.36
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

c. Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya). Mengingat keberadaan cagar budaya yang memiliki nilai penting, maka yang harus dilakukan adalah: melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara



berkelanjutan. Ini mencakup upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran untuk mencegah kerusakan, serta pendidikan dan sosialisasi agar masyarakat sadar dan peduli, dan pendokumentasian digital untuk menjaga informasi dan pewarisan kepada generasi mendatang.

Kabupaten Berau memiliki sejumlah cagar budaya yang dilestarikan yang merupakan keseluruhan jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan atau di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini Bupati berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya yang dianggarkan dalam APBD meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air (UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya). Sedangkan jumlah cagar budaya yang ditetapkan adalah jumlah seluruh cagar budaya yang sudah ditetapkan dan memiliki Register Nasional Cagar Budaya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian cagar budaya yang sudah ditetapkan dan menyertakan SK Bupati/Walikota tentang penetapan cagar budaya.

Kabupaten Berau dengan segala kekayaan budayanya memiliki cagar budaya yang dimiliki dan dilestarikan berupa benda yaitu koleksi BCB yang ada di Museum Batiwakkal, Sambaliung, dan Siraja. Kemudian juga ada situs cagar budaya antara lain makam sultan, makam keramat, keraton, pelabuhan batu bara, gedung bioskop, masjid kuno dan lainnya. Selain itu ada kawasan cagar budaya seperti gua dan kawasan karst. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terlihat peningkatan jumlah cagar budaya baik yang dimiliki dan ditetapkan. Dimana tahun 2020 cagar budaya yang di miliki sebsar 640 objek menjadi 753 obyek, sedangkan yang dilestarikan dari 631 obyek menjadi 742 obyek. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian Pemerintah Kabupaten Berau sangat tinggi terhadap keberadaan dan pelestarian cagar budaya.



Gambar II.37
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Dan Dilestarikan
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

5. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

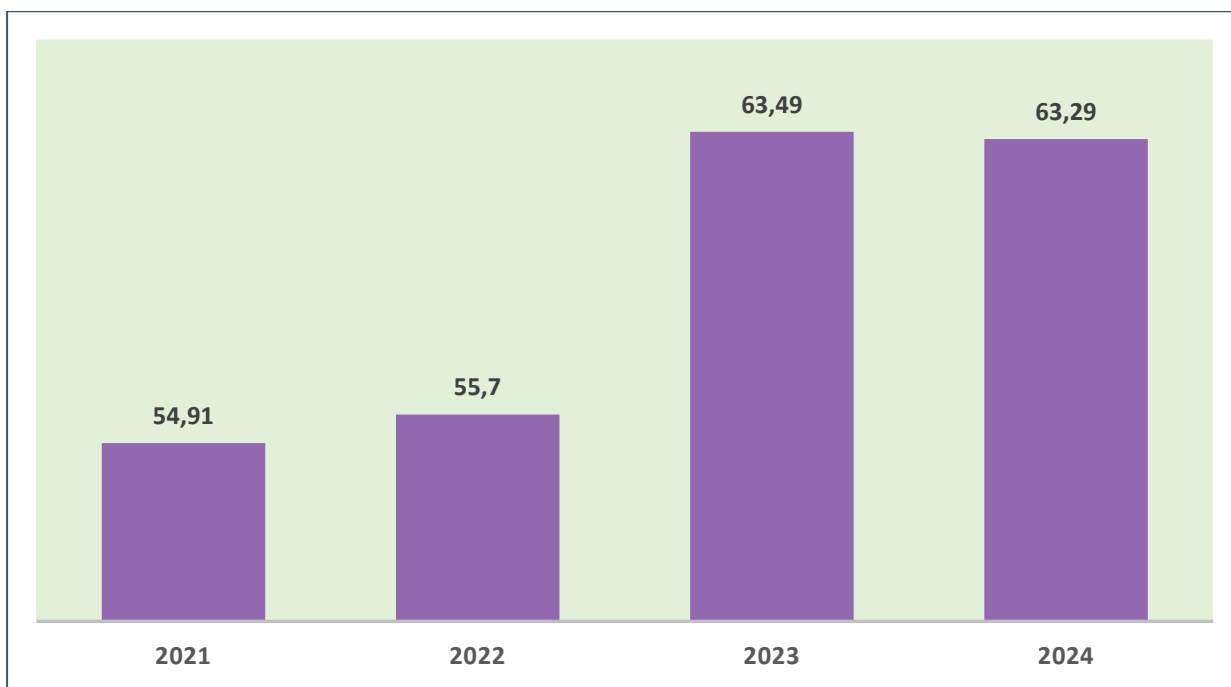
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. 3 (tiga) dimensi pembentuk untuk perhitungan iBangga yaitu Dimensi Ketentraman, dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, jaminan keuangan dan keharmonisan keluarga. Dimensi kemandirian, dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses informasi. Dimensi kebahagiaan dengan indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Dan merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah. iBangga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan



kebijakan/program/kegiatan. Selain itu juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah.

Gambar II.38
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Berau Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa telah terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Berau dari 54,91 pada tahun 2021 menjadi 63, 29 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terus menerus beupaya untuk meningkatkan standar hidup keluarga, program dan kebijakan yang masif dan konsisten terhadap kesehatan dan pendidikan keluarga, serta upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan bagi pelaku UMKM, kursus keterampilan baik menjahit, kuliner maupun kecantikan.

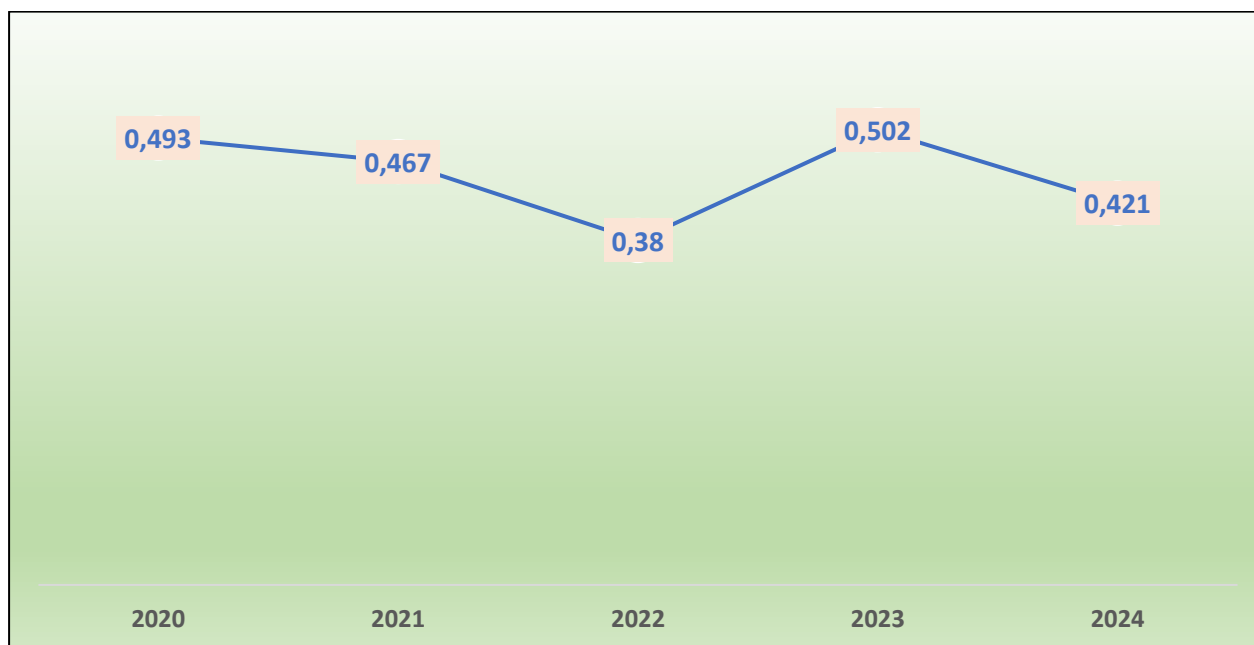
b. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memberikan gambaran tentang sejauh mana ketimpangan tersebut menghambat optimalisasi pembangunan manusia. Selain itu melalui IKG maka dapat mengukur sejauh



mana kesenjangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan manusia dan untuk melacak kemajuan menuju kesetaraan gender.

Gambar II.39
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

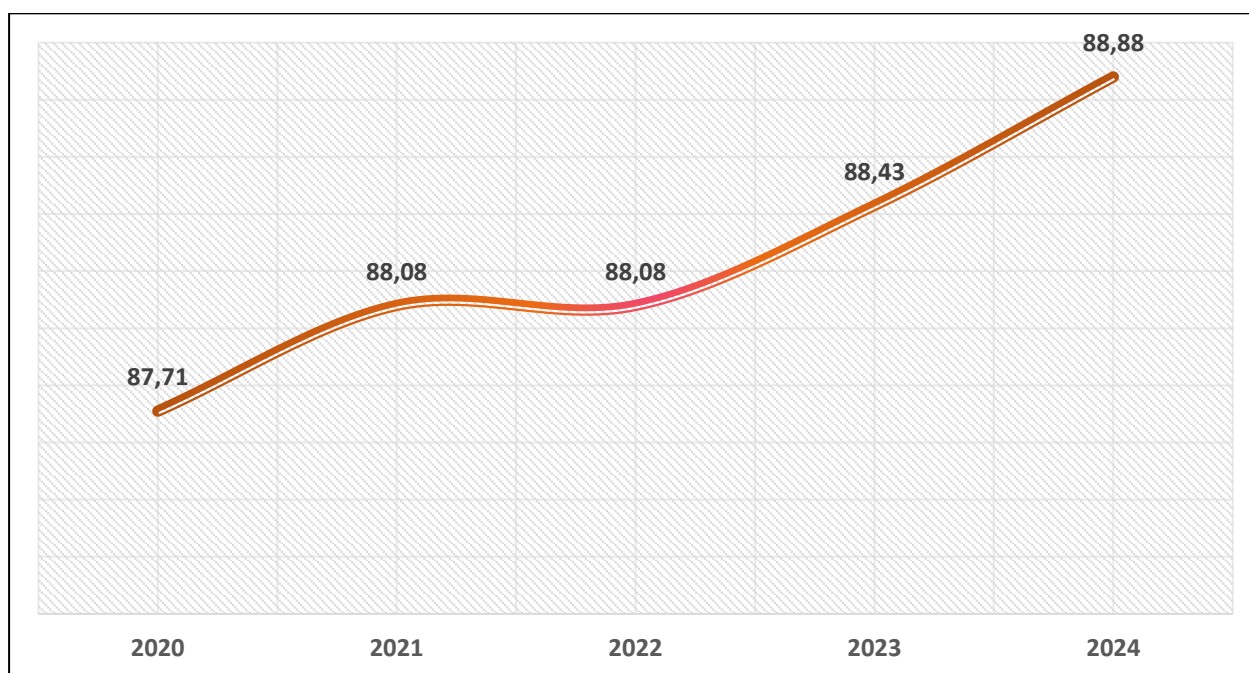
Selama periode 2020–2022, IKG Kabupaten Berau mengalami penurunan dari 0,493 pada tahun 2020 menjadi 0,38 pada tahun 2022, yang menunjukkan perbaikan kesetaraan gender. Namun, pada tahun 2023, indeks ini kembali meningkat menjadi 0,502. Kenaikan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender yang perlu menjadi fokus perhatian semua pihak yang terlibat. Namun IKG pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,421 atau turun sebesar 0,081 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian program-program pengarusutamaan gender yang di lakukan pemerintah menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Berau diharapkan dapat konsisten dan berkesinambungan merancang dan mengimplementasikan program-program penguatan kapasitas, pelibatan perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan hak perempuan secara lebih menyeluruh dan inklusif.



c. Indeks Pembangunan Gender

Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan pengarusutamaan gender. Kesetaraan ini tercapai ketika perempuan dan laki-laki memperoleh peran dan akses yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan secara keseluruhan. Capaian pembangunan gender di Kabupaten Berau menunjukkan tren positif. Setelah mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan nilai mencapai 88,88 persen. Angka ini mencerminkan semakin besarnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Gambar II.40
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Berau memiliki pekerjaan rumah untuk terus melakukan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan negara atau kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Gambaran tentang



perempuan di berbagai bidang sangat diperlukan dalam menunjang kebijakan dan program pembangunan.

C. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing regional merupakan komando strategis dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, yang terhubung dan bertumpu pada optimalisasi aset distingtif berupa potensi, kekhasan, dan keunggulan komparatif wilayah.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, daya saing (*regional competitiveness*) teridentifikasi sebagai determinan krusial bagi keberhasilan *trajectory* pembangunan ekonomi daerah. Kapabilitas suatu daerah dalam berkompetisi secara efektif di tingkat regional, nasional, maupun global berkorelasi positif dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi peningkatan daya saing daerah memerlukan formulasi kebijakan yang komprehensif, meliputi penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah indikator demografi krusial yang merefleksikan keseimbangan struktural usia dalam suatu populasi dan implikasinya terhadap beban ekonomi serta sosial. Lebih dari sekadar rasio, angka ini menyoroti tingkat tekanan yang diemban oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) dalam menopang kebutuhan kelompok usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Kelompok non-produktif ini, baik karena belum memasuki usia kerja maupun telah melewati usia produktif, umumnya membutuhkan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari pembiayaan pendidikan dan kesehatan hingga jaminan sosial dan pensiun.

Interpretasi Angka Ketergantungan memiliki implikasi mendalam terhadap perencanaan pembangunan. Rasio yang tinggi mengindikasikan beban ekonomi yang lebih besar bagi kelompok produktif, yang dapat berpotensi membatasi tabungan dan



investasi nasional, serta memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial dan fiskal pemerintah. Sebaliknya, rasio yang rendah cenderung menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif, di mana proporsi penduduk yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan yang bergantung, sehingga potensi untuk pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal menjadi lebih tinggi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa angka ketergantungan hanyalah gambaran kuantitatif dan tidak secara otomatis mencerminkan kualitas kontribusi masing-masing kelompok usia. Misalnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada kelompok usia muda dapat meningkatkan produktivitas mereka di masa depan. Demikian pula, kebijakan yang mendukung partisipasi aktif lansia dalam kegiatan ekonomi atau sosial dapat mengurangi beban ketergantungan.

Tabel II.34
Angka Ketergantungan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
0-14	Laki-Laki	32.839	33.070	33.279	33.450	33.603
	Perempuan	31.491	31.704	31.886	32.037	32.165
	Total	64.330	64.774	65.165	65.487	65.768
15-64	Laki-Laki	94.945	96.165	97.352	98.500	99.600
	Perempuan	79.085	80.666	82.246	83.808	85.320
	Total	174.030	176.831	179.598	182.308	184.920
65+	Laki-Laki	4.935	5.194	5.489	5.807	6.148
	Perempuan	3.912	4.152	4.411	4.691	4.997
	Total	8.847	9.346	9.900	10.498	11.145
Dependency Ratio	Laki-Laki	39,79	39,79	39,82	39,85	39,91
	Perempuan	44,77	44,45	44,13	43,82	43,56
	Total	42,05	41,92	41,80	41,68	41,59

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020, BPS Kabupaten Berau

Oleh karena itu, pemantauan tren angka ketergantungan secara berkala menjadi esensial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sosial, dan demografi yang adaptif. Analisis ini membantu dalam memproyeksikan kebutuhan akan layanan publik, merencanakan alokasi anggaran untuk program kesejahteraan, dan mengidentifikasi potensi tantangan serta peluang terkait struktur usia penduduk. Strategi



pembangunan yang efektif mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari perubahan angka ketergantungan, termasuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta reformasi sistem jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa kini dan masa depan.

Jumlah penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kelompok ini mencapai 184.920 jiwa, yang terdiri dari 99.600 laki-laki dan 85.320 perempuan. Sementara itu, populasi usia belum produktif (0-14 tahun) juga bertambah, tercatat sebanyak 65.768 jiwa di tahun yang sama, dengan 33.603 laki-laki dan 32.165 perempuan. Umumnya, kelompok usia muda ini masih bergantung secara ekonomi, sebagian besar karena masih dalam tahap pendidikan. Di sisi lain, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) yang dianggap tidak produktif juga meningkat jumlahnya. Di tahun 2024, terdapat 11.145 jiwa dalam kelompok ini, terdiri dari 6.148 laki-laki dan 4.997 perempuan, yang umumnya tidak lagi aktif bekerja optimal karena faktor usia.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur ini, dapat dihitung Rasio Ketergantungan atau Angka Beban Tanggungan, yang mencerminkan seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia non-produktif. Pada tahun 2024, Angka Ketergantungan total di Kabupaten Berau mencapai 41,59 persen. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 41 hingga 42 orang penduduk non-produktif (baik usia muda maupun lanjut) ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif. Jika dilihat per jenis kelamin pada tahun 2024, beban tanggungan laki-laki (39,91 persen) lebih rendah dibanding perempuan (43,56 persen). Meskipun sempat menunjukkan tren penurunan untuk angka ketergantungan perempuan dari tahun 2020 hingga 2024, namun angka ketergantungan laki-laki mengalami hal sebaliknya dimana terus mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Angka ketergantungan perempuan yang di atas 40 persen ini menunjukkan bahwa beban tanggungan penduduk non-produktif terhadap penduduk usia produktif perempuan di Kabupaten Berau tergolong tinggi.

Melengkapi gambaran tersebut, data pada Tabel II.30 menunjukkan bahwa Angka Ketergantungan Total mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Dimulai dari 42,05 persen di tahun 2020, angka ini menurun menjadi 41,92 persen (2021) dan turun lagi menjadi 41,80 persen (2022) dan terus turun hingga menjadi 41,59 di tahun 2024. Penurunan di tahun 2024 ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65+ tahun yang proporsinya tidak lebih tinggi daripada peningkatan



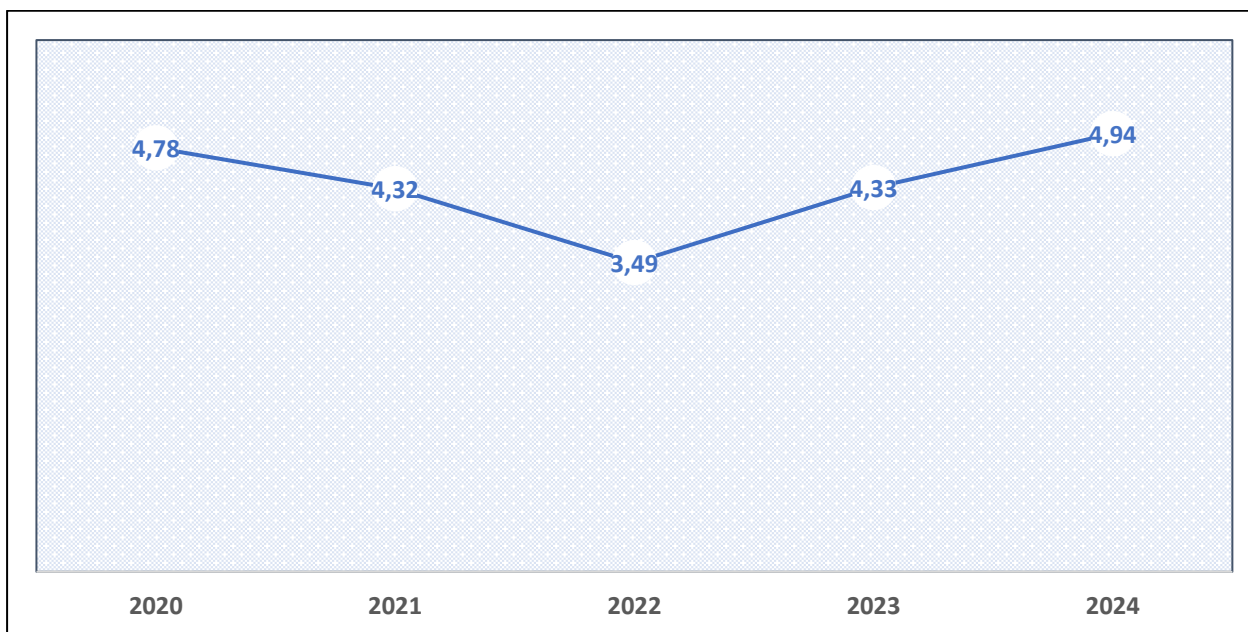
usia produktif. Penurunan di tahun 2024 ini terjadi seiring dengan pertumbuhan pesat jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 184.920 jiwa, sementara total penduduk non-produktif juga bertambah namun dengan laju yang berbeda, menjadikan jumlah penduduk usia 0-14 tahun mencapai 65.768 jiwa dan usia 65+ tahun mencapai 11.145 jiwa pada akhir periode. Dinamika ini menunjukkan pergeseran struktur umur penduduk yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Secara awam, kegiatan industri pengolahan dapat diartikan sebagai suatu proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Sedangkan Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

Gambar II.41
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Pada tahun 2024, besarnya kontribusi kategori industri pengolahan mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 4,94 persen. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, angka kontribusi kategori ini masing-masing 4,78 persen (2020), 4,32 persen (2021), 3,49 persen (2022) dan 4,33 persen (2023). Peningkatan angka kontribusi ini tidak terlepas



dari semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan bahan baku dalam industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO). Pada tahun 2020, terdapat penambahan satu pabrik pengolahan CPO sehingga total pabrik CPO yang beroperasi di Kabupaten Berau menjadi sebanyak sebelas unit dan menjadi empat belas unit pada tahun 2024. Dengan penambahan tersebut, sejalan dengan teori produksi, semakin banyak barang modal dan bahan baku maka output yang dihasilkan akan semakin besar.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

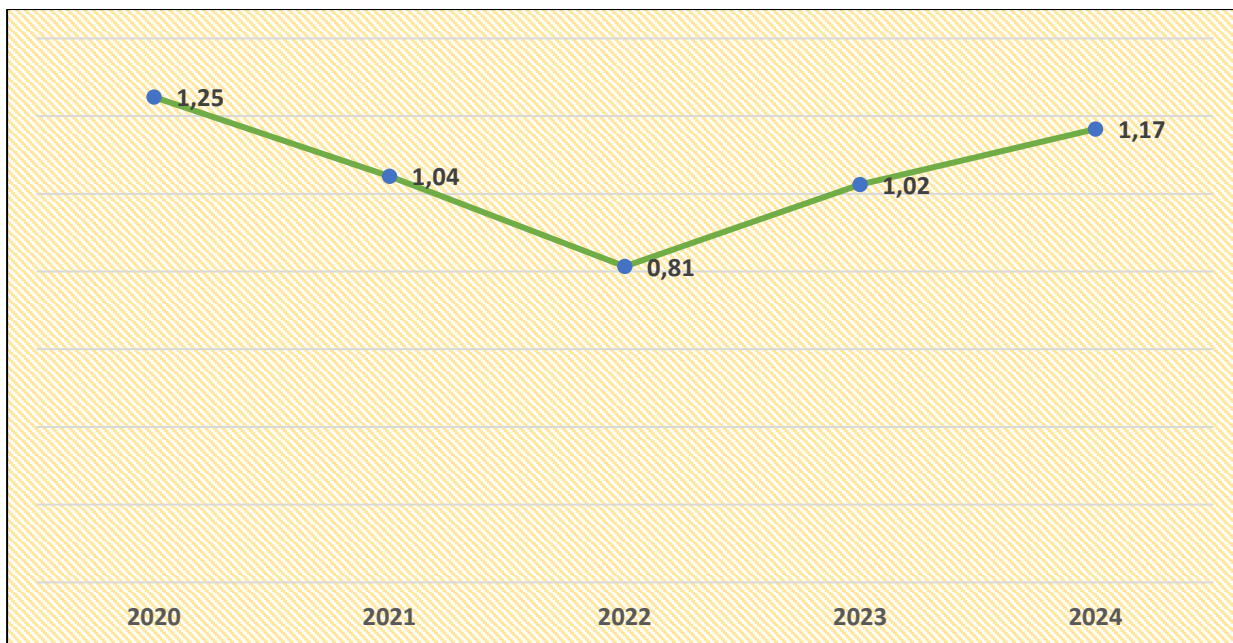
BPS mendefinisikan akomodasi sebagai suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Sedangkan penyediaan makan minum adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak.

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Berau. Akomodasi berfungsi sebagai tempat tinggal selama di daerah tujuan wisata sedangkan penyediaan makan minum berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan makan minum. Beberapa jenis tempat menginap yang berada di Kabupaten Berau antara lain hotel, pondok wisata (*home stay*) dan akomodasi lainnya (seperti asrama dan kos-kosan). Melalui pengembangan pariwisata, dapat mendorong peningkatan pendapatan penduduk setempat dengan cara memanfaatkan sebagian atau seluruh dari rumah yang dimilikinya untuk dijadikan penginapan. Selain itu, wisatawan yang datang juga membutuhkan makanan dan minuman yang dapat menjadi peluang usaha bagi penduduk di wilayah tersebut.

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum juga turut menerima dampak dari adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Ditutupnya beberapa tempat wisata serta pembatasan aktivitas penduduk selama masa pandemi, menyebabkan tingkat penghunian kamar pada akomodasi menjadi menurun. Pada kegiatan penyediaan makan minum, kewaspadaan yang dirasakan oleh penduduk menyebabkan penduduk lebih memilih memasak sendiri dibanding membeli makanan jadi. Selain itu, adanya larangan mengkonsumsi di tempat ketika membeli makanan di rumah makan juga menyebabkan penurunan aktivitas pada penyediaan makan minum.



Gambar II.42
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Kedua penyebab ini turut menyebabkan output yang dihasilkan oleh penyediaan makan minum menjadi berkurang. Namun pada tahun 2023 hingga 2024 mulai merangkak naik kembali hal ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang sudah menerima vaksinasi Covid, menyebabkan tingkat kewaspadaan masyarakat dalam membeli makanan jadi menjadi berkurang. Selain itu, semakin merebak dan bermunculan pengusaha kuliner baru dengan berbagai kuliner kota lain yang di jajakan menjadikan masyarakat tertarik untuk mencoba dan menikmati kuliner tersebut. Bahkan terdapat perusahaan swasta yang memberikan bantuan booth untuk berjualan makanan minuman. Semakin berkembangnya era digital, semakin banyak inovasi dari kegiatan kategori ini terutama penyediaan makan minum. Dari sisi tempat, banyak tempat penjaja makanan dan minuman yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat pada konsumen. Demikian juga, menu dibuat dengan konsep yang menggugah para konsumen untuk membeli. Dari sisi pemasaran, dengan kemudahan teknologi, semakin mudah untuk memasarkan produk melalui media sosial maupun aplikasi belanja. Selain itu, faktor gaya hidup penduduk di Kabupaten Berau juga turut menyebabkan kegiatan penyediaan makan minum semakin berkembang.



c. Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk memperbesar pendapatan asli daerah maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata agar sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi dan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan dan tetap bertahan. Selain itu, perkembangan pariwisata juga hendaknya berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk dan tidak hanya bergantung kepada sektor yang tidak dapat diperbaharui seperti pertambangan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dapat lebih diarahkan pada peningkatan dan pengembangan industri pariwisata menjadi sektor andalan. Majunya sektor pariwisata di suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjungi. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama sebagai sumber pendapatan daerah (Nasrul, 2010).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu wilayah menarik untuk dikunjungi adalah dengan jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan yang tinggi dapat menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pada sektor pariwisata, suatu wilayah dapat mengalami kemajuan apabila jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari sektor ekonomi, adanya wisatawan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan penduduk dan daerah tersebut karena para wisatawan akan membeli oleh-oleh, baik dalam bentuk barang maupun jasa, membeli makanan atau minuman dari penduduk setempat atau pun menyewa akomodasi dan transportasi di wilayah pariwisata seperti *speedboat* atau perahu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk melakukan promosi serta meningkatkan potensi pariwisata Kabupaten Berau.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau pada lima tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara berfluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 127.396 orang dimana wisatawan domestik sebanyak



127.176 orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 220 orang. Jumlah wisatawan meningkat sebesar 11,06 persen pada tahun 2021 dimana jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Berau sebanyak 141.483 orang.

Tabel II.35
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024

Wisatawan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	220	85	283	1.666	4.294
Nusantara	127.176	141.398	397.054	420.926	552.920
Total	127.396	141.483	397.337	422.592	557.214

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Sama seperti tahun sebelumnya, wisatawan domestik pada tahun 2021 mendominasi kunjungan wisatawan dengan komposisi sebesar 99,94 persen atau sebanyak 141.398 orang sedangkan wisatawan mancanegara hanya sebanyak 85 orang. Hal ini dikarenakan masih adanya efek dari pandemi Covid19 menyebabkan turis asing membatasi untuk berkunjung ke Indonesia. Namun demikian pada tahun 2022 hingga 2024 turis asing kembali berminat untuk berkunjung ke Kabupaten Berau dimana mencapai 4.294 orang hingga tahun 2024. Tingginya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Berau yang selalu meningkat.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang mencerminkan vitalitas dan dinamika pasar tenaga kerja suatu wilayah. Lebih dari sekedar persentase, TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia produktif yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Interpretasi TPAK memiliki implikasi yang luas terhadap pemahaman kondisi sosio-ekonomi suatu daerah. TPAK yang tinggi umumnya mengindikasikan tingkat keterlibatan ekonomi yang robust dan potensi produktivitas yang besar. Hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, TPAK yang rendah dapat mengisyaratkan adanya tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja, seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia,



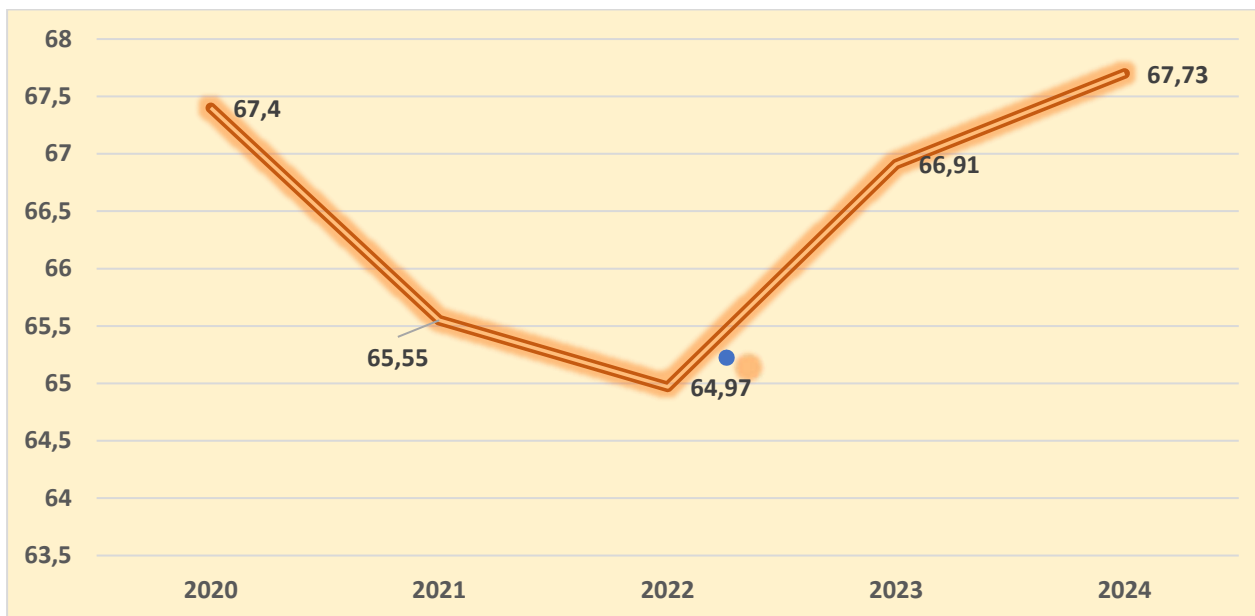
ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, atau faktor-faktor demografis dan sosial yang menghambat partisipasi.

Penting untuk dicermati bahwa TPAK tidak hanya mencakup mereka yang bekerja, tetapi juga mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan (pengangguran). Oleh karena itu, analisis TPAK perlu dikombinasikan dengan data tingkat pengangguran untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pasar tenaga kerja. TPAK yang tinggi namun diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan adanya ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap seluruh potensi angkatan kerja. Lebih lanjut, analisis TPAK berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik partisipasi angkatan kerja. Perbedaan TPAK antar kelompok ini dapat mengidentifikasi adanya disparitas dan potensi kelompok rentan dalam pasar tenaga kerja, yang memerlukan intervensi kebijakan yang spesifik. Dengan demikian, pemantauan dan analisis TPAK secara berkala menjadi esensial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang berkualitas, mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Berau selama periode 2020 - 2024 menunjukkan pergerakan yang dinamis, mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja atau mencari kerja). Angka TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 67,4 persen . Pada tahun berikutnya, 2021, TPAK mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 65,55 persen , dan tren penurunan ini berlanjut hingga mencapai titik terendah dalam periode ini yaitu 64,97 persen pada tahun 2022. Setelah penurunan selama dua tahun berturut-turut, TPAK mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2023 dengan kenaikan menjadi 66,91 persen. Momentum positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana TPAK mencapai 67,7 persen. Angka 67,7 persen pada tahun 2024 ini merupakan yang tertinggi dalam periode lima tahun pengamatan, bahkan sedikit lebih tinggi dari capaian tahun 2020. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya respons angkatan kerja terhadap kondisi ekonomi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal selama periode tersebut, termasuk potensi dampak pemulihan pasca-pandemi atau perubahan kondisi pasar kerja lokal. Meskipun ada penurunan di awal periode, kenaikan yang terjadi dalam dua tahun terakhir menunjukkan geliat positif dalam partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Berau.



Gambar II.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

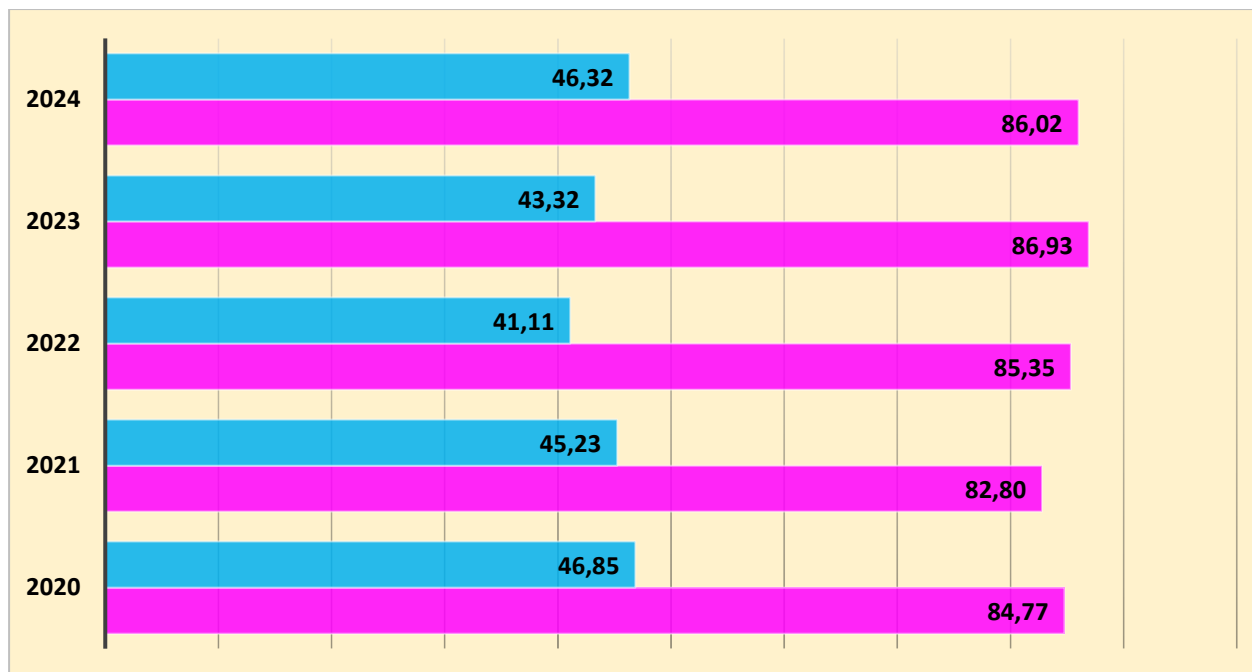
Partisipasi angkatan kerja perempuan juga sangat penting untuk melihat seberapa besar kesetaraan gender di bidang ketenakerjaan telah dilaksanakan, melalui TPAK perempuan maka menjadi salah satu indikator untuk mengukur keterlibatan perempuan yang turut serta dalam dunia kerja. Keberadaan tenaga kerja perempuan di dalam dunia kerja menjadi tantangan tersendiri hal ini dikarenakan label yang melekat kepada perempuan sebagai pekerja domestik (Ibu Rumah Tangga) menjadikan sulitnya perempuan bersaing dan menyisakan waktunya untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih besar dan jam kerja yang lebih banyak karena harus berbagi waktu dan tenaga untuk kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan gambar berikut diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2024 terlihat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Namun jika dilihat lebih seksama, maka dapat diketahui pola peningkatan TPAK perempuan lebih bervariasi, dimana pada tahun 2020 ke tahun 2022 terjadi penurunan yang awal 46,85 persen menjadi 41,11 persen dan merupakan TPAK terendah selama lima tahun terakhir, kendati demikian pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi kenaikan kembali. Salah satu penyebab terjadinya pergeseran ini dikarenakan dampak kejadian pandemi Covid 19, dimana adanya aturan pembatasan



aktivitas diluar rumah, menyebabkan banyak bisnis dan usaha yang terkena dampaknya sehingga para perempuan banyak yang tidak bekerja lagi.

Gambar II.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

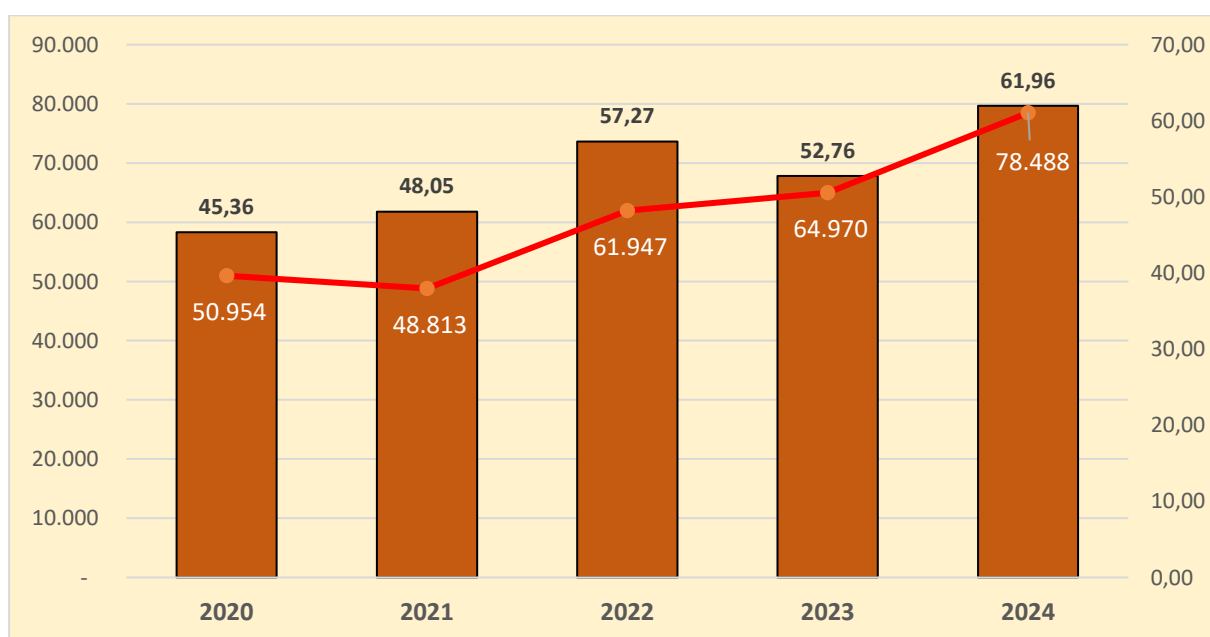
Namun pada tahun 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, angka TPAK perempuan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 43,22 persen dan meningkat lagi menjadi 46,32 persen di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan TPAK perempuan, namun kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan sangat signifikan. Hal ini menggambarkan adanya hambatan bagi perempuan untuk menjadi angkatan kerja, salah satunya dikarenakan masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik gender perempuan di Kabupaten Berau, dimana masih di dominasi sektor pertambangan dan penggalian yang notabene di dominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Selain itu masih adanya anggapan bahwa perempuan adalah pekerja domestik (ibu rumah tangga), sehingga membatasi keterlibatan perempuan untuk bekerja diluar rumah.



e. Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Untuk melihat potensi tenaga kerja di suatu wilayah telah terserap secara maksimal adalah melalui status pekerjaan. Status pekerjaan dapat digunakan sebagai gambaran tentang kedudukan dari penduduk yang bekerja. Secara lebih dalam, data status pekerjaan akan digunakan untuk melihat seberapa besar penduduk yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan seberapa besar penduduk yang mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang disediakan pihak lain. Selain itu, data ini diperlukan pula dalam penentuan kebijakan terkait program pembinaan usaha, peningkatan kapasitas pekerja dan lain sebagainya.

Gambar II.45
Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Pekerja sektor formal adalah tenaga kerja yang memiliki status buruh/karyawan/pegawai dan mereka yang berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar. Untuk pekerja informal di Kabupaten Berau lebih banyak dari pekerja formal yang terjadi pada tahun 2020 dimana terdapat sebesar 45,36 persen merupakan pekerja formal, sedangkan pekerja informal pada tahun 2020 ada sebesar 54,64 persen. Kondisi ini juga berlangsung di tahun 2021 dimana pekerja informal lebih besar dari pekerja formal. Akan tetapi terjadi kondisi berkebalikan di tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa



tenaga kerja pada pekerjaan informal masih dibawah jumlah pekerja yang terserap pada pekerjaan formal. Padahal dari kegiatan informal, salah satunya menunjukkan bahwa tenaga kerja berupaya menciptakan pekerjaan sendiri. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa kegiatan informal harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam rangka mendorong perkembangannya, mengingat kegiatan ini umumnya merupakan kegiatan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan politik. Supaya masyarakat dapat membuka usaha mandiri dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang perlahan akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

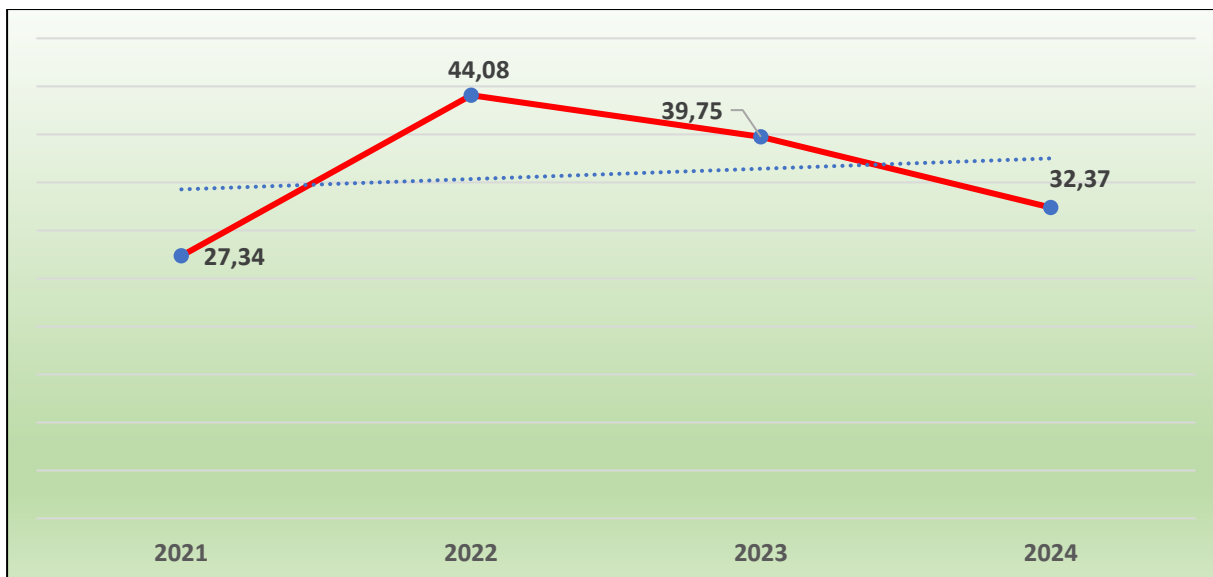
f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sebuah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks Inovasi Daerah memiliki maksud untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bentuk-bentuk inovasi daerah yang dapat dinilai dalam pengukuran indeks ini adalah inovasi dalam tata kelola pemerintahan (inovasi tata laksana internal, fungsi manajemen, dan pengelolaan unsur manajemen), inovasi dalam pelayanan publik (proses pemberian layanan barang/jasa publik), serta inovasi dalam bentuk lainnya (inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun kriteria penilaian dalam pengukuran indeks ini adalah pembaharuan inovasi, kemanfaatan, kepentingan publik, urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, dan bentuk replikasi/aplikasi dari inovasi. Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 3 range yaitu rangen 0,01-29,99 dengan predikat Kurang Inovatif, range 30,00-59,99 dengan predikat Inovatif, serta range 60,00-100,00 dengan predikat Sangat Inovatif.



Gambar II.46
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI

Pada tahun 2022 Kabupaten Berau memiliki nilai IID tertinggi selama kurun lima tahun terakhir yaitu sebesar 44,08 dengan predikat inovatif, namun turun kembali di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai indeks masing-masing 39,75 dan 32,37 dengan predikat masih inovatif. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau hendaknya senantiasa meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat secara transparan, mendorong penerapan *good governance*, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi daerah, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.

3. Transformasi Digital

a. Persentase Penduduk Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital saat ini, komunikasi dan informatika menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, di Kabupaten Berau, aspek ini belum sepenuhnya merata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari terbatasnya jumlah kantor pos pembantu di setiap kecamatan. Ketersediaan jaringan telekomunikasi juga menjadi penentu utama akses internet bagi penduduk. Semakin luas jangkauan internet, semakin besar manfaatnya untuk berbagai keperluan seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah desa/kelurahan yang terhubung jaringan internet terus meningkat setiap tahunnya. Pada



tahun 2020, tercatat 86 dari total desa/kelurahan di Kabupaten Berau sudah terjangkau jaringan internet, menyisakan 24 desa yang belum terkoneksi. Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya meningkatkan konektivitas ini, salah satunya melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) yang memberikan bantuan berupa Very Small Internet Satelit (VSAT) di 25 titik untuk wilayah pesisir dan pedalaman. Layanan internet satelit ini diperuntukkan bagi kantor desa, sekolah, dan puskesmas dengan kecepatan 2 hingga 3 Megabytes.

Rencana implementasi jangka menengah adalah terlaksananya penambahan 500 titik Wifi gratis serta penambahan kapasitas bandwidth dari 5 Mbps/kampung menjadi 10 Mbps/kampung. Disamping itu tetap mengupayakan untuk mengusulkan penambahan pembangunan BTS di Kabupaten Berau. Sampai dengan akhir tahun 2024. Kabupaten Berau akan mendapatkan tambahan 2 BTS, yang akan dibangun di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur dan Kampung Campursari Kecamatan Talisayan. Hingga tahun 2024 telah terpasang 1.004 titik wifi. Dimana Kecamatan Tanjung Redeb memiliki titik wifi paling banyak yaitu sebanyak 229 titik wifi sedangkan Kecamatan Maratua hanya memiliki 7 titik, hal ini sesuai dengan jumlah penduduknya.

Dari sisi perangkat komunikasi, telepon genggam atau *handphone* (HP) telah menjadi alat komunikasi yang sangat umum di masyarakat. HP berfungsi sebagai perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang memungkinkan pengiriman pesan tulisan, suara, dan bahkan video secara nirkabel melalui jaringan telepon menggunakan kabel. Alat komunikasi ini mempermudah komunikasi antar pengguna tanpa harus bertatap muka, dan juga memiliki berbagai fitur tambahan yang semakin berkembang. HP saat ini juga berfungsi sebagai media hiburan dengan berbagai aplikasi seperti musik, permainan, dan pemutar video.

Tabel II.36
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas
menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Tiga Bulan
Terakhir Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer	85,97	89,74	87,10	87,54	85,41
2	Mengakses Internet	64,17	70,11	79,93	80,92	78,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Penggunaan peralatan komunikasi informasi mengalami kenaikan di setiap tahunnya, Dimana persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas di Kabupaten Berau yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel atau komputer menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan peningkatan dari 85,97 persen di tahun 2020 menjadi 87,54 persen di tahun 2021, sebelum kemudian menurun menjadi 85,41 persen di tahun 2024, mengindikasikan dinamika penggunaan teknologi komunikasi yang beragam. Sementara itu, persentase yang mengakses internet menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 64,17 persen di tahun 2020 menjadi 80,92 persen di tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 78,78 persen di tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perluasan akses internet di wilayah tersebut meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir.

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Pada sisi yang berbeda, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Salah satu yang mencirikan suatu barang dianggap sebagai kapital adalah barang tersebut dapat digunakan dalam suatu proses produksi selama lebih dari satu tahun. Barang yang berfungsi sebagai kapital ini berperan sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Sedangkan ketika penggunaan barang hanya berumur kurang dari satu tahun, maka barang tersebut dianggap sebagai biaya antara.

Tabel II.37
Rasio dan Pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB	22,65	18,95	14,41	19,26	21,74
Pertumbuhan	-3,99	0,14	4,29	6,39	5,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami fluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa



pengeluaran untuk investasi atau pembelian barang modal yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha maupun rumah tangga di Kabupaten Berau, terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Pembelian barang modal lebih banyak untuk pembangunan gedung (baik gedung tempat tinggal maupun gedung bukan tempat tinggal), jalan, jembatan, jaringan atau konstruksi lainnya daripada untuk pembelian mesin, kendaraan atau peralatan lainnya. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya perusahaan CPO yang berdiri dan beroperasi hingga tahun 2024.

Kondisi yang sama juga terjadi dari sisi pertumbuhan, komponen PMTB memiliki pertumbuhan yang berfluktuasi naik turun selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Pertumbuhan komponen PMTB yang tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 6,39 persen. Di sisi lain, terjadi kontraksi ekonomi pada komponen PMTB pada tahun 2020 yaitu -3,99 persen.

b. Ekspor Barang dan Jasa

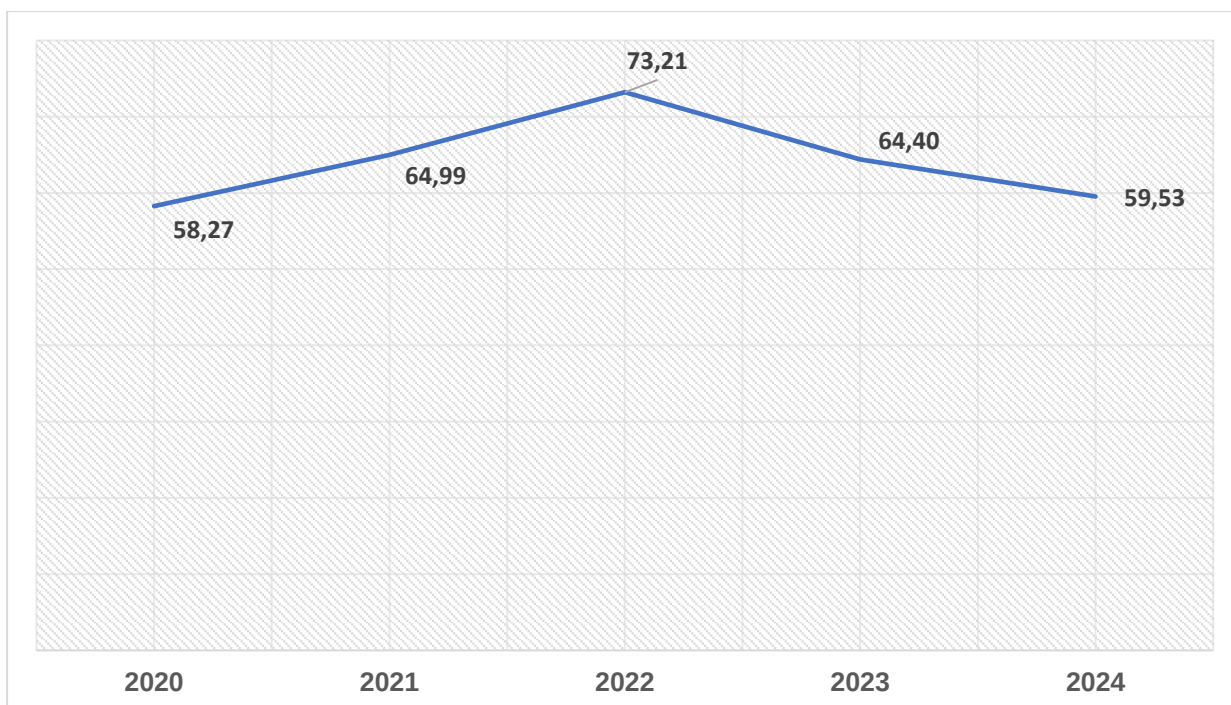
Terjadinya transaksi ekonomi antar wilayah menyebabkan munculnya dua kegiatan yaitu ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa. Namun, dalam PDRB menurut pengeluaran di tingkat kabupaten/kota, komponen ini dijadikan satu komponen yang disebut ekspor neto barang dan jasa. Secara matematis, ekspor neto barang dan jasa didefinisikan sebagai selisih antara ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah. Perhitungan ekspor-impor barang dan jasa antar daerah dan ekspor-impor luar negeri berbeda karena tidak tersedia sumber data ekspor-impor antar daerah yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Informasi yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi, namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Sebagai contoh, ketika penduduk Kabupaten Berau bepergian ke Kota Samarinda, dan disana mengkonsumsi makanan maupun membeli pakaian, maka Kabupaten Berau dianggap melakukan impor makanan dan pakaian dari Kota Samarinda. Sebaliknya, ketika terdapat wisatawan dari Kota Balikpapan yang berkunjung ke daerah wisata di Kabupaten Berau, maka ketika wisatawan tersebut tinggal di penginapan dan mengkonsumsi makanan di daerah wisata tersebut, maka dianggap Kabupaten Berau melakukan ekspor jasa akomodasi dan makan minum ke Kota Balikpapan.

Kondisi yang hanya diketahui adanya transaksi tanpa diketahui besaran ekspor ataupun impornya, menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah dalam



komponen PDRB menurut pengeluaran (dalam series PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual) antara total PDRB menurut pengeluaran dan total PDRB menurut lapangan usaha. Jadi ketersediaan data komponen ini lebih sesuai dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Gambar II.47
Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Secara umum, ekspor neto barang dan jasa di Kabupaten Berau merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau menurut pengeluaran. Pada tahun 2020, komponen ini berkontribusi sebesar 58,27 persen terhadap total perekonomian. Kontribusi ini terendah selama lima tahun terakhir, kemudian terus meningkat menjadi 73,21 persen pada tahun 2022 dan merupakan tertinggi. Dan kontribusi komponen ini cenderung menurun pada dua tahun berikutnya.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Kabupaten Berau termasuk dalam kategori daerah eksportir. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor neto yang selalu bernilai positif. Angka positif ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, nilai ekspor barang dan jasa ke luar daerah selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai impor barang dan jasa dari daerah lain. Nilai ekspor neto ini akan selalu bernilai positif asalkan kenaikan



nilai nominal pada komponen ekspor masih lebih lebih besar dibandingkan kenaikan pada komponen impor. Sebagai daerah eksportir, perkembangan ekspor neto di Kabupaten Berau sangat dipengaruhi oleh perkembangan produk-produk ekspor seperti batu bara, kayu log's, CPO, kernel dan berbagai produk lainnya. Selain ekspor barang, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemerintah maupun badan usaha, beberapa barang perlu didatangkan luar Kabupaten Berau (impor). seperti alumunium nitrat, semen, batu pecah, kontainer, bahan bakar seperti solar, bensin dan pertamax.

5. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Sarana prasarana pembangunan adalah fondasi yang menopang kemajuan suatu wilayah, melampaui sekadar keberadaan fasilitas fisik. Ia merupakan sistem kompleks yang terintegrasi, mencakup infrastruktur keras seperti transportasi, energi, komunikasi, dan air, serta infrastruktur lunak seperti sistem kelembagaan, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Pembangunan sarana prasarana yang terencana dengan matang, berkualitas, dan berkelanjutan adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pengembangan sarana prasarana yang efektif membutuhkan visi jangka panjang dan perencanaan strategis yang holistik. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan prioritas berdasarkan analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan wilayah, serta integrasi dengan rencana pembangunan sektor lainnya. Selain itu, inovasi teknologi dan praktik terbaik dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perlu diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Lebih lanjut, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, adalah kunci keberhasilan pembangunan sarana prasarana. Kemitraan publik-swasta (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan menarik investasi swasta yang inovatif. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penting untuk memastikan bahwa pembangunan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Sarana prasarana pembangunan yang handal dan merata akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan akses yang lebih baik



terhadap pasar, layanan, dan peluang kerja. Juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, transportasi yang efisien, dan akses informasi yang luas. Dengan demikian, investasi strategis dalam sarana prasarana adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

1. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur merupakan urat nadi pembangunan suatu daerah, lebih dari sekadar kumpulan fasilitas fisik dan non-fisik. Infrastruktur adalah sistem terintegrasi yang menopang seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan berkualitas menjadi prasyarat esensial untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan daerah.

Infrastruktur fisik, seperti jaringan transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), sistem energi (listrik, gas), jaringan air bersih dan sanitasi, serta telekomunikasi, menciptakan landasan konektivitas dan efisiensi yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan manusia yang lancar. Ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai menarik investasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur non-fisik, termasuk sistem informasi dan komunikasi, regulasi dan kelembagaan, serta kapasitas sumber daya manusia, memiliki peran yang sama pentingnya. Sistem informasi dan komunikasi yang handal memfasilitasi pertukaran informasi dan inovasi. Regulasi dan kelembagaan yang efektif menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum. Kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni memastikan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang optimal.

Dalam konteks RPJMD, pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara strategis dan terintegrasi dengan visi pembangunan daerah secara keseluruhan. Prioritas pembangunan infrastruktur hendaknya selaras dengan potensi unggulan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu didorong untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan dan pengelolaan yang inovatif. Evaluasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi krusial



untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Sarana infrastruktur dan kemudahan aksesibilitas merupakan fondasi krusial yang menopang seluruh aktivitas masyarakat serta menjadi katalisator utama dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi, komunikasi, energi, dan layanan dasar, memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan menarik investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi infrastruktur pembangunan yang belum optimal, seperti yang terjadi di Kabupaten Berau, dapat menghambat distribusi, mobilitas, akses layanan, dan investasi, sehingga berpotensi memperlambat pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang strategis dan terencana menjadi prioritas utama dalam RPJMD. Upaya ini memerlukan identifikasi kebutuhan mendesak, alokasi anggaran yang tepat, pemanfaatan teknologi inovatif, koordinasi antar instansi yang kuat, dan partisipasi masyarakat. Pemeliharaan infrastruktur yang ada juga krusial untuk keberlanjutan manfaatnya. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai, Kabupaten Berau dapat mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata serta berkelanjutan.

Tabel II.38
Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	442,75	452,62	480,83	515,53	499,75
Kerikil	176,8	201,89	256,77	323,42	157,82
Tanah	966,36	927,82	827,69	698,89	676,13
Beton	92,41	95,99	113,03	140,48	99,81
Jumlah	1.678,32	1.678,32	1.678,32	1.678,32	1.433,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Berau

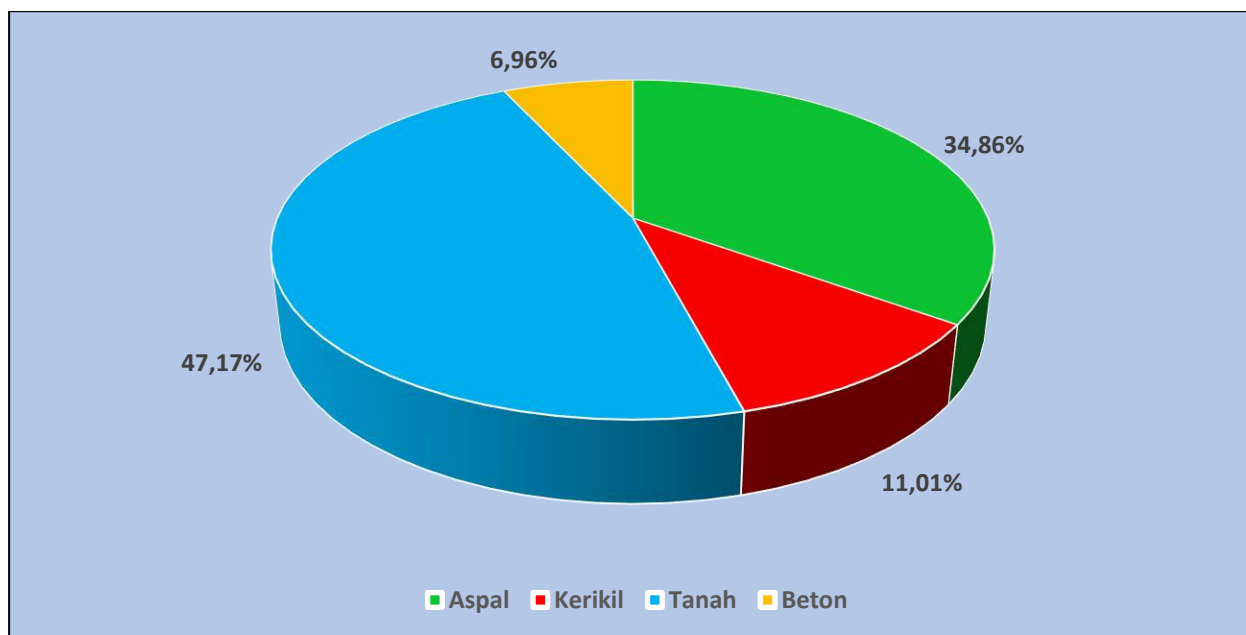
Analisis dari tabel panjang jalan di Kabupaten Berau menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan panjang jalan beraspal dan beton, yang menandakan perkembangan infrastruktur jalan yang lebih baik, panjang jalan kerikil mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2023 namun mengalami penurunan drastis di tahun 2024. Sementara itu,



panjang jalan tanah terus mengalami penurunan, yang dapat mengindikasikan upaya perbaikan dan pengaspalan jalan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, terdapat dinamika dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Berau, dengan tren positif dalam peningkatan jalan beraspal dan jalan tanah yang terus mengalami penurunan, namun fluktuasi pada jalan kerikil dan beton. Selain itu juga perlu perhatian lebih lanjut pada penurunan jumlah jalan kewenangan Kabupaten Berau.

Persentase panjang jalan di Kabupaten Berau berdasarkan jenis permukaannya pada tahun 2024, di mana jenis permukaan tanah mendominasi dengan 47,17 persen dari total panjang jalan, diikuti oleh aspal sebesar 34,86 persen, kemudian kerikil sebesar 11,01 persen, dan yang paling sedikit adalah beton dengan hanya 6,96 persen, yang secara keseluruhan mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Berau masih didominasi oleh jenis permukaan yang kurang optimal, yaitu tanah dan kerikil. Adanya penurunan panjang jalan sepanjang 244,81 km di tahun 2024 mengindikasikan penurunan infrastruktur jalan di Kabupaten Berau dan peralihan kewenangan jalan menjadi tingkat provinsi dan pusat.

Gambar II.48
Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
Kabupaten Berau Tahun 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Berau



Data kondisi jalan di Kabupaten Berau menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang relatif stabil hingga 2023, terjadi penurunan dramatis pada tahun 2024, terutama pada jalan dengan kondisi sedang, hal ini disebabkan panjang jalan yang beralih fungsi kewenangannya sehingga jalan yang dulu di tahun 2020-2023 merupakan kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Sebaliknya, panjang jalan dengan kondisi rusak berat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan penurunan kualitas infrastruktur secara umum.

Tabel II.39
Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

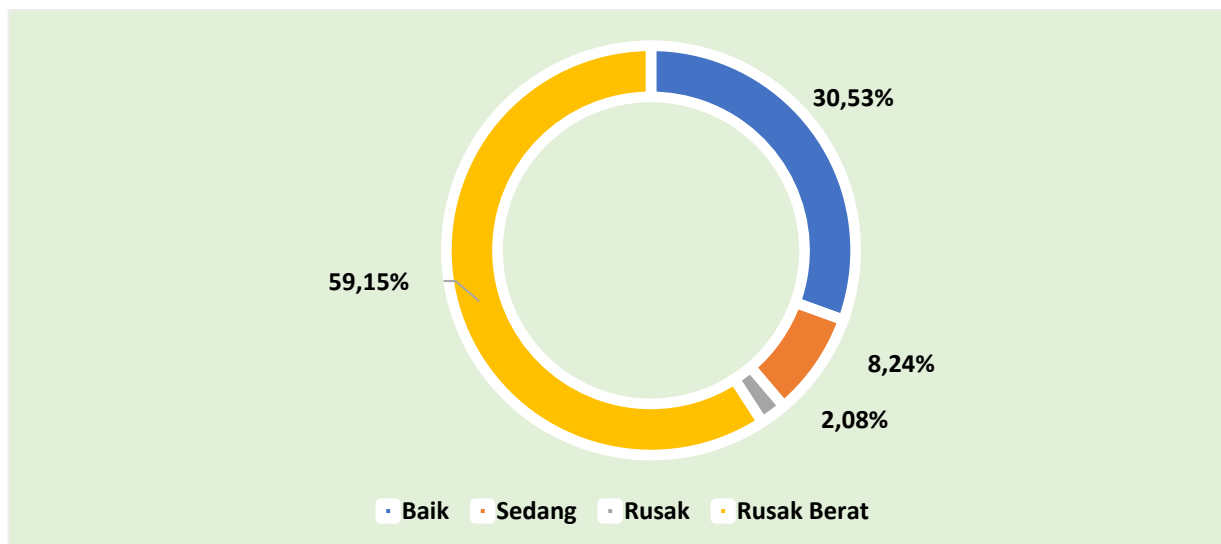
Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	487,13	496,13	501,63	501,63	437,60
Sedang	610,61	615,11	621,61	623,61	118,14
Rusak	462,1	484,89	378,11	376,11	29,80
Rusak Berat	118,48	82,19	176,97	176,97	847,96
Jumlah	1.678,32	1678,32	1.678,32	1.678,32	1.433,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Berau

Persentase panjang jalan di Kabupaten Berau berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2024, di mana mayoritas jalan berada dalam kondisi rusak berat (59,15 persen) dan baik (30,53 persen), sementara persentase jalan yang sedang dan rusak relatif kecil masing-masing sebesar 8,24 persen dan 2,08 persen, menandakan sebagian besar infrastruktur jalan di Kabupaten Berau dalam kondisi rusak berat sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi jumlah jalan yang rusak dan rusak berat. Adanya peningkatan signifikan jalan yang rusak berat sepanjang 847,96 km di tahun 2024 mengindikasikan penurunan kualitas infrastuktur jalan di Kabupaten Berau.



Gambar II.49
Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Berau Tahun 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Berau

2. Infrastruktur Perhubungan

Secara geografis, Kabupaten Berau terletak paling jauh dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, keberadaan infrastruktur seperti Bandar Udara (Bandara) Kalimarau dan Pelabuhan Tanjung Redeb mempermudah arus keluar masuk orang maupun barang. Bandara Kalimarau mulai dibangun pada tahun 2010 dan beroperasi dua tahun kemudian. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.250 meter dengan lebar 45 meter, *taxiway* 179 meter x 23 meter, dan apron seluas 139 meter x 110 meter. Bandara ini merupakan bandara pertama di Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan *centre light*. Pada tahun 2023, tercatat 3.050 penerbangan yang berangkat dari Kabupaten Berau dengan total 174.784 penumpang, rata-rata 57 penumpang per penerbangan. Jumlah keberangkatan pesawat dan penumpang ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, jumlah pesawat yang datang dan berangkat hampir sama, namun cenderung lebih banyak pesawat yang datang.

Data jumlah penerbangan dari Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah penumpang berangkat dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan konsisten setiap tahunnya, mencapai angka 202.849 penumpang pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah pesawat berangkat menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan pada tahun 2021 dan lonjakan signifikan pada tahun 2022



dan 2023, sebelum mengalami penurunan kembali di tahun 2024.

Tabel II.40
Perkembangan Penumpang Angkutan Udara (Orang) di Bandara Kalimantan
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penumpang Berangkat	106.965	109.779	135.086	174.784	202.849
Jumlah Pesawat Berangkat	1.579	1.214	2.258	3.050	2.698

Sumber: Bandara Kalimantan Kabupaten Berau

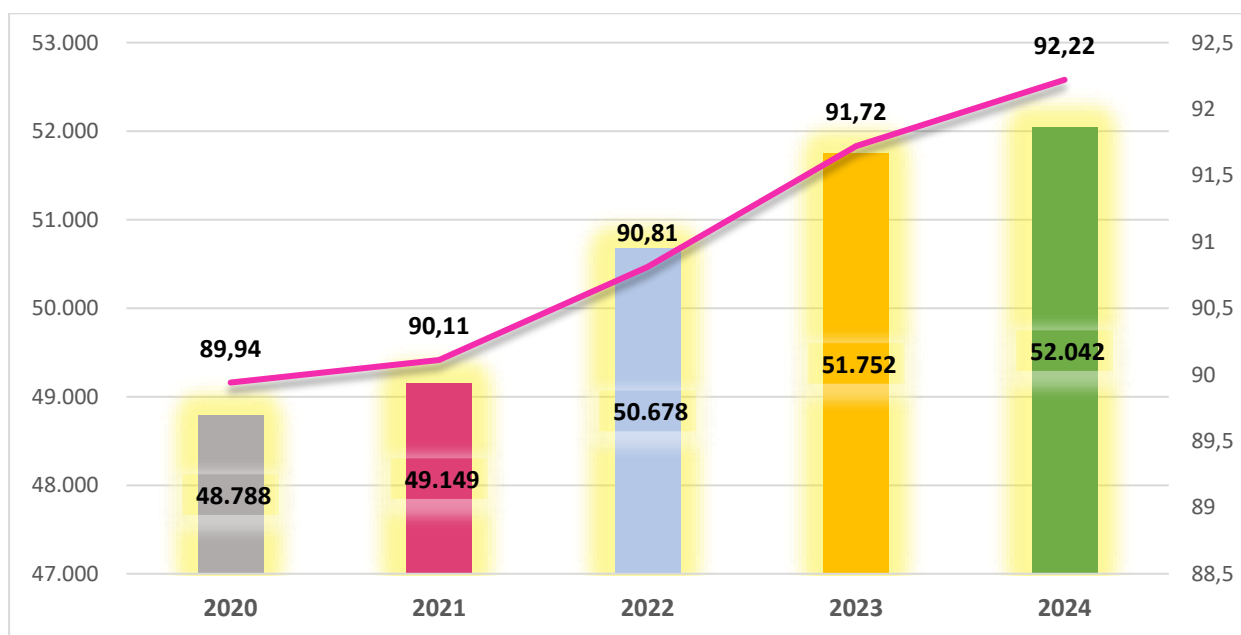
Sektor perhubungan merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang esensial, namun berbeda dari layanan dasar. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam urusan perhubungan yang terbagi menjadi beberapa subsektor, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan, serta Perkeretaapian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketersediaan infrastruktur perhubungan yang memadai memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam memajukan wilayah Kabupaten Berau. Pengembangan infrastruktur ini berlandaskan pada prinsip konektivitas sistem yang handal, dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya logistik dan pergerakan orang maupun barang. Selain itu, pengembangan potensi pusat-pusat transportasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Jika melihat jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian rasioa selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan. Hal ini menandakan Kabupaten Berau mampu secara efektif dan efisien untuk menyediakan hunian yang layak bagi penduduknya. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan permukiman tahun 2020-2024 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten Berau itu sendiri.



Gambar II.50
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kabupaten Berau

Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Hal ini disebabkan permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kabupaten Berau utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan

Jika melihat pada luas kawasan kumuh menurut kewenangan untuk Kabupaten Berau berdasarkan SK Bupati No 30 tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 25,79 Ha adalah kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 2,47 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.



c. Persentase Desa Mandiri

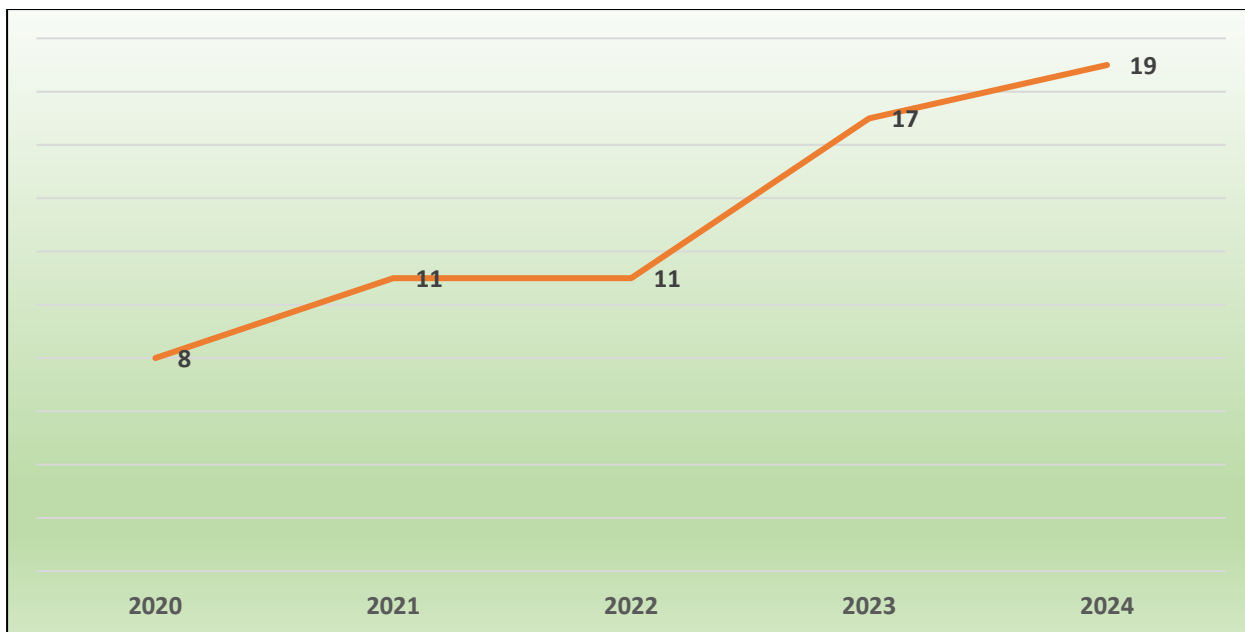
Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Hingga tahun 2024 desa diklasifikasikan menjadi Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Selama kurun waktu lima tahun yaitu dari 2020 hingga 2024 diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase desa mandiri dimana dari 100 desa yang ada di kabupaten Berau pada tahun 2020 ada sebanyak 8 desa meningkat menjadi 19 desa pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Selain itu dengan adanya Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk desa, maka sangat membantu desa/kampung yang ada untuk bisa membangun wilayah dan sumber daya manusianya.

Selain itu dengan banyaknya perusahaan swasta yang melakukan kegiatan operasional di desa-desa maka sangat berpengaruh terhadap kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana untuk masyarakatnya. Melalui bantuan perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility*, yang merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memikirkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas kegiatan perusahaan. Maka hal ini tentu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa tersebut.



Gambar II.51
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

6. Stabilitas Ekonomi Makro

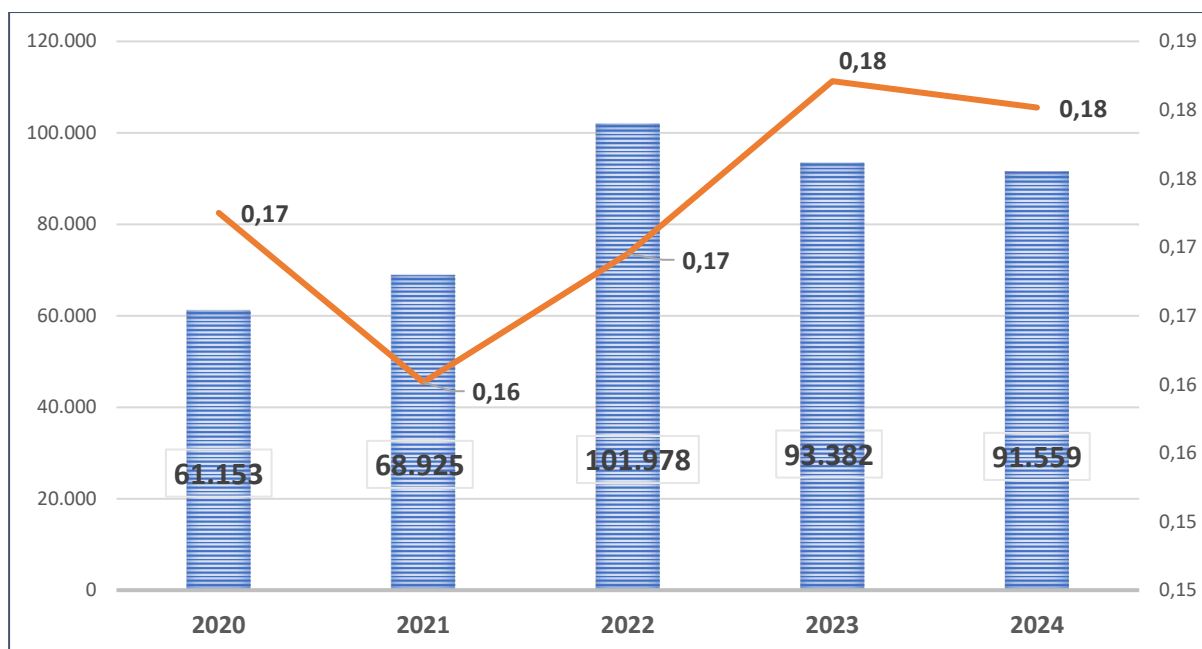
a. Rasio pajak daerah terhadap PDRB

Rasio pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu daerah. Rasio ini menunjukkan persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu. Rasio pajak yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang baik dalam mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonomi, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

Rasio pajak Kabupaten Berau menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan nilai pajak masih dibawah 0,5 persen. Rendahnya rasio pajak ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Berau masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio pajak antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, basis pajak yang sempit, serta adanya praktik penghindaran pajak dan ekonomi informal yang cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan berbagai upaya, termasuk memperluas basis pajak, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan.



Gambar II.52
Jumlah dan Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber : Bapenda dan BPS Kabupaten Berau

Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Berau juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak melalui berbagai program edukasi dan kampanye publik. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor penting lainnya.

b. Inflasi

Laju inflasi diukur untuk mengetahui tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan harga pada kelompok transportasi, makanan, dan jasa lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut :

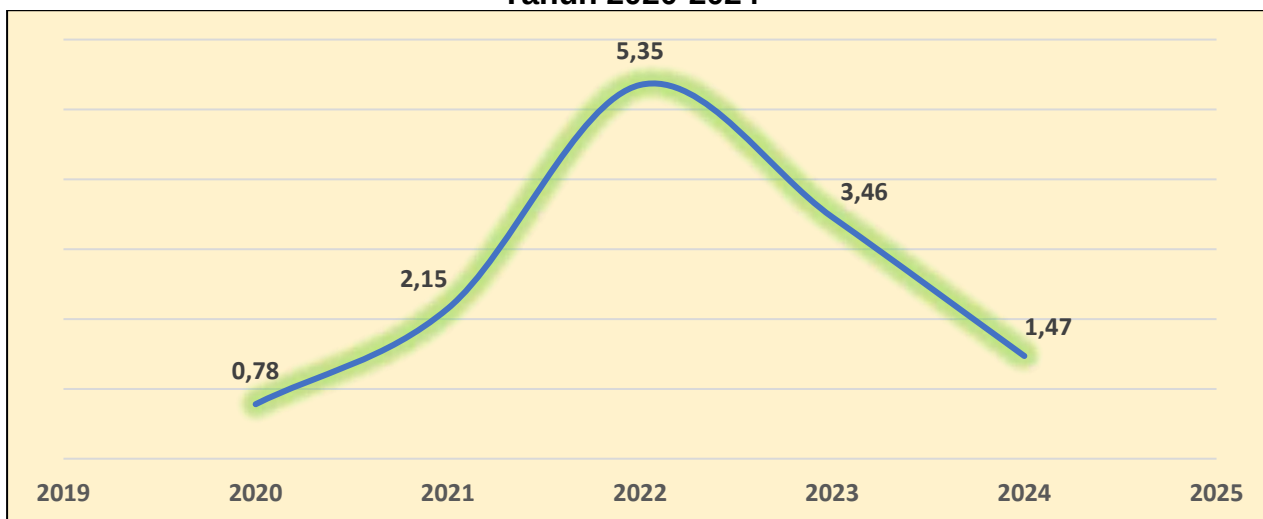
- Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.



- Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.
- Keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada tahun 2022-2023 angka inflasi Kabupaten Berau masih mengacu pada angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi pada tahun 2020 tercatat rendah sebesar 0,78 persen akibat pembatasan mobilitas saat pandemi. Inflasi meningkat pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 2,15 persen dan 5,35 persen, seiring dengan kenaikan harga BBM. Tahun 2024 menunjukkan inflasi sebesar 1,47 persen.

Gambar II.53
Laju Inflasi (Persen) Kabupaten Berau (Pendekatan Provinsi Kalimantan Timur)
Tahun 2020-2024



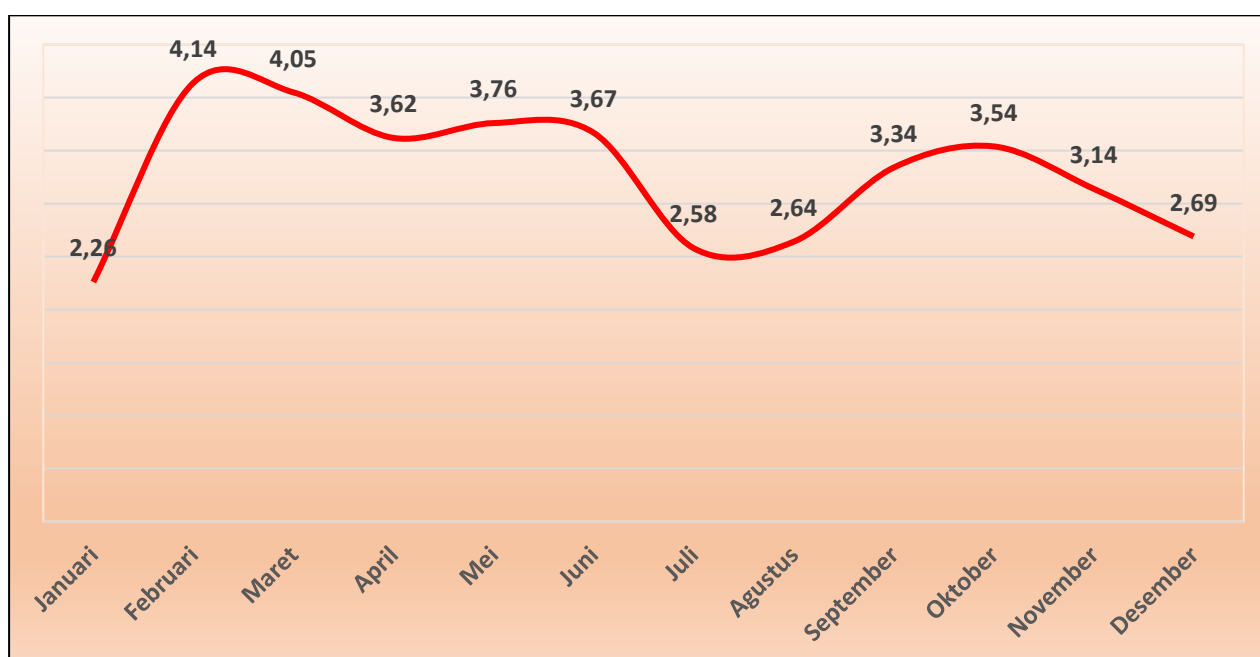
Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2024 Kabupaten Berau telah mengeluarkan angka inflasi sendiri, sehingga tidak menggunakan pendekatan angka Provinsi Kalimantan Timur lagi. Data inflasi bulanan tahun 2024 menunjukkan angka terendah pada bulan Januari (2,26 persen) dan tertinggi pada Februari (4,14 persen), kemudian bergerak fluktuatif hingga mencapai 2,69 persen pada bulan Desember dan juga merupakan inflasi *y-on-y*.



Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada bulan Desember 2024, antara lain: tarif rumah sakit, ikan layang/ ikan benggol, kopi bubuk, beras, udang basah, emas perhiasan, bayam, kangkung, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, sepeda motor, terong, sawi hijau, bawang putih, makanan ringan/snack, es, sekolah dasar, sewa rumah, dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sedangkan, komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: angkutan udara, cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, pisang, bensin, ikan bandeng/ikan bolu, telepon seluler, jagung manis, air kemasan, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ketimun, sabun mandi cair, tahu mentah, sabun cair/cuci piring, biskuit, masker, tempe, sandal karet pria, dan cumi-cumi.

Gambar II.54
Laju Inflasi (Persen) Per Bulan Kabupaten Berau Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator makroekonomi fundamental yang menjadi cerminan komprehensif aktivitas produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB merupakan indikator komprehensif yang melampaui sekadar angka statistik. PDRB adalah cerminan denyut nadi aktivitas ekonomi suatu daerah, merangkum nilai seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Lebih dari sekadar penjumlahan nilai tambah bruto, PDRB



menggambarkan potensi ekonomi, struktur produksi, dan tingkat produktivitas suatu wilayah.

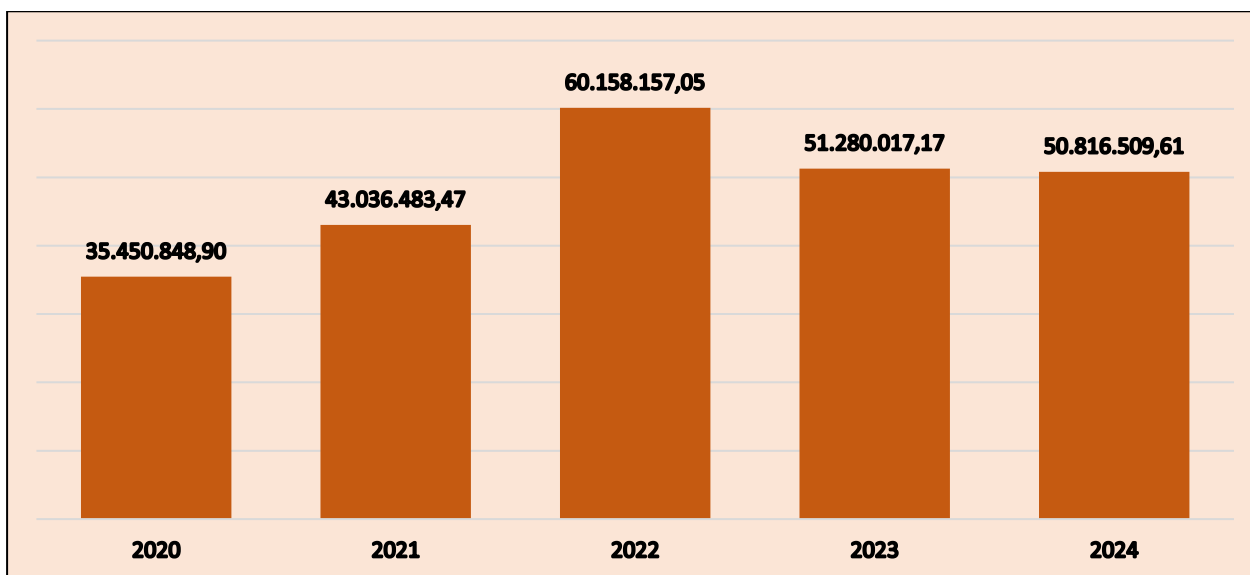
Penting untuk dipahami bahwa tren pertumbuhan PDRB memberikan sinyal vital mengenai dinamika pembangunan ekonomi. Peningkatan PDRB yang berkelanjutan mengindikasikan adanya ekspansi kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan PDRB dapat menjadi alarm perlunya intervensi kebijakan untuk stimulan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, analisis PDRB per kapita memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk suatu daerah. Meskipun PDRB total tinggi, PDRB per kapita yang rendah dapat mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, fokus tidak hanya tertuju pada peningkatan PDRB secara agregat, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan PDRB per kapita secara merata dan berkelanjutan. Struktur PDRB berdasarkan sektor ekonomi memberikan gambaran mengenai kekuatan dan ketergantungan ekonomi suatu daerah. Dominasi sektor tertentu dapat mengindikasikan potensi dan risiko yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, PDRB bukan hanya sekadar angka, melainkan fondasi penting bagi analisis ekonomi yang mendalam dan perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. PDRB menjadi kompas yang memandu arah pembangunan ekonomi suatu daerah menuju kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkeadilan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pergerakan fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai PDRB Kabupaten Berau mencapai 35,45 triliun rupiah, menjadikannya angka terendah dalam periode ini akibat dampak pandemi COVID-19. Kemudian, PDRB meningkat menjadi 43,04 triliun rupiah pada tahun 2021, menunjukkan pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan nilai PDRB mencapai 60,15 triliun rupiah, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Selanjutnya, PDRB mengalami penurunan menjadi 51,28 triliun rupiah pada tahun 2023, namun masih lebih tinggi dari angka sebelum tahun 2022. Terakhir, pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Berau tercatat sebesar 50,81 triliun rupiah. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, tren menunjukkan peningkatan PDRB dari tahun 2020 hingga 2024, mengindikasikan perkembangan positif dalam perekonomian daerah.



Gambar II.55
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Berau dapat digambarkan dari beberapa sektor. Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, data menunjukkan tren peningkatan nilai nominal yang relatif stabil dari tahun ke tahun (dari 4.151.760,06 juta rupiah di 2020 menjadi 6.313.506,38 juta rupiah di tahun 2024). Stabilitas nominal ini mengindikasikan bahwa sektor primer ini berfungsi sebagai komponen fundamental yang memberikan kontribusi basis pada struktur ekonomi regional, meskipun laju pertumbuhannya dalam nilai ADHB tidak sefluktuatif sektor lain yang didorong oleh harga komoditas.

Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalan menampilkan karakteristik *volatilitas ekstrem* dalam kontribusi nominalnya. Sektor ini mendominasi struktur PDRB ADHB Kabupaten Berau, dengan nilai yang melonjak signifikan dari 19.950.122.57 juta rupiah (2020) menjadi puncak 40.294.891,20 juta rupiah (2022), sebelum menurun drastis menjadi 29.882.562,46 juta rupiah (2023) dan 26.972.959,28 juta rupiah (2024). Fluktuasi tajam ini sangat kuat indikasinya didorong oleh *shock eksogen* pada harga komoditas global, mengingat karakteristik Kabupaten Berau sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Dominasi nominal sektor ini menjadikan agregat PDRB ADHB regional sangat sensitif terhadap pergerakan harga di pasar internasional.



Sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren peningkatan nilai nominal yang konsisten (dari 1.695,686,51 juta rupiah di 2020 menjadi 2.512,159,87 juta rupiah di 2024). Meskipun kontribusinya secara nominal jauh lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan, pertumbuhan yang stabil ini mengindikasikan adanya aktivitas peningkatan nilai tambah (*value addition*) pada output primer, yang merupakan elemen positif dalam proses *transformasi struktural* ekonomi regional, meskipun lajunya relatif moderat.

Kelompok sektor-sektor lainnya yang mencakup Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, dan Jasa Perusahaan, secara umum menunjukkan tren peningkatan nilai nominal yang stabil dan positif. Pertumbuhan pada sektor-sektor ini, terutama Konstruksi, Transportasi, dan Utilitas, dapat diinterpretasikan sebagai indikasi akumulasi modal fisik (infrastruktur) dan pengembangan jaringan distribusi serta layanan pendukung ekonomi. Pertumbuhan pada sektor Perdagangan, Akomodasi, dan Informasi&Komunikasi merefleksikan dinamika pasar domestik dan aksesibilitas informasi. Sektor-sektor ini secara kolektif berkontribusi pada diversifikasi nominal struktur ekonomi, meskipun kontribusi agregatnya masih di bawah sektor pertambangan.

Sektor-sektor Jasa seperti Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya juga menunjukkan tren peningkatan nilai nominal yang positif. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan atau penyediaan layanan terkait modal manusia dan kualitas hidup, yang merupakan aspek penting dari pembangunan sosial-ekonomi. Terakhir, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 (dari 529.437,33 juta rupiah di 2023 menjadi 687.351,51 juta rupiah di 2024). Peningkatan nominal pada sektor ini merefleksikan peningkatan belanja pemerintah (*government expenditure*), yang merupakan komponen PDRB dari sisi pengeluaran dan sekaligus kontributor dari sisi produksi (output layanan publik).

Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Berau menunjukkan tren pertumbuhan, meskipun dengan fluktuasi di sektor pertambangan. Diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari data di



bawah, diketahui bahwa sektor pertambangan memiliki pengaruh besar terhadap PDRB Kabupaten Berau.

**Tabel II.41
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.151.760,06	5.049.853,43	5.615.073,24	5.775.964,83	6.313.506,38
Pertambangan dan Penggalian	19.950.112,57	25.686.108,12	40.294.891,20	29.882.562,46	26.972.959,28
Industri Pengolahan	1.695.686,51	1.860.854,54	2.099.593,11	2.222.289,84	2.512.159,87
Pengadaan Listrik dan Gas	15.166,78	15.266,49	16.246,11	18.097,21	20.331,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.211,51	16.151,22	17.725,25	19.506,64	22.505,39
Konstruksi	1.474.400,67	1.610.799,15	2.018.436,80	2.290.702,75	2.617.847,65
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.314.952,20	2.463.594,06	3.000.854,83	3.325.012,08	3.672.775,01
Transportasi dan Pergudangan	2.177.874,77	2.329.360,55	2.691.918,08	3.030.591,47	3.388.903,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	442.716,31	449.684,82	489.217,27	525.057,17	592.732,17
Informasi dan Komunikasi	383.273,45	409.092,94	435.222,57	461.174,01	502.316,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	211.022,11	217.192,50	245.238,01	274.065,43	303.522,97
Real Estate	351.387,10	358.410,91	370.565,39	379.155,16	400.467,88



Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Perusahaan	37.861,84	40.586,11	43.092,13	47.760,46	53.608,94
Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	432.547,91	442.403,15	478.816,02	529.437,33	687.351,51
Jasa Pendidikan	1.075.138,22	1.192.391,79	1.335.740,54	1.414.385,60	1.562.551,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.539,81	589.635,42	663.468,06	707.471,22	760.922,57
Jasa Lainnya	279.197,08	305.098,26	342.058,43	376.783,52	432.047,22
PDRB	35.450.848,90	43.036.483,47	60.158.157,05	51.280.017,17	50.816.509,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Data distribusi PDRB Kabupaten Berau, sektor Pertambangan dan Penggalian secara konsisten mendominasi dengan kontribusi tertinggi. Kontribusi sektor ini secara konsisten merupakan yang tertinggi, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pangsa sebesar 66,98 persen dari total PDRB ADHB. Fluktuasi signifikan dalam kontribusi persentase ini (dari 56,28 persen di 2020, naik tajam ke 66,98 persen di 2022, kemudian menurun ke 58,27 persen di 2023 dan 53,08 persen di 2024) secara langsung merefleksikan pengaruh dominan pergerakan harga komoditas terhadap nilai nominal sektor ini relatif terhadap sektor-sektor lain. Penurunan pangsa di tahun 2023-2024, meskipun nilainya masih sangat dominan, kemungkinan besar bukan disebabkan oleh kontraksi volume produksi yang proporsional lebih besar dari sektor lain, melainkan oleh penurunan harga komoditas yang menyebabkan nilai nominal sektor pertambangan turun lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nominal sektor-sektor lain. Ini menegaskan tingkat spesialisasi dan ketergantungan struktural ekonomi regional pada sektor ekstraktif.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan kontribusi yang signifikan dan relatif stabil dalam kisaran 11-12 persen dari total PDRB ADHB (11,71 persen di 2020, 11,73 persen di 2021, 9,33 persen di 2022, 11,26 persen di 2023, dan 12,42 persen di 2024). Meskipun pangasanya menurun secara proporsional di tahun puncak pertambangan (2022), pemulihan pangasanya di tahun-tahun berikutnya



mengindikasikan bahwa sektor primer ini tetap menjadi basis ekonomi yang resilient, memberikan kontribusi yang stabil terlepas dari gejolak harga komoditas pertambangan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan tren peningkatan kontribusi persentase yang stabil (dari 6,53 persen di 2020 menjadi 7,23 persen di 2024), meskipun sempat mengalami penurunan proporsional di tahun 2022. Peningkatan pangsa ini mengindikasikan ekspansi aktivitas distribusi dan konsumsi domestik, yang seringkali berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan masyarakat (terutama di sektor yang dominan) dan pertumbuhan populasi.

Sektor Konstruksi menampilkan tren peningkatan kontribusi persentase yang menarik, mencapai pangsa tertinggi dalam periode ini sebesar 5,15 persen pada tahun 2024 (dari 4,16 persen di 2020). Peningkatan pangsa sektor konstruksi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur (baik publik maupun privat) dan properti di wilayah Berau. Aktivitas konstruksi seringkali menjadi indikator akumulasi modal fisik dan optimisme terhadap prospek ekonomi regional.

Sektor-sektor Jasa lainnya, seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, menunjukkan tren peningkatan kontribusi persentase, meskipun pangasanya relatif kecil. Peningkatan pangsa Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (dari 1,25 persen di 2020 menjadi 1,50 persen di 2024) mengindikasikan potensi peningkatan permintaan atau penyediaan layanan kesehatan dan sosial. Lonjakan pangsa Administrasi Pemerintahan (dari 1,22 persen di 2020 menjadi 1,35 persen di 2024, dengan peningkatan signifikan di 2024) merefleksikan peningkatan peran atau belanja pemerintah daerah dalam perekonomian nominal.

Meskipun pangasanya kecil, pertumbuhan persentase pada sektor-sektor seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan, dan Jasa mengindikasikan adanya potensi pengembangan sektor-sektor non-basis yang melayani pasar domestik atau menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal. RPJMD perlu mengidentifikasi sektor-sektor ini sebagai target prioritas untuk investasi dan pengembangan kebijakan guna mendorong diversifikasi dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di masa depan.

Secara sintetis, data distribusi PDRB ADHB Kabupaten Berau secara empiris membuktikan tingkat spesialisasi dan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor



Pertambangan dan Penggalian dalam nilai nominal, yang menyebabkan volatilitas pada agregat PDRB. Meskipun sektor-sektor lain menunjukkan pertumbuhan nominal dan sedikit peningkatan pangsa (mengindikasikan diversifikasi nominal), dominasi sektor ekstraktif menimbulkan tantangan signifikan terhadap upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.

**Tabel II.42
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024**

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,71	11,73	9,33	11,26	12,42
B	Pertambangan dan Penggalian	56,28	59,68	66,98	58,27	53,08
C	Industri Pengolahan	4,78	4,32	3,49	4,33	4,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,16	3,74	3,36	4,47	5,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,53	5,72	4,99	6,48	7,23
H	Transportasi dan Pergudangan	6,14	5,41	4,47	5,91	6,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,04	0,81	1,02	1,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	0,95	0,72	0,90	0,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,60	0,50	0,41	0,53	0,60
L	Real Estate	0,99	0,83	0,62	0,74	0,79
M, N	Jasa Perusahaan	0,11	0,09	0,07	0,09	0,11
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,03	0,80	1,03	1,35



Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	3,03	2,77	2,22	2,76	3,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,37	1,10	1,38	1,50
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,79	0,71	0,57	0,73	0,85
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan PDRB menyoroti sisi permintaan agregat dalam perekonomian, mengidentifikasi penggerak pertumbuhan berdasarkan komponen pengeluaran. Komponen-komponen pengeluaran ini, mulai dari konsumsi rumah tangga yang mencerminkan daya beli masyarakat, belanja organisasi nirlaba yang merepresentasikan kontribusi sektor sosial, hingga pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal, semuanya berkontribusi pada pembentukan PDRB.

Lebih lanjut, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) menjadi indikator krusial dari investasi dan akumulasi aset produktif di suatu daerah. Tingginya PMTB mengisyaratkan adanya keyakinan investor terhadap prospek ekonomi masa depan dan potensi peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, perubahan inventori memberikan gambaran mengenai dinamika permintaan dan penawaran jangka pendek. Peningkatan inventori yang tidak diimbangi dengan penjualan dapat menjadi sinyal perlambatan ekonomi. Terakhir, ekspor neto merefleksikan keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap perdagangan internasional dan kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Pendekatan pengeluaran tidak hanya relevan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga penting dalam memahami perubahan struktural ekonomi dari waktu ke waktu. Pergeseran proporsi antar komponen pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan preferensi konsumen, kebijakan pemerintah, atau daya saing eksternal. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kontribusi masing-masing komponen pengeluaran menjadi esensial bagi perumusan kebijakan ekonomi yang efektif dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang solid, yang tercermin dari peningkatan seluruh komponen pengeluaran secara sehat, akan memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli dan perluasan kesempatan ekonomi.

Tabel berikut ini menunjukkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran dari tahun 2020 hingga 2024. Data Pengeluaran Konsumsi Rumah



Tangga (PKRT) menunjukkan peningkatan nilai nominal yang konsisten dari 4.929.486,78 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 5.919.794,69 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini merefleksikan ekspansi permintaan domestik yang didorong oleh sektor rumah tangga. Stabilitas pertumbuhan nominal PKRT, bahkan di tengah fluktuasi agregat PDRB, mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga berfungsi sebagai elemen stabilisator dalam perekonomian nominal regional.

Tabel II.43
PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.929.486,78	5.063.074,88	5.269.850,17	5.584.354,44	5.919.794,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	352.922,53	370.713,55	404.338,29	439.771,38	501.265,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.465.650,77	1.448.877,84	1.656.311,51	2.350.490,74	3.091.818,18
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.029.331,27	8.181.979,30	8.782.076,82	9.875.035,05	11.045.658,61
Perubahan Inventori	17.679,55	4.436,12	4.701,90	5.432,05	6.739,74
Net Ekspor Barang dan Jasa	20.655.778,02	27.967.401,79	44.040.878,36	33.024.933,50	30.251.233,18
PDRB	35.450.848,90	43.036.483,47	60.158.157,05	51.280.017,17	50.816.509,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) juga menunjukkan tren peningkatan nominal yang stabil dari 352.922,53 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 501.265,22 juta rupiah lima tahun berikutnya yaitu tahun 2024. Meskipun kontribusinya secara proporsional relatif kecil terhadap total PDRB, pertumbuhan nominal yang persisten ini merefleksikan peningkatan aktivitas dan kontribusi sektor nirlaba dalam penyediaan layanan kepada rumah tangga.

Pada data Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) menampilkan pola pergerakan yang menarik. Setelah relatif stabil pada tahun 2020-2022 (kisaran 1.465.650,77 juta rupiah hingga 1.656.311,51 juta rupiah, komponen ini menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2023 menjadi 2.350.490,74 juta rupiah dan meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 3.091.818,18 juta rupiah. Peningkatan substansial dalam dua



tahun terakhir ini mengindikasikan adanya akselerasi belanja pemerintah daerah. Peningkatan belanja pemerintah ini berfungsi sebagai stimulus fiskal yang berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat regional, terutama di saat komponen lain (*Net Ekspor*) mengalami koreksi.

Data Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) menunjukkan tren peningkatan nilai nominal yang konsisten dan cukup kuat sepanjang periode, dari 8.029.311,27 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 11.045.658,61 juta rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan PMTB yang stabil ini merupakan indikator positif dari akumulasi aset produktif dan investasi di Kabupaten Berau. Konsistensi pertumbuhan PMTB, meskipun PDRB agregat berfluktuasi, dapat diinterpretasikan sebagai adanya keyakinan jangka panjang dari pelaku ekonomi (baik pemerintah, swasta, maupun rumah tangga) terhadap prospek ekonomi daerah, yang termanifestasi dalam bentuk penambahan kapasitas produksi (misalnya, pembangunan infrastruktur, bangunan, mesin).

Pada komponen Perubahan Inventori memiliki nilai nominal yang relatif kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya dan menunjukkan fluktuasi (dari 17.679,55 juta rupiah di tahun 2020, sempat menurun drastis di tahun 2021, lalu meningkat bertahap hingga 6.739,74 juta rupiah di tahun 2024). Perubahan inventori merefleksikan penyesuaian jangka pendek antara tingkat produksi dan tingkat penjualan/permintaan. Nilainya yang kecil mengindikasikan bahwa dinamika stok tidak menjadi pendorong utama pergerakan PDRB ADHB agregat dalam periode ini.

Data komponen Net Ekspor Barang dan Jasa merupakan penentu utama dan sumber volatilitas paling signifikan dalam PDRB ADHB Kabupaten Berau. Nilainya berfluktuasi ekstrem, dari 20.655.788,02 juta rupiah (2020), melonjak ke 27.967.401,79 juta rupiah (2021), mencapai puncak 44.040.878,36 juta rupiah (2022), kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 33.024.933,50 juta rupiah (2023) dan kembali turun ke 30.251.233,18 juta rupiah (2024). Pola pergerakan Net Ekspor ini sangat kuat korelasinya dengan fluktuasi PDRB ADHB agregat dan dominasi sektor pertambangan yang telah dibahas sebelumnya. Lonjakan di tahun 2022 hampir pasti didorong oleh kenaikan tajam harga komoditas ekspor unggulan Kabupaten Berau, sementara penurunan di tahun 2023-2024 mencerminkan koreksi harga komoditas tersebut. Dominasi Net Ekspor dalam struktur pengeluaran (mencapai lebih dari 73 persen dari PDRB di tahun 2022) menunjukkan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi terhadap



pasar eksternal dan ketergantungan struktural pada kinerja sektor ekspor berbasis sumber daya alam.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hampir semua jenis pengeluaran menunjukkan pertumbuhan negatif, mencerminkan dampak awal dari pandemi COVID-19, dengan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencatat penurunan terbesar sebesar -4,82 persen. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan mayoritas pengeluaran kembali mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -3,03 persen. Lonjakan pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2023, terutama pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang melonjak hingga 36,98 persen, sementara Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap menunjukkan peningkatan stabil dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi dalam periode ini yaitu sebesar 10,15 persen. Secara keseluruhan, terjadi perbaikan ekonomi di Kabupaten Berau pasca-pandemi, dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan lonjakan pengeluaran pemerintah sebagai pendorong utama pertumbuhan.

Tabel II.44
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,08	1,54	1,16	3,81	4,33
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,50	1,08	4,51	4,32	10,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,82	-3,03	10,01	36,98	28,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-3,99	0,14	4,29	6,39	5,44
Perubahan Inventori	-	-	-	-	
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	
PDRB	-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Pengeluaran masyarakat Berau masih didominasi oleh pengeluaran net barang ekspor dan jasa, dilanjutkan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun pada komponen net ekspor barang dan



jasa menunjukkan nilai positif yang menunjukkan bahwa transaksi ekspor Kabupaten Berau masih lebih tinggi daripada transaksi impor.

Data distribusi PDRB Kabupaten Berau menurut pengeluaran, terlihat bahwa Net Ekspor Barang dan Jasa mendominasi kontribusi dengan fluktuasi signifikan, mencapai puncaknya di 73,45 persen pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 59,53 persen di 2024, mengindikasikan ketergantungan besar pada sektor eksternal. Dominasi dan volatilitas tinggi Net Ekspor ini secara jelas menegaskan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor eksternal, khususnya kinerja ekspor yang sangat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global. Nilai positif pada komponen net ekspor barang dan jasa sepanjang periode menunjukkan bahwa secara nominal, transaksi ekspor Kabupaten Berau masih secara signifikan lebih tinggi daripada transaksi impornya.

Di luar Net Ekspor, komponen dengan kontribusi signifikan berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). PMTB menunjukkan perubahan proporsi sepanjang periode, dengan pangsa berkisar antara 14,41 persen (2022) hingga 22,65 persen (2020), dan tercatat sebesar 21,74 persen di tahun 2024. PKRT juga menunjukkan fluktuasi proporsi selama kurun waktu lima tahun, yaitu berkisar antara 13,91 persen ditahun 2020 menurun secara perlahan kontribusinya di tahun 2021 (11,82 persen) dan tahun 2022 memiliki kontribusi sebesar 8,79 persen, namun meningkat kembali ditahun 2023 menjadi sebesar 10,89 persen dan menjadi sebesar 11,65 persen di tahun 2024. Meskipun pangasanya berfluktuasi, kedua komponen ini secara konsisten menjadi kontributor terbesar kedua dan ketiga, menandakan pentingnya konsumsi domestik dan investasi dalam struktur permintaan agregat nominal.

Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) menunjukkan tren peningkatan pangsa yang jelas, terutama dalam dua tahun terakhir periode observasi. Pangsa PK-Pemerintah meningkat dari 4,13 persen di tahun 2020 menjadi 2,69 persen di tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 4,58 persen di tahun 2023 dan mencapai 6,08 persen di tahun 2024. Peningkatan proporsi belanja pemerintah ini menandakan peran fiskal yang semakin besar dalam struktur PDRB nominal, yang mungkin diarahkan pada proyek pembangunan, pelayanan publik, atau stimulus ekonomi. Sebaliknya, komponen lain seperti Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB secara keseluruhan, dengan persentase masing-masing umumnya di bawah 1 persen dan



bahkan di bawah 0,1 persen untuk Perubahan Inventori. Secara keseluruhan, data distribusi ini menggarisbawahi struktur permintaan agregat nominal Kabupaten Berau yang sangat didominasi oleh Net Ekspor yang volatil, dengan kontribusi signifikan dari investasi dan konsumsi rumah tangga, serta peran pemerintah yang semakin meningkat.

Tabel II.45
Distribusi PDRB Kabupaten Berau atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,91	11,82	8,79	10,89	11,65
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,00	0,86	0,67	0,86	0,99
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,13	3,36	2,69	4,58	6,08
Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,65	18,95	14,41	19,26	21,74
Perubahan Inventori	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	58,27	65,00	73,45	64,40	59,53
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek pelayanan umum berfokus pada kondisi tata kelola pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dalam konteks pembangunan daerah menjelma menjadi tolok ukur esensial kualitas interaksi negara dan warga negara, tidak dipandang sebagai sekadar pemenuhan kebutuhan dasar melalui barang dan jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten.

Aspek pelayanan umum merefleksikan tingkat responsivitas, akuntabilitas, dan inklusivitas pemerintah dalam menjawab aspirasi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Pengembangan aspek pelayanan umum di era modern akan membuat sebuah wilayah mengalami transformasi dari pendekatan birokratis yang kaku menuju model layanan yang berpusat pada pengguna (*citizen-centric*). Mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas,



efisiensi, dan transparansi layanan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan evaluasi layanan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar relevan dan berdampak positif. Dengan demikian, aspek pelayanan umum tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga cerminan kualitas demokrasi lokal dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Selain itu diperlukan usaha konkrit dari pemerintah daerah terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bukti nyata peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian berulang kali meraih opini WTP ini secara jelas menunjukkan kekuatan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, di mana penyajian LKPD dianggap wajar dan akuntabel. Keberhasilan ini sekaligus menjadi penegasan atas komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga standar kualitas pelaporan keuangan yang tinggi dan mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangannya.

Tabel II.46
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024

Tahun Penilaian	Tahun Anggaran Dinilai	Opini Publik
2020	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau

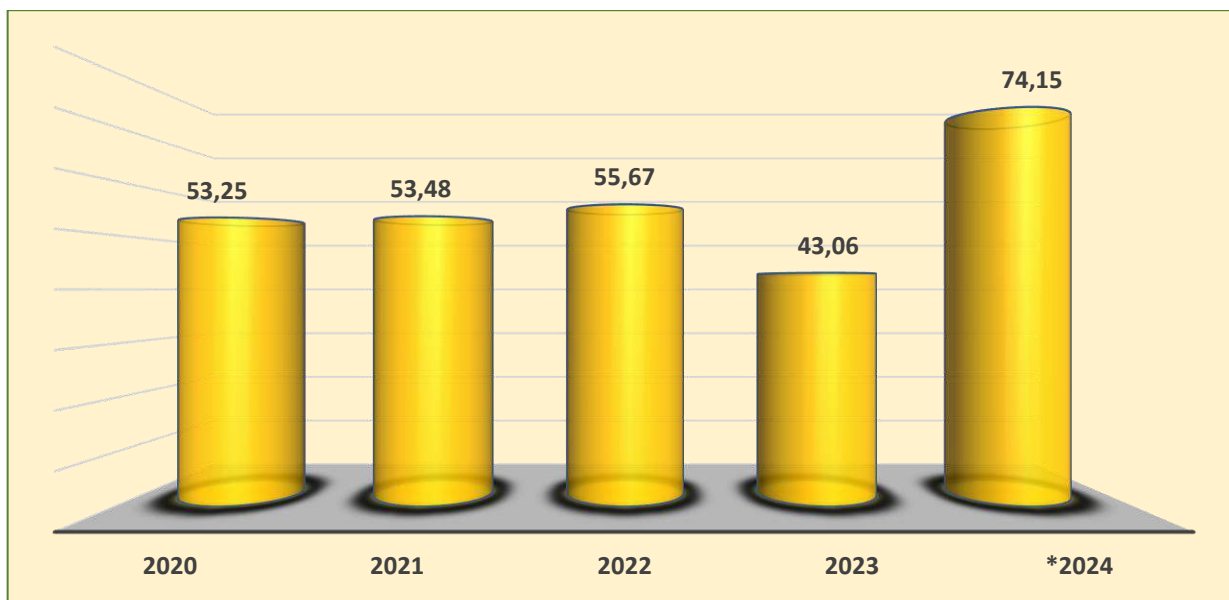
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Berau untuk periode 2020 hingga 2024 merupakan tolok ukur kinerja dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Indeks ini secara umum mengevaluasi seberapa efektif dan efisien jalannya birokrasi, bagaimana upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dijalankan, serta bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selama kurun waktu lima tahun ini, data menunjukkan adanya dinamika atau fluktuasi pada nilai IRB.



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Berau tahun 2020-2024 memperlihatkan fluktuasi kinerja reformasi birokrasi dalam kurun waktu tersebut, yang secara umum mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, keberantasan KKN, serta kualitas pelayanan publik. Terlepas dari penurunan indeks yang terlihat pada tahun 2023, data ini secara keseluruhan mencerminkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya di tahun 2024.

Meskipun terdapat penurunan indeks yang tercatat pada tahun 2023 (43,06), secara keseluruhan data IRB mencerminkan adanya tren perbaikan yang patut dicatat, terutama didorong oleh pencapaian di akhir periode. Tren peningkatan positif ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2021, di mana IRB berada pada angka 53,48, yang kemudian meningkat menjadi 55,67 di tahun 2022. Puncak dari tren positif ini terlihat sangat jelas dan signifikan di tahun 2024. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Berau melonjak drastis hingga mencapai 74,15. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam periode 2020-2024, menandakan adanya lompatan kinerja reformasi birokrasi yang substansial pada tahun terakhir pengamatan. Kenaikan yang drastis ini bisa mengindikasikan adanya kebijakan atau program reformasi yang sangat efektif dijalankan pada tahun 2024, yang berdampak signifikan terhadap efisiensi birokrasi, penurunan potensi KKN, dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Berau.

Gambar II.56
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Sekertariat Daerah Kabupaten Berau



Secara umum, Kabupaten Berau menunjukkan tren positif dalam akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik selama periode 2020-2024. Nilai SAKIP mengalami peningkatan secara bertahap, mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan kinerja meskipun masih memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan, dengan nilai SAKIP yang naik dari 61,62 pada tahun 2022 menjadi 62,74 pada tahun 2024. Walaupun terdapat perkembangan positif ini, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang ideal. Selain itu, dari sisi pelayanan publik, peningkatan telah dicapai meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 1,09 (dalam skala 1-5) menjadi 3,71 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk memenuhi harapan, hal ini menunjukkan fokus yang lebih kuat pada pemenuhan harapan masyarakat.

Peningkatan signifikan terjadi pada Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tahun 2024, mencapai 79,57 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 90,63 di tahun 2024. tren peningkatan yang konsisten dan tinggi, mencerminkan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan. Di sisi lain, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan yang relatif lambat dan belum optimal, namun indeks ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses digitalisasi kinerja pemerintahan.

Tabel II.47
Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintahan
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	63,50	63,74	61,61	62,40	62,74
2	Indeks Pelayanan Publik	N.A.	N.A.	N.A.	1,09	3,71
3	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	N/A	67,28	70,54	79,57	90,63
4	Indeks SPBE	1,30	N/A	1,97	2,02	2,28
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	47,97	63,19	81	76,46	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Untuk Indeks SPBE Kabupaten Berau terlihat peningkatan secara perlahan yang awalnya hanya 1,30 meningkat sebesar 0,98 poin lima tahun kemudian menjadi 2,28 di tahun 2024. Melalui nilai indeks SPBE tersebut maka menunjukkan tingkat kematangan



dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Berau. Indeks ini dihasilkan melalui evaluasi yang menilai berbagai aspek seperti tata kelola, layanan, teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Hasil Indeks SPBE dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan SPBE, mengidentifikasi area perbaikan, dan memotivasi instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik demi kepuasan masyarakat.

Salah satu indeks atau ukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. IPKD mengukur kinerja melalui enam dimensi utama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD. Selama empat tahun terakhir IPKD Kabupaten Berau menunjukkan peningkatan dimana terjadi peningkatan dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 47,97 namun meningkat menjadi 76,46. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau untuk memujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang tangguh dan Demokrasi Substansial

a. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Upaya menjamin keamanan dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat, merupakan landasan fundamental bagi terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis, berjalannya aktivitas sosial dan ekonomi yang produktif, serta terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Lingkungan wilayah yang aman dan kondusif tidak hanya memberikan rasa nyaman dan tenteram bagi penduduknya, tetapi juga esensial untuk menarik dan menjaga iklim investasi yang stabil. Karena investor cenderung menghindari lokasi dengan tingkat kejahatan tinggi atau risiko konflik sosial, penegakan hukum yang efektif dan penanganan kasus kriminalitas yang adil menjadi prasyarat utama dalam menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan publik.

Selain penanganan kriminalitas, upaya preventif untuk meminimalisir potensi konflik sosial melalui dialog, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat juga krusial. Pemerintah



daerah perlu membangun sinergi yang kuat dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan saling menghormati. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta responsifnya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat akan memperkuat rasa kepercayaan dan keadilan. Investasi dalam peningkatan kapasitas aparat keamanan, modernisasi sistem keamanan, serta program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan kriminalitas dan resolusi konflik perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadikan Kabupaten Berau wilayah yang nyaman ditinggali dan menarik bagi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

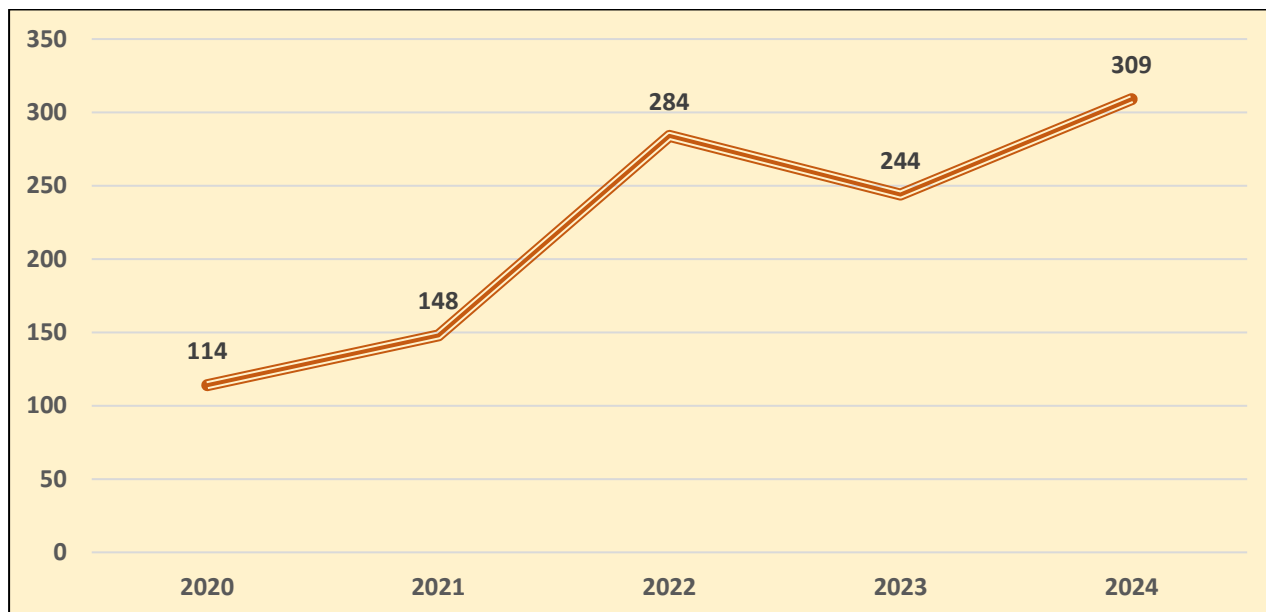
Indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Berau selama kurun waktu lima tahun yaitu 2020-2025 mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Berau telah berhasil menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, yang kondusif, aman, tertib dan teratur untuk masyarakatnya. Meskipun penciptaan rasa aman, damai, dan tentram merupakan bagian integral dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan dinamika tantangan kriminalitas di Kabupaten Berau. Terlihat bahwa pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah tindak pidana, mencapai 284 kasus, yang menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini. Walaupun kasus sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 244, angka tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 309, menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan di Kabupaten Berau.

Pemerintah daerah berupaya menciptakan suasana kondusif di masyarakat didukung oleh semakin jelasnya regulasi pemerintah pusat dalam penanganan konflik sosial. Selain itu, kebijakan pemerintah yang telah mempertimbangkan analisis dampak lingkungan dan sosial, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan deteksi dini potensi konflik, turut menjadi faktor pendukung capaian ini. Kombinasi antara kerangka regulasi yang kuat, kebijakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan sinergi positif dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan harmonis.



Gambar II.57

Jumlah Tindak Pidana (Kasus) Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas penanganan kejadian kriminalitas melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan mengintensifkan kegiatan preventif, yang meliputi peningkatan kegiatan monitoring, penjagaan, dan patroli di lokasi serta waktu yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminal. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggerakkan kembali dan mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya, diharapkan potensi terjadinya kriminalitas dapat diminimalisir.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Berau juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian kasus kriminalitas. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara, meningkatkan kepastian hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan tingkat kriminalitas dapat ditekan dan rasa aman di tengah masyarakat dapat terus ditingkatkan.



3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk berkompetisi dengan wilayah lain dalam beragam aspek krusial, termasuk sektor ekonomi, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kapasitas inovasi, dan daya tarik investasi. Kemampuan kompetitif ini dibentuk oleh berbagai elemen penting, di antaranya adalah kebijakan dan regulasi pemerintah, keberadaan sumber daya alam, tingkat pendidikan serta keterampilan tenaga kerja lokal, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sebagai indikator yang cukup menyeluruh untuk mengukur tingkat daya saing suatu daerah, sering kali digunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

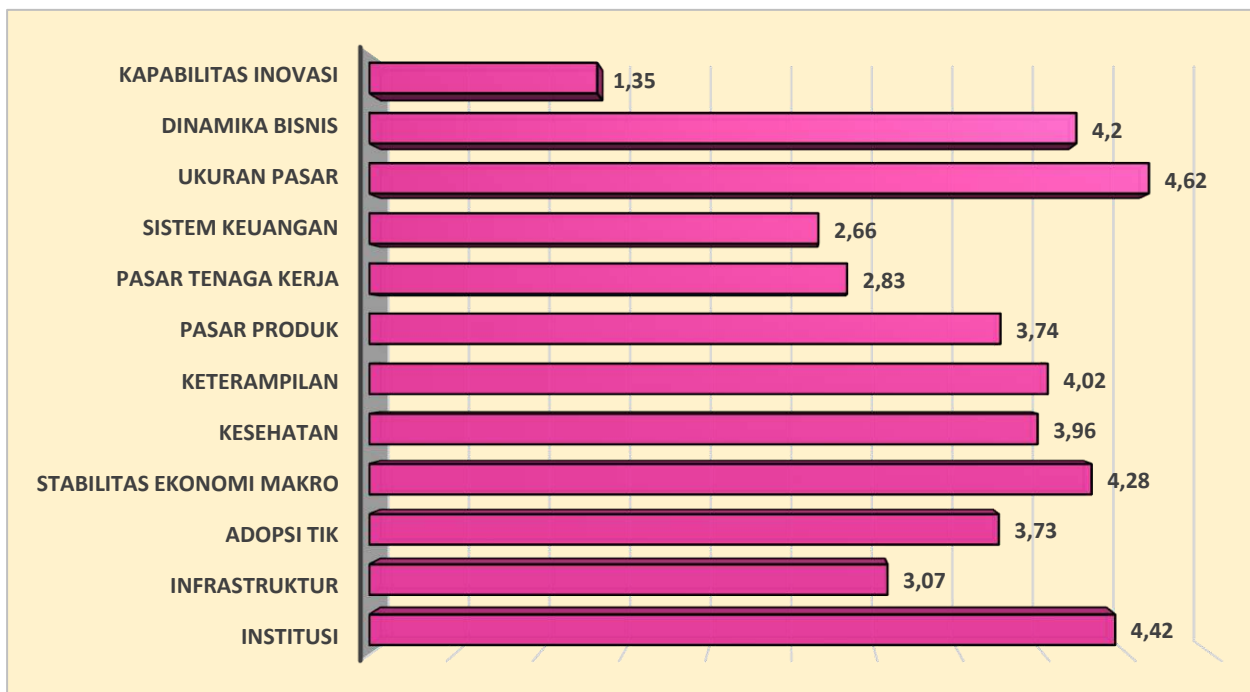
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Berau tahun 2024 menunjukkan variasi signifikan antar pilar penyusunnya. Ukuran Pasar memiliki nilai tertinggi sebesar 4,62, mengindikasikan pasar yang relatif besar dan potensial. Diikuti oleh Institusi (4,42) dan Stabilitas Ekonomi Makro (4,28), yang menunjukkan fondasi yang kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kestabilan ekonomi. Keterampilan (4,02) dan Kesehatan (3,96) juga mendapatkan penilaian yang baik, mencerminkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Berau.

Sementara itu, pilar-pilar seperti Pasar Produk (3,74) dan Adopsi TIK (3,73) berada di level menengah, mengindikasikan adanya potensi perbaikan dalam efisiensi pasar dan pemanfaatan teknologi informasi. Infrastruktur (3,07), Dinamika Bisnis (4,2), dan Pasar Tenaga Kerja (2,83) menunjukkan area yang memerlukan perhatian lebih untuk peningkatan daya saing. Yang paling rendah adalah Kapabilitas Inovasi (1,35), mengindikasikan perlunya upaya serius dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Berau. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan relatif Kabupaten Berau dalam berbagai aspek yang mempengaruhi daya saing daerahnya.

Jika melihat Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Berau selama 2 tahun terakhir ini terlihat kenaikan nilai indeks 2,92 ditahun 2022 naik sebesar 0,65 poin menjadi 3,57. Melalui nilai indeks ini maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mampu memanfaatkan data dan hasil IDSD sebagai kompas untuk merancang strategi yang lebih baik, memperkuat inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai karakteristik kewilayahannya



Gambar II.58
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Berau
Tahun 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

b. Iklim Investasi Daerah

Penanaman modal, terutama penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah secara langsung. Dampak utama yang ditimbulkan adalah pembukaan lapangan usaha baru oleh investor, yang secara langsung menyerap tenaga kerja dan berpotensi menurunkan tingkat pengangguran. Namun, masuknya investasi ke suatu daerah sangat bergantung pada daya saing investasi yang dimilikinya. Pembentukan daya saing ini merupakan proses yang cukup kompleks dan berkelanjutan, yang terus menerus dievaluasi selama pembangunan daerah berjalan. Beberapa faktor penting yang menentukan daya tarik suatu daerah bagi investor antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil, situasi politik dan keamanan yang kondusif, serta kemudahan perizinan dalam mendirikan maupun mengembangkan usaha.

Lebih lanjut, terdapat berbagai faktor krusial yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Faktor-faktor ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang kompeten, serta kemudahan dan



kepastian dalam proses perizinan untuk pendirian dan pengembangan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat dua kategori utama permodalan, yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kedua jenis penanaman modal ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di tingkat daerah.

Tabel II.48
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Realisasi Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN (Juta Rp)	3.615.380,50	445.264,40	2.619.004,00	4.303.938,70	2.632.703,35
PMA (US\$)	16.223.300	35.752.700	49.370.489	46.997.300	63.785.139

Sumber: DPMTSP Kabupaten Berau

Realisasi Investasi menyajikan data nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Berau, baik dari sumber domestik maupun asing, selama periode lima tahun. Terlihat jelas adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun untuk kedua jenis investasi. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi investasi pada tahun 2020 tercatat sebesar 3.615.380,50 juta rupiah. Angka ini kemudian merosot tajam di tahun 2021 menjadi hanya 445.264,40 juta rupiah, menunjukkan penurunan aktivitas investasi domestik yang drastis. Namun, PMDN kembali pulih pada tahun 2022 dengan nilai realisasi 2.619.004,00 juta rupiah. Puncak realisasi PMDN terjadi pada tahun 2023 dengan angka tertinggi dalam periode ini, mencapai 4.303.938,70 juta rupiah. Meski demikian, pada tahun 2024, realisasi PMDN kembali menurun ke angka 2.632.703,35 juta rupiah. Jika dibandingkan tahun 2020, realisasi PMDN di tahun 2024 masih lebih rendah sekitar 982,68 juta rupiah.



Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun dengan beberapa fluktuasi minor. Realisasi PMA dimulai dari 16.223.300 US\$ pada tahun 2020. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat di tahun 2021 menjadi 35.752.700 US\$, dan terus naik signifikan di tahun 2022 mencapai 49.370.489 US\$. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 46.997.300 US\$, namun PMA kembali melonjak dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 63.785.139 US\$. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi PMA di tahun 2024 meningkat hampir empat kali lipat, menunjukkan pertumbuhan minat investasi asing yang kuat di Kabupaten Berau pada akhir periode.

Secara keseluruhan, data ini menyoroti volatilitas dalam realisasi PMDN di Kabupaten Berau selama periode 2020-2024, dengan titik terendah di 2021 dan tertinggi di 2023. Di sisi lain, PMA menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih konsisten dan mencapai puncaknya di tahun 2024. Dinamika yang berbeda antara PMDN dan PMA ini bisa mencerminkan faktor-faktor ekonomi domestik dan global yang berbeda pengaruhnya terhadap masing-masing jenis investasi di Kabupaten Berau.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan mendorong kemajuan pembangunan daerah, setiap bidang pemerintahan mengemban peran dan tanggung jawab yang unik. Untuk mengukur progres pembangunan di berbagai sektor, pemerintah daerah menggunakan seperangkat indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang detail untuk menilai sejauh mana efektivitas program dan kegiatan pembangunan telah tercapai. Dokumen ini menyajikan rangkuman pencapaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Berau selama periode 2021 hingga 2024, yang disusun sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Lebih dari sekadar angka statistik, indikator kinerja pembangunan daerah merefleksikan kondisi aktual dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks Kabupaten Berau yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial budaya yang beragam, interpretasi data indikator ini harus mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan dasar di wilayah pedalaman mungkin menghadapi tantangan logistik dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan di perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap



faktor-faktor seperti kondisi geografis, struktur demografi, serta kearifan lokal sangat krusial dalam menganalisis capaian indikator. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sangat penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan prioritas warga.

Menganalisis Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Berau tahun 2021-2024, terlihat adanya variasi dalam pencapaian target di berbagai urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Sektor Pendidikan menunjukkan fluktuasi partisipasi. Tingkat partisipasi PAUD sempat mencapai 100 persen di tahun 2022 namun menurun ke 74,75 persen di tahun 2024, serupa dengan Pendidikan Dasar yang dari 100 persen di tahun 2022 menjadi 96,46 persen di tahun 2024. Partisipasi Pendidikan Menengah Pertama bahkan melampaui 100 persen di tahun 2021 (108,58 persen) sebelum turun dan kembali naik ke 94,14 persen di tahun 2024. Menariknya, partisipasi pendidikan kesetaraan untuk usia 7-18 tahun menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 15,17 persen di tahun 2021 menjadi 26,01 persen di tahun 2024.

Pada Sektor Kesehatan, beberapa indikator menunjukkan kinerja stabil atau meningkat, sementara yang lain menurun. Persentase Rumah Sakit rujukan terakreditasi konsisten 100 persen. Cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat signifikan dari 37,13 persen ke 71,09 persen. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan standar juga meningkat dari 53,56 persen ke 71,93 persen. Capaian skrining kesehatan usia 15-59 tahun sempat melonjak drastis pada tahun 2023 (61,68 persen) namun turun di tahun 2024 (39,44 persen). Skrining usia 60+ berfluktuasi. Beberapa indikator penyakit menular dan kronis menunjukkan peningkatan capaian yang luar biasa, mencapai 100 persen di 2024 untuk pelayanan penderita Hipertensi (dari 18,02 persen), DM (dari 33,39 persen), ODGJ Berat (dari 82,42 persen), dan orang terduga TBC (dari 43,37 persen), serta mendekati 100 persen untuk deteksi dini HIV (99,87 persen). Namun, persentase ibu hamil dan ibu bersalin yang mendapat pelayanan, serta bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan, menunjukkan tren penurunan signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024 (misal: ibu hamil 84,07 persen menjadi 72,77 persen ; ibu bersalin 95,96 persen menjadi 86,09 persen ; bayi baru lahir 100 persen menjadi 83,88 persen). Rasio daya tampung RS per penduduk juga menunjukkan fluktuasi tajam dengan puncak pada tahun 2023 (2,58) lalu turun drastis di tahun 2024 (0,90).



Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatat beberapa indikator capaian 100 persen, seperti rasio daerah irigasi yang dilayani jaringan, kepatuhan IMB, rasio tenaga operator/teknisi bersertifikat, dan proyek tanpa kecelakaan konstruksi. Namun, perlindungan kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi menunjukkan volatilitas tinggi, mencapai 100 persen di 2022-2023 namun kembali 0 persen di 2021 dan 2024. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota meningkat bertahap dari 65,56 persen di 2021 menjadi 69,97 persen di 2024. Akses air minum dan layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan peningkatan yang konsisten dan stabil setiap tahunnya.

Pada Sektor Perumahan Rakyat, penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha menunjukkan capaian 100 persen sejak tahun 2022. Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berkurang menunjukkan tren positif dari 9,46 persen di 2021 menjadi 7,58 persen pada tahun 2024. Namun, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi, serta jumlah perumahan yang dilengkapi PSU menunjukkan volatilitas capaian.

Sektor Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencatat capaian 100 persen untuk penyelesaian gangguan Trantibum, penegakan Perda/Perkada, serta pelayanan penyelamatan korban bencana dan kebakaran. Waktu tanggap penanganan kebakaran membaik dari 19,46 menit pada tahun 2021 menjadi 12,82 menit pada tahun 2024. Namun, jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan pencegahan/kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami penurunan tajam setelah puncak di tahun 2021/2022.

Pada Sektor Sosial, persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, serta korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, konsisten mencapai 100 persen selama kurun waktu 2021 hingga 2024.

Beralih ke Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, sektor Tenaga Kerja memang menunjukkan fluktuasi. Persentase kegiatan yang mengacu rencana tenaga kerja berfluktuasi antara 87,61 persen di tahun 2021 hingga 91,67 persen. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi justru cenderung menurun dari 14,08 persen di tahun 2021 menjadi 12,38 persen pada tahun 2024. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja juga menurun secara konsisten dari 809,404 juta rupiah di



2021 menjadi 715.627 juta rupiah pada tahun 2024. Penempatan tenaga kerja mengalami fluktuasi.

Pada Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, persentase anak korban kekerasan yang ditangani meningkat drastis dari hanya 0,07 persen di tahun 2021 menjadi 100 persen sejak tahun 2022, hal ini menunjukkan perbaikan layanan dalam hal penanganan anak korban kekerasan. Namun, rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dari 6,32 pada tahun 2021 menjadi 20,45 di tahun 2024. Persentase ARG pada belanja langsung APBD berfluktuasi signifikan. Sektor Pangan menunjukkan volatilitas yang tinggi pada indikator ketersediaan pangan, meskipun mencapai capaian yang sangat tinggi 288,27 persen di tahun 2024 setelah sempat turun di 2023 (96,04 persen)

Sektor Pertanahan mencatat banyak indikator dengan capaian 100 persen, menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan tanah sesuai peruntukan, penetapan tanah fasum, penyediaan lokasi penanaman modal (sejak tahun 2022), ketersediaan tanah untuk masyarakat, dan penanganan sengketa tanah melalui mediasi. Namun, ketersediaan Tanah Objek Landreform siap redistribusi turun drastis menjadi 0 persen di 2024 setelah mencapai 100 persen di tahun-tahun sebelumnya.

Pada Sektor Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan fluktuasi di kisaran 70 hingga 80, dengan 80,28 di tahun 2021 dan 78,97 di 2024. Pengelolaan sampah terlaksana dengan tren peningkatan signifikan dari 49,39 persen menjadi 81,78 persen. Namun, ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan/PPLH menunjukkan volatilitas yang tajam, sempat mencapai 96,42 persen pada 2022 yang sebelumnya hanya mencapai 62,07 persen. Namun kondisi ini tidak bertahan lama karena turun kembali menjadi 50 persen di tahun 2023 dan sedikit mengalami peningkatan 56,25 persen di 2024. Hal ini menunjukkan perlunya aturan yang mengikat dan tegas kepada pelaku usaha untuk taat dan patuh menjaga kelestarian lingkungan.

Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan persentase perekaman KTP-el yang tinggi namun masih di bawah 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP secara elektronik. Kepemilikan akta kelahiran juga tinggi dan terus meningkat. Kepemilikan KIA untuk anak 0-7 tahun terus meningkat namun masih di bawah 70 persen. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD mencapai 100 persen sejak tahun 2022. Pada Sektor



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengentasan desa tertinggal konsisten 100 persen. Persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan fluktuasi antara 8 persen hingga 11,63 persen. Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat tren penurunan Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2021 dari 2,37 menjadi 2,2 di tahun 2024. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) berfluktuasi, sementara persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan tren penurunan signifikan dari 18,02 persen di 2021 menjadi 5,94 persen di 2024, menandakan perbaikan program KB. Urusan Perhubungan menunjukkan peningkatan rasio konektivitas dari 0,56 menjadi 0,75, sementara kinerja lalu lintas kisaran 0,32-0,38 selama kurun waktu 2021-2023 dan mencapai 0,77 pada tahun 2024.

Sektor Komunikasi dan Informatika menunjukkan konsistensi 100 persen pada konektivitas internet OPD. Hal ini merupakan fasilitas yang harus diperhatikan mengingat kebutuhan internet untuk pelayanan masyarakat sangat membutuhkan internet. Layanan publik online yang terintegrasi melonjak drastis ke 100 persen di 2024 setelah stagnan di kisaran 40-an persen. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik juga meningkat signifikan dari 40,33 persen di 2021 menjadi 100 persen di 2023 dan 2024. Pada Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah koperasi berkualitas berfluktuasi, sementara persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha menurun drastis pada tahun 2024 (74,15 persen) setelah tiga tahun mencapai 100 persen. Sektor Penanaman Modal menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi pada persentase peningkatan investasi, dengan angka positif dan negatif yang besar setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai persentase yang sangat tinggi sebesar 524,26 persen dan turun drastis hingga -91,41 persen dan meningkat kembali menjadi sebesar 50,40 persen dan turun drastis menjadi -25,07 persen. Hal ini mencerminkan sifat investasi yang sangat dinamis.

Sektors Kepemudaan dan Olahraga mencatat peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri selama kurun waktu tiga tahun (2021-2023), namun menurun kembali menjadi 3,88 persen. Begitu juga tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dimana selama kurun waktu tiga tahun 2021-2023 meningkat hingga mencapai 8 persen, namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,55 persen. Namun walaupun demikian hal ini tidak mempengaruhi, prestasi olahraga yang diukur dengan perolehan medali menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2024, mencapai 69 medali setelah hanya 6-18



medali di tahun-tahun sebelumnya. Sektor Statistik menunjukkan konsistensi 100 persen pada persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor Persandian menunjukkan fluktuasi pada tingkat keamanan informasi pemerintah, dari 100 persen di 2021 turun drastis ke 41,40 persen di 2022, lalu naik dan stabil di 60,31 persen di 2023-2024.

Pada Sektor Kebudayaan, pelestarian cagar budaya menunjukkan angka yang konsisten tinggi di atas 98 persen. Sektor Perpustakaan mencatat fluktuasi signifikan pada nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (dari 73,43 turun ke 46,80 lalu naik lagi ke 67,54) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (dari 0 melonjak ke 73,35 lalu sedikit turun ke 70,51). Setor Kearsipan menunjukkan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang stabil di kisaran 75 persen. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip berfluktuasi.

Beralih ke Urusan Pilihan, Sektor Kelautan dan Perikanan mencatat total produksi yang sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun dimana dilihat dari indikator jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya). Sektor Pariwisata menunjukkan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang sangat volatil, namun tingkat hunian akomodasi menunjukkan peningkatan yang stabil. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan PAD berfluktuasi, dengan penurunan signifikan pada kontribusi PAD di 2024 (4,60 persen). Sektor Pertanian menunjukkan tren penurunan produktivitas per hektar dan fluktuasi dalam penanganan penyakit hewan menular.

Pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan dan Keuangan menunjukkan tren penurunan rasio belanja pegawai di luar guru/nakes dan rasio PAD, serta rasio belanja Urusan Pemerintahan Umum. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP konsisten di level 3. Opini Laporan Keuangan stabil di level 9 sejak 2022. Sektor Pengadaan mencatat sebagian besar proyek konstruksi tahunan tidak dibawa ke kuartal pertama tahun berikutnya (0 persen kecuali 0,07 persen di 2024). Persentase pengadaan metode kompetitif dan rasio nilai belanja via pengadaan menunjukkan fluktuasi. Urusan Kepegawaian menunjukkan peningkatan rasio pegawai pendidikan tinggi dan pegawai fungsional, sementara rasio jabatan fungsional bersertifikat konsisten 100 persen. Urusan Manajemen Keuangan mencatat fluktuasi pada deviasi realisasi belanja/PAD dan rasio anggaran sisa, dengan manajemen aset konsisten di level 4. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik menunjukkan akses publik terhadap informasi keuangan yang



konsisten 100 persen, namun informasi sumber daya untuk pelayanan menunjukkan fluktuasi.

Secara keseluruhan, data IKK Kabupaten Berau tahun 2021-2024 menampilkan gambaran capaian yang kompleks, dengan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang stabil dan tinggi, tren peningkatan yang konsisten, lonjakan signifikan di tahun-tahun tertentu (terutama 2024 pada beberapa sektor), namun ada pula indikator yang menunjukkan fluktuasi, penurunan kinerja, atau volatilitas yang tinggi. Analisis mendalam per indikator diperlukan untuk memahami faktor-faktor pendorong di balik capaian positif dan tantangan yang masih dihadapi dalam berbagai urusan pemerintahan di Kabupaten Berau.

Tabel II.49
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Berau Tahun 2021-2024

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	72,5	100,00	77,43	74,75
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	95,29	100,00	98,07	96,46
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	108,58	100,00	82,21	94,14
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	15,17	17,94	23,29	26,01
b) Kesehatan						



1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk		0,16	0,15	2,58	0,90
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	84,07	85,48	79,51	72,77
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	95,96	97,43	91,61	86,09
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100,00	99,88	89,10	83,88
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	37,13	41,55	60,66	71,09
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	53,56	70,03	78,49	71,93
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	21,32	26,27	61,68	39,44
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	60,13	63,70	57,80	65,96
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	18,02	71,38	80,99	100,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	33,39	66,37	76,53	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	82,42	82,46	100,00	100,00



13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	43,37	98,81	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	66,92	86,97	86,64	99,87
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	persen	74,92	81,51	81,70	83,17
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	88,43	90,53	91,25	91,59
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	65,56	65,56	69,96	69,97



8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	88,00	100,00	100,00	100,00
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	persen	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	9,46	9,19	8,07	7,58
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	persen	46,26	100,00	100,00	40,44
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	190.342	230.612	100,00	86,15
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	190.342	146.728	10,17	3,95
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Orang	6.890	16.591	100,00	100,00



	penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	19,46	8,32	13,28	12,82
f) Sosial						
1	Persentase (persen) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	87,61	84,69	95,15	91,67
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	persen	14,08	13,78	13,53	12,38
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	809,404	706,202	640,860	715,627
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	100,00	100,00	97,86	100,00
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	persen	93,06	88,15	80,66	82,93



	layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota					
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	49,34	22,74	50,76	40,45
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	persen	0,07	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,00.000 penduduk perempuan)		6,32	11,70	18,70	20,45
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	108,57	180,25	96,04	288,27
d) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	0,57	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	persen	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	97,00	100,00	100,00	0,00
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	persen	100,00	100,00	100,00	100,00



6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	80,28	74,75	75,08	78,97
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	49,39	50,15	80,05	81,78
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	62,07	96,42	50	56,25
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	persen	99,80	97,91	98,32	99,43
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	50,06	64,53	67,90	69,33
3	kepemilikan akta kelahiran	persen	93,99	99,23	99,66	99,40
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	19,15	100,00	100,00	100,00
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase peningkatan status desa mandiri'	persen	8	8	13,95	11,63
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		1	2,37	2,25	2,2
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	71,57	63,98	64,35	72,59



3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	18,02	27,98	13,08	5,94
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	0,56	0,56	0,75	0,75
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	0,32	0,38	0,38	0,77
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	45,75	46,41	43,14	100,00
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	persen	40,33	98,94	100,00	100,00
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	17,98	23,11	11,71	45,45
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	100,00	100,00	100,00	74,15
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	524,26	-91,41	50,40	-25,07
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	2,90	3,85	5,91	3,88
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	7,71	7,42	8,04	0,55



3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	18	6	8	69
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	100,00	41,40	60,31	60,31
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	98,60	98,47	98,48	98,54
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	73,43	46,80	51,10	67,54
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	0,00	30,33	73,35	70,51
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	persen	75,00	75,00	75,00	75,01
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	50,00	65,81	48,78	66,67



Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	238.782,39	26.693,75	28.836,97	29.783,81
b) Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	-61,36	232,94	488,69	157,74
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	11,18	180,84	6,01	31,36
3	Tingkat hunian akomodasi	persen	4,94	9,17	21,56	21,75
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	persen	1,05	1,38	1,76	1,17
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	10,48	11,54	13,18	4,60
c) Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	4,38	4,03	3,20	3,03
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	35,77	-6,25	-6,67	0,00
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	11,58	100,00	100,00	100,00



2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	25,54	92,45	79,50	51,47
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	38,12	27,89	72,40	40,33
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	persen	30	34,70	45,62	23,80
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	50,00	50,00	100,00	0,00
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	4,35	30,43	100,00	100,00
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	persen	0,00	100,00	100,00	0,00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	100,00	90	80	90
h) Transmigrasi						



Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	-	11,08	10,52	6,68	5,88
2	Rasio PAD	-	11,99	9,45	6,11	5,55
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	3	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-	70,76	51,15	35,75	29,74
6	Opini Laporan Keuangan	-	7	9	9	9
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0,00	0,00	0,00	0,07
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	17,21	63,47	28,17	47,45
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	80,52	86,65	80,39	53,37
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	60,29	64,05	61,80	63,18
2	Rasio pegawai Fungsional (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	4,14	15,53	16,13	15,50
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00



d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	21,80	41,74	26,63	26,34
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	33,33	42,23	19,33	35,12
3	Manajemen Aset	-	4	4	4	4,00
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	persen	23,42	35,60	30,73	14,61
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	persen	174,74	62,53	73,61	92,13
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LPPD Kabupaten Berau, 2021-2024



2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang berperan penting dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah daerah menyusun rencana keuangan jangka menengah dan anggaran tahunan guna mengatur pendapatan dan pengeluaran. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang esensial. Pemerintah daerah wajib menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat serta memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah perlu memerhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Berau secara umum masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Hal tersebut memberikan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan penekanan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagai arus utama pembiayaan pembangunan daerah.



2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang kemudian dilakukan analisa untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.50
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Berau berdasarkan DOF dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) cukup berfluktuasi yaitu mengalami kenaikan dari tahun 2020 (9,90%) ke tahun 2021 (11,99%) kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 9,45% dan terus menurun sampai dengan tahun 2024 (5,55). Persentase rata-rata DOF Kabupaten Berau dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) mencapai 8,60% dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Berau masih masuk di kategori “sangat kurang” dimana pada tahun 2021 sempat masuk kategori “kurang”. DOF Kabupaten Berau yang terus menurun terjadi karena kesenjangan fiskal yang terus menurun, di mana beberapa wilayah sangat kaya sementara yang lain sangat miskin, dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan ini, yang dapat berdampak pada otonomi fiskal daerah.

Penting untuk dicatat bahwa penurunan derajat otonomi fiskal dapat memiliki dampak negatif pada pembangunan daerah, karena daerah menjadi kurang mandiri dalam mengelola keuangan dan sumber daya mereka. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa otonomi fiskal tetap berjalan efektif.

Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Berau perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih inovatif dan berkelanjutan.



Adapun perkembangan DOF Kabupaten Berau periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.51
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	233.264.403.504	2.356.039.778.496	9,90%
2	2021	270.422.072.127	2.254.733.927.244	11,99%
3	2022	299.529.844.589	3.169.396.847.336	9,45%
4	2023	287.131.921.505	4.700.904.175.374	6,11%
5	2024	343.480.236.165	6.194.026.383.085	5,55%
	Rata-Rata	286.765.695.578	3.735.020.222.307	8,60%

Sumber: Bapenda Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Berau akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.



1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

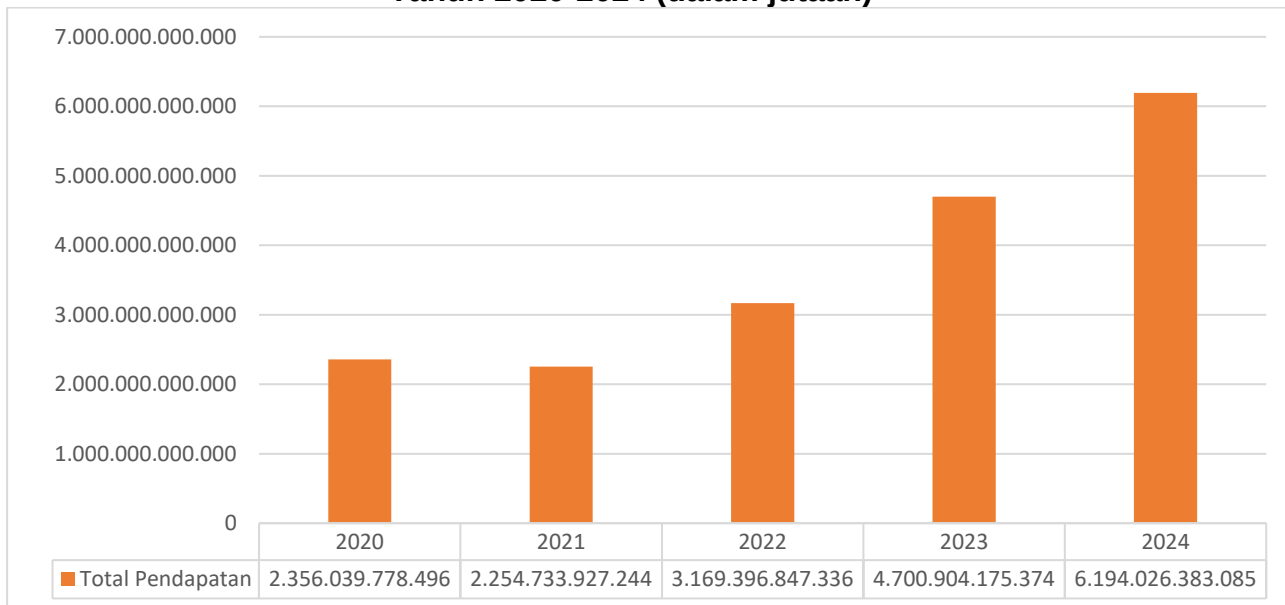
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Berau sempat mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29% pertahun di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 2.356 triliun turun menjadi Rp. 2.254 triliun di tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh menurunnya PAD dari pos pendapatan transfer pada 2021. Realisasi pendapatan kembali meningkat khususnya di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 6.194 triliun.



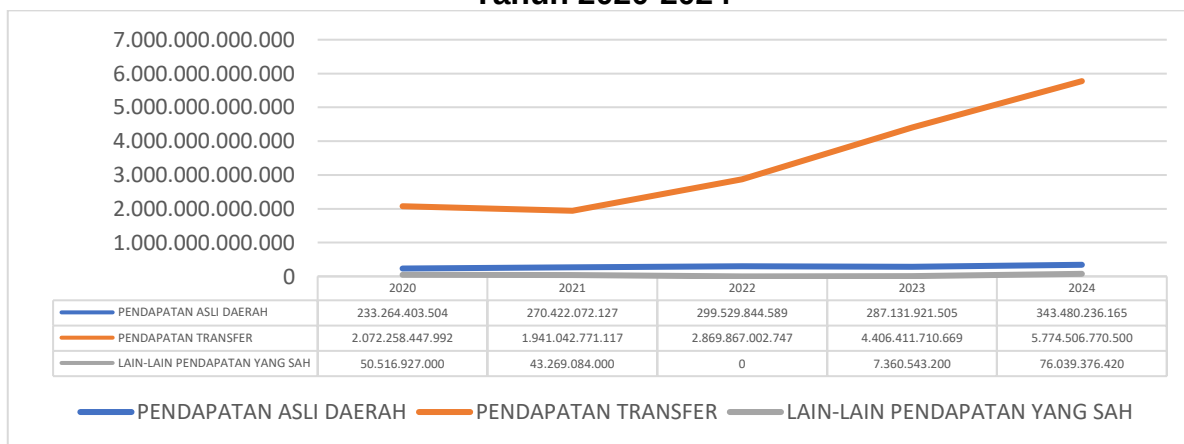
Gambar II.59
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: Bapenda Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan dimana kenaikannya secara berurutan sebesar 11%, 32% dan 273%. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan aspek pendapatan Daerah mengalami peningkatan karena optimalisasi kebijakan pendapatan pendapatan secara keseluruhan.

Gambar II.60
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Perkembangan pajak Daerah mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan cukup signifikan sebesar 13% pertahun dari Rp. 61,152 miliar menjadi Rp. 93,382 miliar pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 91,558. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh sektor pariwisata yang mendorong penerimaan pajak hotel dan hiburan. Secara keseluruhan meskipun pajak mengalami pertumbuhan namun masih relatif kecil kontribusinya. Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan



Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Berau dalam tren meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 13% dari Rp. 9,150 miliar (2020) dan sedikit meningkat di tahun 2022 menjadi Rp. 10,477 miliar dan tumbuh kembali menjadi Rp. 18,110 miliar (2024). Fluktuasi tersebut terutama didorong oleh pendapatan retribusi di sektor pelayanan kesehatan, kebersihan dan parkir serta penggunaan kekayaan daerah dan retribusi pasar. Melihat kondisi ini maka perlu dijaga momentum tumbuhnya kembali retribusi daerah serta meningkatkan kembali retribusi pasar.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7% dari Rp. 14,320 miliar (2020) menjadi Rp. 17,986 miliar (2024). Sedikit fluktuasi terjadi pada tahun 2023 yang menurun capaiannya dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya dividen BUMD. Untuk meningkatkan dividen BUMD ke depan, opsi peningkatan manajemen BUMD dan suntikan modal bisa menjadi pertimbangan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11% dari Rp. 148 miliar (2020) menjadi Rp. 215 miliar (2024) yang menjadi penerimaan tertinggi selama 2020-2024. Penurunan terjadi pada tahun 2023 yaitu dari Rp. 167 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 162 miliar pada 2023. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja BLUD yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.61
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (%)

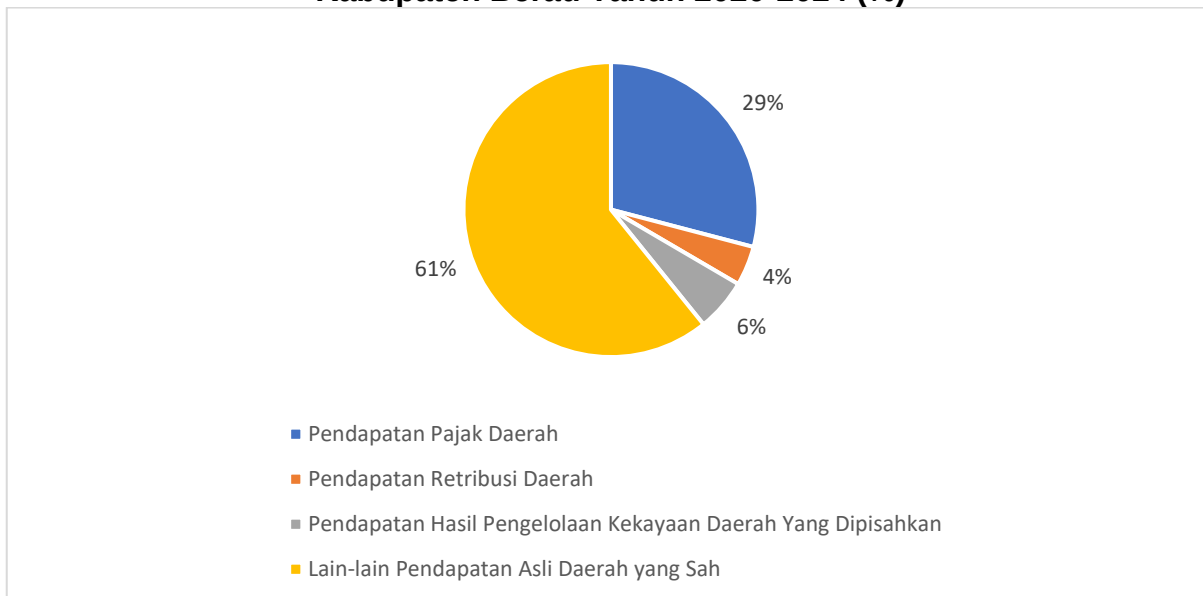


Sumber: Bapenda Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Berau. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 61% pertahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 29% pertahun, berikutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 6% pertahun, dan terakhir Hasil Retribusi Daerah yang kontribusinya sebesar 4% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu dijaga momentum pertumbuhannya dengan dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



Gambar II.62
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (%)

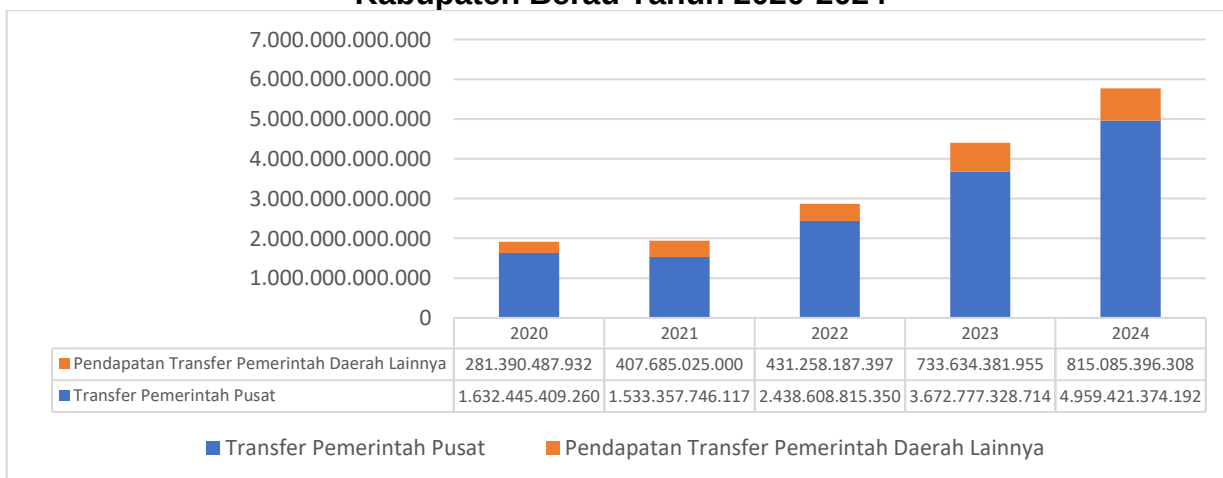


Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar II.63
Komponen Komponen Pendapatan Transfer
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

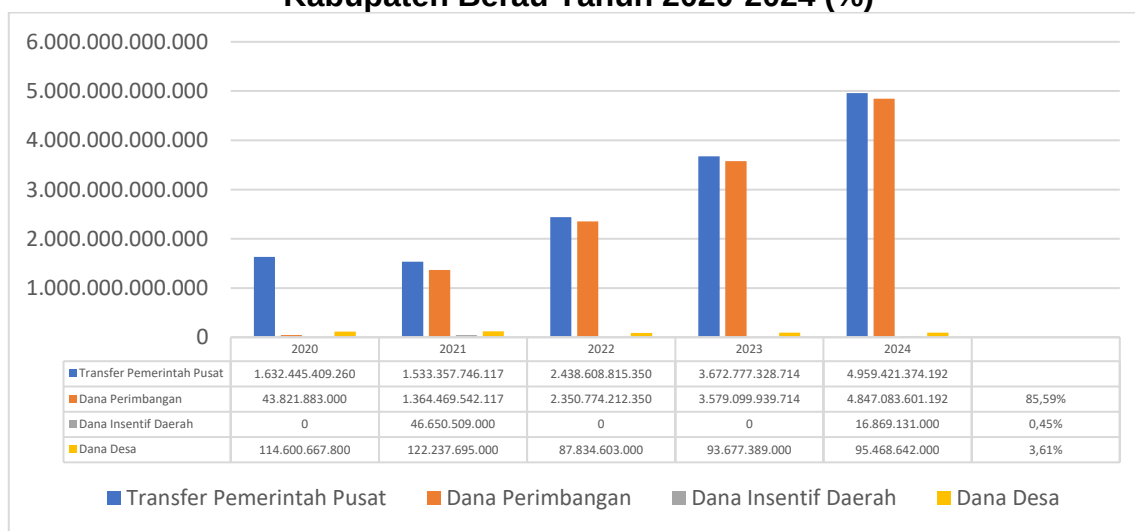


Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Berau mengalami tren meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 32% dari Rp. 2.072 triliun (2020) menjadi Rp. 5,774 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024 relatif tingginya Dana Perimbangan dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 83,43% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 85,59% adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari transfer pemerintah pusat lainnya dari pos Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Gambar II.64
Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan cukup tajam dari tahun 2020 Rp. 43,821 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 1,364 miliar di tahun 2021 dan angka ini kembali meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 4,847 miliar. Melihat kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ruang fiskal yang semakin besar. Menyempitnya sumber pendapatan transfer sebagai komponen pembiayaan menjadi masalah serius jika tidak dibarengi penguatan sumber keuangan mandiri.

Sumber Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Insentif Daerah (DID) dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif karena dalam lima tahun tidak setiap tahun mendapat Dana Insentif Daerah, hanya pada tahun 2021 dan 2024 dimana secara agregat jumlahnya



mengalami penurunan dari Rp. 46,650,653 miliar (2020) menjadi Rp. 16,869 miliar (2024). Sementara Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang berasal dari Dana Dana Desa yang dalam lima tahun terakhir selalu mengalami kontraksi negatif dari Rp. 114,600 miliar (2020) menjadi Rp. 95,468 miliar (2024) atau turun 3% pertahun.

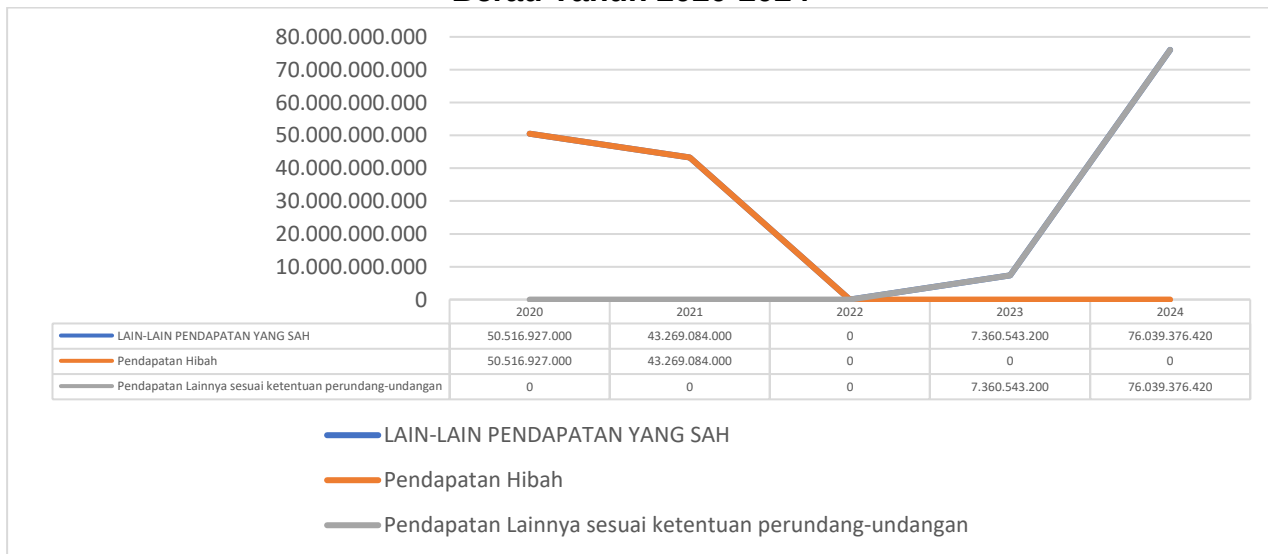
Selain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Kabupaten Berau juga mendapat alokasi pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Secara umum pendapatan transfer antar daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh 33% pertahun dari Rp. 281,390 miliar (2020) menjadi Rp. 815,085 miliar (2024).

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp. 50,516 miliar (2020) menjadi Rp. 76,039 miliar (2024) atau rata-rata meningkat 52%. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang tumbuh dari Rp. 7,360 miliar (2020) menjadi Rp. 76,039 miliar (2024). Sementara diketahui bahwa hibah justru mengalami tren menurun -57% dari tahun ke 2021 dari Rp. 50,516 miliar (2020) menjadi Rp. 43,269 miliar (2021). Penyebab penurunan dana hibah antara lain karena seleksi penerima hibah lemah dan laporan penggunaan dana tidak sesuai.



Gambar II.65
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- Peningkatan Efisiensi:** Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- Diversifikasi Pendapatan:** Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- Pembangunan Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- Pengelolaan Utang:** Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK):** Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.



- f. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel II.52
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024**

URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	2.356.039.778.496	2.254.733.927.244	3.169.396.847.336	4.700.904.175.374	6.194.026.383.085	29%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	233.264.403.504	270.422.072.127	299.529.844.589	287.131.921.505	343.480.236.165	11%
Pendapatan Pajak Daerah	61.152.852.902	68.925.180.648	101.978.007.724	93.382.456.473	91.558.760.332	13%
Pendapatan Retribusi Daerah	9.150.003.217	9.587.388.138	10.477.919.521	14.933.984.444	18.110.450.696	19%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.320.626.363	14.960.047.946	19.370.432.054	16.119.182.280	17.986.298.143	7%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.640.921.022	176.949.455.395	167.703.485.290	162.696.298.308	215.824.726.994	11%
PENDAPATAN TRANSFER	2.072.258.447.992	1.941.042.771.117	2.869.867.002.747	4.406.411.710.669	5.774.506.770.500	32%
Transfer Pemerintah Pusat	1.632.445.409.260	1.533.357.746.117	2.438.608.815.350	3.672.777.328.714	4.959.421.374.192	35%
Dana Perimbangan	43.821.883.000	1.364.469.542.117	2.350.774.212.350	3.579.099.939.714	4.847.083.601.192	793%
Dana Insentif Daerah		46.650.509.000			16.869.131.000	-100%
Dana Desa	114.600.667.800	122.237.695.000	87.834.603.000	93.677.389.000	95.468.642.000	-3%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	281.390.487.932	407.685.025.000	431.258.187.397	733.634.381.955	815.085.396.308	33%



Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163.890.487.932	231.235.025.000	336.097.187.397	509.121.881.955	459.125.396.308	32%
Bantuan Keuangan	117.500.000.000	176.450.000.000	95.161.000.000	224.512.500.000	355.960.000.000	50%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50.516.927.000	43.269.084.000		7.360.543.200	76.039.376.420	273%
Pendapatan Hibah	50.516.927.000	43.269.084.000				-57%
Pendapatan Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan				7.360.543.200	76.039.376.420	933%

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

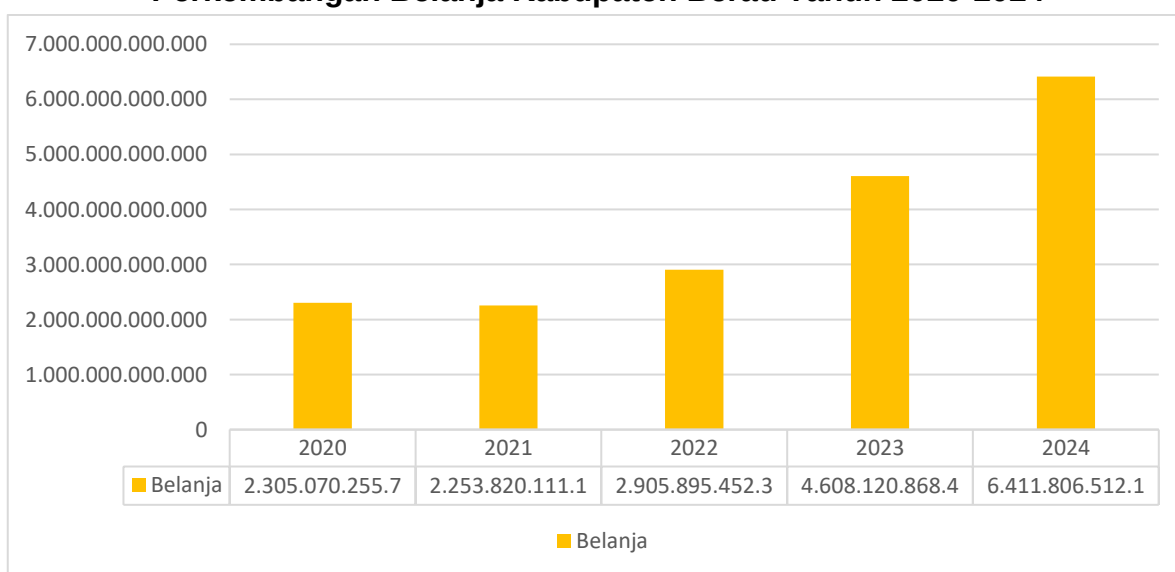
4) Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunannya sebesar 7% pertahun. Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 (Rp. 2,305 triliun) sampai tahun 2021 (Rp. 2,253 triliun) kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi Rp. 2,905 triliun dan naik Kembali hingga pada tahun 2023 menjadi Rp. 4,608 triliun dan tahun 2024 mencapai Rp. 6,411 triliun. Adapun penurunan dari tahun 2020-2021 karena adanya pandemik Covid-19.

Gambar II.66
Perkembangan Belanja Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

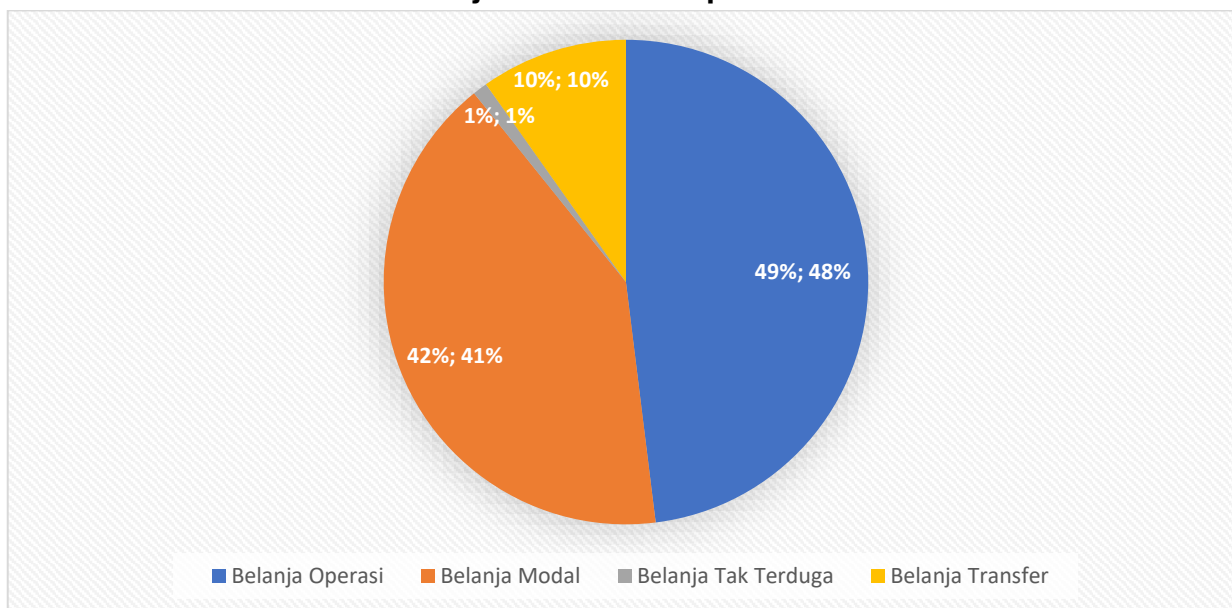


Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Berdasarkan komposisi belanja daerah, terlihat bahwa belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi yang mencakup sekitar 49% dari total belanja. Belanja Modal menempati posisi kedua dengan porsi sebesar 42%, menunjukkan alokasi yang cukup besar untuk kegiatan pembangunan dan pengadaan aset. Sementara itu, Belanja Transfer mencakup 10% dari total belanja, dan Belanja Tak Terduga memiliki porsi paling kecil yaitu sebesar 1%. Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran daerah difokuskan untuk operasional dan pembangunan, dengan alokasi minimal untuk kebutuhan darurat dan transfer antar pemerintah.



Gambar II.67
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Berau telah tumbuh 12% pertahun dari Rp. 2,305 triliun (2020) menjadi Rp. 2,111 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Selama periode 2020 hingga 2024, sebagian besar komponen belanja daerah mengalami peningkatan nominal yang cukup signifikan. Belanja pegawai naik dari Rp599,69 miliar menjadi Rp1,04 triliun (rata-rata tumbuh 15% per tahun), sementara belanja hibah meningkat dari Rp126,59 miliar menjadi Rp868,60 miliar (10% per tahun). Di sisi lain, belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan melonjak tajam dari Rp580,62 miliar menjadi Rp3,08 triliun, mencerminkan pergeseran kebijakan ke arah belanja yang lebih produktif. Meskipun demikian, pertumbuhan belanja rutin seperti pegawai perlu dikendalikan agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi belanja pembangunan, sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 yang menargetkan proporsi belanja pegawai maksimal 30% pada 2027. Pergeseran belanja ini secara umum menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan belanja infrastruktur dan pelayanan publik.



b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Berau mengalami tren meningkat cukup signifikan yaitu 56% pertahun dari Rp. 863,097 miliar (2020) menjadi Rp. 3,828 triliun (2024). Naiknya belanja modal tersebut disebabkan oleh naiknya hampir semua komponen belanja modal yaitu Belanja Peralatan dan Mesin (51% pertahun), Belanja Bangunan dan Gedung (35% pertahun), Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (64% pertahun), Belanja Aset Tetap Lainnya (-51% pertahun) dan Belanja Aset Lainnya (34% pertahun).

Selain untuk menjalankan amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam hal meningkatkan proporsi belanja modal, Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Posisi saat ini, proporsi belanja modal rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 56% pertahun hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat untuk mendorong tumbuhnya investasi yang berdampak pada perekonomian daerah secara umum diperlukan infrastruktur yang memadai. Untuk itu arah kebijakan belanja ke depan harus berpijak pada peningkatan proporsi belanja modal secara bertahap dan berkelanjutan.

c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Berau mengalami rata-rata pertumbuhan 4% pertahun dari Rp. 100,187 miliar (2020) menurun menjadi Rp. 5,774 miliar (2024) dikarenakan pertumbuhan yang sangat melonjak pada tahun 2023 ke tahun 2024 walau secara umum belanja tak terduga mengalami banyak penurunan dari tahun 2020-2023 sehingga didapat rata-rata



pertumbuhan sebesar 4% Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. **Belanja Transfer**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Berau relative naik sekitar 13% pertahun dari Rp. 310,417 miliar (2020) menjadi Rp. 465,702 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relative meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan (desa) yang tumbuh sebesar 14% dari Rp. 301,151 miliar (2020) menjadi Rp. 465,702 miliar (2024). Adapun belanja transfer bantuan keuangan terbesar terjadi pada tahun 2024. Sedangkan Belanja Transfer Bagi Hasil sedikit mengalami penurunan 23% pertahun dari Rp. 9,265 miliar (2020) menjadi tidak ada pada tahun 2024. Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 97% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk belanja bagi hasil khususnya bagi hasil pajak

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) **Prioritas Belanja Modal:** melakukan efisiensi di pos belanja lainnya khususnya belanja pegawai untuk dialokasikan pada belanja modal khususnya pada jenis belanja modal yang mempunyai daya ungkit terhadap masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) **Perencanaan Anggaran yang Cermat:** Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 3) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.



- 4) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 5) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- 6) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan pertanian dalam arti luas, bisnis *carbon fund*, sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 7) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai serta efisiensi kelembagaan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah serta kemampuan SDM dan ketersediaan pendanaan.
- 8) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif serta penghapusan dan penyerdehanaan perangkat daerah yang tidak relevan atau tidak diperlukan.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.53

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	BELANJA	2,305,070,255,737	2,253,820,111,107	2,905,895,452,392	4,608,120,868,464	6,411,806,512,152	31%
5.1	BELANJA OPERASI	1,341,785,218,651	1,310,260,708,896	1,574,647,666,073	1,818,795,262,619	2,111,530,856,755	12%
5.1.01	Belanja pegawai	599,692,828,204	662,259,217,606	788,533,936,226	812,677,295,577	1,038,160,066,708	15%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614,888,703,551	579,611,166,221	698,410,047,416	834,570,312,408	868,596,837,598	10%
5.1.03	Belanja Subsidi						
5.1.05	Belanja Hibah	126,598,686,896	66,805,325,068	80,981,838,137	163,011,244,933	189,599,952,449	23%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	605,000,000	1,585,000,000	6,721,844,294	8,536,409,701	15,174,000,000	148%
5.2	BELANJA MODAL	863,097,690,832	659,066,988,137	1,028,531,224,206	2,345,617,541,442	3,828,798,419,150	56%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13,898,348,425	56,238,000	192,821,000	7,825,488,693	1,352,415,463	1005%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,528,811,257	47,251,453,626	119,216,483,894	172,966,458,500	259,968,567,330	51%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176,967,119,116	147,211,003,610	155,604,600,350	307,876,754,279	472,715,286,591	35%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	580,623,389,337	463,159,654,264	749,802,632,312	1,848,412,488,655	3,081,747,295,756	64%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,080,022,697			8,536,351,315	8,338,136,101	-51%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		1,388,638,638	3,714,686,650		4,676,717,909	34%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	100,187,346,254	16,060,351,075	2,795,846,813	1,826,837,315	5,774,799,583	4%
5.3.01	Belanja Tak Terduga	100,187,346,254	16,060,351,075	2,795,846,813	1,826,837,315	5,774,799,583	4%
5.4	BELANJA TRANSFER	310,417,099,621	268,432,063,000	299,920,715,300	441,881,227,088	465,702,436,664	13%
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9,265,205,000	7,420,868,000	9,376,212,300	9,540,281,000		-23%
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	301,151,894,621	261,011,195,000	290,544,503,000	432,340,946,088	465,702,436,664	14%

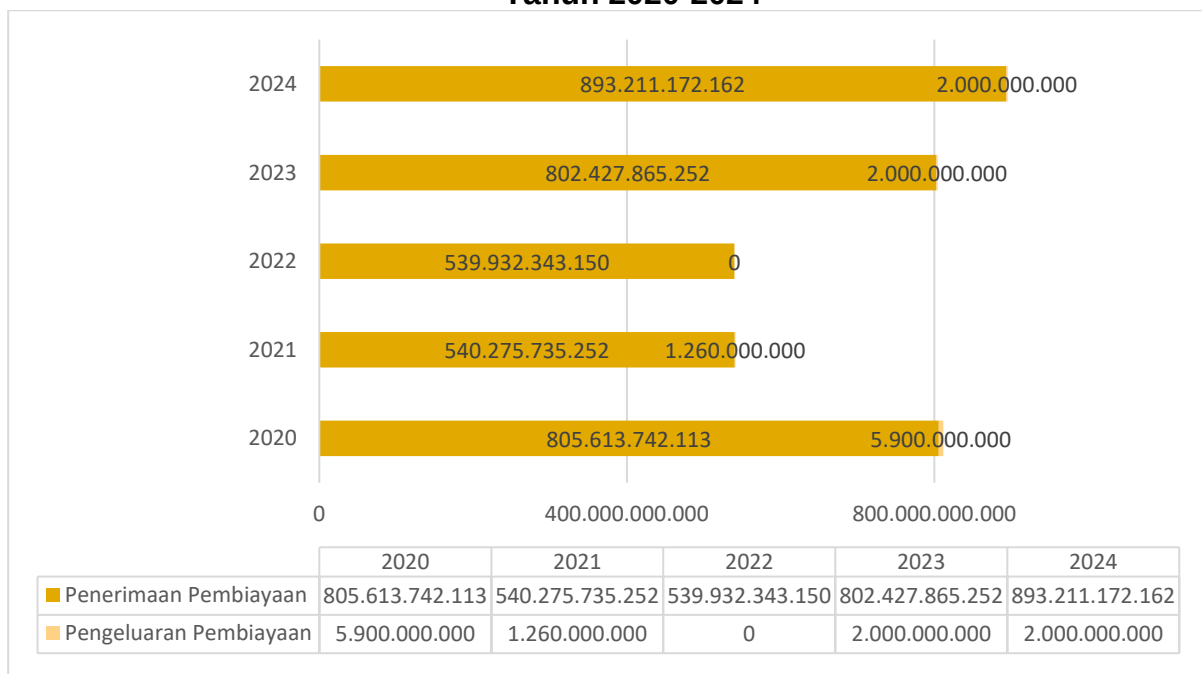
Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relative mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 7% pertahun dari Rp. 799,713 miliar (2020) menjadi Rp. 891,211 miliar (2024). Sumber pembiayaan Kabupaten Berau berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan naiknya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh tingginya penerimaan pembiayaan khususnya pada tahun 2024 dimana penerimaan pembiayaan mencapai Rp. 893,211 miliar dengan pengeluaran pembiayaan Rp. 2 miliar.

Gambar II.68
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Berau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.54
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENDAPATAN	2,356,039,778,496	2,254,733,927,244	3,169,396,847,336	4,700,904,175,374	6,194,026,383,085	29%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	233,264,403,504	270,422,072,127	299,529,844,589	287,131,921,505	343,480,236,165	11%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	61,152,852,902	68,925,180,648	101,978,007,724	93,382,456,473	91,558,760,332	13%
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9,150,003,217	9,587,388,138	10,477,919,521	14,933,984,444	18,110,450,696	19%
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,320,626,363	14,960,047,946	19,370,432,054	16,119,182,280	17,986,298,143	7%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148,640,921,022	176,949,455,395	167,703,485,290	162,696,298,308	215,824,726,994	11%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,072,258,447,992	1,941,042,771,117	2,869,867,002,747	4,406,411,710,669	5,774,506,770,500	32%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1,632,445,409,260	1,533,357,746,117	2,438,608,815,350	3,672,777,328,714	4,959,421,374,192	35%
	Dana Perimbangan	43,821,883,000	1,364,469,542,117	2,350,774,212,350	3,579,099,939,714	4,847,083,601,192	793%
	Dana Insentif Daerah		46,650,509,000			16,869,131,000	
	Dana Desa	114,600,667,800	122,237,695,000	87,834,603,000	93,677,389,000	95,468,642,000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	281,390,487,932	407,685,025,000	431,258,187,397	733,634,381,955	815,085,396,308	33%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163,890,487,932	231,235,025,000	336,097,187,397	509,121,881,955	459,125,396,308	32%
	Bantuan Keuangan	117,500,000,000	176,450,000,000	95,161,000,000	224,512,500,000	355,960,000,000	50%



4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50,516,927,000	43,269,084,000		7,360,543,200	76,039,376,420	100%
4.3.03	Pendapatan Hibah	50,516,927,000	43,269,084,000				
4.3.03	Pendapatan Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan				7,360,543,200	76,039,376,420	933%
5	BELANJA	2,305,070,255,737	2,253,820,111,107	2,905,895,452,392	4,608,120,868,464	6,411,806,512,152	31%
5.1	BELANJA OPERASI	1,341,785,218,651	1,310,260,708,896	1,574,647,666,073	1,818,795,262,619	2,111,530,856,755	12%
5.1.01	Belanja pegawai	599,692,828,204	662,259,217,606	788,533,936,226	812,677,295,577	1,038,160,066,708	15%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614,888,703,551	579,611,166,221	698,410,047,416	834,570,312,408	868,596,837,598	10%
5.1.03	Belanja Subsidi						
5.1.05	Belanja Hibah	126,598,686,896	66,805,325,068	80,981,838,137	163,011,244,933	189,599,952,449	23%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	605,000,000	1,585,000,000	6,721,844,294	8,536,409,701	15,174,000,000	100%
5.2	BELANJA MODAL	863,097,690,832	659,066,988,137	1,028,531,224,206	2,345,617,541,442	3,828,798,419,150	56%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13,898,348,425	56,238,000	192,821,000	7,825,488,693	1,352,415,463	100%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,528,811,257	47,251,453,626	119,216,483,894	172,966,458,500	259,968,567,330	51%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176,967,119,116	147,211,003,610	155,604,600,350	307,876,754,279	472,715,286,591	35%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	580,623,389,337	463,159,654,264	749,802,632,312	1,848,412,488,655	3,081,747,295,756	64%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,080,022,697			8,536,351,315	8,338,136,101	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		1,388,638,638	3,714,686,650		4,676,717,909	34%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	100,187,346,254	16,060,351,075	2,795,846,813	1,826,837,315	5,774,799,583	4%
5.3.01	Belanja Tak Terduga	100,187,346,254	16,060,351,075	2,795,846,813	1,826,837,315	5,774,799,583	4%
5.4	BELANJA TRANSFER	310,417,099,621	268,432,063,000	299,920,715,300	441,881,227,088	465,702,436,664	13%
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9,265,205,000	7,420,868,000	9,376,212,300	9,540,281,000		
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	301,151,894,621	261,011,195,000	290,544,503,000	432,340,946,088	465,702,436,664	14%



6	PEMBIAYAAN NETTO	799,713,742,113	539,015,735,252	539,932,343,150	800,427,865,252	891,211,172,162	7%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	805,613,742,113	540,275,735,252	539,932,343,150	802,427,865,252	893,211,172,162	7%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	805,613,742,113	540,275,735,252	539,932,343,150	802,427,865,252	893,211,172,162	7%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,900,000,000	1,260,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	5,900,000,000	1260000000		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	540,266,165,251	539,929,551,389	803,433,738,094	893,211,172,162	673,431,043,095	9%

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



4. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Secara agregat nilai aset Kabupaten Berau dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 7% dari Rp. 9,032 triliun (2019) menjadi Rp. 15,705 triliun (2024).

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren penurunan dengan rata rata pertumbuhan sebesar 14% pertahun dari Rp. 18,152 miliar (2020) menjadi Rp. 4,794 miliar (2024).



3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Berau berfluktuasi namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7% pertahun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 9,014 triliun menjadi Rp. 15,981 triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2024 nilainya mengalami kenaikan. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Berau disajikan pada Tabel berikut ini.



**Tabel II.55
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan %
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	477,029,668,592	433,064,788,352	676,574,033,625	821,259,740,624	644,036,295,948	23%
Kas di Bendahara Penerimaan	117,719,000	194,124,000	68,930,500	65,356,000	33,906,867	-2%
Kas di Bendahara Pengeluaran	460,000	340,000	1,200	0	65,628,500	-75%
Kas di BLUD	50,242,487,902	93,811,903,723	123,594,394,740	67,648,687,298	24,859,854,694	24%
Kas di Bendahara FKTP	3,447,500,742	10,255,168,428	672,602,218	1,651,431,754	404,086,307	83%
Kas di Bendahara BOS	9,174,465,016	2,604,653,619	1,517,956,039	1,226,486,066	742,867,460	-44%
Kas Lainnya	197,709,515	12,492,031	21,228,897	1,362,517,921	3,311,977,785	2098%
Setara Kas	0	0	802,449,147,220	0	0	-100%
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	
Piutang Pendapatan	65,978,374,049	39,711,203,879	40,497,502,728	41,602,237,825	45,578,464,831	-12%
Piutang Lainnya	64,578,220,055	0	0	45,000,000,000	0	-100%
Penyisihan Piutang	(39,940,991,144)	(42,820,368,942)	(46,759,997,323)	(47,705,061,671)	(48,049,755,338)	6%
Beban Dibayar Dimuka	158,392,548	172,145,872	139,238,431	286,547,978	363,462,949	32%
Persediaan	51,619,695,051	60,783,434,350	104,785,408,018	179,298,130,409	194,762,366,342	54%
Piutang Retribusi Daerah		4,987,733,436	5,293,090,261	3,940,339,164	4,807,662,932	-10%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	55,372,169	55,372,169	0	0%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		93,222,599,018	25,397,736,412	28,206,603,307	29,996,806,707	-31%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0	0	0	0	
Piutang Transfer Antar Daerah		32,208,475,481	67,562,985,000	61,090,578,845	81,333,530,845	50%
JUMLAH ASET LANCAR	682,603,701,326	728,208,693,248	999,420,482,915	1,204,988,967,688	982,247,156,830	21%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0	
Investasi Jangka Panjang Permanen	602,507,363,706	612,063,740,285	612,840,345,861	618,096,020,678	576,426,864,448	1%
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	602,507,363,706	612,063,740,285	612,840,345,861	618,096,020,678	576,426,864,448	1%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	602,507,363,706	612,063,740,285	612,840,345,861	618,096,020,678	576,426,864,448	1%
ASET TETAP						
Tanah	1,095,661,869,439	1,071,794,946,887	1,061,816,959,231	1,069,237,842,505	1,072,145,570,218	-1%
Peralatan dan Mesin	758,040,175,861	801,398,856,634	931,458,524,422	1,109,298,981,825	1,370,853,812,845	14%
Gedung dan Bangunan	2,658,239,034,518	2,518,547,385,967	2,381,212,394,760	2,142,502,313,087	2,599,646,606,526	-7%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6,107,179,394,226	6,616,205,990,930	7,368,157,044,198	9,128,603,795,013	12,222,116,681,776	15%
Aset Tetap Lainnya	70,199,465,866	76,081,077,874	80,709,039,565	87,661,682,797	95,663,258,267	8%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	181,928,176,583	88,851,667,923	85,453,760,261	274,637,546,744	292,549,083,431	55%
Akumulasi Penyusutan	(3,205,003,413,789)	(3,694,749,343,527)	(4,275,703,640,781)	(4,842,147,637,889)	(5,543,777,951,111)	15%
JUMLAH ASET TETAP	7,666,244,702,705	7,478,130,582,687	7,633,104,081,656	8,969,794,524,083	12,109,197,061,952	6%
PROPERTI INVESTASI						



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Properti Investasi	0	0	0	369,649,076,785	369,649,076,785	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0	0	(86,067,581,887)	(93,397,226,531)	
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0	0	0	283,581,494,898	276,251,850,254	
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0	0		0		
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0		0		
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	1,518,524,281	1,322,015,010	1,096,569,599	940,354,048	615,165,937	-15%
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0	274,217,630	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	1,096,569,599	0	0	
Aset Tidak Berwujud	9,800,723,100	11,123,405,600	18,435,073,335	41,569,394,795	56,236,812,306	68%
Aset Lain-lain	74,042,426,801	237,756,756,344	1,392,445,186,657	497,454,164,982	2,230,819,727,591	214%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4,385,722,208)	(5,981,473,308)	(7,874,128,353)	(24,179,725,160)	(29,982,091,756)	92%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(163,712,164,588)	(211,631,267,269)	(213,193,323,774)	(220,739,301,793)	15%
JUMLAH ASET LAINNYA	80,975,951,974	80,508,539,057	1,192,471,433,969	302,590,864,890	2,037,224,529,914	435%
JUMLAH ASET	9,032,331,719,711	8,898,911,555,278	10,437,836,344,401	11,095,470,377,340	15,705,095,613,144	7%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	11,044,489	13,961,611	1,599,986	22,126,952	-31%
Utang Bunga	0	0	0	0	0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
Pendapatan Diterima Dimuka	1,447,515	1,447,515	1,447,515	0	0	-33%
Utang Beban	1,275,635,794	2,355,350,985	3,126,593,537	1,447,515	1,447,515	6%
Utang Jangka Pendek Lainnya	16,875,112,393	3,848,624,990	14,395,872,348	3,128,164,469	4,346,691,677	40%
Utang Transfer	0	0	0	1,105,288,003	424,556,552	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,152,195,702	6,216,467,979	17,537,875,011	4,236,499,973	4,794,822,696	14%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0	0	0	0	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	
Utang kepada Masyarakat	0	0	0	0	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	
JUMLAH KEWAJIBAN	18,152,195,702	6,216,467,979	17,537,875,011	4,236,499,973	4,794,822,696	14%
EKUITAS						
EKUITAS	9,014,179,524,009	8,892,695,087,299	10,420,298,469,391	11,091,233,877,366	15,981,347,443,398	7%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9,032,331,719,711	8,898,911,555,278	10,437,836,344,401	11,095,470,377,340	15,705,095,613,144	7%

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Berau 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 23%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2021 yang mencapai 29% dengan total belanja aparatur sebesar Rp 599 miliar sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 16% yaitu berkisar RP. 780 miliar dari total pengeluaran Rp. 3,699 triliun. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 30% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat



namun perlu ditekan ke depan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.56
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	599.692.828.204	2.310.970.255.737	26%
2	2021	662.259.217.606	2.255.080.111.107	29%
3	2022	788.533.936.225	2.905.895.452.392	27%
4	2023	812.677.295.577	4.610.120.868.464	18%
5	2024	1.038.160.066.708	6.413.806.512.152	16%
Rata-Rata		780.264.668.864	3.699.174.639.970	23%

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan



rata-rata pertumbuhan sebesar 11% pertahun dari Rp. 1,016 triliun (2020) menjadi Rp. 1,503 triliun (2024). Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Formulasi dan Pemanfaatan Pinjaman Daerah yang Efektif:** melakukan formulasi pinjaman daerah untuk pembangunan yang sifatnya produktif dan berdampak luas.
- 2) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 3) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 4) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 5) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 6) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
- 7) **Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan:** Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan



jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.57

**Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Berau Tahun 2020-2024**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama	1,016,197,274,078.60	948,011,631,681.22	1,092,250,498,338	1,259,354,369,478.00	1,503,549,918,934.29	11%
5.1	Belanja Operasi	599,692,828,204	662,259,217,606	788,533,936,225	812,677,295,577.00	1,030,054,682,687.29	15%
5.1.01	Belanja pegawai	599,692,828,204	662,259,217,606	788,533,936,226	812,677,295,577	1,030,054,682,687.29	15%
5.3	Belanja Tak Terduga	100,187,346,254	16,060,351,075	2,795,846,813	2,795,846,813.00	5,774,799,583.00	-15%
5.3.01	Belanja Tak Terduga	100,187,346,254	16,060,351,075	2,795,846,813	1,826,837,315	5,774,799,583.00	4%
5.4	Transfer	310,417,099,621	268,432,063,000	300,920,715,300	441,881,227,088.00	465,720,436,664.00	13%
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9,265,205,000	7,420,868,000	9,376,212,300	9,540,281,000	11,024,007,000.00	6%
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	301,151,894,621	261,011,195,000	290,544,503,000	432,340,946,088	454,696,429,664.00	13%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,900,000,000	1,260,000,000	0	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-39%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	5,900,000,000	1,260,000,000	0	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-39%

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



B. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020 dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp -346,183 miliar, Rp. -33,311 miliar dan Rp -219,780 miliar. Sementara pada tahun 2020,2022, dan 2023 terjadi surplus anggaran.



Tabel II.58
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,356,039,778,496	2,254,733,927,244	3,169,396,847,336	4,700,904,175,374	6,194,026,383,085
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2,305,070,255,737	2,253,820,111,107	2,905,895,452,392	4,608,120,868,464	6,411,806,512,152
3	Pengeluaran Pembiayaan	5,900,000,000	1,260,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000
	Defisit/Surplus	45,069,522,759	-346,183,863	263,501,394,944	90,783,306,910	-219,780,129,067

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja serta proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2026 hingga 2030.

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2026-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2025 dan/atau target APBD tahun 2026.

Pentingnya proyeksi pendapatan antara lain:

1. Dasar Perencanaan Pembangunan Realistis.

Proyeksi pendapatan memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan program kerja dan pengeluaran berdasarkan sumber daya keuangan yang diperkirakan tersedia. Ini menghindari rencana pembangunan yang tidak realistis yang melebihi kapasitas pendanaan daerah.

2. Menjamin Keberlanjutan Fiskal

Dengan memproyeksikan pendapatan secara akurat, daerah dapat menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga defisit yang tidak terkendali bisa dihindari dan daerah tetap mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

3. Alokasi Anggaran yang Terarah dan Efisien

Proyeksi pendapatan membantu menetapkan prioritas kebijakan dan program sehingga anggaran dapat dialokasikan secara tepat sasaran, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di Kab. Berau.

4. Mengelola Risiko Keuangan

Dengan mengetahui potensi dan batasan pendapatan, pemerintah daerah dapat mengantisipasi risiko keuangan serta menyiapkan alternatif sumber pembiayaan jika diperlukan.

5. Sebagai Acuan Evaluasi dan Pelaporan

Proyeksi pendapatan menjadi tolok ukur dalam evaluasi capaian keuangan daerah selama RPJMD berjalan dan menjadi bahan pertanggungjawaban dalam pelaporan pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Berau masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan meskipun trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Berau masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel salah satunya Inflasi yang diproyeksikan stabil dan rendah dalam rentang target Bank Indonesia didukung oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi riil suatu daerah yang dalam hal ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025-2030. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2024 mencapai 7,28 persen, yang merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (5,44 persen). Angka ini menunjukkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur sehingga pendapatan pada tahun 2025 diharapkan dapat naik optimis sampai dengan tahun 2030.

Untuk mengukur sejauh mana PDRB berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, indikator PDRB per kapita menjadi pisau analisis awal yang penting. Angka ini, yang merepresentasikan rata-rata nilai produksi atau pendapatan yang diatribusikan kepada setiap individu dalam suatu wilayah, memberikan perspektif makro tentang tingkat kemakmuran ekonomi. Kenaikan PDRB per kapita diasosiasikan dengan potensi



peningkatan pendapatan daerah yang dapat dilihat dari standar hidup, akses terhadap barang dan jasa yang lebih baik, serta peluang untuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data dan analisa yang disajikan pada sub bab II.2 gambaran umum kondisi daerah, peningkatan PDRB per Kapita mengindikasikan bahwa pendapatan rata-rata individu di Kabupaten Berau mengalami kenaikan. Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Berau mengalami peningkatan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir sehingga kondisi ini dapat dijadikan dasar asumsi kenaikan proyeksi pendapatan Kabupaten Berau tahun 2025-2030. Jika dilihat dari inflasi, pada tahun 2022-2023 angka inflasi Kabupaten Berau masih mengacu pada angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi pada tahun 2020 tercatat rendah sebesar 0,78 persen akibat pembatasan mobilitas saat pandemi. Inflasi meningkat pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 2,15 persen dan 5,35 persen, seiring dengan kenaikan harga BBM. Tahun 2024 menunjukkan inflasi sebesar 1,47 persen. Untuk mengoptimalkan pendapatan maka penting untuk melakukan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Berau tahun 2026-2030 diproyeksikan hanya tumbuh rata rata sebesar $\pm 2\%$ pertahun dari Rp. 4,889 triliun (2026) menjadi Rp. 5,143 triliun (2030). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan 1% atau flat sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2024 ataupun target tahun 2026.

Untuk proyeksi PAD sendiri diproyeksikan pada tahun 2026-2030 tumbuh rata rata $\pm 5\%$ pertahun dari Rp. 419 miliar (2026) menjadi Rp. 503 miliar (2030). Komponen sumber PAD yang berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan stagnan dari tahun 2026 sampai tahun 2030, untuk Pendapatan Pajak Daerah yang diproyeksikan tumbuh $\pm 5\%$ pertahun. Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar $\pm 5\%$ pertahun dari Rp. 162 miliar (2026) menjadi Rp. 197 miliar (2030) juga mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang juga tumbuh $\pm 13\%$ pertahun.

Sedangkan Pendapatan Pajak Retribusi diproyeksikan naik rata-rata 9% pertahun dari angka Rp.131 miliar pada tahun 2026 hingga mencapai Rp.179 miliar pada tahun 2030. Fokus pertumbuhan pajak ini dengan memanfaatkan potensi yang akan mampu mendorong pajak daerah secara signifikan dengan memaksimalkan potensi pajak antara lain pajak PBB-P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung wallet.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah pada tahun 2026-2030 antara lain dengan memaksimalkan potensi sektor unggulan yaitu dengan mendorong investasi dan hilirisasi pariwisata, komoditi unggulan pertanian dalam arti luas (Kakao, Padi, Jagung, Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Lada dan bawang) serta perikanan. Selain itu juga perlu dilakukan kemudahan izin dan menciptakan iklim usaha kondusif serta pemberdayaan UMKM agar ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi aset juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan aset daerah yang belum produktif.

Adapun secara umum target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) **Penilaian Properti yang Akurat:** Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) **Peningkatan Kepatuhan:** Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) **Diversifikasi Sumber Pajak:** Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Berau. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) **Inisiatif Peningkatan Layanan berbasis digital dan SDM berkualitas:** Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.



- 5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2029 ditargetkan tumbuh $\pm 8\%$ pertahun dari Rp. 131 miliar (2026) menjadi Rp. 179 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang stagnan sebesar 19% pertahun. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau belum terdampak dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan. Walaupun belum terdampak namun diperlukan strategi untuk terus bisa memaksimalkan pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan kesehatan, persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.



- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan Retribusi: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2029 diproyeksikan tidak mengalami peningkatan tetap stabil sejumlah Rp. 15 miliar. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif agar dalam meningkatkan labanya sehingga porsi dividen yang didapat juga semakin besar melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup

target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.

- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD bersamaan dengan

optimalisasi hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Pendapatan Daerah Kabupaten Berau masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan transfer pemerintah pusat pertumbuhannya 35%. Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan dari Rp. 4,453 triliun menjadi Rp. 4.623 triliun pada tahun 2030. Proyeksi Dana Transfer Kabupaten Berau dalam RPJMD 2026-2030 menunjukkan tren positif dan berpotensi menopang lebih dari 60% total pendapatan daerah. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, dibutuhkan konsistensi dalam pelaporan, advokasi aktif terhadap hak-hak fiskal daerah, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II.59
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun 2026-2030

URAIAN	Baseline	PROYEKSI TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	4,764,588,664,000	4,889,778,569,516	5,009,929,198,503	5,070,546,650,009	5,101,651,561,617	5,143,265,589,269
PENDAPATAN ASLI DAERAH	400,000,000,000	419,703,474,116	439,854,103,103	460,471,554,609	481,576,466,217	503,190,493,869
Pendapatan Pajak Daerah	154,950,000,000	162,697,500,000	170,832,375,000	179,373,993,750	188,342,693,438	197,759,828,109
Pendapatan Retribusi Daerah	119,382,903,206	131,338,877,322	143,354,631,309	155,430,464,065	167,566,675,986	179,763,568,965
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110,167,096,794	110,167,096,794	110,167,096,794	110,167,096,794	110,167,096,794	110,167,096,794
PENDAPATAN TRANSFER	4,353,229,604,400	4,453,229,604,400	4,553,229,604,400	4,593,229,604,400	4,603,229,604,400	4,623,229,604,400
Transfer Pemerintah Pusat	3,486,482,734,604	3,586,482,734,604	3,686,482,734,604	3,726,482,734,604	3,736,482,734,604	3,756,482,734,604
Dana Perimbangan	3,377,952,788,604	3,477,952,788,604	3,577,952,788,604	3,617,952,788,604	3,627,952,788,604	3,647,952,788,604
Dana Insentif Daerah	6,999,290,000	6,999,290,000	6,999,290,000	6,999,290,000	6,999,290,000	6,999,290,000
Dana Desa	101,530,656,000	101,530,656,000	101,530,656,000	101,530,656,000	101,530,656,000	101,530,656,000
Transfer Antar Daerah	866,746,869,796	866,746,869,796	866,746,869,796	866,746,869,796	866,746,869,796	866,746,869,796
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	529,146,869,796	529,146,869,796	529,146,869,796	529,146,869,796	529,146,869,796	529,146,869,796
Bantuan Keuangan	337,600,000,000	337,600,000,000	337,600,000,000	337,600,000,000	337,600,000,000	337,600,000,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11,359,059,600	16,845,491,000	16,845,491,000	16,845,491,000	16,845,491,000	16,845,491,000
Pendapatan Hibah						
Pendapatan Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan	11,359,059,600	16,845,491,000	16,845,491,000	16,845,491,000	16,845,491,000	16,845,491,000

Sumber: Bapenda Kabupaten Berau, 2025



2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib diluar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan belanja diarahkan pada:

1. Belanja prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
2. Prioritas kedua untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 158. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
5. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk



- meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Berau
 7. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Berau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Berau, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Berau dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksinya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 2\%$ pertahun dari Rp. 4,766 triliun (2026) menjadi Rp. 4,925 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi belanja daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2020-2024 yang mengalami pertumbuhan $\pm 28\%$ pertahun. Belanja daerah Kabupaten Berau pada periode terakhir menunjukkan pola yang masih didominasi oleh kebutuhan rutin pemerintahan, sementara ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan strategis mengalami efisiensi. Proporsi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah masih menjadi komponen terbesar dalam struktur APBD. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan daerah dalam mengakselerasi belanja modal untuk infrastruktur, layanan publik, dan sektor-sektor pengungkit pertumbuhan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pendapatan dari sektor ekstraktif, terutama batu bara dan migas, menjadikan APBD Berau rawan fluktuasi akibat dinamika harga komoditas global.

Dalam konteks regional Kalimantan, belanja daerah Berau dihadapkan pada tantangan peningkatan daya saing wilayah, konektivitas antar-kabupaten/kota, serta penyiapan dukungan bagi transformasi ekonomi yang mengarah ke hilirisasi dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendorong kebutuhan penyesuaian belanja daerah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penataan tata ruang yang lebih adaptif



terhadap pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Kabupaten Berau perlu memastikan alokasi belanja mampu mendorong kesiapan infrastruktur dasar, layanan administrasi pemerintahan yang efisien berbasis digital, serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi unggulan daerah.

Selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang menekankan transformasi ekonomi, reformasi sistem perlindungan sosial, pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan digital, belanja daerah Berau idealnya mengarah pada redistribusi alokasi menuju sektor-sektor prioritas. Belanja harus semakin diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur hijau, pemulihan lingkungan, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Selain itu, RPJMN menekankan penguatan ketahanan fiskal daerah melalui efisiensi belanja dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Dalam konteks ini, Kabupaten Berau menghadapi kebutuhan untuk meninjau ulang struktur belanja operasional agar lebih efektif dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja prioritas pembangunan.

Secara keseluruhan, gambaran belanja daerah Kabupaten Berau masa kini mengindikasikan perlunya reorientasi strategi fiskal agar lebih adaptif terhadap isu strategis regional dan selaras dengan kebijakan nasional dalam RPJMN. Penekanan pada efisiensi dan efektivitas belanja, penguatan belanja modal produktif, serta integrasi isu lingkungan dan digitalisasi menjadi kunci bagi Berau untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika perubahan regional Kalimantan dan agenda pembangunan nasional.

Menghadapi potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Berau perlu menetapkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada penguatan kemandirian daerah. Pengurangan TKD akan berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan program prioritas, terutama pada sektor layanan dasar dan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang komprehensif untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan utama yang harus ditempuh adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan perpajakan daerah, serta diversifikasi sumber PAD melalui



pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, jasa lingkungan, dan pemanfaatan aset daerah. Optimalisasi ini diikuti oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif di Kabupaten Berau.

Di sisi belanja, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan efisiensi dan *refocusing* belanja, terutama pada belanja operasional yang belum memberikan nilai tambah langsung terhadap kinerja pembangunan. Pengetatan pada belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa yang bersifat konsumtif, serta evaluasi terhadap program rutin yang tidak berbasis hasil harus dilakukan secara konsisten. Ruang fiskal yang tersedia harus diarahkan untuk mendukung program prioritas, layanan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kegiatan yang memberikan dampak multisektor seperti infrastruktur konektivitas, digitalisasi pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi produktif.

Selain itu, pengurangan TKD harus direspons dengan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Setiap OPD didorong untuk menyusun program yang terukur, efisien, serta berorientasi hasil, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tumpang tindih kegiatan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengurangi capaian pembangunan, namun mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Berau juga perlu mengembangkan kemitraan pembiayaan alternatif, antara lain melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan skema CSR yang terarah pada prioritas pembangunan daerah, serta penjajakan sumber pembiayaan non-APBD yang legal dan akuntabel. Kerja sama lintas sector khususnya dengan pelaku industri tambang, pariwisata, dan jasa berpotensi menjadi sumber dukungan strategis di tengah penurunan TKD.

Secara keseluruhan, pengurangan Dana Transfer ke Daerah tahun 2026 harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Berau. Dengan optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, penguatan perencanaan berbasis kinerja, dan inovasi pembiayaan alternatif, Kabupaten Berau dapat tetap menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD,



maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah karena kebijakan efisiensi maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) **Pengelolaan Anggaran yang Teliti:** Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya yang berupa belanja modal yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi



dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.

- 6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi, sinergitas dan konsolidasi antar pemerintah daerah, Provinsi dan Pusat serta Pihak terkait lainnya (*Stakeholders*) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas dan penyediaan layanan. Misalnya (1) Kerjasama Pemerintah dengan Pihak swasta, (2) Memanfaatkan dana primbangan dan transfer dari pemerintah pusat, (3) Mencari bantuan keuangan dari pihak ketiga, seperti lembaga donor atau organisasi internasional untuk program - program tertentu.
- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.60
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2030

KODE REKENING	URAIAN	APBD	PROYEKSI TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA	4.764.588.664.000	4.766.710.922.668	4.655.554.856.509	4.775.734.124.554	4.836.420.690.156	4.925.339.123.774
5.1	BELANJA OPERASI	2.278.794.227.099	2.166.886.500.529	2.198.867.581.115	2.231.374.716.819	2.264.417.293.078	2.298.004.871.681
5.1.01	Belanja pegawai	1.058.923.268.042	1.069.512.500.723	1.080.207.625.730	1.091.009.701.987	1.101.919.799.007	1.112.938.996.997
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.001.527.559	1.031.221.558.110	1.051.845.989.272	1.072.882.909.058	1.094.340.567.239	1.116.227.378.584
5.1.03	Belanja Subsidi	-	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	193.391.951.498	50.520.186.896	51.025.388.765	51.535.642.653	52.050.999.079	52.571.509.070
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.477.480.000	15.632.254.800	15.788.577.348	15.946.463.121	16.105.927.753	16.266.987.030
5.2	BELANJA MODAL	2.018.390.630.484	2.089.854.422.139	1.943.971.957.619	2.025.524.686.615	2.047.158.439.116	2.095.585.716.656
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.099.938.148	5.150.937.530	5.202.446.905	5.254.471.374	5.307.016.088	5.360.086.249
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.864.418.440	114.460.230.521	115.604.832.826	116.760.881.154	117.928.489.966	119.107.774.866
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	252.232.629.182	257.277.281.766	262.422.827.401	267.671.283.949	273.024.709.628	278.485.203.820
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.569.175.647.121	1.702.861.952.626	1.550.520.825.735	1.625.498.530.983	1.640.438.699.248	1.682.051.590.258
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.452.815.395	8.507.533.856	8.592.609.194	8.678.535.286	8.765.320.639	8.852.973.845
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.565.182.197	1.596.485.841	1.628.415.558	1.660.983.869	1.694.203.547	1.728.087.618
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	28.402.920.000	40.000.000.000	35.503.650.000	33.195.912.750	30.673.023.381	28.663.940.350
5.3.01	Belanja Tak Terduga	28.402.920.000	40.000.000.000	35.503.650.000	33.195.912.750	30.673.023.381	28.663.940.350
5.4	BELANJA TRANSFER	439.000.886.417	469.970.000.000	477.211.667.775	485.638.808.370	494.171.934.582	503.084.595.088
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	10.513.814.220	15.000.000.000	13.142.267.775	12.288.020.370	11.354.130.822	10.610.435.253
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	428.487.072.197	454.970.000.000	464.069.400.000	473.350.788.000	482.817.803.760	492.474.159.835

Sumber: Bapalitbang Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



3. Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah secara berkelanjutan. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disusun dengan sistematis diharapkan agar dapat menutup defisit atau mengoptimalkan surplus tanpa menimbulkan beban fiskal baru. Melalui strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar nol, sehingga seluruh sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito. Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya: untuk pembangunan infrastruktur).
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel II.61
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Berau Tahun 2026-2030**

Kode Rekening	URAIAN	APBD	PROYEKSI TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	488.004.336.000	0	0	0	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	488.004.336.000					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		67.192.646.848	276.267.841.993	215.276.375.455	183.342.606.461	134.169.605.223
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD		67.192.646.848	276.267.841.993	215.276.375.455	183.342.606.461	134.169.605.223

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2026-2030 akan mengalami peningkatan sebesar $\pm 2\%$ pertahun dari Rp. 1,500 triliun (2026) menjadi Rp. 1,778 triliun (2030).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel II.62
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas
Kabupaten Berau Tahun 2026-2030

Kode Rekening	Uraian		Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama		1.500.720.001.272	1.646.675.147.571	1.869.190.785.498	1.825.120.798.562	1.810.107.363.431	1.778.857.137.658
5.1	1.058.923.268.042	1.069.512.500.723	1.080.207.625.730	1.091.009.701.987	1.101.919.799.007	1.112.938.996.997	1.112.938.996.997
5.1.01	1.058.923.268.042	1.069.512.500.723	1.080.207.625.730	1.091.009.701.987	1.101.919.799.007	1.112.938.996.997	1.112.938.996.997
5.3	2.795.846.813	40.000.000.000	35.503.650.000	33.195.912.750	30.673.023.381	28.663.940.350	28.663.940.350
5.3.01	28.402.920.000	40.000.000.000	35.503.650.000	33.195.912.750	30.673.023.381	28.663.940.350	28.663.940.350
5.4	439.000.886.417	469.970.000.000	477.211.667.775	485.638.808.370	494.171.934.582	503.084.595.088	503.084.595.088
5.4.01	10.513.814.220	15.000.000.000	13.142.267.775	12.288.020.370	11.354.130.822	10.610.435.253	10.610.435.253
5.4.02	428.487.072.197	454.970.000.000	464.069.400.000	473.350.788.000	482.817.803.760	492.474.159.835	492.474.159.835
6.2	0,00	67.192.646.848	276.267.841.993	215.276.375.455	183.342.606.461	134.169.605.223	134.169.605.223
6.2.02	0,00	67.192.646.848	276.267.841.993	215.276.375.455	183.342.606.461	134.169.605.223	134.169.605.223

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, yaitu perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur (KKN) Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Kondisi saat ini sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2026 sebesar Rp. 3.243 triliun dan naik secara total sebesar 6% pada tahun 2030 yaitu sebesar Rp 3.364 triliun. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektifitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang meningkat juga tiap tahun dimana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2026 hingga 2030 secara total naik sebesar 5% angka Rp 4.312 triliun menjadi Rp 4.477 triliun. Secara umum, kapasitas riil pagu OPD di Kabupaten Berau masih dipengaruhi oleh keterbatasan ruang fiskal daerah, di mana sebagian besar belanja masih terserap untuk kebutuhan belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai, operasional perkantoran, serta pelayanan dasar publik. Kondisi ini menyebabkan ruang pembiayaan untuk kegiatan prioritas pembangunan menjadi relatif terbatas, sehingga diperlukan penajaman program dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di setiap OPD.



Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun rincian proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja OPD Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dilihat pada table berikut ini.



Tabel II.63
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2030

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Pendapatan	4.889.778.569.516	5.009.929.198.503	5.070.546.650.009	5.101.651.561.617	5.143.265.589.269
-	Pendapatan Daerah	4.889.778.569.516	5.009.929.198.503	5.070.546.650.009	5.101.651.561.617	5.143.265.589.269
-	Penerimaan Pembiayaan					
Dikurangi						
-	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	1.646.675.147.571	1.869.190.785.498	1.825.120.798.562	1.810.107.363.431	1.778.857.137.658
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		3.243.103.421.946	3.140.738.413.005	3.245.425.851.447	3.291.544.198.186	3.364.408.451.611

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Berau, 2025 (diolah)

Tabel II.64
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Berau Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Pendapatan	4.889.778.569.516	5.009.929.198.503	5.070.546.650.009	5.101.651.561.617	5.143.265.589.269
-	Pendapatan Daerah	4.889.778.569.516	5.009.929.198.503	5.070.546.650.009	5.101.651.561.617	5.143.265.589.269
-	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
2	Total Belanja	633.037.646.848	867.089.659.768	813.647.246.575	790.075.829.424	749.675.000.932
	Belanja Transfer	469.970.000.000	477.211.667.775	485.638.808.370	494.171.934.582	503.084.595.088
	Belanja Tak Terduga	40.000.000.000	35.503.650.000	33.195.912.750	30.673.023.381	28.663.940.350
	Pengeluaran Pembiayaan	67.192.646.848	276.267.841.993	215.276.375.455	183.342.606.461	134.169.605.223
Kapasitas Riil Pagu OPD		4.312.615.922.668	4.220.946.038.734	4.336.435.553.434	4.393.463.997.193	4.477.347.448.608

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Berau, 2025 (diolah)



2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Setiap tahapan dalam proses pembangunan daerah senantiasa dihadapkan pada beragam tantangan dan permasalahan yang bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, serta lingkungan. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap kali bersumber dari ketidakharmonisan antara perencanaan yang telah disusun dengan realisasi yang pada akhirnya mencerminkan bahwa sasaran pembangunan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Dalam hal ini, diperlukan suatu pendekatan sistematis yang melibatkan proses identifikasi serta analisis berbasis evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, guna menelusuri akar permasalahan serta mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang memerlukan perbaikan atau penguatan. Tahapan perumusan permasalahan tersebut memiliki peran strategis dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan, mengingat kemampuan untuk mengenali isu secara tepat dan komprehensif akan berimplikasi langsung terhadap ketepatan dan efektivitas kebijakan yang akan dirumuskan.

Dalam menyusun dokumen kebijakan pembangunan jangka menengah, sangatlah penting untuk memiliki pemahaman yang utuh terhadap dinamika persoalan dan tantangan aktual yang dihadapi oleh daerah, baik yang bersifat struktural maupun situasional. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Berau, perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai isu strategis yang mencerminkan potensi tantangan dan peluang pembangunan di masa mendatang. Identifikasi terhadap isu-isu tersebut harus dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, mencakup dimensi global, nasional, hingga lokal, serta melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Dengan menerapkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, diharapkan proses pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi secara menyeluruh kemudian dapat dijadikan sebagai landasan pijakan yang kuat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan serta menetapkan tujuan dan sasaran yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.



2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis komprehensif yang telah dipaparkan dalam Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah, proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian maupun hambatan dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Melalui telaah atas data empiris dan informasi faktual mengenai karakteristik wilayah, serta evaluasi terhadap isu-isu strategis di tiap sektor pembangunan sesuai dengan realitas objektif di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Berau saat ini adalah **“Belum optimalnya pemerataan pembangunan Kabupaten Berau yang maju dan sejahtera berlandaskan penguatan sektor unggulan daerah”** Permasalahan mendasar tersebut mencerminkan adanya sejumlah aspek krusial yang memerlukan penanganan serius dan menjadi fokus utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Gambar II.69
Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan
Kabupaten Berau





Rumusan permasalahan ini disusun melalui pendekatan analitis terhadap data kuantitatif dan kualitatif, serta informasi strategis yang merepresentasikan situasi aktual pembangunan di wilayah Kabupaten Berau secara menyeluruh. Identifikasi terhadap permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan dan perumusan program-program strategis pembangunan ke depan yang bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada identifikasi permasalahan utama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berikut rincian lebih lanjut mengenai isu-isu yang akan dikembangkan sebagai acuan utama dalam merancang intervensi kebijakan dan langkah-langkah implementatif yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

1. Belum optimalnya pembangunan SDM menuju masyarakat Berau yang Unggul

Salah satu tantangan strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Berau adalah belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan global, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Berau yang unggul. Pembangunan SDM merupakan faktor kunci dalam mempercepat transformasi sosial ekonomi daerah, namun hingga saat ini kualitas dan pemerataan pembangunan manusia di Kabupaten Berau masih belum sepenuhnya tercapai. Meskipun terdapat peningkatan dari sisi indikator pendidikan dan kesehatan, kesenjangan dalam kualitas SDM antarwilayah dan kelompok sosial masih menjadi tantangan nyata. Hal ini terlihat dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 77,17 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 78,79. Selain itu, disparitas antar kecamatan dalam hal akses Pendidikan masih terjadi meliputi belum meratanya akses pelayanan pendidikan yang dilengkapi dengan fasilitas rumah dinas guru dan ruang kelas baru, layanan kesehatan dasar juga menjadi masalah yang perlu mendapatkan prioritas dan perhatian. Selain itu keterampilan tenaga kerja juga menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani.

Peningkatan akses pendidikan di Berau belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja. Masih tingginya angka putus sekolah di jenjang menengah atas, terbatasnya jumlah tenaga pengajar berkualitas, serta minimnya fasilitas pendidikan vokasi menjadi hambatan



serius dalam mencetak generasi muda yang kompeten. Di sektor kesehatan, meskipun angka harapan hidup meningkat, namun masih terdapat tantangan dalam hal gizi anak, ketersediaan tenaga medis, serta keterjangkauan layanan kesehatan di wilayah pedalaman. Potensi turunnya status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai yang menjadi sinyal bahaya bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau. Bidang urusan kesehatan menjadi perhatian masyarakat terkait adanya asumsi minimnya keseriusan dan kepedulian pihak rumah sakit dalam mengelola rumah sakit yang pada periode kepemimpinan sebelumnya juga menjadi janji politik dimana targetnya menjadi RS tipe B.

Berdasarkan analisis pada sub bab sebelumnya, ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan SDM yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal juga masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan BLK dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan ditengah tantangan era digital dan industri berbasis pengetahuan, di mana inovasi, kreativitas, serta penguasaan teknologi menjadi kompetensi utama.

Untuk itu, beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain adalah penguatan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis potensi daerah, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, pengembangan program beasiswa dan talent scouting bagi pelajar berprestasi, serta integrasi program pembangunan SDM lintas sektor dengan pelibatan dunia usaha dan masyarakat sipil. Dengan membangun SDM yang unggul, Kabupaten Berau tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional secara berkelanjutan.

2. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan

Salah satu isu strategis yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan Kabupaten Berau adalah belum optimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan. Meskipun terdapat berbagai kemajuan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, realisasi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah-wilayah terpencil, pedalaman, dan pesisir. Ketimpangan distribusi sumber daya pembangunan



dan akses terhadap layanan dasar masih cukup signifikan. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam hal pendapatan, kualitas hidup, dan peluang kerja. Salah satu indikator utamanya adalah tingkat kemiskinan Kabupaten Berau, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,08%, memang menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun angka ini masih menyisakan tantangan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Berau juga masih cukup tinggi yaitu mencapai 5,15% pada tahun 2024, mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung bergantung pada sektor ekstraktif belum mampu menghadirkan multiplier effect yang merata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di seluruh lapisan. Kesenjangan kesejahteraan ini juga tercermin dalam ketimpangan indeks pembangunan manusia antar wilayah dan dalam aspek aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar. Wilayah-wilayah perbatasan dan kepulauan masih menghadapi keterbatasan dalam sarana prasarana dasar, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Dari data tersebut, meskipun indikator sosial ekonomi menunjukkan perbaikan, tingkat ketimpangan (Gini Rasio) yang masih berada pada angka 0,317 memperlihatkan bahwa pertumbuhan kesejahteraan belum sepenuhnya inklusif. Hal ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih mengarahkan kebijakan pada pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan kesejahteraan ke depan perlu lebih difokuskan pada penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan kesehatan, serta perluasan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Dengan mengakselerasi pembangunan yang menjamin kualitas hidup dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, Kabupaten Berau diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh dan berkelanjutan.



3. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Berau

Salah satu tantangan strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Berau adalah belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Reformasi birokrasi sejatinya merupakan instrumen kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Berau telah menunjukkan komitmen melalui penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan evaluasi mandiri setiap tahunnya, namun hasil implementasi belum menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa area perubahan yang diatur dalam sistem evaluasi nasional. Beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain adalah rendahnya nilai indeks Reformasi Birokrasi, belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta masih terbatasnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan.

Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Berau yang pada tahun 2023 masih berada di kategori “Cukup”, dengan skor 43,06. Hal ini mencerminkan perlunya upaya peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta profesionalisme ASN.

Ketertinggalan dalam implementasi reformasi birokrasi ini turut dipengaruhi oleh minimnya transformasi digital dalam pelayanan publik, lemahnya sistem manajemen kinerja aparatur, serta rendahnya efektivitas pengelolaan perubahan organisasi. Selain itu, masih adanya praktik birokrasi yang bersifat administratif dan kurang adaptif terhadap inovasi menghambat percepatan perbaikan tata kelola. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di Kabupaten Berau. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan integritas ASN secara berkelanjutan, peningkatan digitalisasi proses pelayanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



(SPBE), penyederhanaan proses bisnis dan regulasi internal, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

Implementasi reformasi birokrasi yang optimal sangat penting dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Melalui reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh, diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata.

4. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

Salah satu permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Berau adalah belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan, baik dari sisi ketersediaan, aksesibilitas, maupun keberlanjutan layanan. Infrastruktur memegang peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun hingga saat ini, kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih cukup terlihat, terutama di kawasan pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau terluar.

Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi masih dirasakan oleh masyarakat di sejumlah kecamatan, yang secara langsung berdampak pada lambatnya distribusi layanan publik dan rendahnya daya saing wilayah. Berdasarkan data Kabupaten Berau dalam angka tahun 2025, sebanyak 847,96 km jalan di Kabupaten Berau masih berada pada kondisi rusak berat, sementara jalan dengan kondisi baik hanya mencapai 437,60 km. Keterbatasan anggaran dan akses geografis yang sulit menjadi salah satu faktor penghambat percepatan perbaikan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak juga masih belum merata. Pada tahun 2024, cakupan akses air minum layak mencapai 83,17%, sementara cakupan akses air minum jaringan perpipaan berada di angka 79,68%, masih di bawah target RPJMD 2021-2026. Ketimpangan ini turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang belum tersentuh pembangunan secara optimal.



Ketimpangan dalam penyediaan dan kualitas infrastruktur ini menjadi penghambat utama dalam menjamin keadilan pembangunan antarwilayah dan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif. Rendahnya kualitas infrastruktur juga berimplikasi pada lambatnya pengembangan ekonomi lokal, rendahnya investasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau perlu mendorong strategi pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal, memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan lingkungan, melibatkan kolaborasi dengan swasta melalui skema pembiayaan alternatif, serta memperkuat perencanaan tata ruang wilayah yang mendukung konektivitas antar-kecamatan.

Dengan pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkeadilan, Kabupaten Berau dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, serta integrasi wilayah yang berkelanjutan.

5. Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup

Salah satu isu krusial yang tengah dihadapi Kabupaten Berau adalah meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap daya dukung dan daya tampung ekosistem daerah. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam, mengganggu keseimbangan ekologi, serta berimplikasi pada penurunan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Fenomena deforestasi, degradasi lahan, pencemaran perairan, serta gangguan pada ekosistem pesisir dan laut menjadi isu yang semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, tutupan hutan alam di Kabupaten Berau hanya 75% dari 2,2 juta hektar luas wilayah daratan di Kabupaten Berau. Selain itu, aktivitas pertambangan, perambahan hutan, serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan turut mempercepat laju kerusakan kawasan lindung dan hutan produksi.

Frekuensi kejadian bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan sebaran kejadian yang meluas hingga ke wilayah penyangga konservasi. Hal ini mencerminkan semakin rentannya lingkungan Kabupaten Berau terhadap gangguan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan



perubahan iklim. Analisis nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada sub bab sebelumnya dapat menjadi sinyal kuat bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum optimal. Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih tegas, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam menjaga fungsi ekologis wilayah.

6. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Berau dalam upaya mencapai visi mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Sejahtera adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor unggulan daerah yang kreatif, inovatif, dan berbasis nilai tambah lokal. Meskipun Kabupaten Berau memiliki berbagai potensi unggulan seperti pariwisata bahari (Derawan dan Maratua), komoditas perkebunan (kakao dan kelapa sawit), serta potensi kelautan dan perikanan yang besar, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif rendah dan belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara berkelanjutan.

Saat ini, struktur ekonomi Kabupaten Berau masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, yang pada tahun 2024 tercatat menyumbang lebih dari 53,08% terhadap total PDRB. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif ini menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap guncangan harga global, serta menghambat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan kewirausahaan lokal yang berorientasi pada sektor kreatif dan berkelanjutan. Di sisi lain, potensi ekonomi kreatif yang ada di Berau, seperti industri kerajinan berbasis budaya lokal dan ekowisata belum dikelola secara maksimal. Rendahnya kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, kurangnya akses pembiayaan, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya promosi dan jejaring pasar menjadi faktor penghambat berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di daerah ini.

Indikator makro ekonomi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau masih berada pada angka 7,28% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Kalimantan Timur, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau berada pada peringkat kelima dan di atas angka LPE provinsi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Berau berada pada angka 5,15% di tahun 2024 dan lebih tinggi dari angka TPT tahun



sebelumnya, hal ini menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di sektor produktif dan kreatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sektor unggulan daerah berbasis kreativitas dan inovasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Berau perlu melakukan transformasi struktural melalui pengembangan ekonomi lokal yang berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan cara penguatan ekosistem UMKM dan wirausaha kreatif melalui inkubasi bisnis dan pendampingan usaha, peningkatan literasi digital dan adopsi teknologi pada pelaku usaha, pengembangan sentra ekonomi kreatif di wilayah potensial, serta penyusunan regulasi dan insentif yang mendorong investasi pada sektor-sektor berbasis inovasi. Dengan memaksimalkan potensi lokal melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif, Kabupaten Berau berpeluang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

7. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah menuju transformasi ekonomi hijau

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi Kabupaten Berau adalah belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah dalam mendukung transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Kabupaten Berau memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi sektor unggulan yang cukup besar, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, serta komoditas perkebunan seperti kakao dan kelapa sawit. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di tengah agenda global mengenai perubahan iklim dan transisi energi, Kabupaten Berau dihadapkan pada tantangan besar dalam mengalihkan struktur ekonominya yang masih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan, menuju sektor ekonomi hijau yang lebih berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan. Upaya untuk mengembangkan komoditas unggulan lestari dan mengoptimalkan potensi ekowisata masih mengalami kendala dari sisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya kebijakan lintas sektor secara optimal.



Salah satu indikator yang menggambarkan ketergantungan ekonomi Berau terhadap sektor tambang adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Berau yang masih sangat dominan, yaitu mencapai lebih dari 53,08%. Ketergantungan ini menjadikan struktur ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta menghambat perkembangan sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan seperti pertanian organik, industri kreatif, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Meskipun telah dilakukan berbagai inisiatif seperti promosi UMKM lokal, pengembangan desa wisata, serta penguatan komoditas kakao sebagai produk unggulan, namun belum terdapat akselerasi yang signifikan dalam pencapaian indikator-indikator ekonomi hijau. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, minimnya investasi hijau, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penghambat yang perlu segera diatasi.

Masih tingginya dominasi sektor pertambangan dibandingkan sektor produktif lainnya menunjukkan perlunya akselerasi transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau perlu menyusun kebijakan yang inklusif dan berbasis lingkungan, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga donor dalam mengembangkan ekosistem ekonomi hijau. Program-program seperti pelatihan petani dan pelaku UMKM berbasis *green economy*, insentif investasi hijau, serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat harus diperkuat guna mewujudkan Kabupaten Berau yang tidak hanya maju dan mandiri secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan sosial.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan antara lain penguatan pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif, rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan lindung dan pesisir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta penerapan ekonomi hijau dan insentif terhadap praktik ramah lingkungan oleh pelaku usaha. Dengan langkah-langkah sistematis dan kolaboratif, Kabupaten Berau diharapkan mampu memitigasi laju kerusakan lingkungan serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi masa depan.



Dengan penjabaran permasalahan pokok di atas, maka beberapa permasalahan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.65
Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Permasalahan	OPD
Urusan Pendidikan		
1.	Masih rendahnya minat penduduk usia sekolah untuk bersekolah (APK, APS, dan melek huruf) serta melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (angka melanjutkan pendidikan)	Dinas Pendidikan
2.	Belum optimalnya penanganan SDM pendidik dan tanaga kependidikan	
Urusan Kesehatan		
1.	Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.	Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan	
3.	Masih tingginya angka kematian bayi	
4.	Tingginya angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	
5.	Belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan	
6.	Masih rendahnya upaya penyehatan pangan	
7.	Tingginya Prevalensi Gizi Underweight,Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	
8.	Masih tingginya angka stunting	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum	
3.	Tingginya kejadian banjir	
4.	Pelayananan gedung pemerintah dan manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal	



5.	Berkurangnya daerah resapan air	
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.	Jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara tidak sebanding dengan volume dan bidang kerja DPKP.	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Penempatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang kompetensi dan rekam jejak karir nya tidak sesuai dengan lingkup bidang kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1.	Masih Terjadinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Kurangnya keutuhan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Adanya penebangan pohon dan pembakaran lahan/kebakaran hutan	BPBD/Pemadam Kebakaran dan Keselamatan
Urusan Sosial		
1.	Belum optimalnya pendataan keluarga miskin	Dinas Sosial
2.	Belum optimalnya penanganan PMKS terutama pada lansia terlantar dan ODGJ	
3.	Belum optimalnya pengeloan admistrasi pegawai dan kegiatan	

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

Tabel II.66
Permasalahan Pembangunan Sektorial Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Permasalahan	OPD
Urusan Tenaga Kerja		
1.	Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.	Pelaksanaan Pengembangan hubungan industrial	
3.	Pelaksanaan kegiatan deteksi dini terhadap potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial	
4.	Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	



5.	Rendahnya Minat Masyarakat Untuk Mendirikan LPKS	
6.	Belum Maksimalnya Pelaksanaan Kegiatan produktivitas	
7.	Menurunkan angka pengangguran	
8.	Pelayanan dan penyediaan informasi Pasar Kerja Online	
9.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
10.	Unit Layanan Disabilitas	
11.	Pelayanan Antar Kerja	
12.	Bursa Kerja Khusus	
13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah	
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak		
1.	Belum optimalnya pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender di daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum menggambarkan kondisi sebenarnya	
3.	KDRT cenderung meningkat	
4.	Masih rendahnya capaian kampung/kelurahan layak anak	
5.	Belum tersedianya data pilah gender dan anak	
Urusan Pangan		
1.	Masih tingginya daerah rentan rawan pangan	Dinas Pangan
2.	Kewaspadaan pangan dan gizi masih rendah	
3.	Ketersediaan pangan pokok masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah	
4.	Pemanfaatan Pangan Lokal masih kurang	
5.	Belum maksimalnya capaian skor PPH konsumsi	
6.	Pangan segar yang beredar belum ada jaminan aman dikonsumsi.	
7.	Belum Adanya Pengembangan SDM dalam penyusunan NBM	
8.	Masih terdapat perbedaan perhitungan ketersediaan pangan	



9.	Masih rendahnya distribusi pangan ke masyarakat	
Urusan Pertanahan		
1.	Belum optimalnya Penatagunaan dan pemanfaatan tanah	Dinas Pertanahan
2.	Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan	
3.	Belum meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan	
Urusan Lingkungan Hidup		
1.	Belum terkelolanya limbah industri secara maksimal	Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan
2.	Banyaknya air limbah yang dibuang ke badan sungai	
3.	Meningkatnya produksi asap dari kendaraan bermotor	
4.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan izin lingkungan	
5.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan	
6.	Belum tersedianya tempat sampah dan TPST secara merata di pemukiman penduduk	
7.	Masih kurangnya tenaga lapangan untuk kebersihan	
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
1.	Kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain	
3.	Ketersediaan sarana dan prasana kerja masih terbatas	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
1.	Belum optimalnya kegiatan pembinaan yang dilakukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.	Belum optimalnya lembaga ekonomi kampung menjalankan fungsinya	
3.	Belum optimalnya Pemerintah Kampung dalam Melaksanakan Pemeliharaan , Pengelolaan dan Pengamanan terhadap Sarana dan Prasarana Kampung terutama pada Fasilitas Umum	
4.	Kurangnya pemahaman Kepala Kampung dan Perangkat Kampung terkait tupoksi nya dalam jabatannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kampung	



5.	Pendelagasian Tugas dan pelimpahan kewenangan kepala kampung kepada Perangkat kampung beum sepenuhnya dipahami sehingga sebagaian melaksanakan tugas kurang terintegrasi satu dan lainnya	
6.	Belum optimalnya pengetahuan kepala kampung dan perangkat kampung dalam memahami pengadministrasian keuangan kampung	
7.	Kondisi kekurangan personil / tenaga teknis di seksi pengelolaan keuangan kampung yang ada saat ini sangat kurnag menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal	
8.	Kurangnya peningkatan kapasitas bagi pendmapig kecamatan dalam peran dan tugas nya sebagai pendamping kampung	
9.	Pengelolaan Aset Kampung yang masih kurang dan belum terselesaikan	
10.	Kurangnya sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas aparatur kampung	
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
1.	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 19 - 49 Tahun yang Cenderung Menurun	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk yang Cenderung Menurun tapi Belum Mencapai Target	
3.	Masih Tingginya Angka Kelahiran Pada Remaja usia 15 - 19 Tahun	
Urusan Perhubungan		
1.	Belum optimalnya layanan infrastruktur perhubungan serta aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang meliputi jaringan transportasi darat dan perairan antarwilayah	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi Dan Informatika		
1.	Belum terlaksananya secara optimal penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Belum meratanya akses komunikasi	
3.	Belum meratanya penyelenggaraan keamanan informasi	
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		



1.	Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro karena masih adanya ego sektoral.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, dan
Urusan Penanaman Modal			
1.	Belum optimalnya nilai investasi dan Sistem Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
1.	Rendahnya Tingkat Keaktifan Organisasi Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.	Minimnya kemandirian pemuda dalam dunia usaha		
3.	Pola pembinaan atlit yang kurang tepat		
Urusan Statistik			
1.	Belum terlaksananya secara optimal penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Belum meratanya akses komunikasi		
Urusan Persandian			
1.	Belum meratanya penyelenggaraan keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Permasalahan urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Berau meliputi:

Tabel II.67
Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Permasalahan	OPD
Urusan Kelautan dan Perikanan		
1.	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
2.	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	
3.	Belum optimalnya produksi pengolahan dan pemasaran	
4.	Masih adanya pelaku utama perikanan yang menggunakan alat/ bahan yang tidak direkomendasikan dalam melakukan kegiatan perikanan	
Urusan Pariwisata		



1.	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai - nilai budaya daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	
3.	Belum efektifnya kelembagaan	
Urusan Pertanian		
1.	Belum tercukupinya/tidak tersedianya benih tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dll.) dan benih hortikultura (rambutan, kelengkeng, rambutan, elay, dll.) di tingkat petani	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
2.	Kurang tersedianya stok pestisida/insektisida (kimia dan nabati) di tingkat petani untuk mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian yang disebabkan oleh hama dan penyakit	
3.	Ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani sangat kurang dan tingginya harga pupuk non-subsidi di pasaran toko pertanian	
4.	Dalam hal pemasaran, hasil produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagian besar masih didatangkan, dimonopoli, dan dijumpai produk hasil pertanian dari luar daerah.	
5.	Belum optimalnya penyediaan data prasarana dan sarana pertanian sehingga kesulitan dalam merencanakan pembangunan/penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang akurat	
6.	Belum optimalnya kapasitas penyuluhan pertanian di Kabupaten Berau	
7.	Masih lemahnya kelembagaan petani	
8.	Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Berau.	
Urusan Lingkungan Hidup		
1.	Terjadinya penurunan kualitas air.	Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan
2.	Terjadinya penurunan kualitas udara.	
3.	Belum optimalnya kegiatan revegetasi dan reboisasi akibat pembukaan lahan	
Urusan Perdagangan		
1.	Tugas pokok dan fungsi pada urusan wajib dan pilihan belum dapat di laksanakan secara maksimal	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



Urusan Perindustrian		
1.	Belum optimalnya hilirisasi produk industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Transmigrasi		
1.	Program transmigrasi sering kali hanya fokus pada pemindahan penduduk tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan jangka panjang.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.	Konflik status lahan transmigrasi yang masih belum jelas dan belum diselesaikan.	

Tabel II.68
Permasalahan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Permasalahan	OPD
1.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih rendah	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
2.	Belum maksimalnya Proses Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
3.	Belum maksimalnya Penanganan Permasalahan Hukum	
4.	Belum maksimalnya pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
5.	Belum Maksimalnya pelaksanaan Kegiatan JDIH	
6.	Belum maksimalnya pelaporan Rencana Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM	
7.	Capaian Realisasi Fisik dan Penyerapan Anggaran Pembangunan masih Rendah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
8.	Belum optimalnya personil dalam Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terutama pada pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
9.	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah
10.	Masih belum optimalnya persentase capaian kinerja Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah
11.	Semakin banyaknya volume pekerjaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
12.	Pendaftaran Bantuan Beasiswa bagi siswa/siswi SMA/MA/SMK atau yang	



	sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi yang tidak mampu atau Berprestasi	
13.	Belum optimalnya pembinaan dan monitoring Taman Pendidikan Al Qur'an, Pelayanan Ibadah Haji dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan pada masyarakat	
14.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kabupaten Berau	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
15.	Birokrasi belum mampu menciptakan hasil, birokrasi belum mampu menjamin manfaat pasti yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, dan birokrasi masih belum lincah dan cepat	
16.	Laporan Harta Kekayaan oleh wajib lapor Penyelenggaraan Negara dalam hal perbaikan hasil ferivikasi hal perbaikan hasil ferivikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi oleh penyelenggara Negara	
17.	Pelaksanaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan	
18.	Program prioritas pembangunan daerah belum memperhatikan adanya mekanisme crosscutting lintas PD	
19.	Proses tender APBD Perubahan sering kali terlambat ditenderkan sehingga kemungkinan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sesuai kebutuhan pelaksanaan yang ditetapkan	Bagian PBJ Sekretariat Daerah
20.	pengelolaan PBJ Berau belum optimal.	
21.	Terbatas nya SDM PBJ	
22.	Belum optimal fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Berau	Sekretariat DPRD
23.	Masih rendahnya inovasi yang dihasilkan	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
24.	Rendahnya motivasi ASN untuk melakukan inovasi	
25.	Belum optimalnya inovasi daerah sebagai sarana pelayanan publik	



26.	Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27.	Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	
28.	Masih rendahnya Kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana	
29.	Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Masih rendahnya komitmen beberapa OPD dalam pengelolaan arsip sesuai dgn ketentuan dan peraturan	
31.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung minat baca di perpustakaan-perpustakaan (Desa, sekolah, kabupaten)	
32.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kearsipan di OPD (khususnya Depo Arsip yg belum memenuhi standar)	
33.	Rendahnya penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK dan APIP	Inspektorat
34.	Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau masih perlu ditingkatkan	
35.	Efektifitas pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dinilai dari hasil (<i>outcome</i>) Program pada Pemerintah Kabupaten Berau masih rendah	
36.	APIP Kabupaten Berau belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi Keahlian Profesional yang memadai.	
37.	Masih terbatasnya jumlah personil APIP Kabupaten Berau	
38.	Merasionalkan penghitungan dalam PKPT yang harus mempertimbangkan dengan efektif dan efisien keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu sehingga target yang diprogramkan dalam PKPT dapat terpenuhi bukan sebatas rencana tetapi memang program yang akan dilaksanakan	
39.	Kurangnya pendampingan <i>consulting</i> terhadap Perangkat Daerah yang mempunyai temuan rekomendasi	
40.	Penyusunan proyeksi kebutuhan ASN Kabupaten Berau belum mengacu pada Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang ditetapkan oleh Menpan-RB	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



41.	Belum optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian termutahir	
42.	Belum optimalnya penempatan perpindahan (Mutasi) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	
43.	Belum optimalnya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	
44.	Belum optimalnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	
45.	Rendahnya peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan	Kecamatan
46.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
47.	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	
48.	Kurangnya pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	
49.	Keterbatasan Petugas Pajak yang memiliki sertifikasi Penilai, Pemeriksa, Juru Sita Pajak, Penagih Pajak, perencanaan dan kemampuan Teknologi Informasi	Badan Pendapatan Daerah
50.	Aplikasi Pendaftaran Pelaporan Pembayaran dan Pengawasan Pajak Belum terintegrasi	

2.3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan elemen kunci yang mencerminkan beragam persoalan penting yang relevan di tingkat global, nasional, maupun daerah, karena pengaruhnya yang signifikan terhadap arah dan keberlanjutan pembangunan. Isu-isu ini tidak hanya bersifat aktual, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang yang dapat memengaruhi stabilitas, kesejahteraan, dan kemajuan wilayah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu strategis menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang responsif dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Pada Kabupaten Berau, penempatan isu-isu strategis sebagai pusat perhatian dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar selaras dengan tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan menjadikan isu-isu tersebut sebagai dasar pijakan utama, efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Sebaliknya, pengabaian terhadap isu-isu strategis berisiko



menimbulkan hambatan substansial yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas daerah.

Proses identifikasi dan perumusan isu strategis harus dilakukan secara cermat sejak tahap awal perencanaan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara dinamika global, arah kebijakan nasional, dan kondisi spesifik regional. Pendekatan holistik dan terintegrasi ini memungkinkan penyusunan strategi yang lebih komprehensif dan solutif dalam menjawab kompleksitas permasalahan yang ada. Dengan demikian, Kabupaten Berau dapat merancang agenda pembangunan yang tidak hanya sistematis dan terarah, tetapi juga memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pemahaman terhadap pentingnya isu-isu strategis juga akan memperkuat posisi Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan berbasis bukti dan risiko, sehingga dapat meminimalkan potensi kegagalan serta mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan komitmen terhadap identifikasi isu-isu strategis secara tepat dan antisipatif, Kabupaten Berau akan memiliki arah pembangunan yang lebih solid, progresif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

A. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis internasional merupakan bagian dari dinamika global yang memiliki relevansi kuat terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dalam jangka menengah, dan pada gilirannya memberikan dampak terhadap pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Berau. Perkembangan global yang semakin kompleks di tengah era globalisasi, digitalisasi, dan transisi menuju pembangunan berkelanjutan menuntut daerah untuk mampu merespons isu-isu tersebut secara adaptif dan visioner.

Dalam penyusunan pembangunan jangka menengah, penelaahan terhadap isu-isu global yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi langkah strategis guna memastikan bahwa agenda pembangunan Kabupaten Berau selaras dengan tantangan dan peluang global yang tengah berlangsung. Penyesuaian ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat ketahanan terhadap berbagai tekanan eksternal.

Sejumlah isu global yang relevan, sebagaimana tercermin dalam dokumen RPJMN, menjadi acuan dalam merumuskan isu-isu prioritas pembangunan Kabupaten Berau. Isu-isu tersebut meliputi antara lain:

Gambar II.70
13 Resiko Internasional Jangka Menengah



Berikut merupakan penjabaran dari Isu Strategis Global:

1. Tantangan Perubahan Iklim

Kabupaten Berau berada dalam lintasan risiko tinggi akibat eskalasi krisis iklim global, yang secara nyata tercermin dalam meningkatnya frekuensi serta intensitas fenomena cuaca ekstrem mulai dari banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, hingga tanah longsor di kawasan rentan geomorfologi. Perubahan dinamika atmosferik dan pola presipitasi telah menciptakan disrupsi sistemik terhadap stabilitas ekosistem lokal dan menimbulkan dampak multidimensi, terutama terhadap ketahanan sektor-sektor vital seperti pertanian berbasis lahan, perikanan air tawar, dan infrastruktur pelayanan dasar.



Variabilitas iklim yang tidak terprediksi juga menyebabkan terganggunya siklus produksi pangan, krisis ketersediaan air bersih, serta potensi peningkatan konflik sosial akibat perebutan sumber daya alam yang makin terbatas. Ketidakmampuan sistem eksisting dalam merespons secara adaptif terhadap tekanan iklim ini mencerminkan urgensi penguatan kerangka tata kelola risiko bencana berbasis sains dan teknologi mutakhir. Dalam konteks fiskal dan teknologis yang masih terbatas, kebijakan adaptasi iklim di Berau menghadapi tantangan struktural dan operasional yang kompleks. Maka dari itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih transformatif yang meliputi reformulasi regulasi adaptif, rekayasa kelembagaan berbasis kolaborasi multi-pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi iklim dan pengarusutamaan resiliensi dalam agenda pembangunan daerah. Di sisi lain, pendekatan pembangunan rendah emisi karbon dan investasi pada infrastruktur tangguh iklim menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sosial ekologis Berau di tengah realitas iklim global yang semakin ekstrem dan tak menentu.

2. Perubahan Kritisal Terhadap Ekosistem

Kabupaten Berau menghadapi tantangan ekologis yang semakin kompleks akibat perubahan kritisal terhadap struktur dan fungsi ekosistem alaminya. Tekanan antropogenik yang berasal dari ekspansi lahan untuk kepentingan agraria, pertumbuhan permukiman, serta eksploitasi industri ekstraktif seperti pertambangan, telah mendorong percepatan degradasi lingkungan secara sistemik. Proses deforestasi dan fragmentasi habitat yang terjadi secara masif tidak hanya mengakibatkan kehilangan keanekaragaman hayati, tetapi juga mereduksi kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan esensial, seperti sekuestrasi karbon, pengaturan siklus hidrologi, dan stabilisasi tanah.

Dampak kumulatif dari degradasi ini menciptakan efek domino terhadap berbagai sektor pembangunan daerah. Kondisi ini tidak hanya memperlemah fondasi ekonomi lokal yang berbasis sumber daya alam, tetapi juga mengancam kesejahteraan masyarakat, memperbesar kerentanan sosial, dan menurunkan daya saing daerah dalam jangka panjang. Sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan ekologi lanskap yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan wilayah, yang mampu mengedepankan prinsip konservasi dan restorasi berbasis bukti ilmiah. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan



masyarakat sipil harus bersinergi dalam membangun model tata guna lahan yang adaptif, mendorong investasi hijau, serta memperkuat instrumen regulatif untuk menjaga integritas ekologis Berau sebagai penopang utama keberlanjutan sosial dan ekonomi regional.

3. *Biodiversity Loss* dan Gangguan Ekosistem

Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan terhadap integritas ekosistem di Kabupaten Berau merepresentasikan ancaman strategis terhadap fondasi pembangunan berkelanjutan daerah. Berau yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan hayati tropis yang tinggi kini menghadapi tekanan ekologis dari fragmentasi habitat, eksploitasi lahan yang tidak terkendali, serta aktivitas industri yang melampaui daya dukung lingkungan. Penurunan populasi spesies endemik dan punahnya ekosistem mikro tidak hanya mencerminkan krisis ekologis, tetapi juga melemahkan resiliensi ekologis yang berperan vital dalam menopang keseimbangan alam.

Kerusakan ekosistem yang ditandai dengan berkurangnya tutupan vegetasi alami, penurunan kualitas tanah dan air, serta terganggunya rantai trofik mengakibatkan terhentinya penyediaan jasa ekosistem penting, seperti produksi pangan berbasis lokal, penjernihan air secara alami, serta perlindungan terhadap kejadian bencana ekologis. Kehilangan biodiversitas ini secara langsung berimplikasi terhadap produktivitas sektor-sektor kunci seperti pertanian, perikanan, dan, sekaligus memperbesar risiko kerentanan sosial masyarakat adat dan komunitas pesisir yang menggantungkan hidup pada kelestarian ekosistem.

Menghadapi ancaman ini, diperlukan pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati dalam seluruh rantai kebijakan pembangunan daerah. Upaya perlindungan habitat, penguatan kawasan konservasi berbasis masyarakat, dan pengembangan ekonomi hijau berbasis jasa lingkungan harus dijadikan prioritas lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat sipil merupakan kunci untuk membalikkan tren kehilangan biodiversitas, sekaligus menciptakan tatanan pembangunan yang resilien, adil, dan berbasis pada keberlanjutan ekologis jangka panjang.



4. Krisis Sumber Daya Alam

Kabupaten Berau tengah menghadapi krisis sumber daya alam yang kian kompleks dan multidimensional, sebagai konsekuensi dari tekanan antropogenik terhadap lingkungan yang berlangsung dalam kurun waktu panjang. Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya berbasis ekstraktif, seperti pertambangan dan pembalakan hutan, telah mengakibatkan penurunan signifikan dalam kapasitas ekosistem untuk memulihkan diri. Kondisi ini tercermin dari menurunnya ketersediaan air bersih, degradasi kesuburan tanah, serta menyusutnya hasil hutan dan potensi perikanan, yang secara langsung berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi lokal dan peningkatan kerentanan sosial.

Krisis ini diperparah oleh lemahnya tata kelola sumber daya alam, fragmentasi kebijakan lintas sektor, serta rendahnya efektivitas pengawasan terhadap praktik eksploitasi. Selain menciptakan kesenjangan ekonomi dan menurunkan daya saing daerah, kerusakan ekologis juga meningkatkan intensitas bencana iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang kerap terjadi akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Dalam hal ini, dibutuhkan intervensi struktural yang menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Reformasi kebijakan pengelolaan SDA berbasis ekosistem, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta penerapan pendekatan ekonomi sirkular menjadi langkah strategis yang mendesak untuk menghindari keruntuhan ekologi yang sistemik. Lebih lanjut, partisipasi inklusif masyarakat lokal khususnya komunitas adat dan pelaku ekonomi kecil harus diperkuat agar proses transisi menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud secara menyeluruh di Kabupaten Berau.

5. Misinformasi dan Disinformasi

Persebaran misinformasi dan disinformasi merupakan ancaman non-fisik yang kian nyata terhadap tata kelola pembangunan di Kabupaten Berau, terutama dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang cepat namun belum tentu akurat. Distorsi informasi ini berpotensi melemahkan kapasitas institusi publik dalam merumuskan kebijakan berbasis data, sekaligus menciptakan polarisasi sosial yang mengganggu kohesi masyarakat. Ketika opini publik terbentuk dari narasi yang menyesatkan, proses perencanaan pembangunan dapat terhambat oleh resistensi



sosial, ketidakpercayaan terhadap otoritas, serta munculnya konflik horizontal di tingkat lokal.

Di sektor pemerintahan, misinformasi dapat menyebabkan erosi legitimasi kebijakan, terutama jika informasi yang beredar tidak mampu ditandingi oleh komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Hal ini menjadi lebih krusial di tengah dinamika pembangunan daerah yang kompleks, di mana penyusunan regulasi dan pengalokasian sumber daya memerlukan pemahaman kolektif yang solid dari masyarakat. Disinformasi yang disengaja, terutama di ranah politik dan sosial, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memanipulasi persepsi publik demi kepentingan kelompok tertentu, sehingga mengganggu stabilitas demokrasi lokal.

Dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Berau perlu membangun ekosistem komunikasi yang tangguh melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan fungsi kelembagaan di bidang informasi publik, serta kolaborasi strategis dengan media lokal dan komunitas digital. Mekanisme deteksi dini terhadap informasi palsu dan sistem klarifikasi berbasis bukti menjadi elemen penting untuk menjaga integritas pembangunan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai produsen dan konsumen informasi yang bertanggung jawab merupakan langkah esensial menuju tata kelola daerah yang inklusif, resilien, dan adaptif terhadap tantangan era disrupsi informasi.

6. Globalisasi Tenaga Kerja

Kabupaten Berau menghadapi dinamika globalisasi tenaga kerja yang kompleks, ditandai oleh meningkatnya mobilitas pekerja antar daerah dan masuknya tenaga kerja asing, meskipun jumlahnya masih kecil. Sektor pertambangan batu bara tetap menjadi magnet utama bagi pencari kerja, namun fluktuasi produksi dan penutupan proyek menyebabkan ketidakstabilan penyerapan tenaga kerja. Tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau menarik minat pekerja dari luar daerah, yang dapat menjadi tantangan bagi tenaga kerja lokal jika tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, sektor-sektor potensial seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata masih kurang diminati, meskipun menawarkan peluang kerja yang menjanjikan. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, pemerintah daerah melalui Disnakertrans terus mengadakan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.



7. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Kabupaten Berau menghadapi tantangan struktural yang kompleks, terutama akibat ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan kerentanan terhadap inflasi harga komoditas strategis. Meskipun Berau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, pemanfaatan lahan pertanian belum optimal, dan sebagian besar kebutuhan pangan masih dipenuhi melalui impor dari wilayah lain. Kondisi ini diperparah oleh minimnya diversifikasi produksi pangan lokal dan kurangnya infrastruktur pendukung distribusi yang efisien. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Berau telah menginisiasi berbagai program, seperti pengembangan klaster padi di Kecamatan Teluk Bayur dan penanaman jagung serentak sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui urban farming di wilayah perkotaan juga digalakkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan segar dan mengurangi dampak inflasi. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang holistik, termasuk perlindungan lahan pertanian melalui regulasi yang tepat, peningkatan kapasitas petani lokal, dan penguatan sistem distribusi pangan yang adil dan efisien.

8. Perkembangan Teknologi AI

Kemajuan pesat dalam teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memberikan peluang besar bagi efisiensi pembangunan daerah, namun di sisi lain juga memunculkan potensi risiko yang belum sepenuhnya terkelola, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Berau yang sedang bertransformasi menuju digitalisasi. Ketergantungan terhadap sistem berbasis AI tanpa disertai kesiapan regulatif dan etika digital dapat menciptakan kerentanan baru dalam aspek sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Salah satu dampak yang perlu diantisipasi adalah tergesernya lapangan kerja konvensional akibat otomatisasi, yang dapat memperdalam ketimpangan ekonomi dan memperbesar angka pengangguran, terutama di sektor-sektor yang belum mengalami transformasi digital secara inklusif. Selain itu, algoritma AI yang tidak transparan berisiko memunculkan bias data, diskriminasi sistematis, dan pengambilan keputusan yang tidak adil, khususnya dalam layanan publik, perizinan, atau distribusi bantuan sosial.



Dalam konteks keamanan siber, penerapan AI yang tidak disertai dengan mitigasi risiko juga dapat membuka celah terhadap serangan digital yang menargetkan infrastruktur kritis daerah. Terlebih, pemanfaatan AI untuk memproduksi konten palsu, seperti deepfake atau manipulasi informasi visual dan audio, memperburuk tantangan disinformasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, Kabupaten Berau perlu merumuskan kebijakan tata kelola AI yang adaptif, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Penguatan kapasitas digital aparatur, edukasi masyarakat tentang etika penggunaan teknologi, serta pembentukan sistem audit algoritma menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI benar-benar mendukung prinsip keadilan sosial, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan hak warga negara dalam era digital.

9. Perubahan Geopolitik dan Peta Ekonomi Dunia

Perubahan geopolitik dan pergeseran peta ekonomi dunia telah menciptakan lanskap baru yang turut memengaruhi arah pembangunan daerah seperti Kabupaten Berau. Ketegangan antarnegara, disrupsi rantai pasok global, serta tren dekarbonisasi dan transisi energi bersih memunculkan dinamika baru yang menuntut adaptasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal. Ketergantungan Berau terhadap komoditas ekspor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara, menjadikan daerah ini rentan terhadap fluktuasi pasar global dan perubahan regulasi internasional yang semakin menekan industri ekstraktif. Sementara itu, peluang muncul dari meningkatnya permintaan global terhadap produk hijau, energi terbarukan, dan komoditas lestari yang membuka jalan bagi transformasi ekonomi Berau menuju sektor-sektor berbasis keberlanjutan seperti ekowisata, perikanan ramah lingkungan, serta pertanian organik. Dalam konteks ini, penting bagi Berau untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui peningkatan inovasi, diversifikasi komoditas unggulan, dan diplomasi daerah yang adaptif terhadap arah kebijakan ekonomi global. Tanpa respons strategis yang memadai, perubahan geopolitik dapat memperlebar jurang ketimpangan dan memperlemah kemandirian ekonomi daerah dalam jangka panjang.

10. Involuntary Migration dan Urbanisasi masyarakat dunia

Fenomena migrasi involunter yakni perpindahan penduduk yang terjadi bukan atas kehendak bebas melainkan karena faktor paksaan struktural menjadi tantangan multidimensional yang kian nyata di Kabupaten Berau. Tekanan lingkungan akibat degradasi sumber daya alam, bencana hidrometeorologi, perubahan iklim, serta



ekspansi industri ekstraktif yang tidak inklusif, telah menciptakan kondisi yang mendorong kelompok masyarakat tertentu, khususnya komunitas adat dan kelompok rentan, untuk meninggalkan wilayah asalnya. Perpindahan paksa ini berimplikasi langsung terhadap fragmentasi sosial, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan kerentanan identitas kultural lokal. Migrasi involunter juga sering kali tidak diikuti oleh sistem perlindungan sosial yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan kemiskinan baru di wilayah tujuan, meningkatnya beban pada infrastruktur dasar, dan ketegangan antar komunitas akibat perebutan sumber daya yang terbatas.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk disparitas spasial dan melemahkan kapasitas daerah dalam membangun inklusivitas sosial serta ketahanan ekonomi berbasis lokalitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan melalui perlindungan wilayah adat, pengendalian tata ruang, dan penyediaan lapangan kerja lokal serta penanganan pasca-migrasi yang menjamin hak-hak dasar, keberlanjutan penghidupan, dan keutuhan sosial-budaya masyarakat terdampak.

11. *Cyber Insecurity*

Ketidakamanan siber (*cyber insecurity*) merupakan tantangan kontemporer yang semakin relevan dalam konteks transformasi digital di Kabupaten Berau. Seiring meningkatnya ketergantungan pada sistem digital dalam tata kelola pemerintahan, layanan publik, pendidikan, serta aktivitas ekonomi, potensi kerentanan terhadap serangan siber juga meningkat secara eksponensial. Ketiadaan arsitektur keamanan siber yang kokoh dapat membuka celah bagi berbagai ancaman, seperti pencurian data, peretasan infrastruktur vital, sabotase informasi, hingga penyebaran malware dan ransomware yang melumpuhkan sistem pelayanan publik.

Dampak dari serangan siber bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Ketidakpastian terhadap keamanan data digital dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, serta melemahkan minat investasi di sektor digital dan teknologi informasi. Selain itu, lemahnya literasi digital dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber turut memperparah situasi, menyebabkan lambannya respons terhadap ancaman dan ketidakmampuan dalam mengelola risiko siber secara adaptif.



Dalam rangka mengantisipasi eskalasi ancaman ini, Kabupaten Berau perlu mengembangkan kebijakan keamanan siber yang komprehensif dan berbasis risiko, meliputi penguatan sistem enkripsi data, peningkatan kompetensi tenaga IT lokal, serta pembentukan unit tanggap darurat siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT). Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan multistakeholder menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang resilien, aman, dan inklusif guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di era digital.

12. Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial merupakan ancaman laten yang berpotensi menghambat kesinambungan pembangunan di Kabupaten Berau, terutama ketika perbedaan identitas baik yang bersifat ideologis, etnis, agama, maupun ekonom terakumulasi menjadi konflik horizontal. Fragmentasi sosial yang tajam dapat merusak kohesi sosial, menurunkan kepercayaan antar kelompok masyarakat, serta menciptakan atmosfer permusuhan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi inklusif. Dalam konteks demokratisasi dan keterbukaan informasi, penyebaran narasi-narasi provokatif yang memanfaatkan platform digital turut memperparah segregasi sosial, menciptakan ruang-ruang diskursus yang tidak produktif bahkan destruktif. Ketika ruang publik dipenuhi oleh sentimen polarisasi, proses perumusan kebijakan publik berisiko terjebak dalam tarik-menarik kepentingan kelompok, mengorbankan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan orientasi jangka panjang pembangunan.

Oleh karena itu, penguatan integrasi sosial melalui strategi lintas sektor menjadi urgensi strategis bagi Kabupaten Berau. Hal ini mencakup revitalisasi forum-forum dialog antar komunitas, pendidikan multikulturalisme, serta promosi narasi persatuan dan toleransi di ruang-ruang digital dan fisik. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam deteksi dini potensi konflik sosial, serta memperluas kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil guna mendorong rekonsiliasi dan kolaborasi sosial dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

13. Polusi

Polusi dalam berbagai bentuk baik udara, air, maupun tanah menjadi tantangan multidimensi yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Berau. Akumulasi emisi dari aktivitas industri, pembakaran lahan, serta limbah domestik dan



pertambangan telah berkontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, menurunkan produktivitas ekonomi, serta mengganggu integritas ekosistem lokal. Polusi udara, misalnya, telah dikaitkan dengan peningkatan prevalensi penyakit pernapasan dan gangguan kardiovaskular, yang pada akhirnya membebani sistem layanan kesehatan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pencemaran air dari limbah industri maupun rumah tangga mengancam ketersediaan air bersih, merusak habitat akuatik, serta berdampak negatif terhadap sektor perikanan dan pertanian irigasi. Tanah yang tercemar logam berat atau bahan kimia berbahaya turut menyebabkan penurunan kesuburan lahan, memperburuk produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Krisis polusi ini juga menggerus daya tarik investasi, khususnya dalam sektor pariwisata berbasis ekowisata dan industri hijau. Investor semakin selektif terhadap wilayah dengan kualitas lingkungan rendah, sehingga degradasi ekologis di Berau berpotensi memperlambat arus masuk modal dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kebijakan pengendalian pencemaran yang ketat, sistem monitoring kualitas lingkungan yang terintegrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Isu Strategis Nasional (RPJMN 2025-2029)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan keterpaduan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dokumen ini memiliki peran penting sebagai acuan dalam menetapkan fokus pembangunan daerah agar selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), khususnya dalam pelaksanaan tahap awal RPJMN 2025-2029. Dalam rangka menjamin keterkaitan tersebut, telah dilakukan analisis isu terhadap RPJMN 2025-2029. Pada dokumen RPJMN tersebut, tercantum tujuh isu strategis utama yang menjadi perhatian untuk wilayah Kalimantan pada RPJMN 2025-2029 sebagai berikut.



Gambar II.71
Isu RPJMN 2025-2029 Wilayah Kalimantan

Isu Wilayah	
	Masih besarnya keterbatasan perkembangan daerah pada sektor hilir seperti pengolahan produk industri dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penguasaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan investasi lokal, dan mudahnya pengalihan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
	Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perkembangan wilayah serta belum terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
	- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memadai standar pelayanan minimum (SPM). - Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan pertanahan rakyat. - Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di area kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur). - Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta belum berkembangnya sektor tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan mudahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
	Tingginya laju erosi hutan menjadi lahan kritis produktif dapat mengancam kelestarian ekosistem alam seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan konektivitasan geologi lainnya.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kabupaten Berau saat ini menghadapi tantangan struktural dalam perekonomiannya, di mana dominasi sektor pertambangan masih mendominasi tanpa diimbangi oleh perkembangan industri hilir yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam mendorong pengembangan industri hilir, seperti produk turunan dari sektor pertambangan, guna meningkatkan diversifikasi ekonomi dan pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi prioritas utama, agar masyarakat lokal dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu keterbatasan kapasitas fiskal dan belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi hambatan dalam pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti peningkatan kualitas jalan, pasokan listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi di daerah-daerah yang masih terisolasi. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kemitraan antara sektor publik dan swasta juga perlu didorong guna menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan potensi lokal



secara optimal, Kabupaten Berau diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Dalam mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Berau dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas .
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga



Kemudian terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:

- 1) Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- 2) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Pembangunan wilayah Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka ini, Kalimantan didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyatukan kekuatan lintas sektor strategis, termasuk energi, sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata, dan peningkatan konektivitas antarwilayah berbasis infrastruktur modern dan digitalisasi. Arah kebijakan ini mencerminkan upaya sistematis untuk memperkuat posisi Kalimantan dalam rantai nilai ekonomi nasional dan global melalui pendekatan pembangunan yang inklusif, adaptif, serta berbasis keunggulan lokal. Kabupaten Berau, sebagai salah satu wilayah kunci di Kalimantan Timur yang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), berada pada posisi yang sangat strategis dalam menyambut peluang transformasi ekonomi ini. Dengan potensi unggulan di sektor pertambangan berkelanjutan, pengembangan



energi baru dan terbarukan, serta destinasi wisata alam kelas dunia seperti Kepulauan Derawan dan Taman Nasional Kayan Mentarang, Berau memiliki modal kuat untuk berperan aktif dalam membentuk wajah ekonomi Kalimantan di masa depan.

Optimalisasi potensi tersebut memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antarwilayah, perluasan akses energi dan air bersih, serta penguatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, dan fasilitasi investasi melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Berau dapat memainkan peran sentral dalam mendukung Kalimantan sebagai simpul ekonomi nasional. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kemandirian ekonomi daerah, tetapi juga mempercepat integrasi Berau dalam ekosistem pembangunan Indonesia yang lebih merata, maju, dan berkeadilan menuju 2045. Tabel berikut menguraikan secara lebih rinci Highlight Indikasi Intervensi Transformasi Pembangunan Kabupaten Berau.

Tabel II.69
Highlight Indikasi Intervensi Kebijakan Kabupaten Berau pada RPJMN Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A1. Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau A1: Kabupaten Berau	Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, melalui: - Pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan khususnya di Pulau Derawan dan Pulau Maratua, penyusunan rencana induk/masterplan penataan dan pengembangan kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata. - Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan <i>output</i>: pengembangan bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (<i>backbone</i>) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau.



	• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan output: lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (<i>Base Transceiver Station/Lastmile 4G</i>) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika. • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan output: Fasilitator/<i>Enabler Digital</i> PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital. • Perluasan layanan penyiaran digital, dengan output: transmisi yang terbangun, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan downtime siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan yang terjadi).
D2 Kecamatan Perbatasan D3 Prioritas • D2: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, kabupaten Mahakam Ulu • D3: kecamatan Maratua, Kabupaten Berau,	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan dengan output, diantaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pelayanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan koridor logistik (<i>backbone</i>) dan pengembangan bandara Kalimantan, Kabupaten Berau.
E1. Kawasan Konservasi Derawan • E1: Kabupaten Berau	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui: • Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: data dan informasi ekosistem dan data dan informasi konservasi biota perairan. • Peningkatan sarana pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan. • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem, kawasan



	konservasi perairan yang operasional dan <i>Oceans for Prosperity Project- LAUTRA</i>. • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelola kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan <i>output</i>: kelompok masyarakat penggerak konservasi dan pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya.
E2. Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) • E2: Kabupaten Berau	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk Heart of Borneo di wilayah Kalimantan Timur disertai [peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan <i>output</i>: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dan udara, kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta area penanganan dampak. • Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan <i>output</i>: lahan gambut yang dipulihkan dan direstorasi serta data dan informasi kesatuan hidrologis gambut (KHG). • Rehabilitasi ekosistem mangrove dengan <i>output</i>: lahan rusak yang dipulihkan, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

C. Telaah Isu Stratgis Regional

1. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Berau tahun 2025–2029 memerlukan kajian mendalam terhadap isu-isu strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kalimantan Timur 2025–2029. Kajian ini dilakukan guna memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga visi, misi, serta tema pembangunan Kabupaten Berau dapat terhubung secara sinergis dengan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur. Dengan pendekatan ini, berbagai isu strategis seperti keberlanjutan ekonomi, percepatan transformasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan lainnya dapat dikenali secara komprehensif dan dijadikan dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Adapun sembilan isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Kalimantan Timur terletak pada pentingnya integrasi perencanaan pembangunan SDM dalam strategi transformasi ekonomi daerah. Kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Akses yang merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan mutu dan daya saing SDM. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesesuaian antara keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan sektor ekonomi masa depan, yang dapat menyebabkan ketidaksiapan menghadapi dinamika pasar kerja. Perubahan struktur ekonomi juga dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak dari sektor-sektor seperti pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan untuk alih profesi dan penciptaan peluang usaha baru.

Penanganan isu ini memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, melalui penyusunan program pelatihan yang relevan dan berbasis data, serta kebijakan peningkatan SDM yang tepat sasaran. Dengan strategi yang terintegrasi, Kalimantan Timur diharapkan mampu mencetak SDM yang unggul, adaptif, dan kompetitif di tingkat lokal maupun global, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

2) Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan

Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan menjadi prioritas penting dalam pembangunan Kalimantan Timur. Ketergantungan pada sektor industri ekstraktif telah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun belum diikuti pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, memperparah kesenjangan sosial-ekonomi. Diperlukan strategi pembangunan yang inklusif, merata, dan berbasis masyarakat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Upaya ini mencakup pemerataan investasi, peningkatan akses infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal. Pendekatan yang adil dan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.



3) Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif

Transformasi ekonomi menjadi isu penting bagi Kalimantan Timur karena tingginya ketergantungan terhadap sektor sumber daya tak terbarukan, terutama pertambangan yang masih mendominasi PDRB sebesar 40–57% selama 2013–2024. Ketergantungan ini berisiko terhadap keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, terlebih dalam menghadapi kebijakan transisi energi global. Transformasi yang lambat menghambat adaptasi terhadap perubahan ekonomi global, memperbesar kesenjangan sosial, dan menurunkan inklusivitas pembangunan. Hambatan utama terletak pada belum optimalnya diversifikasi ekonomi, rendahnya investasi di sektor non-migas dan batubara, serta belum maksimalnya fungsi kawasan industri. Transformasi ekonomi yang terarah akan memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan keadilan pembangunan, dan mendukung peran Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN dalam mendorong ekonomi hijau berkelanjutan.

4) Pemerataan Pembangunan Wilayah

Pemerataan pembangunan wilayah merupakan isu utama di Kalimantan Timur, mengingat masih tingginya kesenjangan ekonomi, infrastruktur, dan akses pelayanan publik, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi manfaat pembangunan yang belum merata dan berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merata sangat penting agar seluruh wilayah dapat mengakses peluang pembangunan secara adil. Diperlukan pendekatan yang proporsional dalam distribusi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah harus berbasis pada analisis karakteristik, potensi, serta keunggulan kompetitif masing-masing daerah, terlebih dengan kehadiran IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

5) Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi masih menjadi tantangan penting di Kalimantan Timur. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah menyebabkan kesenjangan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Wilayah tertinggal di Kalimantan Timur umumnya belum terpenuhi infrastruktur dasarnya, sehingga



perlu percepatan pembangunan agar masyarakat dapat hidup layak dan turut mendukung pembangunan daerah. Konektivitas antarwilayah juga belum optimal karena keterbatasan transportasi publik yang terintegrasi (darat, sungai, laut, udara). Selain itu, pembangunan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak di era modern. Akses internet yang cepat dan terjangkau diperlukan untuk memperlancar pertukaran informasi, mendorong bisnis, dan mempermudah akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah.

6) Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN

Pembangunan Kalimantan Timur ke depan sangat dipengaruhi oleh peluang strategis dari hadirnya Superhub Ekonomi dan peran sebagai Mitra IKN, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2023. Pemanfaatan potensi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan industri berkonsep aglomerasi dan integrasi tri-city Balikpapan–Samarinda–IKN, serta dukungan rantai pasok dari daerah sekitar. Superhub Ekonomi diproyeksikan menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pengembangan sektor ekonomi strategis. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, serta peningkatan kapasitas SDM agar masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam industri berbasis klaster. Namun, tantangan yang perlu diantisipasi mencakup ketimpangan pembangunan antarwilayah dan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan. Kedua isu ini harus dikelola dengan baik agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

7) Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK

Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius terkait kualitas lingkungan hidup dan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama karena ekonominya masih bergantung pada sektor berbasis lahan. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan, termasuk kehadiran IKN, berpotensi memperburuk kondisi lingkungan. Upaya penurunan emisi perlu difokuskan pada sektor penyumbang utama seperti penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang tidak ramah lingkungan. Strategi utama mencakup transisi ke energi bersih, perlindungan hutan dan gambut, serta pengembangan produksi pangan berkelanjutan, untuk mencapai target net zero emissions pada 2060 atau lebih



cepat. Peningkatan jumlah penduduk dan kawasan industri menambah tekanan terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan limbah yang baik guna mencegah polusi, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas air. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

8) Ketahanan Pangan

Salah satu isu strategis penting dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah kemandirian pangan. Sebagai wilayah yang terdampak langsung pembangunan IKN, kebutuhan pangan diperkirakan meningkat signifikan, sementara produksi pangan lokal masih terbatas akibat minimnya lahan pertanian produktif. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih tinggi. Tantangan lainnya meliputi akses distribusi pangan yang belum optimal karena kondisi geografis dan infrastruktur yang belum merata, kurangnya petani muda terampil yang menguasai pertanian modern, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, serta pengelolaan dan distribusi air irigasi yang belum maksimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi terpadu dan menyeluruh guna memperkuat sektor pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan, demi mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

9) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu strategis dalam pembangunan Kalimantan Timur mencakup pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Pemerintahan yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, pengurangan disparitas kemampuan antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi. Tantangan lainnya adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, penerapan e-governance, serta pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Dengan tata kelola yang terukur dan evaluasi berkelanjutan, Kalimantan Timur dapat mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berdaya saing global.



Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Dengan merujuk pada Ranperda RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera

Misi 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas unggulan daerah

Misi 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan

Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi

Misi 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan

Dengan segala potensi, tantangan, dan posisi strategisnya, Kabupaten Berau memainkan peran penting sebagai motor penggerak pembangunan Kalimantan Timur khususnya sebagai penunjang sektor pariwisata. Tidak hanya sebagai penopang sektor ekonomi, tetapi juga sebagai mitra kunci dalam pengembangan kawasan penyangga IKN. Oleh karena itu, integrasi pembangunan Kabupaten Berau ke dalam kerangka pembangunan provinsi menjadi keniscayaan demi terwujudnya Kaltim yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan menuju Generasi Emas 2045.

Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki keterkaitan erat dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Berau, hal ini mencerminkan kesinambungan antara perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM dalam isu strategis Kalimantan Timur selaras dengan komitmen Berau dalam mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul. Keduanya menitikberatkan pada pentingnya pembangunan manusia sebagai fondasi utama peningkatan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan sebagai mitra IKN. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dalam RPJMD Kalimantan Timur juga berkorelasi erat dengan agenda pengentasan kemiskinan di Berau yang dilakukan secara terstruktur dan berbasis



pendekatan kultural. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam strategi pengurangan kemiskinan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pendekatan sosial budaya yang kontekstual. Dalam hal transformasi ekonomi, upaya Kalimantan Timur untuk membangun industrialisasi yang inklusif sejalan dengan transformasi ekonomi berkelanjutan di Berau, di mana keduanya menargetkan diversifikasi ekonomi yang adaptif dan berbasis potensi lokal.

Kemandirian pangan sebagai isu strategis provinsi mendukung penataan wilayah di Berau yang merata dan berkualitas, mengingat keterkaitan antara ruang, sumber daya, dan ketahanan pangan. Pemerataan pembangunan wilayah di Kalimantan Timur juga sejalan dengan penataan ruang Berau, di mana keduanya berfokus pada pengurangan ketimpangan antarwilayah dan perluasan akses layanan dasar. Isu infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi di Kalimantan Timur sangat berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata di Berau sebagai leading sector, karena infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat utama pertumbuhan sektor unggulan tersebut. Peluang Kalimantan Timur sebagai superhub ekonomi dan mitra IKN diperkuat dengan posisi strategis Berau dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan. Sektor pariwisata, kehutanan, dan potensi perikanan menjadi nilai tambah Berau dalam menyambut peran barunya sebagai penyangga pembangunan IKN. Di sisi lain, peningkatan risiko degradasi lingkungan hidup di Berau mempertegas relevansi isu kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi GRK di tingkat provinsi. Kedua wilayah menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kelestarian alam di tengah tekanan pembangunan.

Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai isu Kalimantan Timur juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi di Berau yang berbasis transformasi tata kelola. Keduanya menitikberatkan pada efektivitas layanan publik, transparansi, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendorong efisiensi pemerintahan. Dengan demikian, keterkaitan antara isu-isu strategis Kalimantan Timur dan Berau mencerminkan sinergi dan kesinambungan arah pembangunan menuju daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan siap berperan dalam konteks pembangunan nasional dan IKN.

Pemerintah Kabupaten Berau wajib melaksanakan dukungan pelaksanaan Program Unggulan Provinsi dapat berjalan dan menghasilkan manfaat yang maksimal.



Program Unggulan Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 yaitu Gratispol dan Jospol dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

➤ **Gratispol**

1. Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3
2. Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas
3. Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting
4. Gratis Internet di Setiap Desa
5. Gratis Seragam Sekolah
6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah
7. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah

➤ **Jospol**

1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan & perluasan areal tanam berbasis pertanian modern
2. Pengembangan teknologi & inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri & layanan publik
3. Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah
4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM
5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan
7. Pembangunan infrastruktur di seluruh kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional
8. Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata
9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemda, pusat, & swasta.

D. Telaah RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2025-2045

Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 untuk memastikan bahwa setiap isu dalam RPJMD relevan dengan pembangunan jangka panjang. Hal ini agar mampu memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk



kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kabupaten Berau. Dalam hal ini, terdapat 7 (Tujuh) isu strategis RPJPD Kabupaten Berau 2025-2045 yang telah memiliki relevansi terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Berau 2025-2029.

Isu strategis dalam RPJPD Berau memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Berau, mencerminkan kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Transformasi ekonomi dalam RPJPD sejalan dengan upaya RPJMD dalam mengembangkan hilirisasi serta sektor ekonomi unggulan berkelanjutan sebagai mitra IKN. Selain itu, penguatan kemandirian dan ekonomi lokal dalam RPJPD berkorelasi dengan transformasi ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di RPJMD, yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui sektor ekonomi potensial. Peningkatan kualitas SDM dalam RPJPD, termasuk kesehatan dan pendidikan, berhubungan langsung dengan isu pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam RPJMD. Keduanya menyoroti perlunya peningkatan daya saing SDM guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Begitu pula, upaya perbaikan sistem pendidikan dan kebudayaan dalam RPJPD berkaitan dengan ketahanan sosial dan pemajuan kebudayaan di RPJMD, yang berperan dalam memperkuat identitas daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi infrastruktur, optimalisasi infrastruktur wilayah dalam RPJPD mendukung pemerataan kualitas dan pelayanan infrastruktur di RPJMD, terutama dalam perannya sebagai kawasan penyangga IKN. Ini menunjukkan perlunya konektivitas yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar. Di sisi lain, tantangan lingkungan dalam RPJPD, seperti alih fungsi lahan, pencemaran, dan kerawanan bencana, sejalan dengan agenda RPJMD terkait pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Hal ini menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan dalam RPJPD yang masih belum efektif juga berkorelasi dengan agenda RPJMD dalam optimalisasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan dalam mendukung pembangunan. Terakhir, isu IKN dalam RPJPD diperkuat dalam RPJMD melalui pemerataan infrastruktur dan pengembangan ekonomi sebagai mitra strategis IKN. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD Berau



mencerminkan kesinambungan perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan daerah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

E. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Berau Tahun

KLHS RJPMD mengusulkan serangkaian program prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target dalam seluruh indikator TPB yang telah dirumuskan dalam KLHS RPJPD. Seluruh program prioritas juga telah dipadankan dengan nomenklatur perencanaan program pembangunan sebagaimana diatur di dalam Permendagri No P90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 900 Tahun 2024.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau telah dilaksanakan dengan mengikuti arahan dan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai hasil dari pengkajian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperoleh kondisi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Dari sebanyak 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Berau, hanya sebanyak 19 OPD yang mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam evaluasi capaian TPB pada tahun 2023 ini. Sisanya sebanyak 16 OPD tidak mengumpulkan data sementara beberapa OPD ini memiliki cukup banyak indikator TPB yang harus dievaluasi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Sosial
- 2) Dari 220 indikator TPB berdasarkan Metadata I, terdapat 139 atau 63% indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS), 25 atau 11% indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 11 atau 5% indikator yang belum dilaksanakan (BB) dan 45 atau 21% indikator yang tidak ada data (NA)
- 3) Dari 25 indikator yang berstatus sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, terdapat 8 indikator yang berpengaruh terhadap kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) sehingga perlu dilakukan



penyesuaian terhadap upaya tambahan yang akan dilakukan untuk mencapai target nasional

- 4) Terdapat 85 indikator yang berstatus telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), belum dilaksanakan (BB) dan tidak ada data (NA) yang kemudian dikaji dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan di Kabupaten Berau dan dikelompokkan menjadi sepuluh isu strategis di Kabupaten Berau

Sepuluh isu strategis yang sebaiknya dipertimbangkan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Berau yaitu: (1) penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan, (2) jaminan sosial bagi masyarakat, (3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (4) penanggulangan bencana, (5) pengembangan ekonomi dan industri, (6) pengembangan infrastruktur, (7) penyediaan layanan kesehatan dan keluarga berencana, (8) penyediaan layanan pendidikan, (9) penyiapan tenaga kerja dan lapangan kerja dan (10) tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan.

F. Telaah RTRW Kabupaten Berau

Tujuan perencanaan tata ruang adalah menciptakan wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan, efisiensi investasi, dan sinergi antarsektor, serta sebagai acuan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan Penataan Ruang berfungsi sebagai payung hukum untuk mengoptimalkan dan memadukan kegiatan sektor pembangunan, baik sumber daya alam maupun buatan. Penataan ruang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena semua kegiatan pembangunan memerlukan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang.

Dalam menelaah peran Kabupaten Berau di lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan tinjauan terhadap posisi kabupaten di dalam perencanaan tata ruang provinsi., Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.

Perda di atas menyatakan bahwa dalam hierarki pusat kegiatan di tingkat provinsi, Kabupaten Berau berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terpusat di wilayah Tanjung Redep dengan fungsi melayani kegiatan berskala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Selain itu, Berau juga berperan sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) yang terpusat di wilayah Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah, dengan fungsi melayani kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Wilayah-wilayah tersebut berfungsi sebagai simpul-simpul pusat pertumbuhan dalam sistem pusat pelayanan aktivitas permukiman. Sebagai simpul pusat pertumbuhan dedikatif, mereka sesuai dengan arahan dari RTRW tingkat provinsi.

Gambar II.72
PKW Tanjungredep dalam Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042

Selain ditinjau pada hirarki pusat kegiatan provinsi dilakukan juga tinjauan terhadap posisinya dalam perencanaan Kawasan Strategis Provinsi. Penetapan simpul-simpul kawasan strategis di Kabupaten Berau juga merupakan bagian integral dari adanya embrio pusat pertumbuhan di suatu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, Kabupaten Berau menempati posisi Strategis yang cukup penting antara lain:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
 - a. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - Daerah cadangan karbon biru di Kepulauan Derawan dan Biduk-Biduk
 - Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi
 - b. Sudut kepentingan pertahanan dan keamanan



- Kawasan Strategis Nasional Tertentu kedaulatan negara di Pulau Maratua dan Pulau Sambit
- 2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - a. Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat
 - b. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay

Kedudukan sebagai KSN maupun KSP di atas, juga mampu mengindikasikan satu simpul penting di Kabupaten Berau, Dimana kedepannya dimungkinkan adanya aliran investasi baik yang bersumber dari Pemerintah Nasional maupun Provinsi. Secara khusus, peranan Berau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat dan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay. Pengembangan sektor pariwisata alam dan konservasi sangat dimungkinkan.

A. PUSAT PERTUMBUHAN KABUPATEN BERAU

Dalam kebijakan yang bersifat lebih lokal, pengembangan wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, penentuan pusat pertumbuhan juga bisa dilihat berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat kabupaten. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, yang menyatakan bahwa sistem pusat kegiatan di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** yang terletak di Perkotaan Tanjung Redeb. Dalam hal ini PKW memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
2. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang terletak di:
 - a. Perkotaan Merancang
 - b. Perkotaan Tepian Buah
 - c. Perkotaan Tanjung Batu
 - d. Perkotaan Talisayan
 - e. Perkotaan Mangkajang
 - f. Perkotaan Labanan
 - g. Perkotaan Sido BangenPKL memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
3. **Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)** yang terletak di Perkotaan Biduk-Biduk.
4. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:
 - a. Sambakungan
 - b. Kasai
 - c. Teluk Harapan

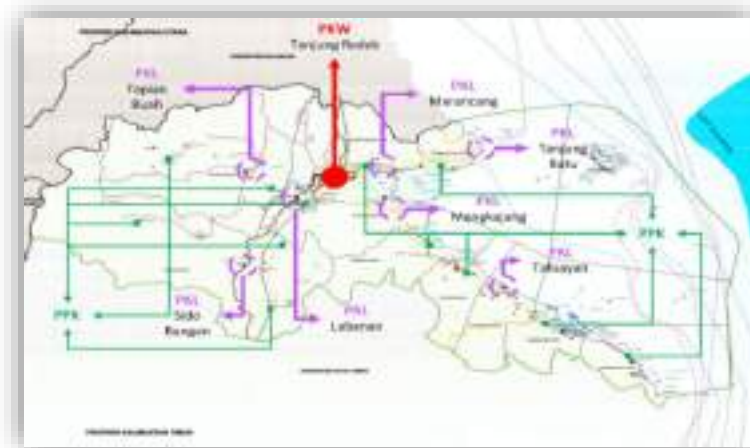


- d. Bebanir/Bangun
- e. Tumbit Melayu
- f. Tubaan
- g. Biatan Lempake
- h. Tembudan
- i. Batu Putih
- j. Merapun
- k. Long Keluh
- l. Merasa
- m. Bukit Makmur
- n. Long Laai

Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

5. **Pusat Pelayanan Lingkungan** yang terletak di trap kolurahan di wilayah kabupaten. Kawasan ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Berikut adalah gambaran pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Berau yang disajikan dalam Peta Struktur Ruang Kabupaten.

Gambar II.73
Peta Hirarki Struktur Ruang Kabupaten Berau



Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

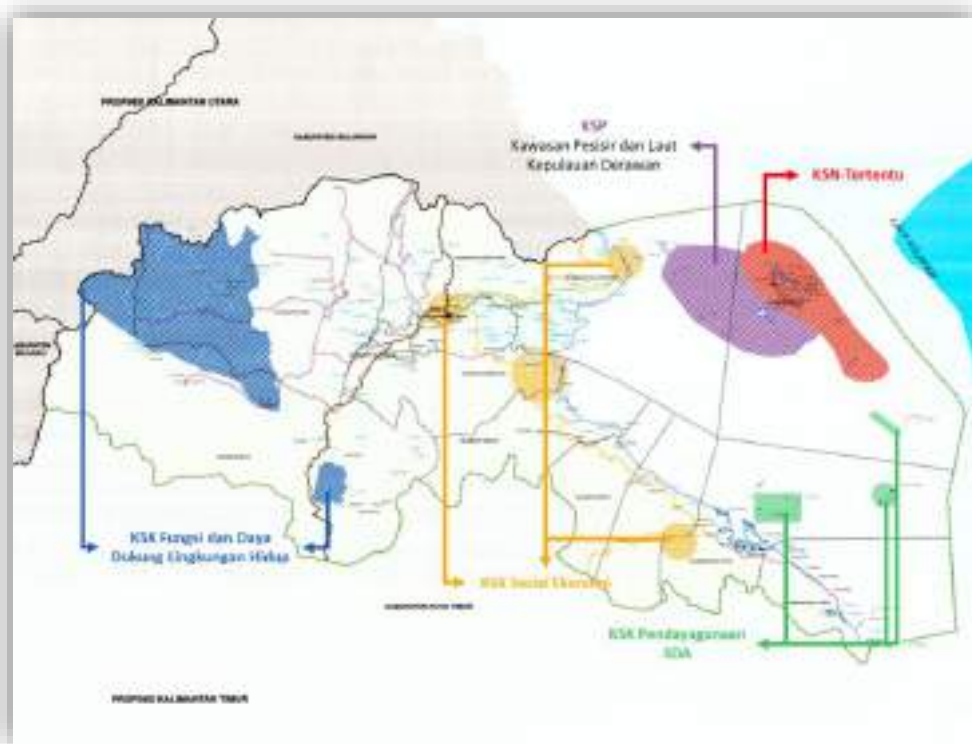
Selain berfokus pada daerah yang telah diidentifikasi sebagai pusat kegiatan dalam rencana tata ruang Kabupaten Berau, perhatian terhadap pertumbuhan wilayah juga dapat dilihat dari keberadaan Kawasan Strategis. Penetapan Kawasan Strategis di wilayah Kabupaten Berau yang juga tetap mengacu pada regulasi di atas nya (RTRW Provinsi), mencakup:



1. **Kawasan Strategis Nasional (KSN)**, wilayah prioritas karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. KSN di Kabupaten Berau adalah Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. **Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**, wilayah prioritas karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara regional provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. KSP di Kabupaten Berau adalah kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
3. **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**, wilayah prioritas karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara regional kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. KSK di Kabupaten Berau meliputi:
 - a. Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:
 - Kawasan *Heart Of Borneo* (HOB)
 - Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan
 - Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki
 - Kawasan Hutan Lindung Lesan
 - Taman-taman / objek wisata alam
 - Kawasan *Karst*
 - b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi:
 - Kawasan Agropolitan
 - Kawasan Minapolitan
 - Kawasan Pusat Industri Perkebunan
 - Kawasan Industri Mangkajang
 - c. Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam:
 - Pulau Kakaban
 - Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit
 - Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Matahajdan
 - Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup
 - d. Kawasan Strategis untuk kepentingan HANKAM berupa bandara udara HANKAM di Pulau Maratua
4. **Kawasan Andalan Nasional (KAN)**, wilayah yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. KAN di Kabupaten Berau adalah Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya.



Gambar II.74
Kawasan Strategis Kabupaten Berau

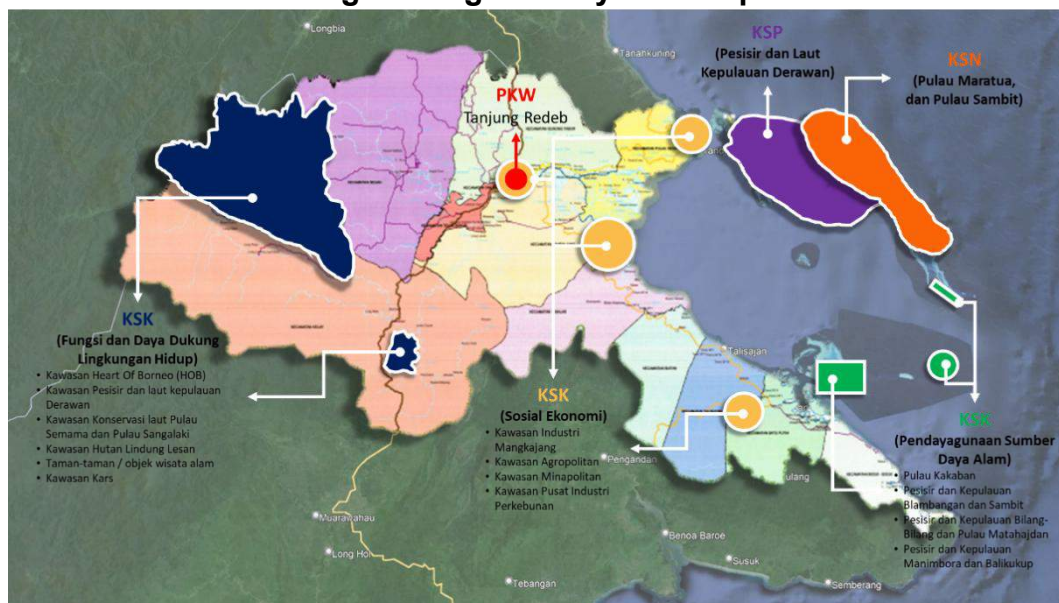


Sumber: Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Oleh karenanya, ragam simpul-simpul strategis sebagaimana tertuang dalam regulasi Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten Berau sendiri, merupakan fondasi penting untuk memahami pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Berau. Dengan mengacu pada sebaran Kawasan Strategis di atas, maka dapat dipetakan simpul-simpul pusat pertumbuhan di Kabupaten Berau sebagai potensi pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Berau dalam jangka Panjang, sebagai berikut:



Gambar II.75
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Berau



Sumber: *Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036*

Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan tersebut secara indikatif memberikan orientasi mengenai area-area, kawasan maupun zona-zona spesifik di Kabupaten Berau yang dapat memberikan dampak positif kewilayahan. Dampak tersebut dapat terjadi baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Berau, maupun melalui insentif dari provinsi dan daerah karena adanya metode perencanaan dedikatif berdasarkan kerangka normatif yang diatur dalam regulasi RTRW Kabupaten Berau.

Disimpulkan, dari perspektif pusat pertumbuhan yang telah dijelaskan, secara geografis, pusat utama pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah pusat kegiatan wilayah (PKW) yang terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. PKW ini berfokus pada pelayanan permukiman berskala perkotaan yang melayani kabupaten/kota sekitarnya. Sementara itu, dalam hal pusat pertumbuhan berdasarkan hierarki struktur ruang dan penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terpusat pada simpul sektor **industri, pertumbuhan agropolitan dan minapolitan, simpul Kawasan Pusat Industri Perkebunan dan simpul Kawasan Industri Mangkajang serta simpul-simpul pariwisata alam**. Harmonisasi seluruh sektor-sektor potensial di atas, menjadi Gambaran mengenai profil fondasi ekonomi wilayah Kabupaten Berau.



G. Pengembangan Pengembangan wilayah Kabupaten Berau Berdasarkan RPKP Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Kedudukan RPKP terhadap sistem pusat-pusat eksternal tata ruang dapat digambarkan seperti gambar dibawah, dimana RPKP akan dikembangkan dalam dimensi ekonomi, dimana pusat kegiatannya dapat setara dengan PKL(p) yang dipromosikan.

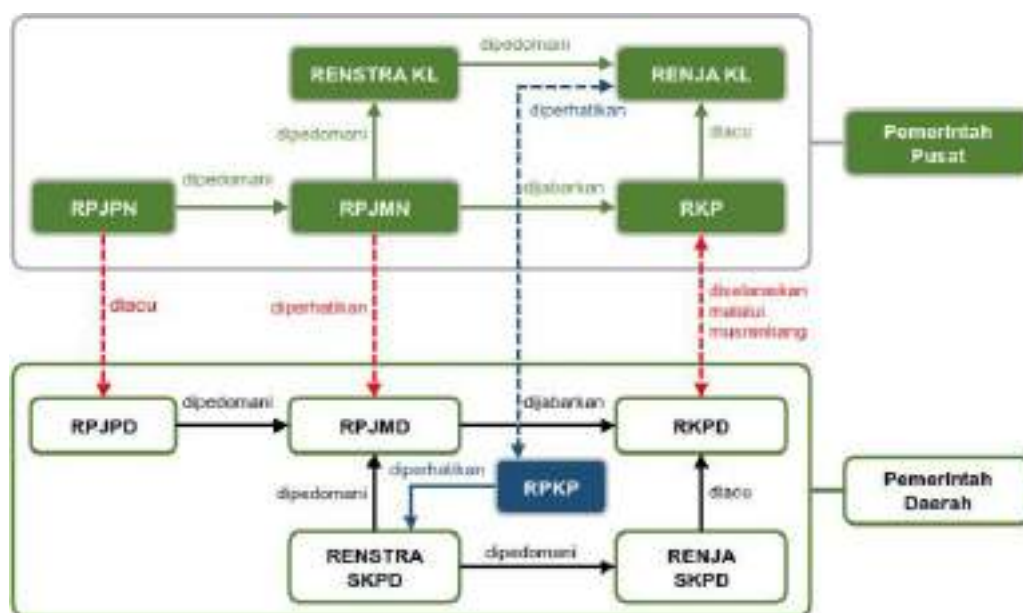
Kedudukan RPKP berikutnya dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 124 menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan Dilaksanakan di Lokasi yang Telah Ditetapkan oleh bupati/walikota. Beberapa poin penting di dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a) Pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b) Usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota;
 - c) Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
 - d) Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.
- 2) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur;
- 3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan;



- 4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
- 5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi;
- 6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota;
- 7) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat;
- 8) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

Gambar II.76
Kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)



Sumber : Dokumen RPKP Kabupaten Berau Tahun 2025-2029



Gambar II.77
Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kecamatan
Pulau Derawan



Sumber: Dokumen RPKP Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Posisi Kecamatan Pulau Derawan dalam konteks nasional merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, dalam konteks regional, Kecamatan Pulau Derawan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki fungsi yaitu pusat pengembangan agropolitan, pelayanan pariwisata, pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, pengembangan agroindustri dan agribisnis, pengembangan energi/kelistrikan, pengelolaan/industri pengolahan perkebunan, dan pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas atau pergudangan. Dalam sistem kawasan perdesaan, Kecamatan Pulau Derawan juga termasuk sebagai Kawasan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap sehingga memiliki peluang dalam pengembangan kawasan perikanan laut dan perikanan budidaya, kawasan permukiman nelayan, dan pasar lokal serta regional produk perikanan.

Apabila dilihat dari posisi Kecamatan Pulau Derawan baik dalam konteks nasional, regional, dan perdesaan dapat terlihat bahwa peluang pengembangan kawasan cenderung mengarah pada pengembangan pariwisata dan perikanan. Hal tersebut juga didukung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau bahwa Kecamatan Pulau Derawan merupakan kawasan pengembangan wisata



alam dan budaya serta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau bahwa Kecamatan Pulau Derawan merupakan lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Perikanan Mina Bestari.

Kemudian, apabila dilihat dari sentra produksi yang ada, pada Kecamatan Pulau Derawan pada umumnya masih didominasi oleh sentra produksi perikanan dengan hasil produksi berupa olahan ikan seperti amplang, abon, petis, terasi, dan olahan lainnya. Selain itu, sentra produksi juga didukung oleh nilai produksi ikan yang cukup tinggi dan adanya kelompok pembudidaya ikan dan nelayan. Pada Kecamatan Pulau Derawan juga terdapat sentra pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis dan pariwisata. Adapun pariwisata yang terdapat di Kecamatan Pulau Derawan didominasi oleh wisata bahari dan wisata alam seperti wisata pantai pasir putih, wisata mangrove, wisata taman laut, dan wisata budaya Bajau.

Pengembangan Kawasan Pulau Derawan yang saling terintegrasi tentunya dapat membantu dalam peningkatan perekonomian. Selain integrasi antar kebijakan yang ada, namun integrasi antar sektor yang ada dapat menjadi peluang dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Pulau Derawan. Dengan demikian, maka tema pengembangan pada Kecamatan Pulau Derawan yaitu Pengembangan Kawasan Minawisata melalui pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

Adapun pengembangan kawasan dalam pembangunan Kawasan perdesaan Kecamatan Pulau Derawan dibagi menjadi 2 klaster sebagai berikut.

Klaster Perikanan

Berdasarkan arahan pengembangan usaha perikanan budidaya dan tangkap Kabupaten Berau, Kecamatan Pulau Derawan yang merupakan wilayah KPPN Kecamatan Pulau Derawan bersama dengan Kecamatan Maratua, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-biduk diarahkan sebagai kawasan perikanan laut dan perikanan budidaya. Dimana upaya pengembangan usaha perikanan budidaya dan tangkap pada wilayah ini dilakukan melalui: peningkatan kemampuan budidaya dan tangkap, pengolahan hasil panen dan dukungan lembaga keuangan.

Sektor Perikanan yang berkembang di KPPN Kecamatan Pulau Derawan adalah budidaya laut dan tambak. Seperti yang diketahui bahwa sebagian wilayah KPPN Kecamatan Pulau Derawan adalah perairan maka sub sektor perikanan cukup



memiliki potensi, terutama perikanan budidaya dengan komoditas unggulan adalah udang dan bandeng. Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat KPPN Kecamatan Pulau Derawan, pada umumnya masyarakat KPPN Kecamatan Pulau Derawan pada umumnya berusaha di sub sektor perikanan.

Berdasarkan arah pengembangan Pemerintah Kabupaten Berau dengan melihat potensi yang dimiliki KPPN Kecamatan Pulau Derawan, serta dipertajam dengan hasil pengamatan lapangan dan hasil diskusi, maka kecenderungan arah pengembangan KPPN Kecamatan Pulau Derawan adalah sebagai berikut:

1. Kampung Kasai menjadi berfungsi menjadi simpul kolektif produksi budidaya tambak bandeng dan udang dan juga sebagai simpul distribusi hasil pengolahan seperti bandeng dan udang beku. Fasilitas yang berada di Kasai antara lain Pusat pengolahan dan Packaging (Udang dan Bandeng Beku) dan *Resouce Centre* (Pusat Pengembangan Komoditi Unggulan).
2. Kampung Tanjung Batu yang merupakan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) menjadi Pusat KPPN yang berfungsi menjadi pemasaran olahan bandeng dan udang dan juga sebagai simpul koleksi hasil pengolahan seperti bandeng dan udang beku. Fasilitas yang berada di Tanjung Batu sebagai Pusat KPPN antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wisata yang terintegrasi dengan wisata mangrove/bahari.
3. Dari Pusat KPPN, komoditi didistribusikan melalui darat ke Kota Tanjung Redeb dan Tanjung Selor. Tanjung Redeb merupakan Ibu Kota Kabupaten Berau sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam struktur ruang Kabupaten Berau. Komoditi juga didistribusikan melalui laut ke kampung lain, Ibu Kota Kecamatan Maratua, dan Kota Makassar.
 - ✓ Dari Tanjung Redeb, komoditi dipasarkan ke Kota Bontang. PKN Bontang merupakan pasar/outlet besar bagi komoditi Unggulan KPPN Kecamatan Pulau Derawan.
 - ✓ IKK Maratua adalah kota disekitar KPPN Kecamatan Pulau Derawan, menjadi pasar kota-kota kecil dan merupakan pasar alternatif bagi komoditi produk olahan.

Sedangkan konsep pengembangan KPPN Kecamatan pulau Derawan adalah sebagai berikut:



1. KPPN Kecamatan Pulau Derawan memiliki kawasan produksi yang juga merupakan sentra produksi budidaya udang dan bandeng tambak, yaitu Kampung Pegat Batumbuk yang akan dibangun sebuah tambak percontohan sistem *silvofishey*. Dari sentra produksi, bandeng dan udang segar dibawa ke pusat pengolahan di Kampung Kasai.
2. Kawasan Pengolahan bandeng dan udang di Kampung Kasai. Sebagai Pusat Pengolahan, Kampung Kasai akan dikembangkan fasilitas yang berskala kawasan berupa Resource Centre (Kantor BUMDes Bersama, Balai Pelatihan, Laboratorium, Perbankan, Pusat Data dan Informasi), Pabrik Es, dan Cold Storage, serta SPBN. Produk yang dihasilkan adalah bandeng dan udang beku.
3. Pusat KPPN Kecamatan Pulau Derawan di Kampung Tanjung Batu. Sebagai Pusat Pemasaran KPPN akan dikembangkan fasilitas yang berskala kawasan berupa Resource Centre (Kantor BUMDes Bersama, Balai Pelatihan, Laboratorium, Perbankan, Pusat Data dan Informasi).

Klaster Pariwisata

Pariwisata dipilih sebagai salah satu klaster karena 2 hal: (a) Pulau Derawan merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan (b) Rencana pengembangan wisata berdasarkan RTRW Kabupaten Berau. Pada Kecamatan Pulau Derawan terdapat lokasi wisata yang cukup terkenal yaitu Pulau Derawan yang merupakan salah satu pulau berpenghuni di Kabupaten Berau. Pulau Derawan memiliki potensi sumberdaya kawasan yang dapat dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata yaitu berupa potensi sumberdaya alam dan budaya serta wisata bahari.

Kawasan Pulau Derawan adalah bagian dari gugusan pulau kecil yang relatif rentan secara ekosistem dari aktivitas manusia dan pembangunan. Kecamatan Pulau Derawan memiliki daya tarik wisata unggulan, khususnya wisata alam, pantai pasir putih dan budaya bahari yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan daya tarik wisata perlu menerapkan pendekatan sebagai berikut:

- a) Konservasi lingkungan alam dan budaya

Kekayaan alam dan keragaman budaya merupakan aset utama yang dimiliki



oleh Pulau Derawan dan sekaligus syarat mutlak untuk keberlanjutan pariwisata. Daya tarik wisata utama Pulau Derawan adalah pesona bawah laut dan pantai pasir putih. Pulau Derawan memiliki beberapa gugusan karang dan terumbu karang sangat rentan terhadap kerusakan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk direhabilitasi. Selain itu, Pulau Derawan juga memiliki kawasan pantai yang dapat terkena dampak abrasi dan kenaikan air laut. Pariwisata adalah kegiatan yang memanfaatkan keindahan alam tersebut, sehingga sudah seharusnya didorong untuk berkontribusi pada upaya-upaya konservasi lingkungan.

b) Peningkatan daya saing

Daya tarik wisata Pulau Derawan, khususnya taman bawah laut Pulau Derawan dan pantai pasir putih merupakan potensi pariwisata, akan tetapi kondisi daya tarik, fasilitas, dan pelayanan masih jauh dari memuaskan sehingga perlu ditingkatkan untuk menjadi keunggulan kawasan dan dapat bersaing dengan destinasi lain.

c) Pelibatan masyarakat

Masyarakat adalah pelaku utama dan kebudayaannya merupakan bagian tidak terlepaskan dari pariwisata di Pulau Derawan. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk membuka peluang-peluang agar masyarakat dapat terlibat, mengambil peran dan mendapat manfaat yang proporsional. Sesuai dengan pendekatan di atas, maka konsep pengembangan pariwisata di Pulau Derawan dapat diarahkan pada beberapa konsep pengembangan, yaitu:

1. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan Prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu ramah/diterima secara lingkungan, ramah secara sosial dan budaya, ramah secara ekonomi, serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur harus mengutamakan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

2. Menerapkan pengelolaan pengunjung

Pengelolaan pengunjung merupakan kata kunci untuk pengembangan pariwisata di pulau kecil, baik dalam pemenuhan fasilitas maupun pemantauan dampak dari pariwisata. Untuk mereduksi tekanan yang berlebihan di Pulau Derawan, maka skala pengembangan khususnya



akomodasi diarahkan kepada skala kecil dan menengah, sementara non-akomodasi dapat menampung luapan kunjungan yang lebih besar. Pengembangan pariwisata dikonsentrasikan di beberapa kawasan saja agar memudahkan pemantauan dan pengelolaan dampak negatif.

3. Menentukan blok pengembangan berdasarkan fasilitas atau pengelolaan daya tarik wisata dengan mengutamakan pada daya tarik wisata utama. Prioritas pengembangan berdasarkan keunggulan karakter daya tarik wisata dan amenities eksisting untuk mendukung aktivitas pengunjung.
4. Mengembangkan produk pariwisata danau dan pantai sebagai produk wisata unggulan. Taman bawah laut dengan aneka terumbu karang merupakan keunikan Pulau Derawan, sementara kedekatannya dengan daya tarik wisata lain dalam konteks pulau kecil merupakan keistimewaan lainnya. Hal ini perlu dieksplorasi dan dikembangkan sebagai keunggulan utama Pulau Derawan.

H. Isu Strategis Kabupaten Berau

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Berau yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Pariwisata Berkelanjutan sebagai *Leading Sector* Pembangunan Berau

Pariwisata telah diidentifikasi sebagai sektor unggulan dalam strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berau memiliki berbagai destinasi wisata unggulan, seperti Kepulauan Derawan dan Maratua, yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Pertumbuhan sektor pariwisata ini membawa manfaat ekonomi berupa penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha-usaha pendukung, dan peningkatan investasi di sektor jasa. Namun, optimalisasi kontribusi pariwisata memerlukan pendekatan yang



berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Pola-pola pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dalam mewujudkan transisi ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor batubara perlu terus didorong terutama dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan IKN yang memerlukan zona penyangga terutama di sektor pariwisata yang dapat menampung efek penambahan jumlah penduduk di IKN sehingga pengembangan sektor-sektor pariwisata selain yang ada saat ini seperti wisata berbasis lingkungan serta MICE Ekoturism perlu untuk dapat dikembangkan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Berau perlu merumuskan kebijakan yang memastikan pertumbuhan pariwisata tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan, termasuk mitigasi dampak lingkungan dan pelestarian budaya. Kolaborasi dengan sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dapat memperkuat partisipasi lokal dan distribusi manfaat ekonomi. Dengan pendekatan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Kabupaten Berau dapat memastikan bahwa pariwisata menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.

b) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Berau memerlukan pengembangan agro-industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai inti strategi pembangunan jangka menengah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi melalui sektor pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti otomatisasi, irigasi cerdas, dan analisis data. Penerapan teknologi dalam agro-industri tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Untuk mencapai transformasi ini, diperlukan kebijakan yang mendukung inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk program pelatihan untuk memastikan petani memiliki keterampilan yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan sektor swasta juga akan mendorong adopsi teknologi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan



kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Berau adalah pengembangan praktik-praktik baik dalam kegiatan perikanan baik budidaya maupun perikanan tangkap perlu untuk diperhatikan agar dapat memberikan dampak pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mendukung ekonomi biru juga perlu upaya mendorong praktik budidaya tambak tradisional secara Lestari dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan produksi tambak udang windu, yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Berau, Pemerintah perlu mendorong pengembangan tambak Lestari yang bertujuan mengoptimalkan hasil panen udang windu dengan tetap memberikan ruang kepada ekosistem mangrove untuk pulih melalui restorasi, dan mempertahankan ekosistem mangrove sebagai faktor pendukung keberlanjutan tambak tradisional. Selain berupaya meningkatkan pendapatan petambak dari produksi udang windu yang organik dengan harga premium, upaya restorasi dan perlindungan ekosistem mangrove di dalam atau di luar Kawasan tambak, menjadi bagian dari komitmen Pemkab Berau dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti banjir rob dan angin kencang di Kawasan pemukiman wilayah pesisir Kabupaten Berau.

Untuk mendukung restorasi dan perlindungan ekosistem mangrove secara efektif, perlu dilakukan program restorasi multi-tahun dengan pendekatan manajemen adaptif serta sistem pemantauan berkelanjutan yang berbasis sains. Pendekatan jangka panjang ini akan memastikan upaya restorasi tidak terputus akibat pergantian kepemimpinan atau siklus anggaran, serta memungkinkan hasil yang lebih berdampak secara ekologis. Restorasi juga perlu didukung oleh perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah, terutama di kawasan pesisir antar-kabupaten yang saling terhubung secara ekologis. Dengan pendekatan ini, RPJMD dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan restorasi mangrove yang berkelanjutan, terukur, dan berbasis ilmiah.

c) Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Transformasi Tata Kelola

Implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada transformasi tata kelola merupakan aspek penting dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau. Reformasi birokrasi yang efektif memerlukan perubahan struktural dan budaya organisasi untuk mencapai pelayanan yang profesional dan akuntabel. Hal ini



diharapkan dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan teknologi informasi dalam birokrasi dapat membantu mempercepat proses layanan publik, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat transparansi, sehingga pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Selain itu, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas dalam birokrasi menjadi dasar bagi tata kelola yang baik. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada aparatur sipil negara untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang transparan juga membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan akselerasi reformasi birokrasi yang didukung oleh tata kelola yang baik, Kabupaten Berau dapat mencapai efisiensi birokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

Transformasi berkelanjutan dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan unggul. Hal ini memerlukan peningkatan kualitas pendidikan melalui program yang mencakup pendidikan dasar, menengah, hingga vokasi, guna membekali penduduk dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah juga harus memastikan akses pendidikan yang merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil, untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keterlibatan masyarakat dan kemitraan dengan sektor swasta dalam bidang pendidikan dapat memberikan dukungan tambahan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif.

Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas adalah elemen kritis dalam pembangunan SDM yang sehat dan unggul. Pemerintah Kabupaten Berau harus menjamin bahwa fasilitas kesehatan dan tenaga medis tersedia dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, program kesehatan preventif dan promosi gaya hidup sehat perlu diperkuat untuk



mengurangi beban penyakit dan meningkatkan harapan hidup. Dengan memperkuat sistem layanan kesehatan dan mendukung inisiatif kesehatan masyarakat, Kabupaten Berau dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial yang berkelanjutan.

e) Pengentasan Kemiskinan Yang Terstruktur Dengan Pendekatan Kultural

Pendekatan kultural dalam pengentasan kemiskinan adalah strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah kenaikan Indeks Gini di Kabupaten Berau. Dengan memahami dinamika sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, program pengentasan kemiskinan dapat dirancang untuk sesuai dengan konteks kultural. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga adat untuk memastikan intervensi yang diterapkan sejalan dengan tradisi dan struktur sosial setempat.

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Pendekatan kultural ini memungkinkan intervensi yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal, mengurangi resistensi terhadap perubahan, dan memastikan hasil yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Berau dapat mengurangi angka kemiskinan, menekan Indeks Gini, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

f) Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Potensi degradasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Berau semakin meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi berlebihan di sektor pertambangan. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal, ia juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan memastikan bahwa perusahaan tambang menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti reklamasi lahan dan pengelolaan limbah yang tepat.

Pendekatan transformasi berkelanjutan menjadi penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau. Diversifikasi ekonomi dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Selain itu, pemerintah harus menggalakkan



kampanye kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dan bisnis, serta mendorong praktik ekonomi yang lebih hijau. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan pembangunan, Kabupaten Berau dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Isu lingkungan mulai dari hilangnya tutupan hutan, kapasitas penyerapan air yang menurun, ruang terbuka hijau perkotaan yang menurun, pelanggaran tata ruang, yang menyebabkan bencana hidrologis. Penegakan hukum sangat perlu dilakukan untuk pelaksanaan reklamasi dan restorasi pasca tambang.

g) Penataan Wilayah Yang Merata Dan Berkualitas

Penataan wilayah yang merata dan berkualitas adalah elemen fundamental dalam strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau, khususnya dalam konteks percepatan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerataan sarana dan prasarana menjadi prioritas, memastikan bahwa seluruh wilayah, memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur dan layanan publik. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan distribusi infrastruktur secara efisien, dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan integrasi dengan IKN, yang pada gilirannya akan mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan yang lebih seimbang.

Selain fokus pada infrastruktur fisik, penataan wilayah yang merata juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Berau perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu mendukung aktivitas ekonomi lokal serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penekanan pada kualitas infrastruktur juga menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang. Dengan penataan wilayah yang seimbang dan berkualitas, Kabupaten Berau dapat mendukung percepatan pembangunan IKN sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

h) Sustainable Financing

Pengembangan kredit karbon biru berbasis kawasan konservasi perairan daerah (KKP3KDPS) Derawan sebagai bentuk nyata pembiayaan inovatif dalam hal ini memuat rencana pengembangan wilayah percontohan (*prototyping area*) untuk



mekanisme kredit karbon biru dari ekosistem mangrove di sekitar KKP3KDPS Derawan sebagai model yang dapat direplikasi di lokasi lain.

Hal ini dilakukan untuk mendorong agar ekosistem mangrove dipisahkan dari pendekatan FOLU (*Forestry and Other Land Use*) dalam pengukuran emisi dan penyerapan karbon, karena mangrove memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan banyak tipe lahan lainnya. Pengakuan terhadap mangrove sebagai ekosistem tersendiri dalam perencanaan iklim dan penghitungan karbon daerah akan membuka peluang lebih besar bagi akses ke mekanisme pendanaan berbasis karbon biru.

Selain dari karbon biru, Pemerintah Kabupaten Berau perlu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pesisir di KKP3K KDPS Berau, melalui penganggaran bersama dan menggali sumber pendapatan dari pungutan tarif jasa lingkungan. Pemerintah Kabupaten Berau perlu memastikan hasil pungutan tarif jasa lingkungan di KKP3K KDPS Berau yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, akan digunakan sebesar-besarnya untuk pelestarian lingkungan laut dan pesisir Berau serta menjamin sumber penghidupan nelayan dan petambak tetap terjaga dan sejahtera.

i) Perhutanan sosial

Percepatan dan implementasi Perhutanan Sosial sebagaimana amanat Perpres No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial (IAD) dan Pergub Kaltim No.10 Tahun 2025 tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Pengembangan Perhutanan Sosial melalui Integrated Area Development yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan di setiap Kabupaten/ Kota.

Isu perhutanan sosial di Kabupaten Berau saat ini menjadi salah satu fokus strategis dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD), perhutanan sosial tidak lagi dipandang sebagai program sektoral kehutanan semata, tetapi sebagai bagian dari pengembangan kawasan secara terpadu yang menghubungkan aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan tata kelola wilayah.



Dari perspektif IAD, tantangan utama perhutanan sosial di Berau terletak pada masih terfragmentasinya perencanaan antar-sektor, terutama antara kehutanan, perkebunan, pariwisata, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Masyarakat pengelola hutan baik kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, maupun komunitas lokal belum sepenuhnya mendapatkan dukungan infrastruktur wilayah, akses pasar, dan pendampingan usaha yang memadai.

Pendekatan IAD menekankan bahwa pengembangan perhutanan sosial harus dilakukan melalui integrasi antar-kawasan seperti desa, kecamatan, dan hamparan landscape hutan, sehingga pengelolaan hutan dapat terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi terdekat. Di Kabupaten Berau, hal ini mencakup integrasi perhutanan sosial dengan kawasan pariwisata (Kelay, Biduk-Biduk, Maratua), pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta peningkatan aksesibilitas dan layanan dasar bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain itu, isu perhutanan sosial juga berkaitan erat dengan kebutuhan untuk membangun rantai nilai (*value chain*) yang lebih kuat, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Melalui pendekatan IAD, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendukung berupa pelatihan usaha, kemitraan dengan sektor swasta, penguatan koperasi, serta penyediaan infrastruktur seperti jalan usaha tani, gudang, dan fasilitas pengolahan HHBK.

Dengan demikian, isu perhutanan sosial di Kabupaten Berau melalui pendekatan *Integrated Area Development* menggambarkan perlunya pembangunan kawasan hutan yang tidak hanya menekankan aspek konservasi, tetapi juga keterhubungan ekonomi dan sosial secara terpadu. Pengelolaan yang terintegrasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi fondasi pembangunan wilayah Berau dalam jangka panjang.

j) Kapasitas layanan kesehatan

Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan, RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dinyatakan mengalami penurunan status dari Tipe C ke Tipe D per 1 Juli 2025. Hal ini terjadi karena belum terpenuhinya indikator standar pelayanan minimal rumah sakit, terutama jumlah kapasitas ruang ICU dan tempat tidur yang sesuai dengan regulasi. Kondisi ini



berimplikasi terhadap pola pembiayaan dan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Berau telah diberikan tenggat waktu hingga Desember 2025 untuk melakukan pemenuhan standar. Upaya yang ditempuh meliputi:

1. Penambahan sarana prasarana ruang perawatan intensif (ICU) dan ruang rawat inap.
2. Penguatan sistem manajemen mutu rumah sakit.
3. Optimalisasi sumber daya manusia kesehatan melalui rekrutmen dan redistribusi tenaga medis.
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendukung pengadaan peralatan medis strategis.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan status RSUD dr. Abdul Rivai sebagai Rumah Sakit Tipe C sekaligus menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat Berau yang bergantung pada rumah sakit rujukan ini.

Berikut ini merupakan matriks keselarasan Isu Strategis Global, Nasional, Regional, Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kabupaten Berau:



Tabel II.70
Matriks Potensi, Permasalahan, Isu KLHS, dan Isu Strategis Daerah Kabupaten Berau

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS KABUPATEN RPJMD BERAU
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
Wilayah perairan Berau, terutama Kepulauan Derawan, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, termasuk budidaya rumput laut dan tangkapan ikan laut. Destinasi wisata bahari seperti Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, dan Sangalaki merupakan aset wisata internasional dengan daya tarik seperti terumbu karang, penyu hijau, dan ubur-ubur tanpa sengat. Berau memiliki kawasan hutan tropis yang luas dan menjadi habitat	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif	pengembangan ekonomi dan industri	Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai	Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif	Pariwisata berkelanjutan sebagai Leading Sector Pembangunan Berau
			Pariwisata Berkelanjutan dan Bertanggungjawab	Penguatan Pariwisata Nusantara	lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.	Sinkronisasi Pariwisata dengan IKN dan Kawasan Penyangga	<i>Sustainable Financing</i>
	Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah menuju transformasi ekonomi hijau		Tantangan Perubahan Iklim	Kebijakan ekonomi hijau dan biru	berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
							Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup	tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	Perubahan Kritis Terhadap Ekosistem				
			Krisis Sumber Daya Alam		Tingginya konversi hutan		



spesies endemik, yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan konservasi alam. Keberagaman etnis seperti Dayak, Bajau, dan Bugis memberikan kekayaan budaya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya dan edukasi.			Polusi		menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.		
		penanggulangan bencana	Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem				Perhutanan sosial
Berau memiliki lahan pertanian dan perkebunan produktif untuk pengembangan komoditas seperti kelapa sawit, padi, karet, dan kakao. Potensi industri pengolahan berbasis sumber daya lokal membuka peluang hilirisasi dan penciptaan nilai tambah ekonomi daerah.	Belum optimalnya pembangunan SDM menuju masyarakat Berau yang Unggul	penyediaan layanan pendidikan		Investasi Sektor SDM	Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul
		penyediaan layanan kesehatan dan		Penanganan Stunting	Masih minimnya akses masyarakat		Peningkatan Layanan Kesehatan



Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi terus berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan logistik regional. Berau memiliki peluang strategis sebagai wilayah penyangga dan mitra ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan logistik. Lingkungan sosial yang stabil dan kekuatan kearifan lokal mendukung pengembangan pembangunan berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.		keluarga berencana	Misinformasi dan Disinformasi		terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan tingginya tingkat kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur).		
	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan	jaminan sosial bagi masyarakat	Ketahanan Pangan			Kemandirian Pangan	Pengentasan Kemiskinan Yang Terstruktur Dengan Pendekatan Kultural
			Polarisasi Sosial				
		penyiapan tenaga kerja dan lapangan kerja	Globalisasi Tenaga Kerja	Penurunan Kemiskinan	Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara.	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan	
		pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Involuntary Migration dan Urbanisasi masyarakat dunia				
	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan			Pelaksanaan Astacita dan PSN	Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta	Pemerataan Pembangunan Wilayah	Penataan Wilayah Yang Merata Dan Berkualitas



					belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.		
		pengembangan infrastruktur		Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	
						Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	
	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Berau	Penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan		Agenda Transformasi Cyber Insecurity		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Transformasi Tata Kelola



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan konsep yang saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai tujuan dalam mengoptimalkan pemerataan pembangunan Kabupaten Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera dengan menguatkan beberapa sektor unggulan daerah.

Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya melimpah dimiliki baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia dengan dukungan kemajuan teknologi. Visi dan misi dalam konteks ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu H. Sri Juniarsih Mas, M.Pd. dan H. Gamalis SE.

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keunggulan komparatif sangat besar, terutama Sumber Daya Alam (SDA) baik yang bersifat dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tersebut menjadi penopang dan penggerak ekonomi di Kabupaten Berau. Dari sekian banyak sektor usaha yang ada di Berau, sektor pertanian dan sektor pariwisata menjadi dua sektor yang sangat berpotensi menjadi penopang utama ekonomi di Kabupaten Berau di masa yang akan datang menggantikan sektor pertambangan dan penggalian. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Berau dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan Tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam jangka waktu lima tahun. Dalam hal ini sasaran dicerminkan sebagai sesuatu yang terukur sehingga



dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja pada akhir periode perencanaan maupun *breakdown* di masing-masing tahun. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.



Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Berau, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera”

Dalam rumusan visi ini terkandung lima (5) rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Berau pada tahun 2029. Kelima rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pada dasarnya, visi Kabupaten Berau mengacu langsung pada UUD 1945 yang mengamanatkan pada pemerintah untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil dan makmur.

Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Penjelasan Pokok Visi

Pokok Visi	Uraian
Maju	Pokok visi Maju diartikan sebagai daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih. Perwujudan maju dalam hal pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau. Upaya pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dan peluang berusaha untuk masyarakat sehingga tercipta peningkatan ekonomi daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara berama-sama mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Karena itu arti penting pembangunan infrastruktur harus tertuang pada kebijakan jangka panjang daerah. Dalam mewujudkan daerah



	yang maju pemerintah Kabupaten Berau harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Unggul	Perwujudan daerah yang unggul merupakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki. Berau yang Unggul diharapkan Kabupaten Berau menjadi daerah yang lebih baik, berdaya saing tinggi, memiliki sumber daya yang unggul serta infrastruktur dan teknologi unggul untuk menunjang kebutuhan Kabupaten Berau. Pokok Visi unggul ini mendorong agar Berau menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dengan mempercepat pembangunan di bidang pariwisata, pertanian hingga ekonomi kreatif. Dalam hal mewujudkan Kabupaten yang Unggul, Berau harus dapat memanfaatkan potensi dimana Berau merupakan wilayah yang memiliki beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten yang lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya.
Berkelanjutan	Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keunggulan komparatif salah satunya dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tersebut menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi di Kabupaten Berau. Sehingga dalam hal ini, perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya <i>inclusive green economy</i> .



	Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Makmur	Makmur adalah tercapainya kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan bagi masyarakat. Kondisi makmur dapat diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata serta perwujudan masyarakat yang memiliki daya beli yang memadai sehingga terwujud kemandirian. Perwujudan makmur juga tercermin dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Selain dari sisi ekonomim sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif juga menjadi pendorong terwujudnya Kabupaten Berau yang menghasilkan generasi berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena tidak ada pembangunan daerah yang berkembang tanpa kekuatan dan keunggulan sumber daya manusia.
Sejahtera	Sejahtera merupakan tercapainya kehidupan yang berkecukupan bagi seluruh masyarakat. Kondisi sejahtera dapat diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas dan kebutuhan hidup yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan dasar



	secara merata serta perwujudan masyarakat yang memiliki daya beli yang memadai sehingga terwujud kemandirian. Dalam mewujudkan kesejahteraan, Kabupaten Berau harus dapat menciptakan kondisi dimana masyarakat bisa menikmati kemakmuran utuh, bebas dari kemiskinan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas Kesehatan. Sehingga masyarakat Berau yang sejahtera adalah masyarakat dengan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkualitas baik baik materil maupun spiritual.

Visi Kabupaten Berau periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan yang Maju, Unggul, Berkelanjutan dan Makmur yang dapat dicapai dengan memajukan kesejahteraan yang merata melalui pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan dan peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan. Arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau yaitu memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sehingga kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dapat dinikmati seluruh masyarakat Berau secara merata.



Gambar III.1
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Berau dengan Visi RPJMN dan Provinsi Kalimantan Timur



Visi Kabupaten Berau periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan yang maju dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menciptakan SDM kreatif dan inovatif, karena dengan adanya kreatifitas dan inovasi Kabupaten Berau diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas birokrasi. Arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau yaitu dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Misi merupakan tindakan, strategi, dan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai visi di masa mendatang. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai melalui upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

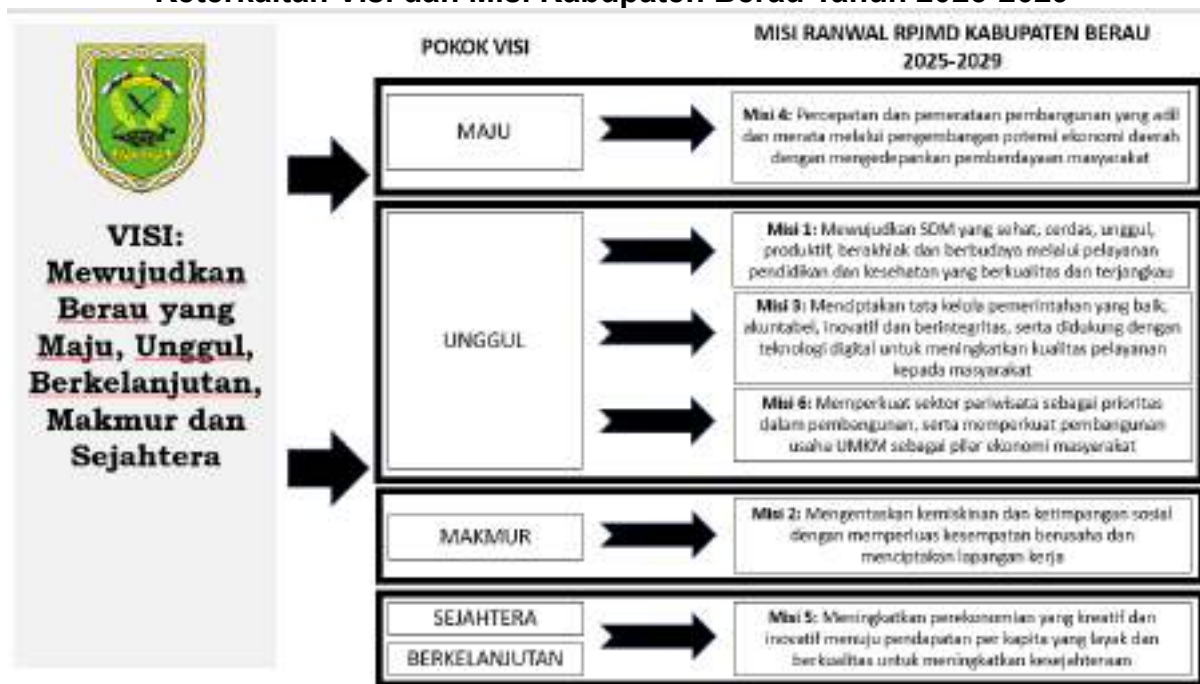
Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus



dapat menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah. Rumusan misi yang baik membantu penggambaran visi yang lebih jelas yang ingin dicapai. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan Kabupaten dan provinsi dengan nasional serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Penjelasan misi harus dapat menyelaraskan muatan atau pokok visi Bupati dan wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan. Dengan memperhatikan pokok visi yang terkandung di dalam Visi Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, maka berikut ini dijabarkan keterkaitan Visi dengan Misi pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029:



Gambar III.2
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Berau Tahun 2025-2029



Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, unggul, produktif, berakhlak dan berbudaya melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau menuju SDM yang sehat, cerdas, unggul, produktif, berakhlak serta berbudaya. Pembangunan SDM merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu meningkatkan daya saing, khususnya dalam peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas



sehingga mampu menciptakan generasi yang berbudaya dan berakhlak. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

MISI 2 : Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghapus kondisi kemiskinan dalam masyarakat kabupaten Berau, baik dari sisi pendapatan, akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan), maupun partisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Sementara itu, mengurangi ketimpangan sosial berarti mengurangi kesenjangan atau perbedaan yang mencolok antar kelompok masyarakat, baik dari segi ekonomi (seperti perbedaan pendapatan dan kekayaan), akses terhadap layanan publik, kesempatan kerja, maupun status sosial. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial diupayakan dengan meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, serta dari segi sosial dan budaya mampu mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-budaya masyarakat. Langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan diwujudkan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sektor unggulan daerah dan penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran.

MISI 3 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat



Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.

MISI 4 : Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat

Misi ini ditekankan pada optimalisasi pembangunan Berau yang dapat menunjang peningkatan sektor ekonomi daerah khususnya pariwisata. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Berau dengan infrastruktur dasar mulai dari infrastruktur yang merata di perdesaan. Infrastruktur sarana dan prasarana publik merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal dan merata, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun untuk mendorong terwujudnya kemandirian kampung dan hal ini



tentu menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi Kabupaten Berau dalam mendorong pemerataan serta daya saing daerah.

MISI 5 : Meningkatkan perekonomian yang kreatif dan inovatif menuju pendapatan per kapita yang layak dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan diwujudkan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sektor unggulan daerah dan penyediaan lapangan kerja sebagai menurunkan angka pengangguran. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui terbentuknya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kabupaten Berau dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kabupaten Berau yang sejahtera.

MISI 6 : Memperkuat sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan, serta memperkuat pembangunan usaha UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat

Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi yang bersumber dari sektor pariwisata. Beragam destinasi wisata menjadi modal untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan menjadi daya tarik investasi. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi di bidang industri jasa dan perkembangan UMKM. Optimalisasi pembangunan Berau ke kawasan pariwisata juga perlu diintervensi sehingga akan menunjang peningkatan sektor pariwisata. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta



memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan UMKM yang akan mendorong peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kabupaten Berau dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kabupaten Berau menjadi destinasi pariwisata unggulan di Kalimantan Timur.

Misi pembangunan Kabupaten Berau tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Asta Cita sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi prioritas, merupakan kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana Kabupaten Berau harus mengintegrasikan misi pembangunan lima tahunan dengan hal tersebut. Mengingat Kabupaten Berau merupakan daerah penghasil komoditas unggulan yang potensial, maka pemerintah Kabupaten Berau harus menggali potensi tersebut agar tujuan sebagai destinasi pariwisata terkemuka dapat tercapai. Berikut ini adalah keterkaitan antara Misi pembangunan Kabupaten Berau tahun 2025-2029 dengan Asta Cita.



Gambar III.3

Keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029



B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui



beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:



**Tabel III.2
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029**

Tujuan	No Urut	Indikator Tujuan	Satuan	2024	Target 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
T1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,17	77,57	78,19	78,50	78,82	79,13	79,65
T2: Meningkatkan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00
T3: Meningkatkan akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat	3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,08	4,88	4,68	4,28	4,01	3,75	3,58
T4: Meningkatkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik inovatif berbasis digital mendukung daya saing daerah	4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,15	74,35	74,71	75,41	76,21	77,11	78,11
T5: Meningkatkan pemerataan Infrastruktur,	5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	4,22	4,81	5,15	5,50	5,92	6,32	6,42



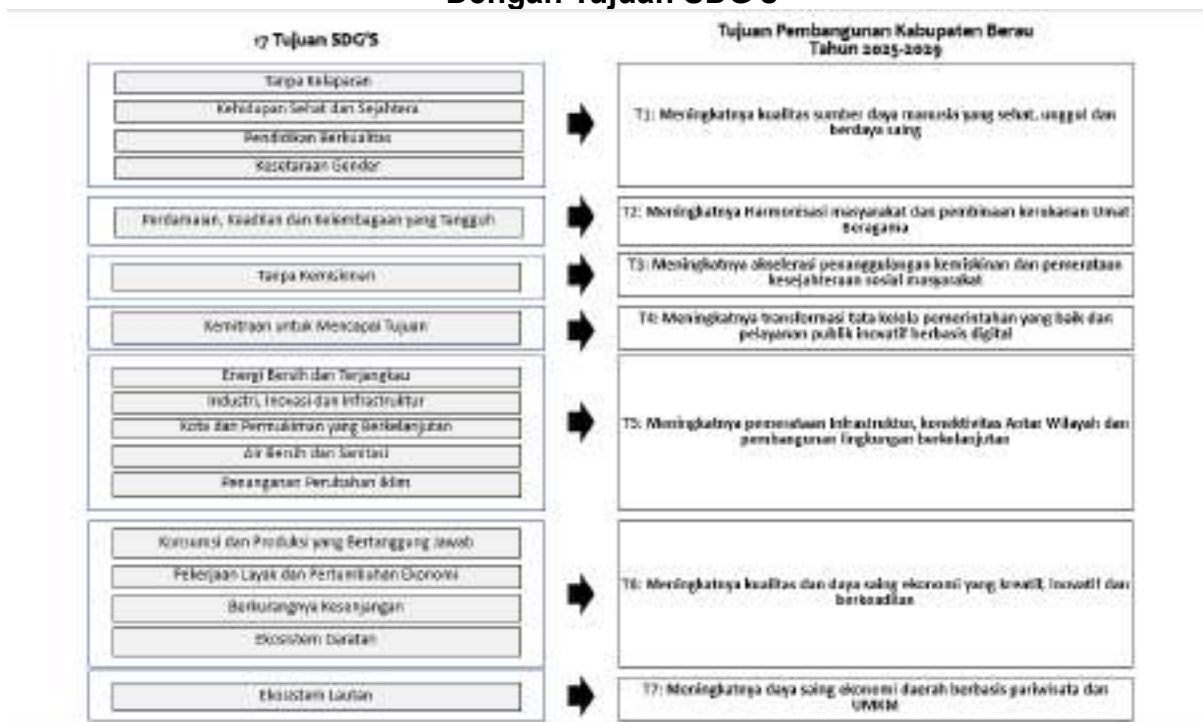
konektivitas Antar Wilayah dan pembangunan lingkungan berkelanjutan	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	78,97	82,21	82,3	82,4	82,49	82,58	82,75
T6: Meningkatnya kualitas dan daya saing ekonomi yang kreatif, inovatif dan berkeadilan	7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,28	7,4	7,66	7,92	8,18	8,44	8,63
	8	Indeks Gini	Indeks	0,317	0,290	0,316	0,311	0,303	0,299	0,294
T7: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata dan UMKM	9	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan akomodasi, makan minum dan jasa lainnya)	Persen	2,02	2,04	2,06	2,08	2,1	2,12	2,14



Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan, sehingga dalam hal ini, dalam penyusunan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 harus diselaraskan dengan tujuan SDG's. Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau yang selaras dengan SDGs, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan yang dicapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kabupaten Berau diharapkan dapat mengembangkan strategi nasional yang sesuai dengan konteks dan prioritas yang ada di Kabupaten Berau. SDGs harus menjadi pedoman penyelarasan karena merupakan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Kabupaten Berau. Melalui kerja sama internasional dan upaya kolektif, tujuan-tujuan ini diharapkan dapat tercapai demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Penyelarasan tujuan pembangunan Kabupaten Berau dan Tujuan SDS's dapat dilihat seperti dalam gambar berikut:



Gambar III.4
Penyelarasan Tujuan Pembangunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029
Dengan Tujuan SDG's



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Berau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Sasaran diwujudkan agar dapat dicapai dalam periode tertentu dan berintegrasi dengan tujuan yang diimplementasikan. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. T1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing

Menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan suatu daerah termasuk Kabupaten Berau. Tujuan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan potensi individu melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja,



dan pengembangan kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan pasar global yang terus mengalami kemajuan.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- S1: Meningkatnya kualitas dan Akses Layanan Pendidikan.
- S2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
- S3: Meningkatnya ketahanan keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

2. T2: Meningkatnya Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama

Mengelola keragaman yang ada di Kabupaten Berau dengan baik menjadi sesuatu hal yang penting untuk mencapai stabilitas sosial dan harmoni di antara berbagai kelompok suku dan agama. Hal ini melibatkan faktor-faktor sosial seperti budaya, politik, ekonomi, dan sejarah, yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi dinamika hubungan antar umat beragama. Oleh karena itu, peningkatan harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan umat beragama perlu dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- S4: Optimalisasi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3. T3: Meningkatnya akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat.

Peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat ini merupakan tujuan yang membutuhkan upaya terintegrasi seperti peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban pengeluaran dengan program bantuan sosial dan akses layanan dasar, serta penghapusan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta komitmen politik yang kuat untuk mengintegrasikan program demi mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau yang berkelanjutan.



Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- S5: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masyarakat
- S6: Meningkatnya upaya perlindungan dan penciptaan kesejahteraan sosial

4. T4: Meningkatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik inovatif berbasis digital

Meningkatnya transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik digital berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Berau secara merata dan berkeadilan.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- S7: Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik
- S8: Meningkatnya pengelolaan pemerintahan berbasis digital
- S9: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian keuangan daerah

5. T5: Meningkatnya pemerataan Infrastruktur, konektivitas Antar Wilayah dan pembangunan lingkungan berkelanjutan

Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Berau berupaya mewujudkan hal ini melalui pengembangan infrastruktur fisik dan digital, seperti jaringan jalan dan transportasi, untuk mengurangi disparitas antarwilayah, mempercepat logistik, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan akses ke layanan dasar bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- S10: Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan yang berdaya dan mandiri



- S11: Percepatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum
- S12: Percepatan Ketersediaan aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah
- S13: Percepatan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
- S14: Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan berkelanjutan
- S15: Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana.

6. T6: Meningkatnya kualitas dan daya saing ekonomi yang kreatif, inovatif dan berkeadilan

Meningkatnya kualitas dan daya saing ekonomi kreatif, inovatif, dan berkeadilan dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan berdaya saing, peningkatan akses pasar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan dan sektor unggulan daerah. Upaya-upaya ini akan mendorong penciptaan produk dan jasa bernilai tinggi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PDRB, dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- S16: Meningkatnya pendapatan per kapita dan aktivitas ekonomi masyarakat merata dan berkualitas
- S17: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.
- S18: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

7. T7: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata dan UMKM

Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pariwisata dan UMKM dicapai dengan pengembangan produk dan layanan inovatif, pemasaran digital dan branding, peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sinergi antara kedua sektor ini menciptakan ekosistem yang saling melengkapi, di mana pariwisata menarik pengunjung dan UMKM menyediakan produk dan jasa kreatif bernilai tambah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Berau.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Berau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:



- S19: Meningkatnya keunggulan kompetitif sektor pariwisata dalam kemandirian ekonomi daerah
- S20: Meningkatnya pembangunan dan daya saing UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut:



**Tabel III.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran Daerah	No Urut	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	2024	Target 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77.17	77.57	78.19	78.50	78.82	79.13	79.65
Meningkatnya kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	2	Rata-rata lama sekolah (penduduk usia di atas 15 tahun)	Tahun	9.57	9.58	9.59	9.6	9.61	9.62	9.63
	3	Harapan lama sekolah	Tahun	13,37	13,38	13,40	13,41	13,42	13,44	13,45
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,66	73,78	73,9	74,08	74,29	74,53	74,70
Meningkatnya ketahanan keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.29	63.53	63.66	63.69	63.81	63.97	64.03
	6	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.421	0.415	0.394	0.374	0.355	0.337	0.328
Meningkatnya Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00
Optimalisasi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat	9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5.08	4.88	4.68	4.28	4.01	3.75	3.58
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.15	4,51	4,78	4,42	4,15	4,08	4,01
Meningkatnya upaya perlindungan dan penciptaan kesejahteraan sosial	11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	29.89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik inovatif berbasis digital mendukung daya saing daerah	12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74.15	74.35	74.71	75.41	76.21	77.11	78.11
Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.71	4.03	4.09	4.11	4.15	4.19	4.22
	14	Nilai SAKIP	Nilai	62.74	63.37	64	64.64	65.29	65.94	66.6
Meningkatnya pengelolaan pemerintahan berbasis digital	15	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2.28	2.58	1,60 (Pemdi)	1,70 (Pemdi)	1,80 (Pemdi)	1,90 (Pemdi)	2,00 (Pemdi)



Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian keuangan daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	76,46*	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	17	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5.84	5.87	5.88	5.89	5.90	5.92	5.93
Meningkatnya pemerataan Infrastruktur, konektivitas Antar Wilayah dan pembangunan lingkungan berkelanjutan	18	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	4.22	4.81	5.15	5.50	5.92	6.32	6.42
	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	78.97	82.21	82.3	82.4	82.49	82.58	82.75
Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan yang berdaya dan mandiri	20	Persentase Desa Mandiri*	Persen	19	22	22	22	23	23	23
Percepatan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	21	IKLI Pekerjaan Umum	Indeks	3.10	3.49	3.87	4.33	4.75	5.14	5.26
Percepatan Ketersediaan aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	22	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0.63	0.65	0.68	0.70	0.75	0.78	0.80
Percepatan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	23	Cakupan rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	92.42	92.87	93.58	94.29	95.00	95.71	95.71
Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan berkelanjutan	24	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	156	27.54	44.45	53.02	60.85	59.53	67.52
Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana	25	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	148.64	140.64	133.21	125.22	117.70	110.64	108.64
Meningkatnya kualitas dan daya saing ekonomi yang kreatif, inovatif dan berkeadilan	26	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7.28	7.4	7.66	7.92	8.18	8.44	8.63
	27	Indeks Gini	Indeks	0.317	0.290	0.316	0.311	0.303	0.299	0.294
Meningkatnya pendapatan per kapita dan aktivitas ekonomi masyarakat merata dan berkualitas	28	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	194.08	248.09	253.00	260.59	267.10	272.45	277.90
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan Daerah	29	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Persen	12.42	12.67	12.92	13.18	13.44	13.71	13.99
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	30	Indeks Ketahanan Pangan.	Indeks	81.91	81.95	82.00	82.10	82.20	82.30	82.40
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata dan UMKM	31	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan akomodasi, makan minum dan jasa lainnya)	Persen	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14
Meningkatnya keunggulan kompetitif sektor pariwisata dalam kemandirian ekonomi daerah	32	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Persen	5.98	6.32	6.54	6.75	7.02	7.36	7.72
	33	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	Persen	7.23	7.95	8.75	9.62	9.89	10.01	10.23



Meningkatnya pembangunan dan daya saing UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat	34	Inflasi	Persen	2.69	2.39	2.24	2.11	2.07	1.97	1.83

*Keterangan : * = dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025*



Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.



3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada tahun 2025-2029, Kabupaten Berau memiliki fokus dalam penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan daya dukung lingkungan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Strategi yang dapat dirumuskan untuk mencapai penguatan fondasi transformasi dan mewujudkan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel III.4

Strategi Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Misi RPJMD 2025-2029		Strategi	
1	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, unggul, produktif, berakhlak dan berbudaya melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
		2	Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis
2	Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja	3	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat



3	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	4	Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan
		5	Peningkatan sinergitas kesinambungan pembangunan
4	Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat	6	Peningkatan kemandirian kampung dengan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat
		7	Peningkatan dan perluasan layanan infrastruktur berkualitas
		8	Pemenuhan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan publik yang berkualitas
		9	Optimalisasi Pemenuhan Hunian layak terjangkau dan berkelanjutan
		10	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Meningkatkan perekonomian yang kreatif dan inovatif menuju pendapatan per kapita yang layak dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan	11	Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah
		12	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih
6	Memperkuat sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan, serta memperkuat pembangunan usaha UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat	13	Penguatan hilirisasi dan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru yang berkelanjutan
		14	Akselerasi pembangunan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM yang mendukung pariwisata

Strategi 2025-2029 yang merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan



program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dioperasionalkan ke dalam prioritas di masing-masing tahun pelaksanaan RPJMD dalam RKPD. Berikut ini adalah uraian dari masing-masing strategi yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan strategi kunci dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Berau yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas, sehat, produktif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan global. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah termasuk wilayah pesisir.

Upaya pemenuhan ini mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga medis, digitalisasi layanan, serta pengembangan kurikulum dan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar global. Pemerintah daerah juga perlu mendorong kolaborasi dengan lembaga internasional, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mentransfer pengetahuan, teknologi, serta memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan berbasis inovasi. Dengan memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, maka akan tercipta SDM lokal yang tidak hanya unggul secara akademik dan keterampilan, tetapi juga sehat secara fisik dan mental siap bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Program kesehatan Kabupaten Berau tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan transformasi layanan primer yang berorientasi pada peningkatan akses, mutu, dan efektivitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat. Transformasi ini menjadi salah satu program unggulan daerah sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperkuat layanan kesehatan yang promotif, preventif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat paling dekat. Penguatan



layanan primer dilakukan melalui revitalisasi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan serta integrasi sistem kesehatan yang lebih modern dan responsif berbasis digital.

Fokus utama program adalah penguatan Puskesmas dan jaringan layanan kesehatan primer melalui peningkatan sarana-prasarana, pemenuhan tenaga kesehatan yang kompeten, serta penerapan standar mutu layanan. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan komunitas, yang tidak hanya menyediakan layanan kuratif, tetapi juga menjadi pusat promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengelolaan kesehatan masyarakat berbasis wilayah.

Sejalan dengan tuntutan modernisasi pelayanan publik, program ini juga menekankan digitalisasi layanan kesehatan sebagai inti dari transformasi sistem. Digitalisasi meliputi penerapan rekam medis elektronik (RME), antrean online, telekonsultasi, integrasi data kesehatan antar fasilitas, serta pemanfaatan dashboard kesehatan daerah. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, akurat, dan mampu menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk di wilayah terpencil.

Bagian penting lainnya dari transformasi adalah penguatan sistem rujukan terpadu yang menghubungkan layanan primer di Puskesmas dengan rumah sakit daerah dan jejaring layanan spesialisik. Sistem rujukan yang lebih terstruktur, berbasis digital, dan responsif akan mengurangi keterlambatan penanganan, meningkatkan kesinambungan layanan, serta memastikan pasien mendapatkan layanan sesuai tingkat kebutuhan. Integrasi ini juga memungkinkan monitoring rujukan secara *end-to-end* dan meningkatkan keterpaduan program kesehatan lintas fasilitas.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mendorong pengarusutamaan gender khususnya terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari kelompok gender melalui pengembangan strategi dan peta jalan serta alas kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan tipologi sosial dan



lingkungan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu
- 2) Pembangunan kawasan terpadu pusat pendidikan yang lengkap, modern dan terjangkau
- 3) Penguatan kualitas, digitalisasi layanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Berau
- 4) Peningkatan layanan yang berfokus pada stunting melalui SPPG (Sistem Pemantauan dan Pencegahan Gizi), pemberdayaan kader Posyandu dan PKK serta intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita
- 5) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan
- 6) Peningkatan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
- 7) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya serta kearifan lokal serta pendidikan karakter khususnya generasi muda

2. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis

Menciptakan kondusivitas masyarakat yang aman dan damai memerlukan penanaman sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjalin kebersamaan, serta kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Penyelesaian masalah secara baik tanpa kekerasan, komunikasi yang efektif dan santun, serta adanya keadilan bagi semua pihak juga menjadi kunci penting untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis memerlukan partisipasi aktif warga, penegakan prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum, serta adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini juga melibatkan pendidikan politik dan kewarganegaraan sejak dini, penghargaan terhadap keberagaman, serta pemberantasan korupsi dan politik uang untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat



3. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat

Pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, berdaya saing, produktif, dan berakhlak mulia. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pengurangan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia secara menyeluruh. Melalui integrasi berbagai program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan peningkatan keterampilan kerja, masyarakat miskin dan rentan didorong untuk memiliki akses terhadap layanan dasar yang layak, peluang ekonomi, serta lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri dan bermartabat.

Di sisi lain, perlindungan sosial Masyarakat memungkinkan sistem respons yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi guncangan seperti krisis ekonomi, bencana alam, maupun perubahan iklim. Upaya ini memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ketika masyarakat memiliki kepastian perlindungan dan akses terhadap pelayanan publik yang adil, mereka lebih siap untuk tumbuh sebagai individu yang produktif, inovatif, dan berdaya saing, tanpa kehilangan akar nilai-nilai luhur dan akhlak mulia. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan menciptakan fondasi sosial yang kokoh bagi kemajuan Kabupaten Berau secara berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja layak dan perlindungan tenaga kerja
 2. Peningkatan komitmen daerah terkait upaya program perlindungan sosial Masyarakat
 3. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu
 4. Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak bagi masyarakat
- ### **4. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan**



Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perampingan struktur dan penyederhanaan prosedur, tetapi juga pada perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Melalui reformasi ini, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik korupsi dan diskriminasi.

Dalam praktiknya, implementasi reformasi birokrasi dilakukan melalui berbagai langkah seperti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), serta evaluasi kinerja secara berkala berbasis hasil. Selain itu, partisipasi masyarakat juga didorong melalui mekanisme pengaduan yang terbuka dan partisipatif, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Dengan birokrasi yang reformis dan adaptif, pelayanan publik akan lebih mudah diakses, lebih cepat diberikan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN didukung pengembangan *smart governance*

5. Peningkatan sinergitas kesinambungan pembangunan

Peningkatan sinergi kesinambungan pembangunan merupakan proses kolaborasi antara berbagai pihak (pemerintah, Masyarakat dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, efisien, dan memberikan dampak yang lebih besar daripada upaya masing-masing pihak secara individu. Hal ini dilakukan dengan membangun koordinasi, komunikasi, kepercayaan, serta menyelaraskan program dan kebijakan agar pembangunan Kabupaten Berau lebih efektif, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan



masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan digitalisasi pelayanan.
- 2) Penguatan monitoring dan evaluasi serta kesinambungan perencanaan Pembangunan.
- 3) Peningkatan transparansi dan penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan pemerintahan.

6. Peningkatan kemandirian kampung dengan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat

Peningkatan kemandirian kampung melalui perkembangan dan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan cara mengembangkan potensi lokal, memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mengembangkan ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan pertanian berkelanjutan.

Salah satu meningkatkan sinergitas pembangunan perdesaan dengan pelaksanaan perhutanan sosial melalui Integrated Area Development (IAD) di Kab. Berau sebagai dukungan dan upaya mencapai komponen visi “berkelanjutan”. Program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu dioptimalkan dengan pelaksanaan program lintas OPD dan Lembaga lainnya dengan menerapkan konsep *Integrated Area Development* (IAD).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian warga agar mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mengatasi berbagai persoalan desa sendiri.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan digitalisasi dan pengembangan infrastruktur kampung/kecamatan sebagai pusat pertumbuhan

7. Peningkatan dan perluasan layanan infrastruktur berkualitas

Strategi peningkatan dan perluasan layanan infrastruktur berkualitas diarahkan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memenuhi standar teknis, mendukung konektivitas wilayah, serta memperkuat kapasitas pelayanan publik di Kabupaten Berau. Upaya ini meliputi penguatan perencanaan berbasis data spasial dan kebutuhan masyarakat (*evidence-based planning*), optimalisasi



pemanfaatan anggaran melalui penguatan *cost effectiveness*, serta peningkatan kualitas pembangunan dan pemeliharaan aset infrastruktur secara berkelanjutan.

Secara strategis, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dasar, termasuk jalan, jembatan, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi, melalui modernisasi metode konstruksi, penerapan standar pelayanan minimal (SPM), dan pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih efisien. Perluasan layanan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil, kawasan pesisir, dan pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan jaringan baru, integrasi jaringan transportasi, serta peningkatan infrastruktur pelayanan.

Strategi ini juga difokuskan pada peningkatan efektivitas pengelolaan infrastruktur melalui penguatan sistem pemeliharaan berbasis *asset management*, pemanfaatan teknologi pemantauan kondisi infrastruktur (*monitoring system*), serta pengembangan sistem informasi infrastruktur terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, pemerintah daerah mendorong diversifikasi pembiayaan infrastruktur melalui pemanfaatan dana transfer berbasis kinerja, dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Secara keseluruhan, strategi ini diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur yang andal, adaptif, merata, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Berau tahun 2025–2029.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar serta penyediaan sistem pendukung berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik.

8. Pemenuhan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan publik yang berkualitas.

Strategi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan publik diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan dasar maupun layanan pemerintahan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan jaringan transportasi, penyediaan infrastruktur pendukung mobilitas, serta



pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi umum yang terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta layanan sosial. Pengembangan ini tidak hanya bertujuan mempercepat waktu tempuh dan menurunkan biaya mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat interkoneksi antarkawasan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di era digital, strategi juga menekankan pemanfaatan konektivitas internet dan layanan digital untuk memperluas akses terhadap pelayanan publik. Melalui perluasan jaringan telekomunikasi, digitalisasi proses administrasi, dan penerapan layanan berbasis daring, pemerintah daerah berupaya mengurangi hambatan geografis dan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif.

Selain itu, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta menjadi elemen kunci dalam mempercepat penyediaan infrastruktur konektivitas dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Pembangunan diarahkan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, prinsip inklusivitas, serta ketahanan terhadap bencana untuk memastikan keberlanjutan layanan.

Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup serta percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah mitra IKN

9. Optimalisasi Pemenuhan Hunian layak terjangkau dan berkelanjutan

Strategi optimalisasi pemenuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, mendapatkan akses yang adil dan mudah terhadap



kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang aman, sehat, dan berkualitas. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sistem penyediaan perumahan yang lebih inklusif dan responsif melalui peningkatan ketersediaan unit hunian baru, penataan kawasan permukiman, dan integrasi aspek keberlanjutan dalam seluruh tahapan pembangunan perumahan.

Secara strategis, pemerintah mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan melalui pemanfaatan skema subsidi, fasilitas pembiayaan berbasis pemerintah, revitalisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya, serta kemitraan dengan perbankan dan pengembang untuk menekan biaya hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki atau menempati rumah yang sesuai standar minimal kesehatan dan kenyamanan.

Selain itu, strategi ini juga mencakup pengembangan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada konsep keberlanjutan, baik dari aspek tata ruang, lingkungan, maupun infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah mendorong pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan ruang terbuka hijau, sistem drainase yang baik, infrastruktur dasar yang memadai, dan mitigasi risiko bencana. Upaya penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh juga menjadi bagian penting dari kebijakan, melalui pendekatan slum upgrading, penyediaan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungannya.

Arah kebijakan selanjutnya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan secara efektif dan efisien melalui penegakan RTRW, pengembangan perumahan vertikal di kawasan dengan keterbatasan lahan, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk penyediaan hunian terjangkau melalui skema KPS/KPBU. Pemerintah daerah juga memperkuat basis data perumahan dan permukiman untuk mendukung perencanaan berbasis bukti dan memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif, terjangkau, adaptif terhadap perubahan iklim, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan. Dengan langkah ini, pemenuhan hak masyarakat terhadap hunian layak dapat diwujudkan secara lebih



merata dan berkelanjutan, sekaligus mendorong keteraturan tata ruang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Berau.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

10. Penyelenggaraan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan bagian integral yang bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Berau yang lebih baik serta menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik tidak hanya menyangkut pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup upaya pelestarian alam, penghijauan kawasan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutannya termasuk sektor utama Kabupaten Berau yaitu sektor pertambangan.

Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah penguatan tata kelola persampahan berbasis partisipasi masyarakat, pemanfaatan energi terbarukan, perlindungan daerah resapan air, serta revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar tercipta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih dan asri, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman, serta mampu beraktivitas dengan produktif. Kondisi ini juga berdampak positif terhadap sektor pariwisata, kesehatan, dan investasi, sehingga mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan local



11. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah di Kabupaten Berau dapat dilakukan melalui mitigasi risiko, kesiapsiagaan melalui pelatihan dan simulasi, penyusunan rencana darurat, serta pembangunan infrastruktur tahan bencana. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk BPBD, serta masyarakat dengan program pendampingan dan penguatan kapasitas di tingkat lokal. Dalam aspek ketahanan sosial, budaya, dan ekologi maka perlu atensi atas pengelolaan dampak pembangunan daerah terhadap aspek sosial, budaya dan ekologi

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mitigasi dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim

12. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih

Pengembangan kualitas produksi sektor unggulan berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih merupakan strategi terpadu yang menghubungkan potensi lokal dengan dinamika sektor pertanian, investasi, perdagangan, dan pemberdayaan usaha mikro. Melalui pendekatan ini, produk-produk unggulan daerah seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan hasil pertanian diolah dan dikemas dengan standar yang sesuai kebutuhan pasar wisata, sehingga tidak hanya menjadi identitas budaya lokal, tetapi juga meningkatkan pengalaman wisata yang autentik bagi pengunjung. Dalam pengembangan ekonomi unggulan daerah, penggunaan metode *Development by Design* (DbD) dalam perencanaan tata ruang untuk mengintegrasikan areal dengan nilai konservasi tinggi di sektor pertanian/perkebunan berkelanjutan, pengarusutamaan kawasan lindung geologi untuk perlindungan geopark/geosite sesuai dengan surat edaran Bappenas. Intervensi pengembangan potensi unggulan juga dilakukan terhadap potensi tambak udang windu tradisional dan organik di Kabupaten Berau, penguatan ruang pengelolaan udang windu berkelanjutan melalui skema Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE) sesuai dengan Peraturan Dirjen Budidaya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Nomor 154 tahun 2019.



Pengembangan pola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan areal dengan nilai konservasi tinggi serta penerapan strategi untuk peningkatan produksi dan kualitas produk komoditas pertanian melalui identifikasi faktor-faktor kunci untuk peningkatan produksi komoditas pertanian prioritas di Kabupaten Berau, peningkatan kualitas SDM pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dan kualitas produk komoditas pertanian yang dihasilkan, serta penguatan inovasi penerapan GAP berdasarkan potensi sumber daya lokal.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan industri kreatif
- 2) Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan

13. Penguatan hilirisasi dan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru yang berkelanjutan

Dalam rangka hilirisasi, daerah mendorong terbentuknya ekosistem industri pengolahan di tingkat lokal melalui skema investasi yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah membuka peluang investasi swasta dan kemitraan publik-swasta dengan tetap memberi ruang besar bagi pelaku usaha mikro dan koperasi agar tidak terpinggirkan melalui pelaksanaan koperasi merah putih di Kabupaten Berau.

Pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Berau merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan koperasi yang inklusif, profesional, dan berdaya saing. Koperasi Merah Putih dihadirkan sebagai model koperasi modern yang menekankan transparansi, efisiensi manajemen, serta partisipasi anggota sebagai fondasi dalam membangun ekonomi kerakyatan. Implementasinya diarahkan untuk memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan akses permodalan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan perdagangan skala lokal.

Di Kabupaten Berau, pelaksanaan Koperasi Merah Putih difokuskan pada pengembangan koperasi berbasis kawasan, terutama pada wilayah-wilayah yang



memiliki potensi ekonomi namun belum optimal dalam pengelolaan usaha bersama. Melalui dukungan pelatihan manajemen usaha, fasilitasi legalitas, pendampingan kelembagaan, serta integrasi dengan platform digital layanan koperasi, pemerintah daerah berupaya memastikan agar koperasi ini dapat menjadi pusat ekonomi masyarakat yang mandiri. Selain itu, sinergi dengan perusahaan-perusahaan melalui skema kemitraan dan CSR turut memperkuat kapasitas koperasi dalam pengadaan barang, hilirisasi produk lokal, dan memperluas akses pasar.

Pelaksanaan Koperasi Merah Putih juga diarahkan untuk menjadi penghubung antara pelaku usaha kecil dengan peluang rantai pasok industri yang lebih besar, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak atau pasar informal yang kurang menguntungkan. Melalui model usaha yang lebih terstruktur, koperasi diharapkan mampu menjadi wadah peningkatan pendapatan anggota dan menggerakkan ekonomi desa secara lebih inklusif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Berau tidak hanya bertujuan memperkuat sektor koperasi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong, kemandirian, dan pemerataan. Dengan dukungan pemerintah daerah, pendampingan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperluas peluang usaha masyarakat Berau.

Produk-produk yang telah diolah ini kemudian diarahkan ke pasar yang lebih luas melalui peningkatan akses perdagangan, baik secara offline maupun digital. Dukungan terhadap usaha mikro tidak hanya dalam bentuk permodalan dan pelatihan, tetapi juga integrasi mereka dalam rantai pasok pariwisata dan perdagangan. Sinergi antar sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan, kompetitif, dan merata bagi seluruh pelaku ekonomi di daerah. Pengembangan prioritas pada aspek hilir ditekankan untuk intensifikasi pada produk-produk hilir terutama terkait produk unggulan daerah.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:



- 1) Penguatan integrasi dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam, sejarah dan budaya

14. Akselerasi pembangunan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM yang mendukung pariwisata

Akselerasi pembangunan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM yang mendukung pariwisata melibatkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan produk dan jasa inovatif berbasis budaya dan kearifan lokal, sehingga meningkatkan daya tarik wisata dan perekonomian daerah melalui pelatihan, digitalisasi, promosi, dan pengembangan infrastruktur pendukung. UMKM yang beroperasi dalam sektor ekonomi kreatif dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata daerah baik dalam maupun luar negeri dengan mengembangkan produk dan objek wisata daerah serta meningkatkan pembinaan event-event wisata daerah.
- 2) Mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, serta akses modal dan pasar.

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan.

Penahapan pembangunan per tahun dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah memiliki fokus yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penahapan pembangunan per tahun Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar III.5
Penahapan Pembangunan Kabupaten Berau
Tahun 2025-2029



Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Berau, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut.



Tabel III.5

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Strategi	Arah Kebijakan Rankhir RPJMD	Penahapan Pembangunan 2026-2030				
		2026	2027	2028	2029	2030
		Transformasi SDM Unggul untuk mendukung daya saing dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Tata kelola pemerintahan kolaboratif-inovatif berbasis digital untuk peningkatan layanan publik dan perwujudan kesejahteraan sosial yang berkeadilan	Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan akselerasi terhadap konektivitas daerah	Transformasi sektor unggulan berbasis pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi dan keberdayaan masyarakat	Perwujudan Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera
Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu					
	Pembangunan kawasan terpadu pusat pendidikan yang lengkap, modern dan terjangkau					
	Penguatan kualitas, digitalisasi layanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Berau					
	Peningkatan layanan yang berfokus pada stunting melalui SPPG (Sistem Pemantauan dan Pencegahan Gizi), pemberdayaan kader Posyandu dan PKK serta intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita					



	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan					
	Peningkatan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak					
	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya serta kearifan lokal serta pendidikan karakter khususnya generasi muda					
Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat					
Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja layak dan perlindungan tenaga kerja					
	Peningkatan komitmen daerah terkait upaya program perlindungan sosial masyarakat					
	Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu					
	Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak bagi masyarakat					
Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN didukung pengembangan smart governance					
Peningkatan sinergitas kesinambungan pembangunan	Peningkatan digitalisasi pelayanan					
	Penguatan monitoring dan evaluasi serta kesinambungan perencanaan pembangunan					



	Peningkatan transparansi dan penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan pemerintahan					
Peningkatan kemandirian kampung dengan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan digitalisasi dan pengembangan infrastruktur kampung/kecamatan sebagai pusat pertumbuhan					
Peningkatan dan perluasan layanan infrastruktur berkualitas	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar serta penyediaan sistem pendukung berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik					
Pemenuhan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan publik yang berkualitas	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas wilayah mitra IKN					
Optimalisasi Pemenuhan Hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
Penyelenggaraan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal					
Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Peningkatan mitigasi dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim					
Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Pengembangan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan industri kreatif					
	Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan					



Penguatan hilirisasi dan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru yang berkelanjutan	Penguatan integrasi dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam, sejarah dan budaya					
Akselerasi pembangunan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM yang mendukung pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata daerah baik dalam maupun luar negeri dengan mengembangkan produk dan objek wisata daerah serta meningkatkan pembinaan event-event wisata daerah.					
	Mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, serta akses modal dan pasar.					



Program yang menjadi operasionalisasi pelaksanaan strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi unggulan potensial, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Berau.

Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye. pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2025-2029, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki program unggulan yang disebut dengan 8 Plus, yaitu Optimalisasi 18 Program Unggulan yang telah dilaksanakan sejak periode kepemimpinan 2021-2026 ditambah 7 program unggulan baru. Program unggulan 8 Plus sesuai janji kampanye tersebut secara lebih lengkap sebagai berikut:

1) Optimalisasi 18 Program Unggulan, yang terdiri dari:

1. Melanjutkan program percepatan pembangunan dengan SIGAP;
2. Melanjutkan program percepatan pembangunan 50 s/d 100 juta per RT;
3. Pembangunan rumah sakit;
4. Gratis iuran BPJS kesehatan bagi warga yang tidak mampu;
5. Gratis fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan perlindungan tenaga kerja lokal;
6. Penyediaan 1000 titik Wi-fi gratis hingga ke tingkat Desa;
7. Peningkatan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian kampung dan kota;
8. Peningkatan program beasiswa Berau cerdas, 1.000 laptop untuk guru dan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar yang tidak mampu;
9. Peningkatan insentif untuk kader posyandu, tenaga kesehatan, PTT, ketua RT



- & pembimbing rohani dan tenaga pendidikan (guru dan PAUD);
10. Program peningkatan sarana fasilitas air bersih (25.000 sambungan baru) dan listrik di seluruh Kampung;
 11. Pembangunan kawasan terpadu pusat seni, budaya dan kreativitas (terdiri dari taman budaya, amphltheater, pusat kreativitas & kawasan UMKM Terpadu) serta pembangunan balai adat;
 12. Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19; (Sudah tidak dilaksanakan pada tahun 2026)
 13. Revitalisasi bangunan bersejarah (keraton, makam bersejarah, dan lain-lain);
 14. Pemberian bantuan stimulan (sapronek, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi;
 15. Pengembangan sarana & prasarana destinasi pariwisata;
 16. Menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan serta kredit lunak kepada UMKM;
 17. Tata kelola pemerintahan yang bersih & berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital teknologi.
 18. Bantuan layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.

2) Bantuan angkutan pelajar dan mahasiswa

3) Gratis biaya masuk sekolah TK, SD dan SMP (Biaya registrasi, buku sekolah dan seragam sekolah).

4) Biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi warga yang tidak mampu.

5) Pembangunan sistem transportasi publik terpadu “Trans Berau” secara bertahap.

6) Pembangunan sirkuit balap motor dan fasilitas cabang olahraga lainnya secara bertahap untuk mencapai prestasi.

7) Pengembangan dan penguatan pusat ekonomi desa.

8) Pembangunan gedung kesenian Berau/*Berau Creative Hub*.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas



merupakan Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Tabel III.6
Pemetaan Program Unggulan Kepala Daerah ke Dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Misi RPJMD 2025-2029			Tujuan/Sasaran Daerah	Program Unggulan Janji Kampanye Kepala Daerah	17 Program Prioritas Nasional	Program Prioritas	Outcome	Indikator	OPD Penanggungjawab
1	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, unggul, produktif, berakhlak dan berbudaya melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	T1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing						
		S1	Meningkatnya kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Gratis biaya masuk sekolah TK, SD, dan SMP (Biaya Registrasi, Buku Sekolah, dan Seragam Sekolah)	8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS Anak Usia 5-6 tahun	Dinas Pendidikan
								APS Anak Usia 7-12 tahun	
								APS Anak Usia 13-15 tahun	
								APS Anak Usia 7-18 kesetaraan	
								APK SD	
								APK SMP	
				Peningkatan program beasiswa berau cerdas, 1000 laptop untuk guru sekolah (PAUD, TK, SD, dan SMP) dan bantuan sarana dan prasarana perlengkapan sekolah		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru	
Peningkatan insentif untuk kader posyandu, tenaga kesehatan, PTT, ketua RT, pembimbing rohani dan tenaga pendidikan (guru sekolah dan PAUD)		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kemandirian dan Perilaku Hidup Sehat Masyarakat serta Partisipasi Aktif dalam Upaya Kesehatan.	Persentase Kelurahan/Kampung mencapai STBM	Dinas Kesehatan				
		Program Penataan Desa	Meningkatnya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Presentase Fasilitasi Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				



						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru	Dinas Pendidikan
	S2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan rumah sakit tipe B termasuk layanan PCR gratis	7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Akses Universal terhadap Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Berkualitas, Merata, dan Berkesinambungan.	Persentase Universal Health Coverage (UHC)		
			Gratis iuran BPJS kesehatan bagi warga yang tidak mampu						
	S3	Meningkatnya ketahanan keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	
				10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	DPPPAKB	
				6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Pembangunan sirkuit balap motor dan fasilitas cabang olahraga lainnya secara bertahap untuk mencapai prestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Atlit Berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	T2	Meningkatnya Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama							



		S4	Optimalisasi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penguatan ideologi pancasila karakter kebangsaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan penguatan ideologi pancasila karakter kebangsaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Kesbangpol
					9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	Satpol PP
2	Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja	T3	Meningkatnya akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat						
		S5	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masyarakat	Gratis fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan perlindungan tenaga kerja lokal	15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Disnakertrans
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Disnakertrans
		S6	Meningkatnya upaya perlindungan dan penciptaan kesejahteraan sosial	Melanjutkan program percepatan pembangunan 50 s/d 100 Juta per RT		Program Penataan Desa	Meningkatnya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah/Dinas Sosial
				Bantuan langsung tunai (BLT) bagi fakir miskin, yatim piatu dan orang tua jompo yang terlantar	5) Pemberantasan kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Dinas Soaial



					1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Dinas Pangan
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	DPUPR
3	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	T4	Meningkatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik inovatif berbasis digital mendukung daya saing daerah						
		S7	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui sumber daya manusia (SDM) yang profesional berbasis digital teknologi	3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang undangan	Persentase ketepatan penetapan perda	Sekretariat DPRD
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah
						Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi dan Kualitas Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		S8	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan berbasis digital			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		S9	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan		2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Ketercapaian Target Anggaran Pendapatan	BPKAD



			kemandirian keuangan daerah	Gratis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi warga yang tidak mampu		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan serta Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Bapenda
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terselenggaranya kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang IKP	Persentase tingkat kepuasan masy. Terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD	Bapelitbang
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian / kajian yang dimanfaatkan dalam kebijakan	Bapelitbang
						Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Bapelitbang
					4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PKPT	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Kapabilitas APIP	Inspektorat
						Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan



4	Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat	T5	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur, konektivitas Antar Wilayah dan pembangunan lingkungan berkelanjutan						
		S10	Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan yang berdaya dan mandiri	Melanjutkan program percepatan pembangunan dengan SIGAP		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	DPMK
				Penyediaan 1000 titik wifi gratis hingga ke tingkat desa		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Terselenggaranya kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang IKP	Persentase tingkat kepuasan masy. Terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Diskominfo
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemda	Indeks SPBE	Diskominfo
		S11	Percepatan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian kampung dan kota		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemandapan jalan	DPUPR
				Pembangunan gedung kesenian Berau/Berau Creative Hub		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan tematik yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	DPUPR



				Program peningkatan sarana fasilitas air bersih dengan 25.000 sambungan baru dan listrik diseluruh kampung		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	DPUPR
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Air Limbah Domestik	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	DPUPR
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas fungsional daerah irigasi kewenangan kabupaten	DPUPR
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Skor Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
		S12	Percepatan Ketersediaan aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Pengembangan sistem transportasi publik terpadu "Trans Berau" secara bertahap		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Dinas Perhubungan
				Bantuan angkutan pelajar dan mahasiswa					
						Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi laut	Rasio Konektivitas Laut Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dinas Perhubungan
		S13	Percepatan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Disperkim



		S14	Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan berkelanjutan		11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana dan Program (KRP)	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	DLHK
		S15	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana			Program Penanggulangan Bencana	meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	BPBD
5	Meningkatkan perekonomian yang kreatif dan inovatif menuju pendapatan per kapita yang layak dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan	T6	Meningkatnya kualitas dan daya saing ekonomi yang kreatif, inovatif dan berkeadilan						
		S16	Meningkatnya pendapatan per kapita dan aktivitas ekonomi masyarakat merata dan berkualitas	Pemberian bantuan stimulan (Sapronak, Sapronak, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi	12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Pertanian	Produktivitas Bahan Pangan	DTPHP
						Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	DTPHP
		S17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan Daerah			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi komoditi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
		S18	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi komoditi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Perikanan
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Presentase Stabilisasi harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Disperindagkop



				Pengembangan dan penguatan pusat ekonomi desa	14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	Program Perencanaan Pengembangan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase dokumen perencanaan dan pembangunan industri	Disperindagkop
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	Tingkat Partispasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kecamatan
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pengggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha produk dalam negeri yang difasilitasi	Diskoperindag
6	Memperkuat sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan, serta memperkuat pembangunan usaha UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat	T7	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata dan UMKM						
		S19	Meningkatnya keunggulan kompetitif sektor pariwisata dalam kemandirian ekonomi daerah	Pembangunan gedung kesenian Berau/Berau Creative Hub	17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Revitalisasi bangunan bersejarah, keraton, makam bersejarah dan lain-lain		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pembangunan kawasan terpadu pusat seni, budaya dan kreativitas yang (terdiri dari taman, budaya, amphiteater, pusat kreativitas, kawasan UMKM terpadu) serta		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



				pembangunan balai adat					
				Pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata					
		S20	Meningkatnya pembangunan dan daya saing UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat	Menyediakan fasilitas pembinaan pelatihan, serta kredit lunak kepada UMKM (optimalisasi 18)		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Diskoperindag
						Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya pelaku usaha yang menanamkan modalnya	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	DPMPTSP

Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

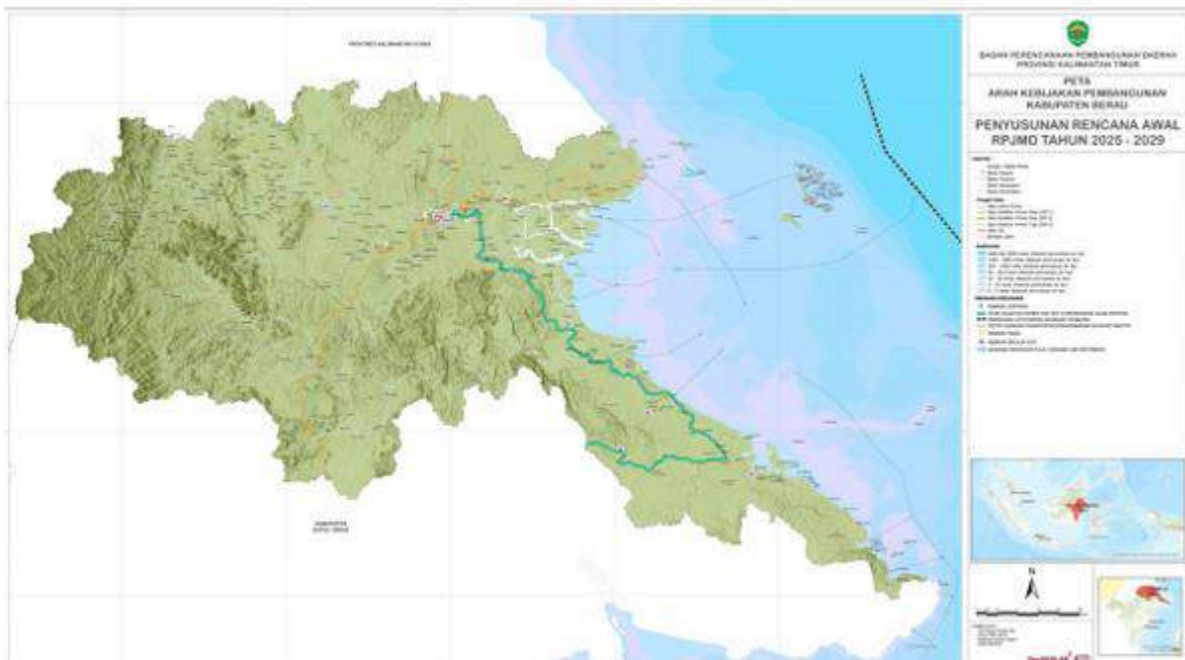
a. Kedudukan Kabupaten Berau Secara Regional

Kabupaten Berau diarahkan untuk Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan.

Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur. Highlights indikasi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Berau disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Berau.

Gambar III.6

Peta Highlights Indikasi Kebijakan di Kabupaten Berau Tahun 2025-2029



(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Berau sebagai berikut:

1. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
2. Penyediaan afirmasi akses Pendidikan



3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
4. Pengembangan pasar lokal berbasis komoditas unggulan
5. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
6. Pengelolaan Pelabuhan perikanan Sambaliung
7. Pengelolaan daya atrik wisata provinsi
8. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya atrik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata provinsi
9. Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya
10. Pengembangan ekonomi maritime
11. Penyelenggaraan jalan provinsi
12. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Berau
13. Pembinaan modern
14. Pengendalian banjir
15. Pembangunan pengaman Pantai
16. Penyediaan PSU permukiman
17. Rehabilitasi rumah tidak layak hunu
18. Penguatan Pembangunan Kawasan perdesaan yang berkontribusi pada Pembangunan terpadu berkelanjutan utamanya di Kawasan perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb

Dukungan Kabupaten Berau terhadap pelaksanaan program unggulan Jospol Gratispol agar dapat berjalan dan menghasilkan manfaat yang maksimal baik untuk kabupaten Berau maupun Provinsi Kalimantan Timur secara umum:

1. Pembangunan rumah produksi Bersama (RPB)
2. Pengembangan desa korporasi ternak (PDKT)
3. Pengembangan Kawasan tanaman kakao.
4. Rahabillitasi dan revitalisasi pabrik es dan cold storage sebagai sarana system rantai dingin.
5. Pemberian insentif guru sekolah umum, pesantren dan penjaga rumah ibadah.
6. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu.
7. Pengembangan dan penignkatan daya saing sektor ekonomi kreatif.
8. Pengembangan pariwisata geopark Sangkuriang-Mangkalihat.



9. Pengembangan desa wisata yang berstandar.
10. Pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya untuk mendukung pariwisata berbasis budaya.
11. Peningkatan/rehabilitasi ruas jalan provinsi
12. Pembuatan peta peluang investasi, IPRO dan penyusunan Pra-FS investasi.

b. Pengembangan wilayah Kabupaten Berau berdasarkan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Salah satu upaya dalam mengali potensi pengembangan suatu wilayah adalah dengan menelaah adanya pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan yang dimaksud merupakan suatu area dimana tingkat pertumbuhannya cepat, yang menjadi pusat pengembangan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap wilayah di sekitarnya. Tujuan lainnya dari terbentuknya pusat pertumbuhan wilayah adalah untuk merangsang perekonomian masyarakat dimana apabila pertumbuhan wilayah berlangsung dengan pesat dan perekonomian masyarakat yang kuat, diharapkan tingkat kesejahteraan wilayah dapat meningkat pada masa depan, melampaui kondisi ekonomi saat ini atau setidaknya setara dengan situasi ekonomi saat ini.

Dalam teori pusat pertumbuhan ini dibahas lebih lanjut mengenai pola pertumbuhan ekonomi regional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Menurut teori ini, dalam suatu wilayah atau daerah, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai pendorong atau propeler bagi perkembangan ekonomi di sekitarnya. Pusat pertumbuhan dapat muncul secara organik melalui aktivitas yang terus berkembang sehingga menimbulkan embryo pusat pertumbuhan maupun dengan adanya investasi, inovasi, atau kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah tersebut. Konsep pusat pertumbuhan wilayah menyatakan bahwa pusat pertumbuhan ini memiliki daya tarik dan kapabilitas untuk merangsang aktivitas ekonomi di sekitarnya. Teori ini mengajukan bahwa melalui investasi dan perkembangan di pusat pertumbuhan, dampak positif akan merembes ke daerah sekitarnya, menciptakan efek penyebaran (spread effect) dan efek ganda (multiplier effect) pada sektor dan wilayah lainnya.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka diperlukan adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan wilayah dengan dokumen perencanaan pembangunan.



Pengenalan terhadap pusat pertumbuhan di tingkat wilayah Kabupaten Berau, dapat dilakukan dengan mengamati embrio pusat-pusat pertumbuhan yang secara umum telah menunjukkan ciri-ciri sebagai pusat pertumbuhan secara empiris. Selain itu, penilaian terhadap konsep pusat pertumbuhan juga dapat merujuk pada pemahaman Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana identifikasi pusat pertumbuhan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penetapan sistem pusat dalam struktur hierarki penataan ruang serta penetapan kawasan strategis yang, dari segi yuridis, dapat berupa Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, maupun Kota untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Oleh karenanya, tinjauan kedudukan Kabupaten Berau perlu dilihat dari sudut pandang kepentingan kedudukannya secara nasional dan regional. Identifikasi kemudian dilanjutkan untuk meninjau pusat-pusat pertumbuhan dalam skala kewilayahan dalam batas administrasi Kabupaten Berau.

Dalam melakukan perencanaan wilayah tentunya perlu adanya acuan pada arahan perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, arahan perencanaan wilayah di Kabupaten Berau tertuang dalam regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

Selanjutnya, evaluasi sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen RTRW dan RPJPD dalam perspektif jangka Panjang, ditinjau dari pertimbangan terhadap tujuan penataan ruang wilayah. Dalam konteks RTRW Kabupaten Berau, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan kabupaten sebagai kawasan sentra industri dan pariwisata, berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Berau berfokus ke arah pengembangan sektor industri dan pariwisata yang diperkuat dengan sektor pertanian dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Gambar III.7
Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Berau



Selain berdasarkan hirarki pada pusat kegiatan provinsi, Peran Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur juga dapat ditinjau dari posisinya dalam perencanaan Kawasan Strategis Provinsi. Penetapan kawasan strategis juga merupakan bagian integral dari adanya embrio pusat pertumbuhan di suatu wilayah.

Selain menitikberatkan pada daerah yang telah diidentifikasi sebagai pusat kegiatan dalam rencana tata ruang Kabupaten Berau, fokus terhadap pertumbuhan wilayah juga bisa ditinjau pada keberadaan Kawasan Strategis.

Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Berau meliputi:

1. **Kawasan Strategis Nasional (KSN)**, wilayah prioritas karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. KSN di Kabupaten Berau adalah Perbatasan Laut RI di sekitar pulaupulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. **Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**, wilayah prioritas karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara regional provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. KSP di Kabupaten Berau adalah kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.



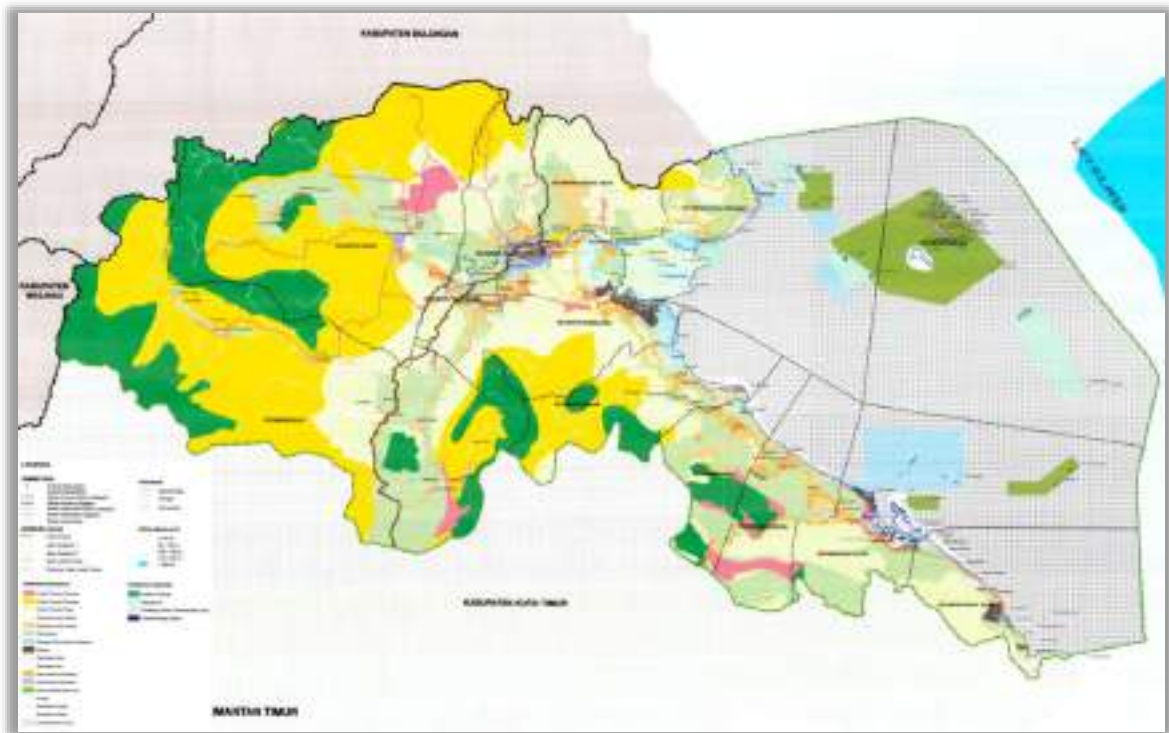
3. **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**, wilayah prioritas karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara regional kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. KSK di Kabupaten Berau meliputi:
 - a. Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:
 - Kawasan *Heart of Borneo* (HOB)
 - Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan
 - Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki
 - Kawasan Hutan Lindung Lesan
 - Taman-taman / objek wisata alam
 - Kawasan *Karst*
 - b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi:
 - Kawasan Agropolitan
 - Kawasan Minapolitan
 - Kawasan Pusat Industri Perkebunan
 - Kawasan Industri Mangkajang
 - c. Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam:
 - Pulau Kakaban
 - Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit
 - Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Matahajdan
 - Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup
 - d. Kawasan Strategis untuk kepentingan HANKAM berupa bandara udara HANKAM di Pulau Maratua
4. **Kawasan Andalan Nasional (KAN)**, wilayah yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. KAN di Kabupaten Berau adalah Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan aspek penting dalam perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Pengaturan ini berfokus pada Upaya yang optimal untuk memanfaatkan ruang berdasarkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah berlangsung secara

terencana dan terkoordinasi. Berikut merupakan pemetaan secara keseluruhan terhadap rencana Pola Ruang di Kabupaten Berau baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya.

Gambar III.8

Peta Rencana Pola Ruang Lindung dan Budidaya Kabupaten Berau



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Rencana pola ruang wilayah kabupaten Berau meliputi penggunaan lahan budidaya dan konservasi. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, seperti industri, perumahan dan pertanian. Sementara kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan uraian rinci rencana pola ruang wilayah Kabupaten Berau berdasarkan fungsi kawasan lindung:



Tabel III.7

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Berau

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan hutan lindung	360.254,31
2	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	
3	Kawasan perlindungan setempat	42.151,35
4	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	58.970,16
5	Kawasan lindung geologi	345.226,54
6	Kawasan rawan bencana	
7	Kawasan lindung lainnya	

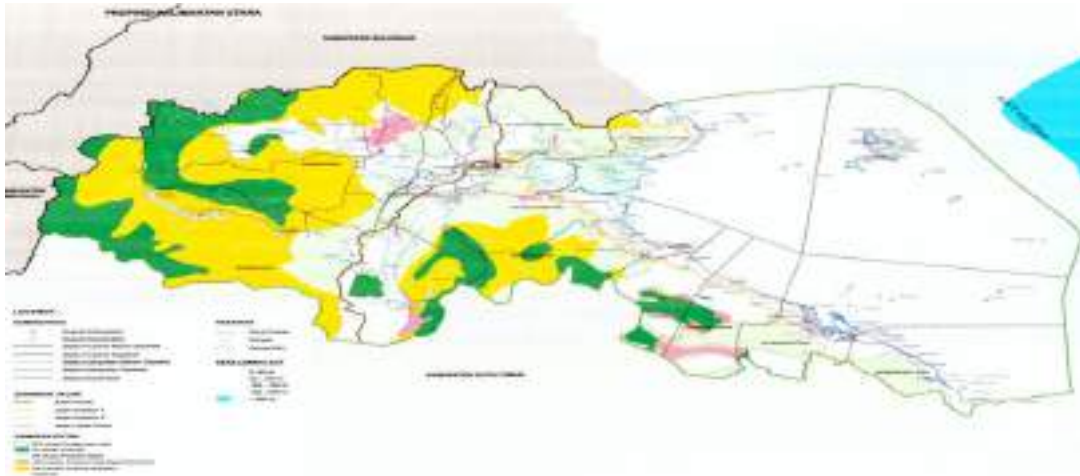
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Jika dilihat dari alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Berau, area dengan alokasi lahan terbesar adalah kawasan hutan lindung, dengan luas 360.254,31 hektar, diikuti oleh kawasan lindung geologi yang memiliki luas 345.226,54 hektar. Hal ini merupakan Upaya penguatan konservasi dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Berau, Dimana Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berikutnya secara berturut-turut, alokasi polar uang konservasi di Kabupaten Berau terdiri atas Kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan Kawasan lindung geologi.



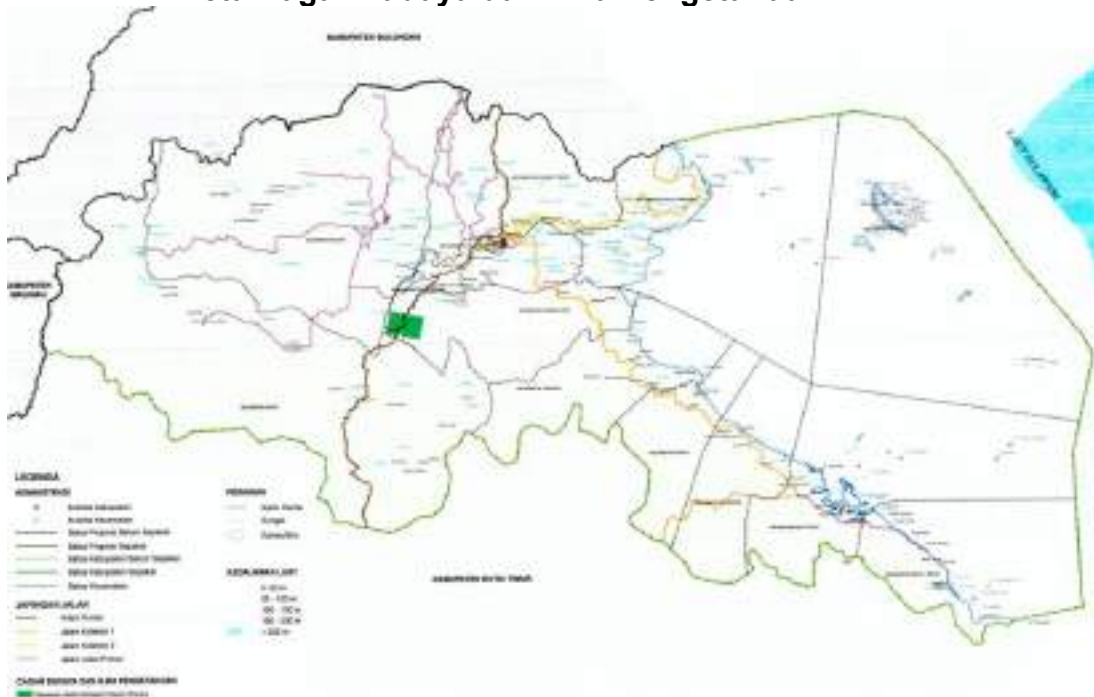
Berikut merupakan peta distribusi kawasan lindung di Kabupaten Berau:

Gambar III.9
Peta Kawasan Hutan



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

Gambar III.10
Peta Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Berau adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi



sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Telaah terhadap alokasi polar uang budidaya adalah untuk memastikan bahwa rancangan visi misi RTRW yang mendorong pada pengembangan sektor agropolitan, minapolitan, Perkebunan, sektor industri dan pariwisata diwadahi secara komprehensif dalam perencanaan tata guna lahan. Berikut adalah Rincian rencana alokasi Pola Ruang Budidaya di Kabupaten Berau:

Tabel III.8

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Berau

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	1.191.477,27
2	Kawasan peruntukan pertanian	497.605,22
3	Kawasan peruntukan perikanan	
4	Kawasan peruntukan pertambangan;	
5	Kawasan peruntukan industri	10.786,43
6	Kawasan peruntukan pariwisata	41.024,6
7	Kawasan peruntukan permukiman	66.307,34
8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	
9	Kawasan peruntukan budidaya lainnya	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

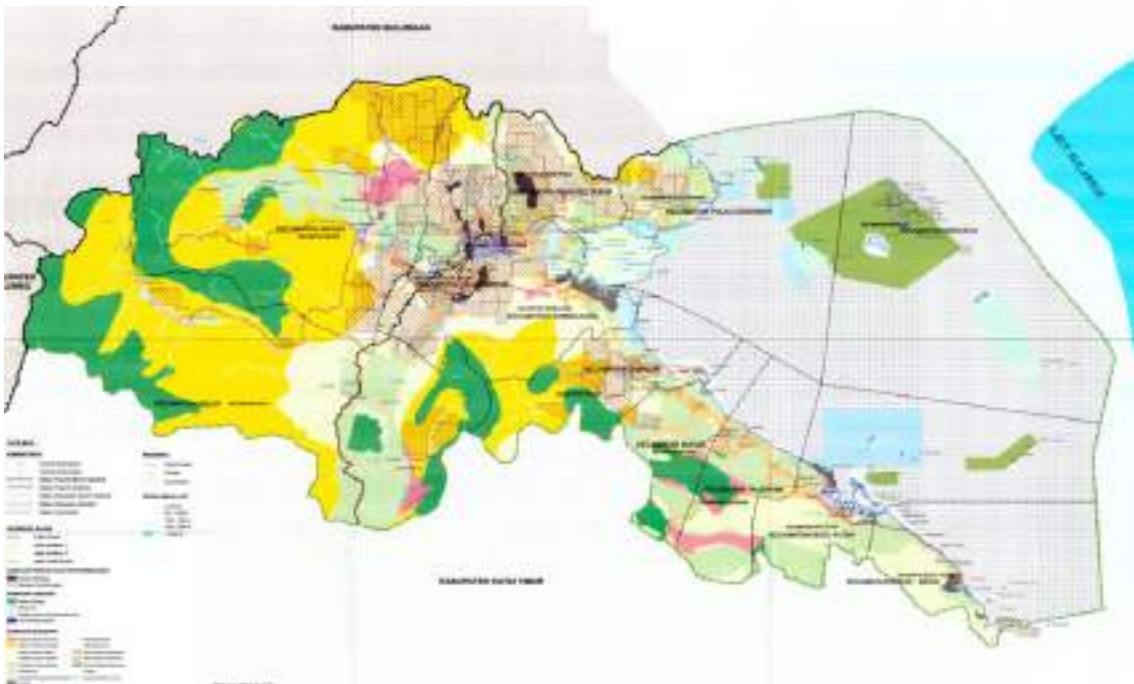
1. Kawasan peruntukan hutan produksi dengan alokasi lahan seluas 1.191.477,27 Ha.
2. Kawasan peruntukan pertanian dengan alokasi lahan seluas 497.605,22 Ha.
3. Kawasan peruntukan permukiman dengan alokasi lahan seluas 66.307,34 Ha.

Peruntukan kawasan pertambangan juga diatur dalam rencana spasial Kabupaten Berau, yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan Batubara, Wilayah Usaha Mineral Logam, dan Wilayah Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kawasan pertambangan sendiri adalah area yang memiliki potensi sumber daya tambang dan tempat di mana sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan dilakukan, baik di daratan maupun perairan, tanpa terpengaruh oleh penggunaan lahan, termasuk kawasan

budidaya dan kawasan lindung. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sektor pertambangan, yang telah diatur secara formal dalam rencana RTRW Kabupaten Berau, dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan mempengaruhi sektor ekonomi di Kabupaten Berau dan terintegrasi dalam rencana Pembangunan a-spasial.

Gambar III.11

Peta Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Berdasarkan analisis di atas dan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Berau, fokus pengembangan wilayah Kabupaten Berau dalam 20 tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Berau 2016-2036, adalah pada pengembangan sektor industri dan pariwisata, dengan penekanan tambahan pada sektor pertanian dan kelautan.

Secara spesifik, sektor unggulan yang tercantum dalam Rincian Kawasan Andalan Darat meliputi sektor Industri, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, dan Perikanan. Pengembangan ini akan didukung oleh alokasi lahan untuk kawasan industri, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta sektor pariwisata.



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas perencanaan pendanaan pembangunan serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Berau dalam rangka merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah disusun. Program-program ini berfokus pada sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat digunakan untuk merancang serta melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja berbagai sektor pemerintahan, aspek utama yang dipertimbangkan mencakup kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan harus selaras dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Berau memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi faktor utama untuk memastikan setiap program dapat direalisasikan secara optimal.

Sistem pendanaan yang tertata dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang menyelaraskan kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, serta pelaksanaannya, Kabupaten Berau diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



**Tabel IV.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2030**

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	75%	80%	449,798,288,815	85%	494,778,117,697	90%	544,255,929,466	95%	598,681,522,413	100%	658,549,674,654	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	APS Anak Usia 5-6 tahun	72.28	73.00	185,146,067,911	73.73	203,660,674,702	74.47	224,026,742,172	75.21	246,429,416,390	75.96	271,072,358,028	Dinas Pendidikan
	APS Anak Usia 7-12 tahun	99.74	99.84	-	99.94	-	99.95	-	99.96	-	99.97	-	Dinas Pendidikan
	APS Anak Usia 13-15 tahun	96.89	96.98	-	97.08	-	97.18	-	97.27	-	97.37	-	Dinas Pendidikan
	APS Anak Usia 7-18 kesetaraan	22.29	22.73	-	23.19	-	23.65	-	24.12	-	24.61	-	Dinas Pendidikan
	APK SD	111.50	111.79	-	114.03	-	116.31	-	118.63	-	121.01	-	Dinas Pendidikan
	APK SMP	97.00	98.50	-	100.00	-	101.50	-	103.00	-	104.50	-	Dinas Pendidikan
	Jumlah Penduduk yang terlayani di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	70%	75%	325,000,000	80%	357,500,000	85%	393,250,000	90%	393,250,000	95%	432,575,000	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	75%	75%	91,510,624	80%	100,661,686	85%	110,727,855	90%	121,800,641	95%	133,980,705	Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru	80	80	10,417,765,816	83	11,459,542,398	85	12,605,496,637	88	13,866,046,301	90.00	15,252,650,931	Dinas Pendidikan
	Indeks Distribusi Tenaga Kependidikan	80	80	-	83	-	85	-	88	-	90.00	-	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase bahasa dan sastra yang dilestarikan	33	33	212,483,432	66	233,731,775	66	257,104,953	100	282,815,448	105.00	311,096,993	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	75%	75%	253,598,798,151	80%	240,918,858,243	85%	243,833,976,428	90%	242,078,371,798	95%	243,918,167,424	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	75%	75%	129,999,317,065	80%	123,499,351,212	85%	124,993,693,362	90%	124,093,738,770	95%	125,036,851,184	Dinas Kesehatan
	Persentase kasus dilakukan deteksi dini dan respon cepat pengendalian penyakit dari seluruh sasaran kasus/masalah kesehatan	75%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	Dinas Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	75%	75%	2,681,153,432	80%	2,547,095,760	85%	2,577,915,619	90%	2,559,354,626	95%	2,578,805,722	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	75%	75%	564,608,110	80%	536,377,705	85%	542,867,875	90%	538,959,226	95%	543,055,317	Dinas Kesehatan
	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan	75%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan/Kampung mencapai STBM	75%	75%	447,425,876	80%	425,054,583	85%	430,197,743	90%	427,100,319	95%	430,346,282	Dinas Kesehatan
	Persentase Kader Posyandu telah mengikuti peningkatan ketrampilan dasar kader dan telah lulus penilaian minimal 4 dari 5 kelompok ketrampilan (pengelolaan posyandu, layanan balita dan layanan ibu /usia sekolah remaja/dewasa dan lansia).	75%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100.00%	100.00%	32,397,380,180	100.00%	30,777,511,171	100.00%	31,149,919,056	100.00%	30,925,639,639	100.00%	31,160,674,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase perlindungan tepi sungai dari abrasi dan banjir rob	25,81%	4839500.00%	249,594,463,500	61,29%	237,114,740,325	74,19%	239,983,828,683	87,10%	238,255,945,116	100.00%	240,066,690,299	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio luas fungsional daerah irigasi kewenangan kabupaten	12.00%	13.00%	-	13,50%	-	14.00%	-	14,50%	-	15.00%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	83,17%	86.00%	160,008,060,000	87.00%	152,007,657,000	88.00%	153,846,949,650	89.00%	152,739,251,612	90.00%	153,900,069,924	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS 3R	25.00%	80.00%	74,144,880,000	85.00%	70,437,636,000	90.00%	71,289,931,396	95.00%	70,776,643,890	95.00%	71,314,546,383	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	91.54%	94.62%	23,436,600,000	95.60%	22,264,770,000	96.30%	22,534,173,717	97.00%	22,371,927,666	100.00%	22,541,954,317	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	12.00%	11.50%	180,904,879,335	16.50%	171,859,635,369	20.00%	173,939,136,956	20.00%	172,686,775,170	20.00%	173,999,194,662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	51.61%	67.74%	171,914,501,463	75.81%	163,318,776,390	83.87%	165,294,933,584	91.94%	164,104,810,063	100.00%	165,352,006,619	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	0.00%	20.00%	10.000.000.000	40.00%	19.246.500.000	60.00%	21.171.150.000	80.00%	23.288.265.000	100.00%	25.617.091.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	37.56%	42.24%	1,103,438,441,832	44.82%	1,048,266,519,741	47.96%	1,060,950,544,630	51.10%	1,053,311,700,708	53.19%	1,061,316,869,634	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi	0.00%	100.00%	1,225,095,000	100.00%	1,163,840,250	100.00%	1,177,922,717	100.00%	1,169,441,673	100.00%	1,178,329,430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penataan Ruang	35.14%	52.86%	2,982,840,000	67.14%	2,833,698,000	71.43%	2,867,985,746	85.71%	2,847,336,248	100.00%	2,868,976,004	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100.00%	100.00%	9,419,653,964	100.00%	8,948,671,266	100.00%	9,056,950,188	100.00%	8,991,740,147	100.00%	9,060,077,372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah; Persentase warga negara yang ditangani akibat korban bencana;	100.00%	100.00%	16,972,359,600	100.00%	16,123,741,620	100.00%	16,318,838,894	100.00%	16,201,343,254	100.00%	16,324,473,462	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	0.00%	17.44%	2,077,335,000	38.37%	1,973,468,250	60.47%	1,997,347,216	100.00%	1,982,966,316	100.00%	1,998,036,860	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.60%	6.42%	18,640,619,400	5.71%	17,708,588,430	5.00%	17,922,862,350	4.29%	17,793,817,741	4.00%	17,929,050,756	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	46.50%	56.50%	35,991,160,500	61.50%	34,191,602,475	66.50%	34,605,320,865	71.50%	34,356,162,555	76.50%	34,617,269,390	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah pengembang perumahan yang bersertifikat dan teregistrasi	15.00%	25.00%	79,897,500	30.00%	75,902,625	35.00%	76,821,047	40.00%	76,267,935	45.00%	76,847,572	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	19,741,370,287	100%	18,754,301,773	100%	18,981,228,824	100%	18,844,563,977	100%	18,987,782,663	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	75%	80%	6,994,161,668	85%	6,644,453,585	90%	6,724,851,473	95%	6,676,432,543	100%	6,727,173,430	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kopetensinya	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	9,433,811,423	100%	8,962,120,852	100%	9,070,562,514	100%	9,005,254,464	100%	9,073,694,398	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana	persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	persentase warga negara yang terlayani di daerah rawan bencana	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	persentase warga negara yang terlayani pasca bencana di daerah rawan bencana	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	9,433,811,423	100%	8,962,120,852	100%	9,070,562,514	100%	9,005,254,464	100%	9,073,694,398	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	15	15	1,677,865,997	15	1,593,972,697	15	1,613,259,767	15	1,601,644,296	15	1,613,816,793	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	9,433,811,423	100%	8,962,120,852	100%	9,070,562,514	100%	9,005,254,464	100%	9,073,694,398	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	85	87	808,078,304	90	767,674,389	92	776,963,249	93	771,369,113	95	777,231,519	Dinas Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Disabilitas terlarut, Anak terlarut, lansia terlarut, dan Gepeng yang dilayani kebutuhan dasarnya diluar panti	85	87	7,652,285,055	90	7,269,670,803	92	7,357,633,819	93	7,304,658,856	95	7,360,174,263	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	85	87	1,117,020,315	90	1,061,169,299	92	1,074,009,448	93	1,066,276,580	95	1,074,380,282	Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik.	85	87	527,276,627	90	500,912,795	92	506,973,840	93	503,323,629	95	507,148,888	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	85	87	1,373,171,700	90	1,304,513,115	92	1,320,297,724	93	1,310,791,580	95	1,320,753,596	Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	85	87	-	90	-	92	-	93	-	95	-	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				-		-		-		-		-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	10,273,307,377	100%	9,759,642,008	100%	9,877,733,677	100%	9,806,613,994	100%	9,881,144,261	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja di daerah	100%	100%	138,382,470	100%	131,463,347	100%	133,054,053	100%	132,096,064	100%	133,099,994	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	70%	2,592,428,856	70%	2,462,807,413	70%	2,492,607,383	70%	2,474,660,610	75%	2,493,468,030	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	100%	100%	1,173,960,600	100%	1,115,262,570	100%	1,128,757,247	100%	1,120,630,195	100%	1,129,146,984	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase pekerja pada perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial	100%	100%	3,007,495,924	100%	2,857,121,128	100%	2,891,692,294	100%	2,870,872,109	100%	2,892,690,737	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				-		-		-		-		-	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan	100%	100%	383,508,000	100%	364,332,600	100%	368,741,024	100%	366,086,089	100%	368,868,343	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	100%	100%	53,265,000	100%	50,601,750	100%	51,214,031	100%	50,845,290	100%	51,231,714	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang di kembangkan	100%	100%	53,265,000	100%	50,601,750	100%	51,214,031	100%	50,845,290	100%	51,231,714	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	10,045,647,643	100%	9,543,365,261	100%	9,658,839,981	100%	9,589,296,333	100%	9,662,174,985	Dinas Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	86%	88%	509,213,400	89%	483,752,730	90%	489,606,138	91%	486,080,974	92%	489,775,189	Dinas Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	85,70%	85,90%	6,085,585,150	86%	5,781,305,893	86,1%	5,851,259,694	86,2%	5,809,130,624	86,3%	5,853,280,017	Dinas Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12,70%	12,65%	1,065,300,000	12,40%	1,012,035,000	12,10%	1,024,280,624	12%	1,016,905,803	12%	1,024,634,287	Dinas Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100%	100%	893,893,166	100%	849,198,508	100%	859,473,810	100%	853,285,598	100%	859,770,569	Dinas Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	0.00%	95.00%	7,914,689,686	96.00%	7,518,955,202	97.00%	7,609,934,560	98.00%	7,555,143,031	99.00%	7,612,562,118	Dinas Pertanahan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	0.00%	40.00%	346,222,500	60.00%	328,911,375	80.00%	332,891,203	100.00%	330,494,386	100.00%	333,006,143	Dinas Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah	0.00%	40.00%	8,096,280,000	60.00%	7,691,466,000	80.00%	7,784,532,739	100.00%	7,728,484,103	100.00%	7,787,220,582	Dinas Pertanahan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Bidang tanah yang diusulkan	1	1	346,222,500	1	328,911,375	1	332,891,203	1	330,494,386	1	333,006,143	Dinas Pertanahan
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	0.00%	40.00%	266,325,000	60.00%	253,008,750	80.00%	256,070,156	100.00%	254,226,451	100.00%	256,158,572	Dinas Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase jumlah RTGL kampung yang sudah sesuai	0.00%	40.00%	1,342,554,978	60.00%	1,275,427,229	80.00%	1,290,859,899	100.00%	1,281,565,707	100.00%	1,291,305,607	Dinas Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	26,833,084,123	100%	25,491,429,916	100%	25,799,876,218	100%	25,614,117,110	100%	25,808,784,400	DLH dan Kebersihan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen	319,590,000	1 dokumen	303,610,500	1 dokumen	307,284,187	1 dokumen	305,071,741	1 dokumen	307,390,286	DLH dan Kebersihan
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status Lingkungan Hidup Daerah	Baik	Baik	2,354,313,000	Baik	2,236,597,350	Baik	2,263,660,178	Baik	2,247,361,825	Baik	2,264,441,775	DLH dan Kebersihan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas RTH	19%	19%	8,234,769,000	19%	7,823,030,550	20%	7,917,689,220	20%	7,860,681,857	20%	7,920,423,039	DLH dan Kebersihan
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase jumlah limbah B3 yang terkelola	100%	100%	335,569,500	100%	318,791,025	100%	322,648,396	100%	320,325,328	100%	322,759,800	DLH dan Kebersihan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase jumlah perusahaan yang taat terhadap persetujuan lingkungan	100%	100%	216,255,900	100%	205,443,105	100%	207,928,967	100%	206,431,878	100%	208,000,760	DLH dan Kebersihan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	250 Orang	250 Orang	475,123,800	300 Orang	451,367,610	350 Orang	456,829,158	400 Orang	453,539,988	400 Orang	456,986,892	DLH dan Kebersihan
Program Penanmngan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah aduan Lingkungan Hidup yang tertangani	85%	80%	219,815,882	85%	208,825,088	90%	211,351,872	92%	209,830,138	95%	211,424,847	DLH dan Kebersihan
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	74,44%	75,59%	19,628,152,500	74,66%	18,646,744,875	74,74%	18,872,370,488	74,81%	18,736,489,420	74,89%	18,878,886,740	DLH dan Kebersihan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	14,675,956,133	100%	13,942,158,327	100%	14,110,858,442	100%	14,009,260,262	100%	14,115,730,640	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	3,54%	10%	6,994,161,668	15%	6,644,453,585	20%	6,724,851,473	25%	6,676,432,543	30%	6,727,173,430	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Prosentase akta kematian yang diterbitkan	75%	80%	215,190,600	85%	204,431,070	90%	206,904,686	95%	205,414,972	100%	206,976,126	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Prosentase akta kelahiran yang diterbitkan	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	75%	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	75%	80%	397,356,900	85%	377,489,055	90%	382,056,673	95%	379,305,865	100%	382,188,589	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	75%	80%	63,918,000	85%	60,722,100	90%	61,456,837	95%	61,014,348	100%	61,478,057	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	8,259,979,207	100%	7,846,980,247	100%	7,941,928,708	100%	7,884,746,821	100%	7,944,670,897	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	10%	15%	268,455,600	30%	255,032,820	50%	258,118,717	75%	256,260,262	100%	258,207,840	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Kampung	6%	10%	213,059,724	10%	202,406,738	10%	204,855,859	10%	203,380,897	10%	204,926,592	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	60%	65%	4,070,807,937	70%	3,867,267,540	75%	3,914,061,477	80%	3,885,880,235	100%	3,915,412,925	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	60%	65%	4,070,807,937	70%	3,867,267,540	75%	3,914,061,477	80%	3,885,880,235	100%	3,915,412,925	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	10,529,159,399	100%	10,002,701,429	100%	10,123,734,116	100%	10,050,843,231	100%	10,127,229,639	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	28%	31,35%	969,423,000	35,10%	920,951,850	39,40%	932,095,367	44%	925,384,281	44,10%	932,417,201	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	75%	80%	485,510,475	85%	461,234,951	90%	466,815,894	95%	463,454,820	100%	466,977,076	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	64,07%	64,07%	506,017,500	64,07%	480,716,625	64,07%	486,533,296	64,07%	483,030,256	64,07%	486,701,286	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	75%	80%	73,718,760	85%	70,032,822	90%	70,880,219	95%	70,369,882	100%	70,904,693	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	58,21%	58,21%	372,855,000	58,21%	354,212,250	58,21%	358,498,218	58,21%	355,917,031	58,21%	358,622,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yg Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	1,347,604,500	100%	1,280,224,275	100%	1,295,714,989	100%	1,286,385,841	100%	1,296,162,373	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-		-		-		-		-	
Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	75%	80%	63,918,000	85%	60,722,100	90%	61,456,837	95%	61,014,348	100%	61,478,057	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

													Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61,8%	61,9%	738,252,900	62%	701,340,255	62,1%	709,826,472	62,2%	704,715,721	62,3%	710,071,561	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	75%	80%	63,918,000	85%	60,722,100	90%	61,456,837	95%	61,014,348	100%	61,478,057	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100.00%	100.00%	21,376,667,106	100.00%	20,307,833,751	100.00%	20,553,558,539	100.00%	20,405,572,917	100.00%	20,560,655,272	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.50%	0.60%	46,242,164,219	0.63%	43,930,056,008	0.65%	44,461,609,685	0.70%	44,141,486,096	0.75%	44,476,961,390	Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang dengan kondisi ideal	13.00%	50.00%		60.00%		70.00%		80.00%		85.00%		Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Laut	60.00%	63.00%	109.313.615.000	65.00%	119.126.684.250	70.00%	119.360.911.129	75.00%	119.156.740.569	80.00%	119.156.740.569	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	60.00%	63.00%	-	65.00%	-	70.00%	-	75.00%	-	80.00%	-	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	11,958,118,458	100%	11,360,212,535	100%	11,497,671,107	100%	11,414,887,875	100%	11,501,641,023	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintergrasi	74.15	77.14	63,531,363,480	77.91	58,996,103,525	78.69	59,389,563,686	79.48	58,707,100,831	80.27	28,057,349,831	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur telematika untuk pelayanan publik	35.56%	53.33%	30,515,688,340	57.78%	28,182,551,763	62.22%	28,293,781,843	66.67%	27,836,050,416	71.11%	28,057,349,831	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-		-		-		-		-	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data statistik sektoral Dalam	2.16	2.59	1,005,100,000	2.85	1,075,000,000	2.99	1,097,755,000	3.14	1,110,956,713	3.3	1,133,175,847	Dinas Komunikasi dan Informatika



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-		-		-		-		-	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan siber	1,15 (level 1)	level 1	770,000,000	level 2	920,000,000	level 2	970,000,000	level 2	970,000,000	level 3	989,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	15,009,274,325	100%	14,258,810,609	100%	14,431,342,217	100%	14,327,436,553	100%	14,436,325,071	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif dan sesuai perundang-undangan	80%	85%	399,487,500	90%	379,513,125	95%	384,105,234	95%	381,339,676	100%	384,237,858	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%	85%	266,325,000	90%	253,008,750	95%	256,070,156	95%	254,226,451	100%	256,158,572	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	80%	85%	607,221,000	90%	576,859,950	95%	583,839,955	95%	579,636,308	100%	584,041,544	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				-		-		-		-		-	
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	80%	85%	106,530,000	90%	101,203,500	95%	102,428,062	95%	101,690,580	100%	102,463,429	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	80%	85%	9,527,299,194	90%	9,050,934,235	95%	9,160,450,539	95%	9,094,495,295	100%	9,163,613,459	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting	80%	85%	692,445,000	90%	657,822,750	95%	665,782,405	95%	660,988,772	100%	666,012,287	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	80%	85%	532,650,000	90%	506,017,500	95%	512,140,312	95%	508,452,902	100%	512,317,144	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan urusan kemetrologian	80%	85%	814,919,345	90%	774,173,378	95%	783,540,876	95%	777,899,381	100%	783,811,417	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha produk dalam negeri yang difasilitasi	80%	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-	100%	-	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-		-		-		-		-	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase dokumen perencanaan dan pembangunan industri	80%	85%	3,649,408,586	90%	3,466,938,157	95%	3,508,888,108	95%	3,483,624,114	100%	3,510,099,657	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi industri nasional	80%	85%	1,965,478,500	90%	1,867,204,575	95%	1,889,797,750	95%	1,876,191,207	100%	1,890,450,260	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	10,293,115,102	100%	9,778,459,347	100%	9,896,778,705	100%	9,825,521,898	100%	9,900,195,865	Dinas Penanaman Modal dan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

													Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	82%	83%	1,118,565,000	84%	1,062,636,750	85%	1,075,494,655	86%	1,067,751,093	87%	1,075,866,001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	90%	92%	4,573,807,047	94%	4,345,116,695	96%	4,397,692,607	98%	4,366,029,220	100%	4,399,211,042	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	95%	96%	607,753,650	97%	577,365,968	98%	584,352,096	99%	580,144,761	100%	584,553,861	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	62%	64%	676,465,500	66%	642,642,225	78%	650,418,196	70%	645,735,185	72%	650,642,772	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	64%	65%	230,342,298	66%	218,825,183	67%	221,472,968	68%	219,878,362	69%	221,549,438	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	11,431,285,426	100%	10,859,721,155	100%	10,991,123,781	100%	10,911,987,690	100%	10,994,918,796	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	100%	100%	1,387,847,273	100%	1,318,454,909	100%	1,334,408,214	100%	1,324,800,474	100%	1,334,868,958	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi (menghitung jumlah atlet yang mendapatkan medali tingkat provinsi dan nasional/total atlet x 100%)	100%	100%	19,937,217,336	100%	18,940,356,469	100%	19,169,534,782	100%	19,031,514,132	100%	19,176,153,639	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase SDM kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	582,719,100	100%	553,583,145	100%	560,281,501	100%	556,247,474	100%	560,474,955	Dinas Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-		-		-		-		-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	19.510.807.528	100%	18.765.169.648	100%	17.926.469.648	100%	18.582.101.056	100%	18.194.869.648	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	50%	55%	4.150.000.000	60%	3.800.000.000	60%	4.000.000.000	65%	4.000.000.000	65%	4.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	50%	55%	188.320.000	60%	250.000.000	60%	300.000.000	65%	350.000.000	70%	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan Budaya yang dilestarikan	98,53%	98,53%	110.000.000	98,53%	150.000.000	98,53%	200.000.000	98,53%	250.000.000	98,53%	250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	1,26%	1,52%	1.270.000.000	1,68%	1.500.000.000	1,84%	1.600.000.000	2,02%	1.700.000.000	2,23%	1.800.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				-		-		-		-		-	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara	557.214 Orang	674.229 Orang	27.427.782.182	741.652 Orang	30.356.399.317	815.817 Orang	30.499.100.171	897.399 Orang	29.425.479.497	987.139 Orang	29.690.685.968	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	25%	30%	8.122.238.094	30%	5.430.000.000	30%	6.122.000.000	30%	6.422.000.000	30%	6.756.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	2,58%	2,58%	800.000.000	7,75%	21.380.000.000	12,91%	1.621.500.000	18,07%	1.747.175.000	24,96%	1.777.175.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi yang berdaya saing	2,37%	6,51%	1.000.000.000	9,55%	2.624.700.000	12,60%	2.764.700.000	15,65%	2.914.700.000	18,69%	3.019.700.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah		100%	11,084,991,233	100%	10,530,741,671	100%	10,658,163,645	100%	10,581,424,867	100%	10,661,843,696	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka	226,609	284,258	3,191,446,300	318,369	4,360,000,000	356,574	5,600,000,000	399,362	6,575,000,000	447,286	7,100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	41.47%	58%	74,667,000	67%	250,000,000	75%	350,000,000	84%	450,000,000	92%	450,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-		-		-		-		-	
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	75.01 %	76%	1,029,245,323	77%	1,445,000,000	78%	1,905,000,000	79%	2,325,000,000	80%	2,725,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip	67%	72%	618,833,392	75%	665,000,000	77%	780,000,000	80%	900,000,000	82%	1,020,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	100%	100%	205,000,000	100%	270,000,000	100%	330,000,000	100%	400,000,000	100%	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				-		-		-		-		-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah		100	14,576,834,173	100	13,746,612,480	100	13,914,052,697	100	14,045,605,072	100	14,152,351,671	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	26,323.93	27,126.71	4,371,750,000	27,553.61	4,856,400,000	27,946.61	5,077,009,000	28,365.81	5,077,009,000	28,791.29	5,115,594,268	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,476.53	2,501.30	2,697,000,000	2,896.48	3,283,200,000	2,940.00	3,260,880,000	2,984.71	3,260,880,000	3,030.67	3,285,662,688	Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pelaku utama perikanan yang mematuhi peraturan perikanan	100%	75%	282,750,000	77%	337,440,000	77%	371,378,000	78%	371,378,000	79%	374,200,473	Dinas Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4,902.32	5,118.00	1,087,500,000	5,297.21	1,409,006,049	5,482.61	1,295,294,000	5,674.50	1,295,294,000	5,873.11	1,305,138,234	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	29,682,956,675	100%	28,307,745,472	100%	28,650,269,192	100%	28,443,987,254	100%	28,660,161,557	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi Sawah	3.40 ton/ha	3.42	11,950,000,000	3.44	14,000,000,000	3.46	14,169,400,000	3.48	14,067,380,320	3.50	14,174,292,410	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produktivitas Jagung	5.55 ton/ha	5.57	-	5.60	-	5.65	-	5.68	-	5.70	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produktivitas Cabai	3.21 ton/ha	3.22	-	3.23	-	3.25	-	3.26	-	3.27	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produksi Daging Sapi	522.751 ton	530	-	545	-	600	-	630	-	650	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produksi Daging Ayam Ras Pedaging	1686.197 ton	1,700	-	1,750	-	1,900	-	2,000	-	2,100	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produksi Telur Ayam Ras Petelur	1636.640 ton	1,650	-	1,700	-	1,800	-	1,900	-	2,000	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	98%	98.18	2,345,000,000	98.67	3,000,000,000	99.17	3,036,300,000	99.66	3,014,438,640	100	3,037,348,374	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	70%	75%	1,566,223,611	80%	2,000,000,000	85%	2,024,200,000	90%	2,009,625,760	95%	2,024,898,916	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Tingkat Penanganan Kasus Penyakit Hewan Infeksius maupun non infeksius	70%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	63%	68.00	6,136,200,000	70.50	1,700,000,000	72.42	1,720,570,000	75.40	1,708,181,896	78.00	1,721,164,078	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100%	100%	210,000,000	100%	350,000,000	100%	354,235,000	100%	351,684,508	100%	354,357,310	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	56%	65.00%	1,223,036,000	73.75%	1,100,000,000	82.50%	1,113,310,000	91.25%	1,105,294,168	100%	1,113,694,404	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	12,773,313,288	100%	12,134,647,624	100%	12,281,476,860	100%	12,193,050,227	100%	12,285,717,409	Dinas Perkebunan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Ton)	2.385.000 ton	2.520.000 ton	3,085,856,767	2.565.000 ton	2,931,563,929	2.610.000 ton	2,967,035,853	2.655.000 ton	2,945,673,194	2.700.000 ton	2,968,060,311	Dinas Perkebunan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas kebun yang dikembangkan	100 Ha	100 Ha	2,141,992,574	100 Ha	2,034,892,945	100 Ha	2,059,515,150	100 Ha	2,044,686,641	100 Ha	2,060,226,259	Dinas Perkebunan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	200 Ha	60%	1,106,288,094	60%	1,050,973,689	60%	1,063,690,471	60%	1,056,031,900	60%	1,064,057,742	Dinas Perkebunan
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang dibina	20 Dokumen	68%	402,453,717	74%	382,331,031	78%	386,957,237	83%	384,171,145	88%	387,090,845	Dinas Perkebunan
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petugas dan Kelembagaan Petani yang dibina dan dilatih	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	1,467,505,038	10 Kelompok Tani	1,394,129,786	10 Kelompok Tani	1,410,998,756	10 Kelompok Tani	1,400,839,565	10 Kelompok Tani	1,411,485,946	Dinas Perkebunan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	88,103,478,639	100%	83,698,304,707	100%	84,711,054,194	100%	84,101,134,604	100%	84,740,303,227	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	100%	47,842,994,904	100%	45,450,845,159	100%	46,000,800,385	100%	45,669,594,622	100%	46,016,683,541	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	6,458,806,191	100%	6,135,865,881	100%	6,210,109,858	100%	6,165,397,067	100%	6,212,254,085	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	61,960,534,308	100%	58,862,507,593	100%	59,574,743,935	100%	59,145,805,779	100%	59,595,313,902	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase ketepatan penetapan perda	100%	100%	27,011,285,821	100%	25,660,721,530	100%	25,971,216,261	100%	25,784,223,504	100%	25,980,183,602	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	14,982,755,476	100%	14,920,550,000	100%	14,920,550,000	100%	14,920,550,000	100%	14,920,550,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD	100%	100%	3,237,888,165	100%	3,240,000,000	100%	3,240,000,000	100%	3,240,000,000	100%	3,665,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Rata-rata tingkat capaian program prioritas daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Rata-rata tingkat capaian program prioritas bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Rata-rata tingkat capaian program prioritas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	3.882.952.200	100%	3.884.000.000	100%	3.884.000.000	100%	3.884.000.000	100%	3.884.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		-		-		-		-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian / kajian yang dimanfaatkan dalam kebijakan	100%	100%	2.338.841.913	100%	970.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	2.100.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan		100%	-	100%	350.000.000	100%	200.000.000	100%	350.000.000	100%	200.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
KEUANGAN				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	18.950.000.000	100%	19.950.000.000	100%	19.950.000.000	100%	19.950.000.000	100%	20.149.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	40%	40%	394.721.000.000	40%	406.266.000.000	40%	412.266.000.000	40%	428.291.000.000	40%	432.573.910.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	30%	30%		30%		30%		30%		30%		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85%	85%		85%		85%		85%		85%		
	Persentase Penurunan SILPA	12%	12%		12%		12%		12%		12%		
	Persentase Laporan keuangan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	18%	18%	4.860.000.000	18%	4.900.000.000	15%	4.900.000.000	15%	4.900.000.000	15%	4.949.000.000	Badan Pengelolaan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

													Keuangan dan Aset Daerah
KEUANGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	17,769,623,393	100%	16,881,142,223	100%	17,085,404,044	100%	16,962,389,135	100%	17,091,303,292	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Target Anggaran Pendapatan	80%	85%	639,180,000	90%	607,221,000	95%	614,568,374	100%	610,143,482	100%	614,780,572	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	30%	32%	6,785,980,265	35%	6,446,681,252	37%	6,524,686,095	40%	6,477,708,355	42%	6,526,938,938	Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	12,313,033,560	100%	11,697,381,882	100%	11,838,920,203	100%	11,753,679,977	100%	11,843,007,945	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%	100%	4,412,621,742	100%	4,191,990,655	100%	4,242,713,742	100%	4,212,166,203	100%	4,244,178,666	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	100%	100%	6,732,696,000	100%	6,396,061,200	100%	6,473,453,541	100%	6,426,844,675	100%	6,475,688,695	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
INSPEKTORAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	23,490,893,998	100%	22,316,349,298	100%	22,586,377,124	100%	22,423,755,209	100%	22,594,175,749	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PKPT	95%	80%	3,104,315,836	80%	2,949,100,044	85%	2,984,784,155	85%	2,963,293,709	95%	2,985,814,741	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	1,698,134,264	Level 3	1,613,227,550	Level 3	1,632,747,604	Level 3	1,620,991,821	Level 3	1,633,311,359	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN													
Kecamatan Tanjung Redeb				-		-		-		-		-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	16,099,549,264	100%	15,294,571,801	100%	15,479,636,120	100%	15,368,182,740	100%	15,484,980,929	Kecamatan Tanjung Redeb
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	74,571,000	100%	70,842,450	100%	71,699,644	100%	71,183,406	100%	71,724,400	Kecamatan Tanjung Redeb
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	490,570,650	100%	466,042,118	100%	471,681,227	100%	468,285,122	100%	471,844,089	Kecamatan Tanjung Redeb
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	106,530,000	100%	101,203,500	100%	102,428,062	100%	101,690,580	100%	102,463,429	Kecamatan Tanjung Redeb
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	50,069,100	100%	47,565,645	100%	48,141,189	100%	47,794,573	100%	48,157,811	Kecamatan Tanjung Redeb
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	26,632,500	100%	25,300,875	100%	25,607,016	100%	25,422,645	100%	25,615,857	Kecamatan Tanjung Redeb
Kecamatan Gunung Tabur													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	8,168,112,295	100%	7,759,706,680	100%	7,853,599,131	100%	7,797,053,217	100%	7,856,310,822	Kecamatan Gunung Tabur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	22,797,420	100%	21,657,549	100%	21,919,605	100%	21,761,784	100%	21,927,174	Kecamatan Gunung Tabur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	830,224,135	100%	788,712,928	100%	798,256,355	100%	792,508,909	100%	798,531,977	Kecamatan Gunung Tabur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	80,110,560	100%	76,105,032	100%	77,025,903	100%	76,471,316	100%	77,052,498	Kecamatan Gunung Tabur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	247,748,299	100%	235,360,884	100%	238,208,750	100%	236,493,647	100%	238,290,999	Kecamatan Gunung Tabur
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	217,587,525	100%	206,708,149	100%	209,209,317	100%	207,703,010	100%	209,281,553	Kecamatan Gunung Tabur
Kecamatan Sambaliung													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	8,812,086,106	100%	8,371,481,801	100%	8,472,776,731	100%	8,411,772,738	100%	8,475,702,211	Kecamatan Sambaliung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	20,240,700	100%	19,228,665	100%	19,461,332	100%	19,321,210	100%	19,468,051	Kecamatan Sambaliung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	262,489,920	100%	249,365,424	100%	252,382,746	100%	250,565,590	100%	252,469,888	Kecamatan Sambaliung
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	53,265,000	100%	50,601,750	100%	51,214,031	100%	50,845,290	100%	51,231,714	Kecamatan Sambaliung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	85,224,000	100%	80,962,800	100%	81,942,450	100%	81,352,464	100%	81,970,743	Kecamatan Sambaliung
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	154,468,500	100%	146,745,075	100%	148,520,690	100%	147,451,341	100%	148,571,972	Kecamatan Sambaliung



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Kecamatan Teluk Bayur				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	9,861,839,080	100%	9,368,747,126	100%	9,482,108,966	100%	9,413,837,782	100%	9,485,382,949	Kecamatan Teluk Bayur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	85,224,000	100%	80,962,800	100%	81,942,450	100%	81,352,464	100%	81,970,743	Kecamatan Teluk Bayur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	527,323,500	100%	500,957,325	100%	507,018,909	100%	503,368,372	100%	507,193,972	Kecamatan Teluk Bayur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	53,265,000	100%	50,601,750	100%	51,214,031	100%	50,845,290	100%	51,231,714	Kecamatan Teluk Bayur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	154,468,500	100%	146,745,075	100%	148,520,690	100%	147,451,341	100%	148,571,972	Kecamatan Teluk Bayur
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	197,080,500	100%	187,226,475	100%	189,491,915	100%	188,127,574	100%	189,557,343	Kecamatan Teluk Bayur
Kecamatan Segah				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	5,051,486,632	100%	4,798,912,300	100%	4,856,979,139	100%	4,822,008,889	100%	4,858,656,157	Kecamatan Segah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	192,659,505	100%	183,026,530	100%	185,241,151	100%	183,907,414	100%	185,305,111	Kecamatan Segah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	495,545,601	100%	470,768,321	100%	476,464,618	100%	473,034,072	100%	476,629,131	Kecamatan Segah
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	47,938,500	100%	45,541,575	100%	46,092,628	100%	45,760,761	100%	46,108,543	Kecamatan Segah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	351,815,325	100%	334,224,559	100%	338,268,676	100%	335,833,141	100%	338,385,473	Kecamatan Segah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	272,162,844	100%	258,554,702	100%	261,683,214	100%	259,799,095	100%	261,773,568	Kecamatan Segah
Kecamatan Kelay				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	4,826,771,444	100%	4,585,432,872	100%	4,640,916,610	100%	4,607,502,010	100%	4,642,519,025	Kecamatan Kelay
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	79,897,500	100%	75,902,625	100%	76,821,047	100%	76,267,935	100%	76,847,572	Kecamatan Kelay
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	675,932,850	100%	642,136,208	100%	649,906,056	100%	645,226,732	100%	650,130,455	Kecamatan Kelay
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	31,959,000	100%	30,361,050	100%	30,728,419	100%	30,507,174	100%	30,739,029	Kecamatan Kelay
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	186,960,150	100%	177,612,143	100%	179,761,249	100%	178,466,968	100%	179,823,317	Kecamatan Kelay
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan	100%	100%	149,142,000	100%	141,684,900	100%	143,399,287	100%	142,366,812	100%	143,448,800	Kecamatan Kelay



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Pengawasan Pemerintahan Desa												
Kecamatan Pulau Derawan				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	5,295,981,449	100%	5,031,182,376	100%	5,092,059,683	100%	5,055,396,853	100%	5,093,817,869	Kecamatan Pulau Derawan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	274,581,075	100%	260,852,021	100%	264,008,331	100%	262,107,471	100%	264,099,488	Kecamatan Pulau Derawan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	186,427,500	100%	177,106,125	100%	179,249,109	100%	177,958,516	100%	179,311,000	Kecamatan Pulau Derawan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	37,285,500	100%	35,421,225	100%	35,849,822	100%	35,591,703	100%	35,862,200	Kecamatan Pulau Derawan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	272,024,355	100%	258,423,137	100%	261,550,057	100%	259,666,897	100%	261,640,365	Kecamatan Pulau Derawan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	196,015,200	100%	186,214,440	100%	188,467,635	100%	187,110,668	100%	188,532,709	Kecamatan Pulau Derawan
Kecamatan Talisayan				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	5,687,181,888	100%	5,402,822,794	100%	5,468,196,950	100%	5,428,825,932	100%	5,470,085,009	Kecamatan Talisayan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	220,517,100	100%	209,491,245	100%	212,026,089	100%	210,499,501	100%	212,099,297	Kecamatan Talisayan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	2,809,728,750	100%	2,669,242,313	100%	2,701,540,144	100%	2,682,089,055	100%	2,702,472,932	Kecamatan Talisayan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	37,285,500	100%	35,421,225	100%	35,849,822	100%	35,591,703	100%	35,862,200	Kecamatan Talisayan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	166,186,800	100%	157,877,460	100%	159,787,777	100%	158,637,305	100%	159,842,949	Kecamatan Talisayan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	284,967,750	100%	270,719,363	100%	273,995,067	100%	272,022,302	100%	274,089,672	Kecamatan Talisayan
Kecamatan Biduk-Biduk				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	6,202,935,680	100%	5,892,788,896	100%	5,964,091,641	100%	5,921,150,181	100%	5,966,150,923	Kecamatan Biduk-Biduk
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	38,883,450	100%	36,939,278	100%	37,386,243	100%	37,117,062	100%	37,399,151	Kecamatan Biduk-Biduk
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	500,691,000	100%	475,656,450	100%	481,411,893	100%	477,945,727	100%	481,578,115	Kecamatan Biduk-Biduk
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	29,295,750	100%	27,830,963	100%	28,167,717	100%	27,964,910	100%	28,177,443	Kecamatan Biduk-Biduk
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	154,468,500	100%	146,745,075	100%	148,520,690	100%	147,451,341	100%	148,571,972	Kecamatan Biduk-Biduk



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	214,551,420	100%	203,823,849	100%	206,290,118	100%	204,804,829	100%	206,361,345	Kecamatan Biduk-Biduk
Kecamatan Maratua				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	6,647,766,153	100%	6,315,377,845	100%	6,391,793,917	100%	6,345,773,001	100%	6,394,000,876	Kecamatan Maratua
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	81,282,390	100%	77,218,271	100%	78,152,612	100%	77,589,913	100%	78,179,596	Kecamatan Maratua
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	531,052,050	100%	504,499,448	100%	510,603,891	100%	506,927,543	100%	510,780,192	Kecamatan Maratua
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	37,615,743	100%	35,734,956	100%	36,167,349	100%	35,906,944	100%	36,179,837	Kecamatan Maratua
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	37,615,743	100%	35,734,956	100%	36,167,349	100%	35,906,944	100%	36,179,837	Kecamatan Maratua
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	113,891,223	100%	108,196,662	100%	109,505,841	100%	108,717,399	100%	109,543,652	Kecamatan Maratua
Kecamatan Tabalar				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	5,229,718,542	100%	4,968,232,615	100%	5,028,348,230	100%	4,992,144,122	100%	5,030,084,418	Kecamatan Tabalar
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	89,485,200	100%	85,010,940	100%	86,039,572	100%	85,420,087	100%	86,069,280	Kecamatan Tabalar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	427,839,394	100%	406,447,424	100%	411,365,438	100%	408,403,607	100%	411,507,475	Kecamatan Tabalar
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	60,498,387	100%	57,473,468	100%	58,168,897	100%	57,750,081	100%	58,188,981	Kecamatan Tabalar
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	186,427,500	100%	177,106,125	100%	179,249,109	100%	177,958,516	100%	179,311,000	Kecamatan Tabalar
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	116,692,962	100%	110,858,314	100%	112,199,699	100%	111,391,862	100%	112,238,440	Kecamatan Tabalar
Kecamatan Batu Putih				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	5,311,874,789	100%	5,046,281,050	100%	5,107,341,050	100%	5,070,568,195	100%	5,109,104,513	Kecamatan Batu Putih
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	31,959,000	100%	30,361,050	100%	30,728,419	100%	30,507,174	100%	30,739,029	Kecamatan Batu Putih
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	237,561,900	100%	225,683,805	100%	228,414,579	100%	226,769,994	100%	228,493,446	Kecamatan Batu Putih
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	15,979,500	100%	15,180,525	100%	15,364,209	100%	15,253,587	100%	15,369,514	Kecamatan Batu Putih
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan	100%	100%	213,060,000	100%	202,407,000	100%	204,856,125	100%	203,381,161	100%	204,926,857	Kecamatan Batu Putih



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum												
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	144,880,800	100%	137,636,760	100%	139,302,165	100%	138,299,189	100%	139,350,263	Kecamatan Batu Putih
Kecamatan Biatan				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	6.350.013.988	100%	5.880.279.155	100%	5.804.141.588	100%	5.441.031.009	100%	4.839.361.425	Kecamatan Biatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Skor SKM	100%	100%	10,653,000	100%	10,120,350	100%	10,242,806	100%	10,169,058	100%	10,246,343	Kecamatan Biatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	458,415,422	100%	435,494,651	100%	440,764,136	100%	437,590,634	100%	440,916,323	Kecamatan Biatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kantibnas	100%	100%	21,306,000	100%	20,240,700	100%	20,485,612	100%	20,338,116	100%	20,492,686	Kecamatan Biatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	101,916,186	100%	96,820,376	100%	97,991,903	100%	97,286,361	100%	98,025,738	Kecamatan Biatan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	107,033,461	100%	101,681,788	100%	102,912,137	100%	102,171,170	100%	102,947,671	Kecamatan Biatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				-		-		-		-		-	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				-		-		-		-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	10,187,394,147	100%	9,678,024,440	100%	9,795,128,536	100%	9,724,603,610	100%	9,798,510,598	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan penguatan ideologi pancasila karakter kebangsaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	70%	75%	2,787,326,008	80%	2,647,959,707	85%	2,680,000,020	90%	2,660,704,020	95%	2,680,925,370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Kader Partai Politik yang mengikuti pendidikan politik dibagi total jumlah kader partai dikali 100%	70%	75%	2,787,326,008	80%	2,647,959,707	85%	2,680,000,020	90%	2,660,704,020	95%	2,680,925,370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	70%	75%	2,787,326,008	80%	2,647,959,707	85%	2,680,000,020	90%	2,660,704,020	95%	2,680,925,370	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdaftar dan Ormas yang Aktif	70%	75%	2,787,326,008	80%	2,647,959,707	85%	2,680,000,020	90%	2,660,704,020	95%	2,680,925,370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang dibina dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agamadan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	70%	75%	2,787,326,008	80%	2,647,959,707	85%	2,680,000,020	90%	2,660,704,020	95%	2,680,925,370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU 2025-2029

	Kerukunan umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah												
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Konflik Sosial	70%	75%	2,787,326,008	80%	2,647,959,707	85%	2,761,760,225	90%	2,741,875,551	95%	2,762,713,805	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL				4,312,615,922,668		4,220,946,038,734		4,336,435,553,434		4,393,463,997,193		4,477,347,448,608	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2030 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Utama Kabupaten Berau periode 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:



**Tabel IV.2.
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Berau Tahun 2025-2030**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,17	77,57	78,19	78,50	78,82	79,13	79,65	
2	Rata-rata lama sekolah (penduduk usia di atas 15 tahun)	Tahun	9,57	9,58	9,59	9,60	9,61	9,62	9,63	
3	Harapan lama sekolah	Tahun	13,37	13,38	13,40	13,41	13,42	13,44	13,45	
4	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,66	73,78	73,90	74,08	74,29	74,53	74,70	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,29	63,53	63,66	63,69	63,81	63,97	64,03	
6	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,421	0,415	0,394	0,374	0,355	0,337	0,328	
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00	
8	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,08	4,88	4,68	4,28	4,01	3,75	3,58	
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,15	4,51	4,78	4,42	4,15	4,08	4,01	
11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	29,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,15	74,35	74,71	75,41	76,21	77,11	78,11	



No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,71	4,03	4,09	4,11	4,15	4,19	4,22	
14	Nilai SAKIP	Nilai	62,74	63,37	64,00	64,64	65,29	65,94	66,6	
15	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,28 (Indeks SPBE)	2,58 (Indeks SPBE)	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	76,46*	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
17	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,84	5,87	5,88	5,89	5,90	5,92	5,93	
18	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	4,22	4,81	5,15	5,50	5,92	6,32	6,42	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	78,97	82,21	82,30	82,40	82,49	82,58	82,75	
20	Persentase Desa Mandiri**	Persen	19	22	22	22	23	23	23	
21	IKLI Pekerjaan Umum	Indeks	3,10	3,49	3,87	4,33	4,75	5,14	5,26	
22	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,63	0,65	0,68	0,70	0,75	0,78	0,80	
23	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	92,42	92,87	93,58	94,29	95,00	95,71	95,71	
24	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	156,00	27,54	44,45	53,02	60,85	59,53	67,52	
25	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	148,64	140,64	133,21	125,22	117,70	110,64	108,64	
26	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,28	7,40	7,66	7,92	8,18	8,44	8,63	



No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	Indeks Gini	Indeks	0,317	0,290	0,316	0,311	0,303	0,299	0,294	
28	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	194,08	248,09	253,00	260,59	267,10	272,45	277,90	
29	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Persen	12,42	12,67	12,92	13,18	13,44	13,71	13,99	
30	Indeks Ketahanan Pangan.	Indeks	81,91	81,95	82,00	82,10	82,20	82,30	82,40	
31	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan akomodasi, makan minum dan jasa lainnya)	Persen	2,02	2,04	2,06	2,08	2,1	2,12	2,14	
32	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Persen	5,98	6,32	6,54	6,75	7,02	7,36	7,72	
33	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	Persen	7,23	7,95	8,75	9,62	9,89	10,01	10,23	
34	Inflasi	Persen	2,69	2,39	2,24	2,11	2,07	1,97	1,83	

Keterangan : * = angka tahun 2023

** = dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025



B. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Kemudian terdapat juga indikator kinerja kunci yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Aspek geografi dan demografi diukur melalui indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik wilayah, potensi pengembangan, kerentanan bencana, serta kondisi dan perubahan penduduk suatu daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial.

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau secara rinci dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut:

**Tabel IV.3.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2030**

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,91	81,95	82,00	82,10	82,20	82,30	82,40	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	12,73	12,70	12,65	12,40	12,10	12,00	12,00	
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	6,66	6,38	6,07	5,75	5,48	5,12	4,89	
4	Konsumsi Listrik perkapita	kWh/Kapita	896,60	915,00	934,00	953,00	973,00	993,00	1.013,00	
5	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	83,17	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
6	Rasio Elektrifikasi	Rasio	81,81	85,00	88,50	91,50	94,00	95,50	96,50	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,97	82,21	82,30	82,40	82,49	82,58	82,75	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	56,59	74,14	74,24	74,34	74,44	74,54	74,64	
9	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,27	82,76	82,86	82,96	83,06	83,16	83,26	
10	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	90,19	93,28	93,35	93,42	93,49	93,56	93,63	
11	Akses Sanitasi Layak	Persen	89,45	90,00	90,50	90,73	90,96	91,09	93,45	
12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,09	2,09	4,12	4,87	5,34	5,91	6,55	
13	Persentase Timbunan Sampah/Tahun	Persen	19,14	19,98	20,81	21,64	22,48	23,31	24,00	
14	Persentase Sampah Terkelola	Persen	74,44%	74,51%	74,59%	74,66%	74,74%	74,81%	74,89%	
15	Persentase Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	156,00	27,54	44,45	53,02	60,85	59,53	67,52	
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	148,64	140,64	133,21	125,22	117,70	110,64	108,64	
17	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,74	0,74	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	83,30	38,00	46,00	51,00	56,00	61,00	64,50	
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,37	1,32	1,28	1,23	1,18	1,15	1,10	
20	Kepadatan penduduk	Orang/KM ²	7,08	7,18	7,27	7,36	7,45	7,53	7,61	
21	Rasio Jenis Kelamin	Rasio	113,77	113,25	112,76	112,27	111,79	111,3	110,82	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,28	7,4	7,66	7,92	8,18	8,44	8,63	
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,08	4,88	4,68	4,28	4,01	3,75	3,58	
3	Garis Kemiskinan	(Rp/Kapita/Bulan)	731.251	759.329	779.987	799.823	812.520	842.875	878.982	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	12,35	11,85	11,35	10,85	10,35	9,85	9,35	
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,41	0,36	0,3	0,29	0,25	0,21	0,19	
6	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,07	0,06	0,05	0,04	0,035	0,03	0,025	
7	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	
8	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	194,08	248,09	253,00	260,59	267,10	272,45	277,90	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,15	4,51	4,78	4,42	4,15	4,08	4,01	
10	Indeks Gini	Indeks	0,317	0,290	0,316	0,311	0,303	0,299	0,294	
11	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,17	77,57	78,19	78,50	78,82	79,13	79,65	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,66	73,78	73,90	74,08	74,29	74,53	74,70	
13	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	N/A	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	100,00	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	23,40	20,12	18,80	17,60	16,45	15,38	14,19	
15	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (<i>Success Rate TB</i>)	Persen	93,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
16	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	96,89	97,26	97,76	98,00	98,25	98,75	99,00	
17	Jumlah Kematian Ibu	Angka	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	
18	Jumlah Kematian Balita	Angka	97,00	90,00	90,00	88,00	86,00	84,00	82,00	
19	Rasio tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	/1000 penduduk	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,57	9,58	9,59	9,60	9,61	9,62	9,63	
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,42	13,48	13,55	13,63	13,72	13,82	
23	Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
24	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas dengan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki : Perguruan Tinggi	Persen	12,21	12,33	12,64	12,95	13,28	13,61	13,98	
25	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja, dengan Pendidikan SMA Ke Atas	Persen	58,36	59,87	61,37	62,88	64,39	65,89	67,40	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Orang	4.498	4.732	4.629	4.513	4.428	4.332	4.285	
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	54,00	57,83	58,27	59,63	62,33	64,21	65,79	
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00	
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	58,80	59,36	59,92	60,48	61,04	61,62	
30	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Milyar Rupiah	592,73	598,66	604,64	610,69	616,8	622,97	629,19	
31	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Persen	5,98	6,32	6,54	6,75	7,02	7,36	7,72	
32	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	63,29	63,53	63,66	63,69	63,81	63,97	64,03	
33	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,421	0,415	0,394	0,374	0,355	0,337	0,328	
34	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,88	89,5	90,24	90,99	91,74	92,50	93,12	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,41	64,91	65,47	65,89	66,36	66,79	67,28	
36	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Angka	27,00	26,30	25,50	24,80	24,10	23,50	22,80	
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,90	61,03	61,39	61,76	62,13	62,5	62,91	
38	Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	604,00	604,00	610,00	650,00	675,00	701,00	701,00	
39	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Rasio	N/A	0,002	0,002	0,002	0,002	0,0019	0,0019	
40	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	29,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	Persentase pencapaian mutu minimal layanan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dasar									
42	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	5,33	5,87	6,45	7,10	7,81	8,59	9,45	
43	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	Persen	2,22	2,22	2,50	2,90	3,25	3,60	4,00	
44	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Indeks	0,00	0,00	0,025	0,028	0,03	0,033	0,035	
45	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Persen	0,55	0,55	1,10	1,60	2,00	2,50	3,00	
46	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	0,00	40,00	40,00	40,00	45,00	50,00	50,00	
47	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	70,51	71,22	71,93	72,65	73,37	74,11	74,85	
48	Nilai Tingkat Gemar	Persen	67,54	69,57	71,65	73,80	76,02	78,30	80,65	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Membaca Masyarakat									
49	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	B (BAIK)	B (BAIK)	BB (SANGAT BAIK)	BB (SANGAT BAIK)	BB (SANGAT BAIK)	BB (SANGAT BAIK)	A (MEMUASKAN)	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Angka Ketergantungan	Persen	41,59	41,54	41,55	41,59	41,69	41,86	42,06	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	4,94	5,10	5,25	5,40	5,55	5,75	6,00	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	1,17	1,20	1,24	1,30	1,37	1,45	1,55	
4	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,7	68,05	68,45	68,90	69,40	69,90	70,40	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama : Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar)	Persen	3,34	4,04	4,15	4,26	4,38	4,49	4,61	
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	46,32	46,47	46,98	47,21	47,55	48,34	49,25	
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,37	34,17	36,59	38,22	40,87	42,37	47,76	
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	21,74	21,89	21,99	22,02	22,39	22,64	22,95	
10	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	59,53	65,61	66,22	66,82	67,43	68,04	68,64	
11	Persentase Desa Mandiri	Persen	19	22	22	22	23	23	23	
12	Rasio Pajak Terhadap PDRB	Rasio	0,18	0,19	0,20	0,22	0,24	0,25	0,25	
13	Tingkat Inflasi	Persen	2,69	2,39	2,24	2,11	2,07	1,97	1,83	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	50,00	70,00	100,00	130,00	150,00	200,00	250,00	
15	Update dan pengumpulan Data UMKM	Usaha	5.400	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	
16	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	52,00	55,00	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00	
17	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
18	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	144,00	155,00	160,00	165,00	170,00	175,00	180,00	
19	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,16	2,16	2,61	2,93	3,15	3,38	3,50	
21	Tingkat Keamanan Informasi (KAMI)	Persen	51,11	61,33	64,40	67,62	71,00	74,55	78,28	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum	Indeks	3,10	3,49	3,87	4,33	4,75	5,14	5,26	
23	Menurunnya waktu tempuh	Skor	59	67	75	84	92	100	100	
24	Skor Infrastruktur Sumber Daya Air	Nilai	14,94	18,91	21,87	27,39	32,46	36,48	40,5	
25	Skor Infrastruktur Cipta Karya	Nilai	7,74	8,95	10,16	11,37	12,58	13,79	15,00	
26	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Indeks	6,00	6,00	6,30	6,50	7,00	7,50	7,50	
27	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,63	0,65	0,68	0,70	0,75	0,78	0,80	
28	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0,77	0,76	0,75	0,73	0,72	0,70	0,68	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	4,34	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,70	
30	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	92,42	92,87	93,58	94,29	95,00	95,71	95,71	
31	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persen	0,00	0,00	17,44	38,37	60,47	100,00	100,00	
32	Persentase lembaga kemasyarakatan kampung, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif dan terdokumentasi	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	
33	Persentase Lembaga Ekonomi Kampung yang aktif	Persen	25,00	27,00	30,00	34,00	38,00	42,00	42,00	
34	Persentase tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Pertumbuhan nilai investasi	Persen	94,00	94,97	95,00	96,03	97,06	98,09	99,12	
36	Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	3.750,00	4.500,00	4.635,00	4.774,05	4.917,27	5.064,79	5.216,73	
37	Persentase Penduduk Usia 15+ yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	61,96	62,32	62,78	63,05	63,69	64,21	64,76	
38	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	1,48	1,75	8,00	10,00	11,00	13,00	15,00	
39	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	96,21	97,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
40	Persentase eks kawasan transmigrasi yang minimal berstatus desa maju	Persen	24,13	24,98	25,21	25,65	29,90	30,60	35,00	
41	Jumlah Produksi Padi Sawah	Ton	8.772	8.816	8.860	8.904	8.993	9.038	9.129	
42	Konsumsi daging sapi	Kg	386.273	390.136	394.037	397.977	401.957	405.977	410.037	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43	Jumlah Produksi Jagung	Ton	9.801	9.850	9.899	9.949	10.048	10.098	10.199	
44	Konsumsi daging ayam ras	Kg	1.686.198	1.694.629	1.703.102	1.711.618	1.720.176	1.728.777	1.737.420	
45	Konsumsi telur ayam ras	Kg	1.636.198	1.644.379	1.652.601	1.660.864	1.669.168	1.677.514	1.685.902	
46	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	593,60	596,00	599,00	602,00	608,00	611,00	617,00	
47	Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Ton	2.964.603	2.994.249	3.023.895	3.053.541	3.084.077	3.114.917	3.142.467	
48	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan	Persen	6,15	6,20	6,25	6,30	6,35	6,40	6,45	
49	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Persen	1,09	1,12	1,16	1,19	1,23	1,26	1,30	
50	Persentase laju pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Persen	5,54	5,67	5,80	5,93	6,07	6,21	6,35	
51	Persentase laju pertumbuhan	Persen	6,38	6,44	6,51	6,57	6,67	6,77	6,87	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	produksi perikanan budidaya									
52	Ketepatan Penyampaian LKPD ke BPK-RI	Ketepatan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
53	Penetapan APBD	Ketepatan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,15	74,35	74,71	75,41	76,21	77,11	78,11	
2	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2.28 (Indeks SPBE)	2.58 (Indeks SPBE)	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,71	4,03	4,09	4,11	4,15	4,19	4,22	
4	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Persen	90,63	91,34	92,78	93,48	94,61	95,17	96,82	
5	Indeks Pelaksanaan Reforma Agraria	Indeks	N/A	25.12	43.22	61.32	79.42	97.52	97.62	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Indeks redistribusi tanah	Indeks	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
7	Indeks ketersediaan tanah	Indeks	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
8	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,52	73,70	74,89	76,03	77,17	78,25	79,47	
9	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Nilai SAKIP	Nilai	62,74	63,37	64,00	64,64	65,29	65,94	66,60	
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,47	3,58	3,71	3,85	3,92	4,01	4,19	
12	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan SekrEtariat DPRD	Indeks	195,00	62,00	65,00	68,00	70,00	75,00	80,00	
13	Persentase Fasilitas Pembentukan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Produk Hukum Daerah									
14	Indeks pelayanan dan kepuasan masyarakat	Indeks	86,23	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
15	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00	
18	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)	Indeks	N/A	50,00	65,00	80,00	85,00	90,00	90,00	
19	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	N/A	81,00	82,00	83,00	85,00	90,00	91,00	
20	Persentase Capaian SPM Kebencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response</i>)	Menit	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)									
22	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	N/A	71,00-80,99 (Cukup Baik)	71,00-80,99 (Cukup Baik)	71,00-80,99 (Cukup Baik)	81,00-90,99 (Baik)	81,00-90,99 (Baik)	81,00-90,99 (Baik)	
23	Rerata capaian indikator sasaran daerah	Angka	96,1	96,29	96,48	96,68	96,87	97,06	97,26	
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,37	32,43	32,49	32,56	32,62	32,69	32,76	
25	Maturitas	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
26	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparaturngawasan	Persen	95,00	95,00	80,00	80,00	85,00	85,00	95,00	
27	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	74,75	75,26	76,03	76,89	77,62	78,38	79,41	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	96,46	96,71	96,97	97,33	97,89	98,24	98,82	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	94,14	94,65	95,15	95,66	96,13	96,71	98,09	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	26,01	27,13	28,29	29,32	30,49	31,58	32,64	
B	KESEHATAN									
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	N/A	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	
14	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	N/A	68,40	76,00	80,00	80,00	85,00	90,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Angka kejadian Malaria	Persen	N/A	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
17	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Sesuai Standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Presentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Persentase SDM yang mendapatkan peningkatan mutu dan kompetensi tersertifikasi bidang kesehatan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persen	N/A	1,60	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase perlidungan tepi sungai dari abrasi dan banjir rob	Persen	25,81	35,48	48,39	61,29	74,19	87,10	100,00	
2	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	N/A	15,00	11,50	16,50	20,00	20,00	20,00	
3	Persentase luas fungsional daerah irigasi kewenangan kabupaten	Persen	N/A	12,55	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	Persen	83,17	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA,/TPST/TPS 3R	Persen	25,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	
6	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	Persen	91,54	92,09	94,62	95,60	96,30	97,00	100,00	
a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	89,45	90,00	90,50	90,73	90,96	91,09	93,45	
b	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,09	2,09	4,12	4,87	5,34	5,91	6,55	
7	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persen	51,61	59,68	67,74	75,80	83,87	91,94	100,00	
8	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	N/A	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	37,56	39,66	42,24	44,82	47,96	51,10	53,19	
10	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Skor Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	35,14	38,57	52,86	67,14	71,43	85,71	100,00	
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN									
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah; Persentase warga negara yang ditangani akibat korban bencana;	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase jumlah pengembang perumahan yang bersertifikat dan teregistrasi	Persen	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	
5	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	Persen	0,00	0,00	17,44	38,37	60,47	100,00	100,00	
6	Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,60	7,10	6,42	5,71	5,00	4,29	3,89	
7	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi	Persen	46,50	51,50	56,50	61,50	66,50	71,50	75,50	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PSU									
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Anggota Linmas Yang Mengikuti Pembinaan Potensi Masyarakat	Persen	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kopetensinya	Persen	N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
F	SOSIAL									
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan	Persen	N/A	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NAPZA									
3	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	N/A	60,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	
4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	70,00	75,00	75,00	
5	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	N/A	60,00	70,00	70,00	75,00	77,00	80,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	44,00	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00	64,00	
7	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	348,00	50,00	53,00	55,00	57,00	60,00	63,00	
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	28,00	32,00	
9	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	8,00	20,00	25,00	30,00	30,00	34,00	40,00	
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	N/A	30,00	32,00	34,00	37,00	40,00	0,45	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	5,33	5,87	6,45	7,10	7,81	8,59	9,45	
12	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	N/A	65,00	67,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
13	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Persen	N/A	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	
14	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	N/A	20,00	25,00	35,00	40,00	50,00	65,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik.	Persen	N/A	70,00	75,00	78,00	78,00	80,00	80,00	
7	TENAGA KERJA									
1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	9,71	9,93	10,12	15,00	17,25	17,98	18,00	
2	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
3	Persentase tenaga kerja lokal yang terlindungi	Persen	96,21	97,00	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks	86,20	86,4	86,50	86,70	86,90	87,10	87,30	
2	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	47,50	40,45	40,95	41,45	41,96	42,48	43,00	
4	TPAK Perempuan	Persen	46,32	47,45	49,29	51,20	53,19	55,25	57,98	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Lembaga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,21	58,21	58,21	58,21	58,21	58,21	58,21	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)	Indeks	N/A	N/A	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	
9	PANGAN									
1	Indeks Keterjangkauan Pangan	Indeks	77,86	78,50	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	
2	Indeks Ketersediaan Pangan	Indeks	85,65	85,70	85,75	85,80	85,85	85,90	86,00	
3	Indeks Pemanfaatan	Indeks	81,16	82,00	82,80	83,60	84,40	85,20	86,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pangan									
10	PERTANAHAN									
1	Persentase jumlah RTGL kampung yang sudah sesuai	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
2	Jumlah Bidang tanah yang diusulkan	Angka	1	1	1	1	1	1	1	
3	persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
4	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
5	Persentasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
11	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	74,44%	74,51%	74,59%	74,66%	74,74%	74,81%	74,89%	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	43,75%	70%	70%	70%	75%	75%	80%	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	3,54	6,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	70,17	75,00	82,00	87,00	92,00	97,60	99,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase akta kematian yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,66	99,70	99,80	99,85	99,90	99,95	99,95	
5	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase akta perceraian yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase data yang terkelola untuk Profil Kependudukan	Persen	56,00	58,00	60,00	62,00	65,00	65,00	70,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	10,00	15,00	30,00	50,00	70,00	100,00	100,00	
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Kampung	Persen	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
3	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	100,00	100,00	
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	N/A	10,00	12,00	15,00	18,00	21,00	21,00	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	72,97	61,80	61,90	62,00	62,10	62,20	62,30	
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	Persen	72,70	73,20	73,80	74,30	74,90	75,40	76,00	
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,80	59,3	59,8	60,3	60,80	61,30	61,80	
15	PERHUBUNGAN									
1	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0,60	0,60	0,63	0,65	0,70	0,75	0,80	
2	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio	0,60	0,60	0,63	0,65	0,70	0,75	0,80	
3	Konektivitas Darat	Rasio	0,50	0,58	0,60	0,63	0,65	0,70	0,75	
4	Persentase Kelengkapan jalan	Persen	15	25	50	60	70	80	85	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	yang telah terpasang dengan kondisi ideal									
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
18	PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	Persen	89,00	89,40	90,30	91,20	92,20	93,20	94,20	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	3,88	3,88	3,90	4,20	4,50	4,70	5,00	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,55	0,55	1,10	1,60	2,00	2,50	3,00	
3	Persentase Atlit Berprestasi (menghitung jumlah atlit yang mendapatkan medali tingkat provinsi dan nasional/total atlet x 100%)	Persen	12,40	13,00	20,00	15,70	17,50	18,10	22,50	
4	Persentase SDM kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persen	N/A	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perangkat Daerah									
20	STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60,31	60,91	61,52	62,14	62,76	63,39	64,02	
22	KEBUDAYAAN									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	98,59	
23	PERPUSTAKAAN									
24	KEARSIPAN									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75,00	75,75	76,51	77,27	78,05	78,83	79,61	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	48,78	49,27	49,76	50,26	50,76	51,27	51,78	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	29.817,71	28.813,14	30.115,23	30.679,99	31.132,21	31.574,10	32.001,85	
26	PARIWISATA									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	157,74	122,09	4,05	5,19	6,17	6,98	7,61	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	31,35	32,92	34,56	36,29	38,11	40,01	42,01	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	21,75	21,77	21,79	21,82	21,84	21,86	21,88	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,02	2,04	2,06	2,08	2,10	2,12	2,14	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	11,67	11,90	12,14	12,38	12,63	12,88	13,14	
27	PERTANIAN									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	-4,50	-5,00	
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,03	3,05	3,07	3,10	3,12	3,15	3,17	
28	KEHUTANAN									
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
30	PERDAGANGAN									
31	PERINDUSTRIAN									
32	TRANSMIGRASI									
1	Persentase perencanaan pertanahan kawasan transmigrasi yang terealisasi menjadi kegiatan teknis	Persen	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	Persen	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	
3	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	
33	SEKRETARIAT DAERAH									
1	Indeks Kelembagaan	Indeks	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	88,00	
34	SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase penetapan Rancangan Perda	Persen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	PERENCANAAN									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	KEUANGAN									
37	KEPEGAWAIAN									



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
40	PENGAWASAN									
1	Persentase Pelaksanaan	Persen	95,00	95,00	80,00	80,00	85,00	85,00	95,00	

No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengawasan Terhadap PKPT									
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	94,00	94,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	
3	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
1	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam penguatan ideologi pancasila karakter kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Ormas yang terdaftar dan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ormas yang Aktif									
4	Persentase masyarakat yang dibina dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agamadan Fasilitas pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Pencegahan Konflik Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase penanganan konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase jumlah konflik sosial yang dicegah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase jumlah konflik sosial yang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	terselesaikan									
	KELAY									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
	TALISAYAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,95	88,96	88,97	88,98	88,99	89,00	89,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	TABALAR									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daeeah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	BIDUK-BIDUK									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PULAU DERAHAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,17	85,2	85,4	85,5	85,6	85,7	85,8	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	MARATUA									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	88,50	88,89	89,00	89,50	89.89	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
	SAMBALIUNG									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,25	84,3	84,50	84, 55	84,58	85	85,06	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,20	75,30	75,35	75,38	75,40	75,42	75,45	
	TANJUNG REDEB									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	GUNUNG TABUR									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	TELUK BAYUR									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
2	Nilai SAKIP	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perangkat Daerah									
	SEGAH									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	BATU PUTIH									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
	BIATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Berau serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bapelitbang.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi



demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Berau maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Berau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan



efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Berau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, Bapelitbang Kabupaten Berau berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapelitbang Kabupaten Berau dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bapelitbang Kabupaten Berau melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bapelitbang Kabupaten Berau serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.



Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**